



Komitmen Untuk Berkualitas

Laporan Tahunan
2018





Kesinambungan Tema

Kesinambungan tema Laporan Tahunan menjadi penting untuk menunjukkan konsistensi Laporan Tahunan. Berikut ini kami sajikan kesinambungan tema selama 3 (tiga) tahun terakhir :

2018

Komitmen untuk Berkualitas

Menjadi Bank Syariah Terdepan dan Terpercaya

Melanjutkan tema sebelumnya, tema tahun ini merupakan komitmen setiap insan Bank Victoria Syariah untuk memberikan kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

Komitmen untuk berkualitas diterapkan di setiap aspek bisnis, operasional, sumber daya insani maupun tata kelola perusahaan yang baik, sehingga harapan untuk mencapai pertumbuhan usaha yang berkualitas dan berkelanjutan dalam rangka menjadikan Bank Victoria Syariah terdepan dan terpercaya dapat terlaksana.



2017 Ayo Sinergi

Menuju Bank yang sehat, kuat, dan *profitable*

Sinergi adalah membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan kinerja yang berkualitas. Dalam Sinergi diharapkan para pemangku kepentingan saling mengisi dan melengkapi perbedaan untuk pencapaian hasil yang lebih baik ke depan. Ayo Sinergi diambil sebagai tema *annual report* mengandung makna sebagai berikut :

- Tahun sinergi untuk mencapai kinerja dan hasil yang positif.
- Tahun sinergi untuk saling bekerjasama untuk maju dan tumbuh berkembang.
- Tahun sinergi untuk meningkatkan keefektifan organisasi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kepercayaan (*trust*) pada seluruh *Stakeholders*

Dengan Tema “AYO SINERGI” maka semua *stakeholder* dirangkul untuk sama-sama membangun *trust* untuk mewujudkan cita-cita menjadi Bank Victoria Syariah yang sehat, tumbuh berkembang dan *profitable*.



2016 Transformasi


Transformasi Menuju Bank yang sehat kuat dan *profitable*

Manajemen pada tahun 2016 berkomitmen menjadikan tahun perubahan dalam berbagai aspek untuk menumbuhkan bisnis secara berkualitas dan sustain. Tema ini kelanjutan dari tema tahun 2015 yang telah berkomitmen untuk memperkokoh pondasi untuk lepas landas. Bank telah memperkuat pondasi untuk lepas landas.

Bank Victoria Syariah meletakkan dasar dasar transformasi perusahaan berkaitan dengan implementasi *corporate plan* 2016 – 2019. Transformasi Bank Victoria Syariah dilakukan pada segala aspek bisnis, operasional, SDI maupun tata kelola perusahaan yang baik dan profesional.

Semangat ditahun 2016 adalah semangat perubahan untuk menang secara bersungguh sungguh dalam menghadapi segala tantangan yang ada. Dengan transformasi untuk menang tersebut maka perusahaan semakin baik dan sehat sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan di mata para *stakeholders*.





Insani berkualitas menjunjung kinerja yang berkualitas

Memasuki tahun ke-8 Bank Victoria Syariah terus menunjukkan komitmen dan kerja kerasnya dalam mengembangkan bisnis syariah di Indonesia dan perjalanan Tahun 2018 diwarnai dengan beberapa prestasi atau penerimaan penghargaan, yang merupakan buah dari dedikasi dan loyalitas insani Bank Victoria Syariah untuk selalu berusaha menyediakan pelayanan terbaik bagi setiap nasabahnya.

Pemahaman dan penerapan prinsip syariah menjadi fondasi yang kuat untuk menopang langkah dalam menggapai visi menjadi bank syariah terdepan dan terpercaya.

Oleh karena itu, setiap insani Bank Victoria Syariah harus memahami bahwa tanah dan kekayaan adalah milik Tuhan Yang Maha Kuasa, dan sebagai umat manusia bertanggung jawab untuk mengelolanya sesuai dengan yang ditasbihkannya, yang mana kita harus menerapkan prinsip syariah yang kuat dalam usaha untuk tumbuh yang berkualitas agar mampu diperhitungkan dalam perkembangan di industri keuangan syariah.

Daftar Isi

1 BAB 1		2 BAB 2	
Sejarah Singkat Perusahaan	10	Tinjauan Industri	34
Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan	11	Tinjauan Bisnis	36
Jejak Langkah	12	Tresuri	42
Jaringan Kantor	14	Sumber Daya Insani	44
Ikhtisar Keuangan	15	Teknologi Informasi	48
Peristiwa Penting	16	Operasional	52
Kinerja Utama	18	Tinjauan Keuangan	54
Struktur Grup Perusahaan	19	Analisis Kinerja	58
Struktur Organisasi	20		
Laporan Dewan Komisaris	22		
Laporan Direksi	26		
Laporan Dewan Pengawas Syariah	30		

3 BAB 3

Tata Kelola Perusahaan	64
1. Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan	65
2. Komitmen Bank Victoria Syariah dalam Tata Kelola Perusahaan	65
3. Kerangka Kerja Bank Victoria Syariah dalam Tata Kelola Perusahaan	65
4. Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme atau Prinsip Mengenal Nasabah	66
5. Rapat Umum Pemegang Saham	66
6. Dewan Komisaris	67
7. Komite-Komite Dibawah Dewan Komisaris	69
8. Direksi	71
9. Komite Eksekutif Direksi	74
10. Dewan Pengawas Syariah	76
11. Penerapan Fungsi Kepatuhan	78
12. Fungsi Audit Internal atau Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)	80
13. Penyimpangan Internal	82
14. Audit Eksternal	82
15. Penerapan Manajemen Risiko	82
16. Pengendalian Internal	83
17. Permasalahan Hukum	84
18. Nilai-Nilai Budaya Perusahaan	84
19. Transaksi dengan Benturan Kepentingan	85
20. Kode Etik	85
21. Perlindungan Nasabah	85
22. Keterbukaan Informasi	85
23. Sekretaris Perusahaan	86
24. Penilaian GCG Secara <i>Self Assessment</i>	87
25. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Manajemen Risiko Tahun 2018	89

4 BAB 4

Profil Dewan Komisaris	96
Profil Direksi	100
Profil Dewan Pengawas Syariah	104
Profil Pejabat Eksekutif	106
Profil Pimpinan Cabang	112
Profil Komite	116
Produk dan Layanan	118





Sejarah Singkat Perusahaan

Visi, Misi dan Budaya Perusahaan

Jejak Langkah

Jaringan Kantor

Ikhtisar Keuangan

Peristiwa Penting

Kinerja Utama

Struktur Grup Perusahaan

Struktur Organisasi

Laporan Dewan Komisaris

Laporan Direksi

Laporan Dewan Pengawas Syariah

Sejarah Singkat Perusahaan

PT Bank Victoria Syariah didirikan untuk pertama kalinya dengan nama PT Bank Swaguna berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 15 April 1966. Akta tersebut kemudian diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 4 tanggal 5 September 1967 yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (d/h Menteri Kehakiman) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: JA.5/79/5 tanggal 7 November 1967 dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri I di Cirebon masing-masing di bawah Nomor 1/1968 dan Nomor 2/1968 pada tanggal 10 Januari 1968, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 tanggal 24 Mei 1968, Tambahan Nomor 62.

Seiring dengan proses menjadi bank umum syariah, PT Bank Swaguna berubah namanya menjadi PT Bank Victoria Syariah sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 5 tanggal 6 Agustus 2009 yang dibuat dihadapan Erni Rohaini SH, MBA, Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-02731.AH.01.02 tahun 2010 tanggal 19 Januari 2010, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 83 tanggal 15 Oktober 2010, Tambahan Nomor 31425.

Terakhir, Anggaran Dasar PT Bank Victoria Syariah diubah dengan Akta Nomor 45 tanggal 30 Maret 2010 yang dibuat dihadapan Sugih Haryati, SH, MKn sebagai pengganti dari Notaris Erni Rohaini, SH, MBA, Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Perubahan Anggaran Dasar tersebut pada pasal 10 ayat 3 dan telah diterima serta dicatat dalam *database* Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.10-16130 tanggal 29 Juni 2010.

Perubahan kegiatan usaha Bank Victoria Syariah dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah telah mendapatkan izin dari oleh Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 12/8/KEP.GBI/DpG/2010 tertanggal 10 Februari 2010. Bank Victoria Syariah mulai beroperasi dengan prinsip syariah sejak tanggal 1 April 2010. Adapun kepemilikan saham PT Bank Victoria International Tbk pada Bank Victoria Syariah adalah sebesar 99,99%.

Bank Victoria Syariah mencanangkan untuk menjadi pelopor dalam industri perbankan syariah Indonesia sebagai bank syariah yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran, penghimpunan dana masyarakat dan pembiayaan bagi nasabah perusahaan maupun nasabah perorangan. Masyarakat yang menginginkan produk dan jasa perbankan syariah yang berkualitas serta ditunjang oleh layanan yang prima (*excellent*) merupakan target dari Bank Victoria Syariah.

Dukungan penuh dari perusahaan induk PT Bank Victoria International, Tbk telah membantu tumbuh kembang Bank Victoria Syariah. Bank Victoria Syariah terus berkomitmen untuk membangun kepercayaan nasabah dan masyarakat melalui pelayanan dan penawaran produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta memenuhi kebutuhan nasabah.

Pada akhir tahun 2018, Bank Victoria Syariah mengelola aset sebesar Rp. 2,12 Triliun dengan mengoperasikan 8 (delapan) kantor Cabang dan 4 (empat) kantor cabang pembantu yang berada di Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Serang, Bandung, Cirebon, Tegal, Solo dan Denpasar.

Selama 2018 Bank Victoria Syariah memperoleh beberapa penghargaan yaitu:

- *The Most Efficient Bank* kategori Bank Syariah dari Bisnis Indonesia
- *Indonesia Best Banking Award* dari Warta Ekonomi
- *Top 50 Bank Ranks 2018* dari Bisnis Indonesia

Pencapaian tersebut diatas adalah bukti kualitas dan kinerja yang baik dari Sumber Daya Insani Bank Victoria Syariah yang berkomitmen untuk mewujudkan bank syariah yang sehat dan akan terus berupaya mengembangkan diri untuk lebih baik lagi.

Dalam memberikan pelayanan keuangan Bank Victoria Syariah telah menetapkan visi dan misi sebagai bentuk jaminan konsistensinya agar menjadi lembaga keuangan yang terpercaya dan dipilih untuk memberikan solusi keuangan di masyarakat.

Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan

Visi dan Misi Bank Victoria Syariah telah ditetapkan sebagai landasan bagi seluruh *stakeholders* untuk mencapai tujuan bersama. Visi menjadi pegangan bagi seluruh *stakeholders* untuk mentransformasikan diri menjadi salah satu bank syariah terkemuka di Indonesia.

VISI Bank Victoria Syariah adalah :

“Menjadi Bank Syariah Terdepan dan Terpercaya”

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka Misi Bank Victoria Syariah dijabarkan sebagai berikut :

Customer

Memenuhi kebutuhan dan layanan terbaik kepada nasabah dan menjadi *partner* bisnis yang memberikan solusi yang bernilai tambah.

People

Mengembangkan Sumber Daya Insani yang profesional dan memiliki nilai-nilai akhlak yang baik untuk memberikan layanan yang terbaik.

Pemegang Saham

Menjalankan operasional perbankan syariah yang efisien, aman dan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian, sehingga menghasilkan nilai tambah.

Komunitas

Peduli dan berkontribusi kepada masyarakat dan lingkungan.

Regulator

Mengelola risiko dan keuangan secara *prudent* dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dan efektif.

Untuk lebih mendukung pencapaian Visi dan penerapan Misi dalam aktivitas operasional Perusahaan, maka Bank Victoria Syariah telah menetapkan Nilai-Nilai Budaya Perusahaan (*Core Values*) sebagai dasar budaya Perusahaan yang diharapkan dapat menjadi acuan utama bagi seluruh Sumber Daya Insani Bank Victoria Syariah tanpa terkecuali.

Adapun Nilai-nilai Budaya Perusahaan yang disepakati dan dianut oleh seluruh Karyawan Bank Victoria Syariah dapat disingkat H-E-B-A-T. Penjabaran dari HEBAT tersebut adalah sebagai berikut :

Honest

Kejujuran menjadi landasan budaya kerja yang sangat penting bagi setiap perusahaan, terlebih perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan seperti Bank Victoria Syariah. Seluruh Sumber Daya Insani (SDI) Bank Victoria Syariah tanpa terkecuali harus memiliki sikap kejujuran yang tinggi sehingga dapat dipercaya dalam mengemban amanah yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya.

Energic

Seiring dengan era globalisasi dan perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat dinamis saat ini, semangat dan jiwa muda dalam setiap kepribadian karyawan Bank Victoria Syariah menjadi keharusan agar bank dapat terus berkembang dalam menjalankan aktivitas operasional-nya.

Brilliant

Dalam mengembangkan bisnis secara berkesinambungan, setiap individu maupun tim harus memiliki kemampuan yang *brilliant* untuk melihat setiap peluang maupun tantangan yang ada sehingga dapat menjaga pertumbuhan bisnis Bank Victoria Syariah secara berkesinambungan (*sustainable growth*).

Accurate

Sebagai lembaga keuangan dan lembaga kepercayaan masyarakat, data yang akurat terkait dengan penyebaran informasi baik formal maupun informal sudah menjadi suatu kewajiban dari bank untuk dipenuhi.

Trust

Bank merupakan lembaga kepercayaan bagi para nasabah untuk menyimpan dana, untuk itu unsur *trust* (kepercayaan) wajib menjadi nilai budaya yang harus melekat pada seluruh Sumber Daya Insani Bank Victoria Syariah.



Jejak Langkah



1966 - 1997

PT. Bank Swaguna didirikan di Cirebon pada tahun 1966, Bank ini memulai kegiatan operasionalnya pada tanggal 7 Januari 1967



2014

Penambahan setoran modal Rp 50 Milyar sehingga modal menjadi Rp 160 Milyar



2007

PT Bank Victoria mengakuisisi 99.99% saham Bank Swaguna dan mendapat persetujuan BI tanggal 3 Agustus 2007, Modal disetor Bank menjadi Rp 90 Milyar pada bulan September 2007



2015

Penataan strategi dan penguatan GCG



2008

Pada bulan Maret 2008, Pemegang Saham PT Bank Victoria International Tbk kembali memperkuat modal Rp 110 Milyar



2016

Tahun transformasi

Penambahan setoran modal Rp 50 Milyar sehingga modal menjadi Rp 210 Milyar



2010

Bank Swaguna dikonversi menjadi PT Bank Victoria Syariah dan Mendapatkan izin operasional sebagai Bank Syariah berdasarkan SK Gubernur Bank Indonesia No.12/8/KEP-GBI/DpG/2010, Bank beroperasi penuh dengan sistem syariah pada tanggal 1 April 2010



2017

Penambahan setoran modal Rp 100 Milyar sehingga Modal menjadi Rp 310 Milyar



2011-2012

Entry Point to be Sharia Retail Bank.
Menambah jumlah jaringan kantor dan memperluas pangsa pasar



2018

Perbaikan Kualitas Aset Produktif dan Profitabilitas



2013

Memperkokoh fondasi melalui pengembangan produk dan segmen bisnis baru

Jaringan Kantor



KANTOR PUSAT & CABANG UTAMA GEDUNG THE VICTORIA

Jalan Tomang Raya Kav. 35-37 Lantai 1-3,
Jakarta Barat
Phone : (021) 5600467 (hunting)
Fax : (021) 5664247
Website : www.bankvictoriasyariah.co.id

Kantor Cabang

Cabang	Alamat	Telp	Fax
Bekasi	Ruko Bekasi Square No.63 Jl. Jend. Ahmad Yani , Pekayon Bekasi	021-82434874-75	021-82434876
Serang	Jl. Jend Ahmad Yani No. 152 A Serang – Banten	0254-227621	0254-227622
Bandung	Jl. Gatot Subroto No. 3 Bandung – Jawa Barat	022-87340303	022-87340311
Cirebon	Cirebon Super Block, Blok GS/5. Jl Dr Cipto Mangunkusumo No. 26 Cirebon, Jawa Barat	0231-8291051-52	0231-8291053
Tegal	Ruko Nirwarna Square Blok A/12B Tegal – Jawa Tengah	0283-351024	0283-351027
Denpasar	Ruko Tuban Plaza No. 44-45 Jl By Pass I Gusti Ngurah Rai, Tuban. Kuta – Badung- Bali	0361-753531-32	0361-768081
Solo	Ruko Honggowongso Square Blok A/7 Solo – Jawa Tengah	0271-660832	0271-660932

Kantor Cabang Pembantu

Kantor Cabang	Alamat	Telp	Fax
Tebet	Grand Soepomo Jl, Prof Dr. Soepomo SH Blok A lt. 2 No.73 Tebet – Jakarta Selatan	021-83785567	021-83785569
Pasar Induk Kramat Jati	Ruko Pasar Induk Kramat Jati Blok D2/33 Jl. Raya bogor Km. 17 Kramat Jati – Jakarta Timur	021-87797573	021-87797574
Depok	Jl. Kemakmuran Raya No. 25A Kelurahan Mekarjaya Kec. Sukmajaya, Depok Tengah II - Depok	021- 7702882	021- 7703340
Tangerang	Ruko Modern Land Blok AR/23 Jl. Jendral Sudirman Cikokol Tangerang – Banten	021-55747698	021-55747699

Ikhtisar Keuangan

(Dalam jutaan rupiah)	2018	2017	2016	2015	2014	Mutasi 2018-2017	Mutasi 2017-2016	Mutasi 2016-2015
NERACA								
Total Aset	2,126,019	2,003,114	1,625,183	1,379,266	1,439,632	6.14%	23.25%	17.83%
Total Pembiayaan yang Diberikan	1,234,571	1,262,926	1,212,690	1,075,681	1,076,761	-2.25%	4.14%	12.74%
Penempatan Surat Berharga	408,379	320,282	237,032	230,449	188,452	27.52%	35.12%	2.86%
Dana Pihak Ketiga	1,491,441	1,512,008	1,204,681	1,128,908	1,132,086	-1.36%	25.51%	6.71%
Giro	46,288	37,471	37,251	53,760	19,756	23.53%	0.59%	-30.71%
Tabungan	54,066	43,766	40,157	50,319	65,225	23.53%	8.99%	-20.19%
Deposito	1,391,088	1,430,772	1,127,273	1,024,828	1,047,105	-2.77%	26.92%	10.00%
Total Ekuitas	291,249	299,393	194,330	162,652	186,368	-2.72%	54.06%	19.48%
LABA/RUGI								
Pendapatan Pengelolaan Dana	169,987	153,695	122,263	144,366	145,071	10.60%	25.71%	-15.31%
Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer	(109,262)	(101,060)	(84,096)	(104,381)	(103,933)	8.12%	20.17%	-19.43%
Net Pengelolaan Dana	60,724	52,635	38,167	39,985	41,138	15.37%	37.91%	-4.55%
Pendapatan Operasional Lainnya	1,688	3,332	969	1,231	6,856	-49.33%	243.88%	-21.28%
Beban Operasional	(56,195)	(49,712)	(77,754)	(73,740)	(73,269)	13.04%	-36.06%	5.44%
Laba Operasional	6,218	6,255	(38,618)	(32,524)	(25,275)	-0.60%	-116.20%	18.74%
Beban Non Operasional Bersih	118	(156)	10,735	539	226	-175.49%	-101.46%	1891.65%
Laba Sebelum Pajak	6,336	6,099	(27,883)	(31,985)	(25,049)	3.88%	-121.87%	-12.82%
Penghasilan (Beban) Pajak	(1,362)	(1,505)	9,410	7,984	5,663	-9.55%	-116.00%	17.86%
Laba Bersih Setelah Pajak	4,974	4,593	(18,473)	(24,001)	(19,386)	8.29%	-124.87%	-23.03%
RASIO KEUANGAN (%)								
Rasio Biaya terhadap Pendapatan (BOPO)	96.38%	96.02%	131.34%	119.19%	143.31%	-0.36%	35.32%	-12.15%
Rasio Kecukupan Modal (CAR)	22.07%	19.29%	15.98%	16.14%	15.27%	-2.78%	-3.31%	0.16%
Rasio Pembiayaan Bermasalah Kotor (NPF Gross)	4.00%	4.59%	7.21%	9.80%	7.10%	0.59%	2.62%	2.59%
Rasio Pembiayaan Bermasalah Bersih (NPF Netto)	3.46%	4.08%	4.35%	4.82%	4.75%	0.62%	0.27%	0.47%
Rasio Tingkat Pengembalian Aset (ROA)	0.32%	0.36%	-2.19%	-2.36%	-1.87%	0.04%	-2.55%	-0.17%
Rasio Tingkat Pengembalian Ekuitas (ROE)	2.02%	2.01%	-17.45%	-15.06%	-17.61%	-0.01%	-19.46%	2.39%
Rasio Pembiayaan terhadap Dana Pihak Ketiga (FDR)	82.78%	83.57%	100.67%	95.29%	95.19%	0.81%	17.08%	-5.38%
GWM (Giro Wajib Minimum)	5.11%	6,30%	5.03%	5.03%	5.01%	1.38%	-1.46%	0.00%

Peristiwa Penting



Rapat Kerja Tahun 2018
26 Januari 2018

Bank Victoria Syariah mengadakan Rapat Kerja Tahunan di Graha BIP Jakarta yang dihadiri oleh seluruh jajaran Direksi, Komisaris, Kepala Divisi, Kepala Bagian serta Pimpinan Cabang untuk membahas dan mendiskusikan rencana, strategi dan target untuk tahun 2018.



Bantuan Dana Pembangunan Masjid Cigamea
28 Februari 2018

Dalam rangka menjalankan misi Bank Victoria Syariah untuk kepedulian dan kontribusi kepada masyarakat dan lingkungan, Bank Victoria Syariah memberikan santunan kepada Masjid di daerah Cigamea, Jawa Barat.



Milad Bank Victoria Syariah ke-8
2 April 2018

Bank Victoria Syariah mengadakan syukuran dalam rangka Milad ke-8 yang dihadiri oleh seluruh Direksi, Komisaris, Pejabat Eksekutif, karyawan dan undangan lainnya.



iB Vaganza Bandung
20 – 22 April 2018

Bank Victoria Syariah mengikuti *event* rutin yang diadakan oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu iB Vaganza yang diadakan di BEC Bandung dan dihadiri kurang lebih 22 Perbankan Syariah.



RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 dan RUPS Luar Biasa
18 Mei 2018

Bank Victoria mengadakan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 dan RUPS Luar Biasa di Kantor Pusat PT. Bank Victoria Syariah yang dihadiri oleh Dewan Komisaris, Direksi, Pemegang Saham dan Pemegang Saham Pengendali Bank Victoria Syariah, Kepala Divisi, Komite Audit dan Pemantau Risiko, serta KAP Mirawati Sensi Idris.



Buka Puasa Bersama
28 Mei 2018

Bank Victoria Syariah menyelenggarakan Buka Bersama dan Santunan Anak Yatim Piatu dengan tema “Melangkah Bersama Meraih Kemenangan di Bulan Ramadhan yang Suci” di Kantor Pusat Bank Victoria Syariah.



Corporate Social Responsibility (CSR) 7 Juni 2018

Sebagai bagian dari kepedulian sosial untuk berbagi dengan lingkungan sekitar, Bank Victoria Syariah memberikan santunan kepada Sekolah Saja (Sekolah Anak Jalanan) di Jakarta.



Penyerahan Hewan Qurban di Masjid Al-Jihad, Jakarta 22 Agustus 2018

Penyerahan Hewan Qurban dari Keluarga Besar PT. Bank Victoria Syariah (diwakili oleh Bapak Deddy Effendi Ridwan selaku Direktur) kepada Pengurus Masjid Al-Jihad untuk disalurkan kepada Dhuafa di lingkungan sekitarnya.



Penyerahan Hewan Qurban MNC Peduli 23 Agustus 2018

Penyerahan Hewan Qurban dari PT. Bank Victoria Syariah (diwakili oleh Bapak Deddy Effendi Ridwan selaku Direktur) kepada MNC Group (Bapak Hary Tanoesoedibjo selaku CEO MNC Group) untuk disalurkan kepada Dhuafa di daerah pelosok Indonesia.



iB Vaganza Jakarta 5 – 7 Oktober 2018

Bank Victoria Syariah mengikuti event rutin yang diadakan oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu iB Vaganza bertempat di Blok M Square Jakarta yang dihadiri kurang lebih 22 Perbankan Syariah.



Pembukaan Layanan Syariah Bank 22 Oktober 2018

Bank Victoria Syariah resmi membuka Layanan Syariah Bank di Kantor Bank Victoria International Cabang Fatmawati.

Penghargaan Tahun 2018



Bisnis Indonesia Financial Award 2018
The Most Efficient Bank
Kategori Bank Syariah



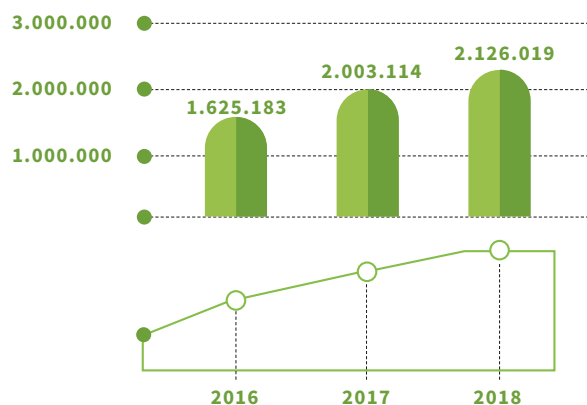
Warta Ekonomi Award 2018
Bank berpredikat "Sehat"
Kategori Syariah Buku I



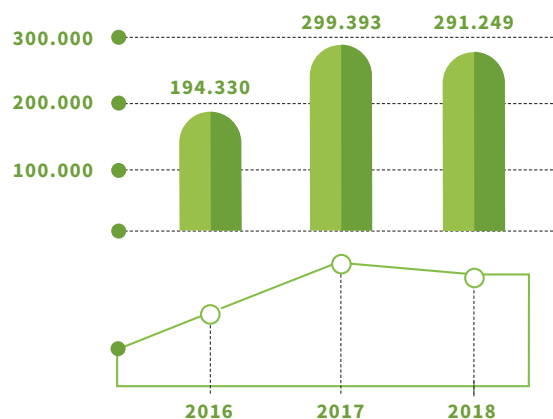
Bisnis Indonesia - Top 50 Bank Ranks 2018
"Posisi 49"

Kinerja Utama

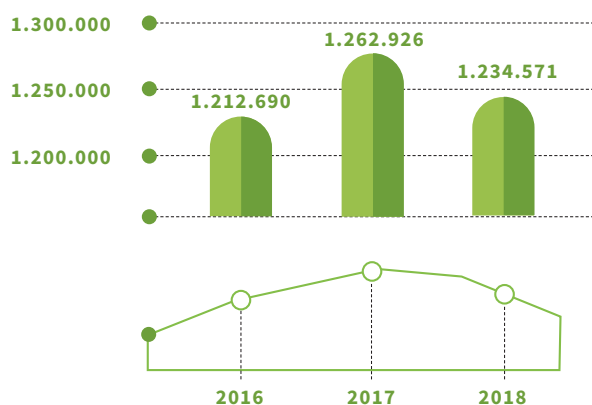
Total Aset



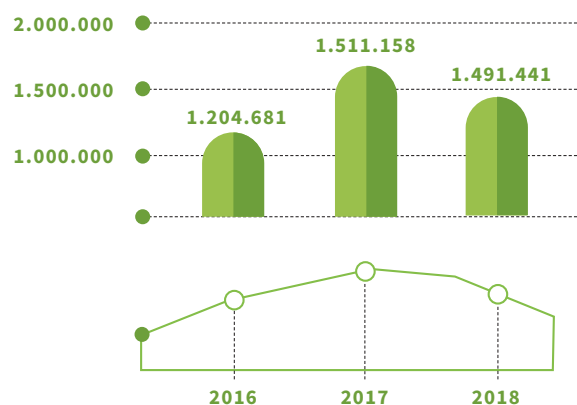
Total Ekuitas



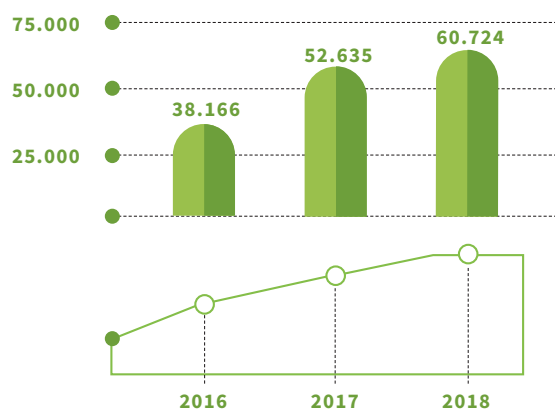
Total Pembiayaan



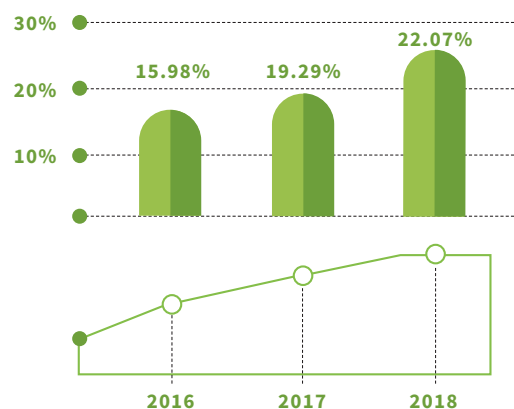
Total DPK



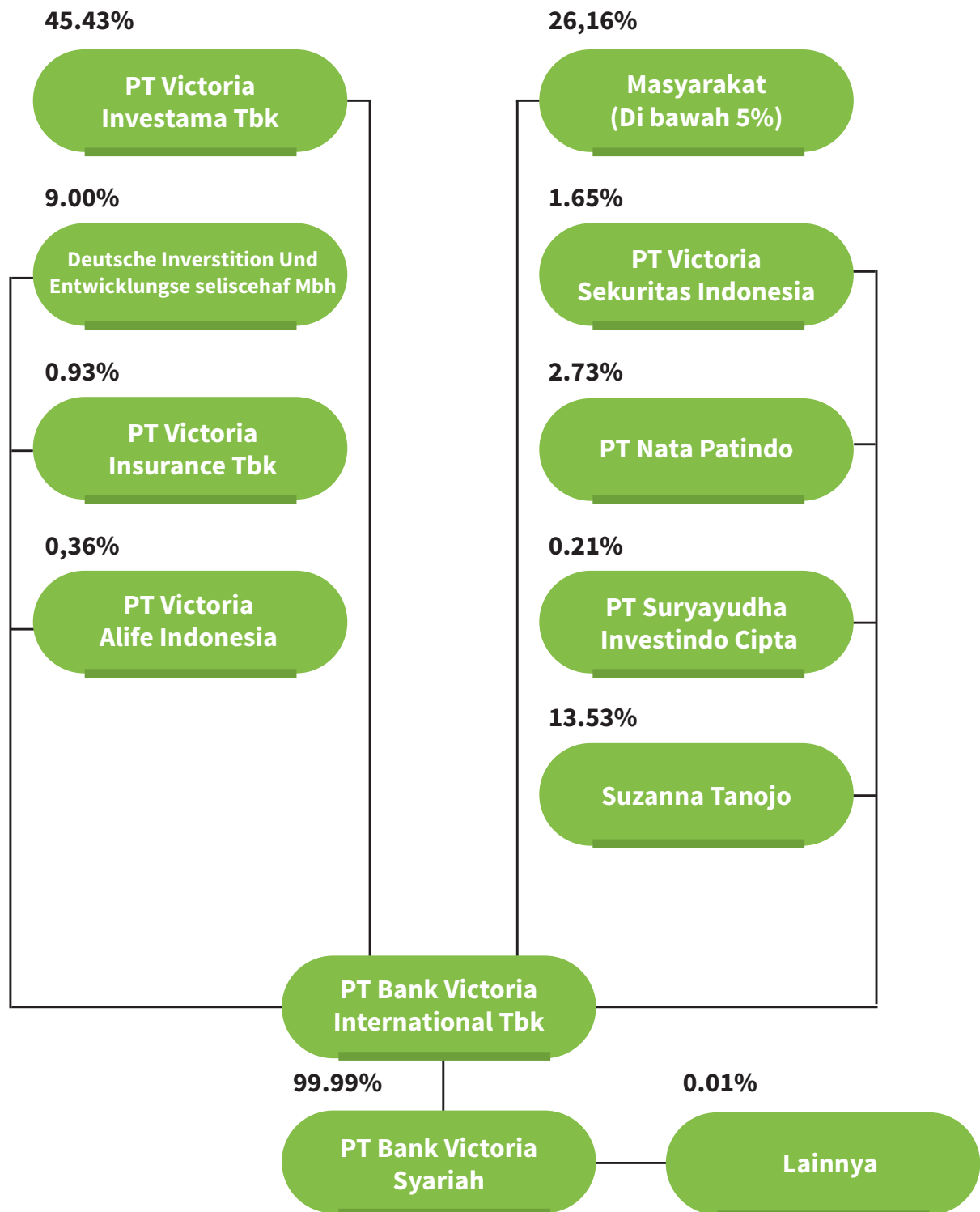
Net Margin



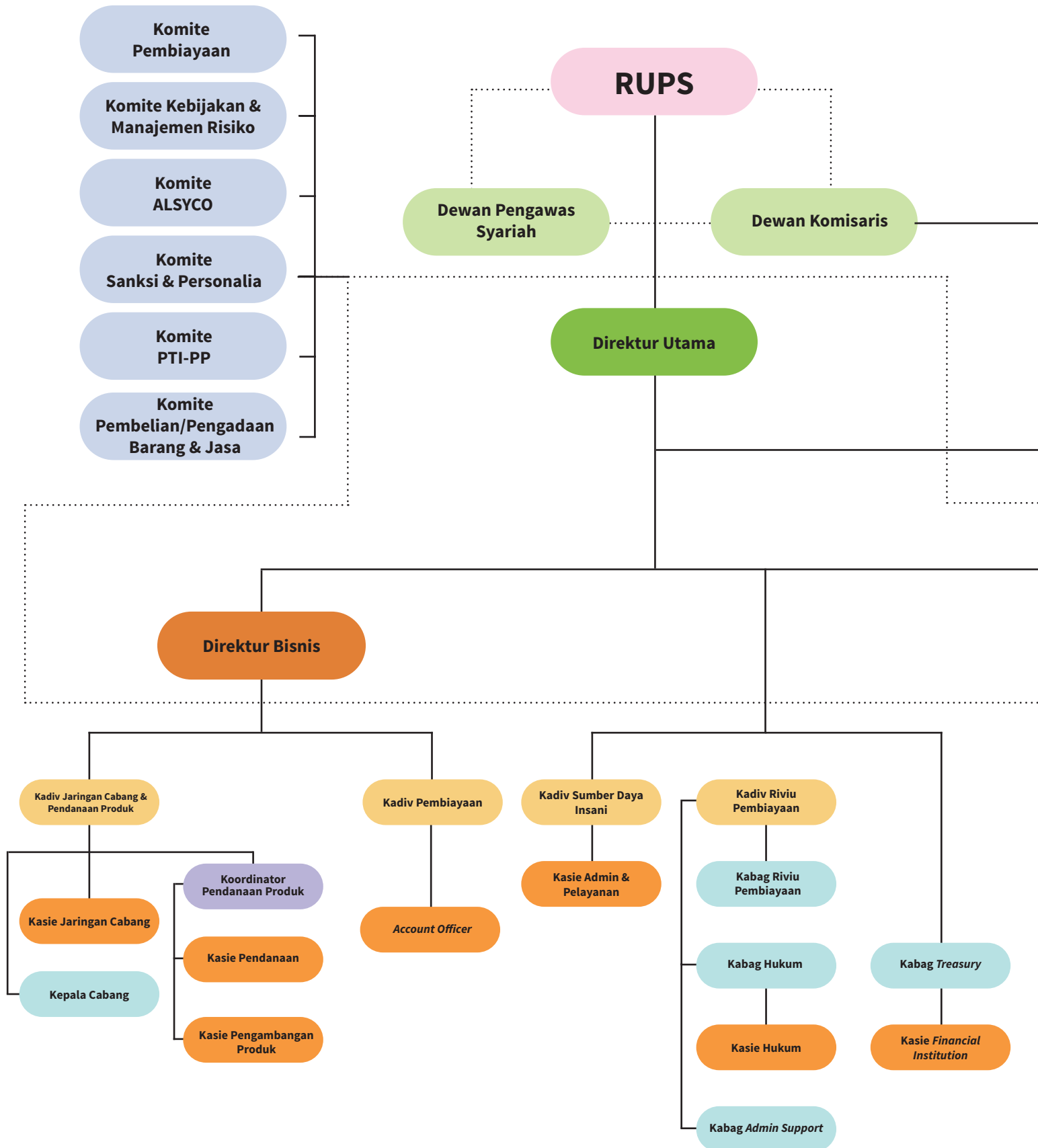
Rasio Kecukupan Modal

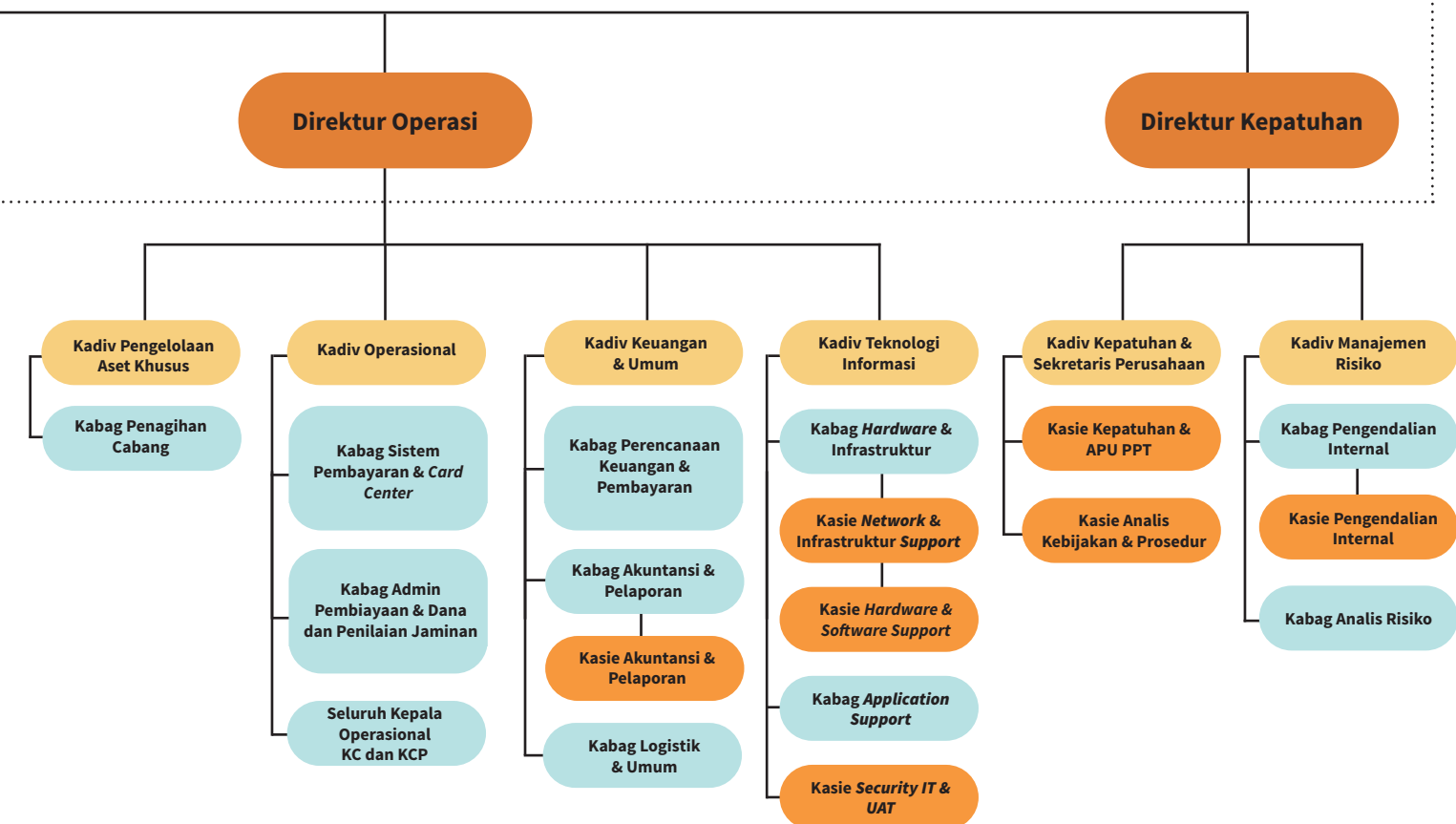
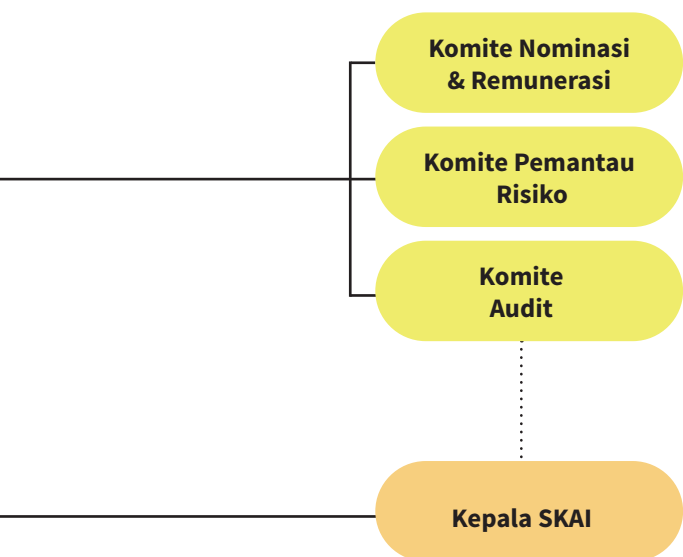


Struktur Grup Perusahaan



Struktur Organisasi





Laporan Dewan Komisaris



Sugiharto
Komisi Utama

Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah – Nya, sehingga dapat menjalankan segala aktivitas dalam rangka mencari ridha-Nya.

Para Pemangku Kepentingan yang terhormat, Sepanjang tahun 2018, Dewan Komisaris secara aktif telah menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Bank dan dapat kami sampaikan bahwa Bank Victoria Syariah pada tahun 2018, Alhamdulillah telah membukukan hasil yang positif. Ditengah kondisi ekonomi yang belum stabil Bank Victoria Syariah mengutamakan pertumbuhan yang berkualitas dan menjaga posisi likuiditas dan permodalan yang memadai.

Dewan Komisaris menghargai dan percaya bahwa dengan kerjasama dari segenap Sumber Daya Insani (SDI) serta izin dari Allah SWT, Bank Victoria Syariah dapat menghadapi kesulitan yang ada dengan menghasilkan kinerja keuangan yang baik.

Dalam menjalankan strategi bisnis, Bank Victoria Syariah telah mematuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan, kepatuhan, pengelolaan risiko yang terukur (*Good Corporate Governance, Compliance* dan *Risk Management*).

Pengawasan Komisaris

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan, Dewan Komisaris berpendapat bahwa Direksi telah menjalankan fungsinya dengan baik, dan kami menilai bahwa langkah-langkah yang dilakukan Direksi selaras dengan pandangan Dewan Komisaris.

Landasan dasar pengawasan yang digunakan Dewan Komisaris adalah Rencana Bisnis Bank (RBB) yang disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengawasan Dewan Komisaris fokus pada tanggung jawab Direksi dalam menjalankan operasional perusahaan dan menurut hemat kami Direksi telah menerapkan beberapa inisiatif yang tepat untuk menjaga keseimbangan antara profitabilitas, likuiditas dan kualitas aset.

Perkembangan Usaha dan Kinerja Keuangan

Secara umum kinerja Bank Victoria Syariah selama tahun 2018 menunjukkan perkembangan yang baik dibandingkan dengan tahun 2017, dengan pencapaian sebagai berikut :

1. Total aset sebesar Rp. 2.126 Milyar, meningkat 6.14% .
2. Dana Pihak Ketiga tercatat sebesar Rp. 1.599 Milyar, meningkat 4,3%
3. Perolehan Laba tahun berjalan sebelum pajak tercatat sebesar Rp. 6,3 Milyar, meningkat 3.88%.
4. Realisasi pembiayaan sebesar Rp.1.234 Milyar.

Good Corporate Governance dan Risk Management

Dewan Komisaris senantiasa memantau terselenggaranya prinsip dan praktik tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada seluruh jenjang organisasi dengan mengevaluasi hasil *self assessment* GCG dan mendorong penyempurnaan pelaksanaan GCG yang mengacu pada peraturan yang berlaku. Prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, independensi dan kewajaran menjadi pedoman utama dalam pengelolaan bisnis bank.

Bank Victoria Syariah percaya bahwa penerapan praktek-praktek GCG merupakan aset penting dalam menciptakan budaya organisasi yang kokoh dan unggul guna meraih pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan serta mampu memberikan nilai tambah bagi nasabah.

Untuk mendukung pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh jajaran perusahaan terus berupaya membangun dan menyempurnakan berbagai kebijakan, sistem dan perangkat yang ada. Secara berkala Bank Victoria Syariah melakukan *self assessment* secara komprehensif terhadap pelaksanaan GCG yang menyangkut 11 aspek penilaian yang mengacu pada ketentuan yang berlaku tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi perbankan syariah. dan sesuai dengan hasil *self assessment* Bank Victoria Syariah terhadap pelaksanaan GCG sepanjang tahun 2018 tercatat berpredikat “Baik”.

Dewan Komisaris juga menilai bahwa *Risk Management* telah dikelola dan dikendalikan dengan baik sesuai *risk appetite*, dimana selama tahun 2018 tidak ditemukan adanya pelanggaran dan potensi risiko yang dapat membahayakan kelangsungan usaha perusahaan. Profile Risiko Bank per Desember 2018 ada pada peringkat 2 – *Low to Moderate*.

Komitmen Dewan Komisaris

Kami melihat bahwa tantangan yang dihadapi perekonomian Indonesia masih akan berlanjut ditahun 2019 dengan masih belum adanya tanda-tanda pemulihan perekonomian global. Tahun 2019 merupakan tahun politik yang akan berpengaruh kepada sektor riil dalam melakukan setiap rencana bisnis mereka kedepan. Namun demikian kami tetap optimis dalam menghadapi setiap tantangan yang ada.

Dalam usaha menyelaraskan perkembangan tersebut, Dewan Komisaris akan terus menjaga dan berusaha untuk meningkatkan aktivitasnya sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya sebagai berikut :

1. Konsisten dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
2. Konsisten untuk tetap menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengelola manajemen risiko sesuai *risk appetite*, serta pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank Victoria Syariah pada setiap tingkatan dan jenjang organisasi.
3. Meningkatkan peran dalam rangka mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank Victoria Syariah dan memastikan bahwa perseroan telah menjalankan prinsip-prinsip perbankan syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memastikan bahwa telah dilakukan tindak lanjut atas hasil temuan dan rekomendasi audit internal, audit eksternal, regulator regulator lainnya.

Akhir kata, marilah kita tingkatkan kerja sama dan sinergi yang telah terjalin baik selama ini. Semoga

Allah SWT selalu memberikan bimbingan kepada kita
semua agar Bank
Victoria Syariah semakin maju dan berkembang
ditahun mendatang.

Aamin Yaa Robbal Alamiin.

Wabillahi Taufik Walhidayah
Wassalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sugiharto', written in a cursive style.

Sugiharto
Komisaris Utama

Halaman ini sengaja dikosongkan

Laporan Direksi



Firman Ananda Moeis
Direktur Utama

Tiada kata yang pantas untuk diucapkan selain kata Alhamdulillah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah SWT yang senantiasa mencurahkan rahmat-Nya, sehingga kita dapat melalui tahun 2018 dengan hasil yang cukup baik. Berkat kerja keras yang dilandasi keikhlasan dalam mewujudkan harapan bersama, Alhamdulillah, di tengah kondisi perekonomian Indonesia maupun kondisi perekonomian dunia yang belum kunjung membaik, namun Bank Victoria Syariah dapat mencapai sebagian target bisnisnya. Hal ini merupakan bagian dari kelanjutan transformasi untuk menciptakan kinerja yang lebih baik di masa mendatang sehingga mencapai visi dan misi perusahaan.

Pencapaian positif ini merupakan hasil kerjasama Sumber Daya Insani yang sejalan dengan peningkatan layanan kepada nasabah, perbaikan kinerja operasional dan secara proaktif selalu menjaga kualitas pembiayaan yang disalurkan serta berkomitmen untuk menjalankan seluruh aktivitasnya pada kerangka kerja tata kelola perusahaan yang baik. Bank Victoria Syariah senantiasa mengedepankan pendekatan bisnis dengan prinsip kehati-hatian dan memegang teguh prinsip syariah ditengah naik turunnya kondisi perekonomian secara makro serta mengelola risiko sehingga diperoleh hasil yang optimal.

Oleh karena itu, Bank Victoria Syariah pada tahun 2018 dapat meningkatkan jumlah laba dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2017, pertumbuhan aset yang positif dengan rasio aset bermasalah (*Non Performing*) yang terkendali, mampu menjaga posisi likuiditas dan hasil *self assessment*-nya menghasilkan profil risiko yang *low to moderate* dan peringkat GCG adalah baik. Berdasarkan hal tersebut, hasil *self assesment* untuk nilai tingkat kesehatan bank menghasilkan nilai Peringkat Komposit adalah 2.

Pencapaian ini merupakan bukti bahwa Bank Victoria Syariah memiliki komitmen untuk melanjutkan transformasi serta didasari keyakinan dengan sinergi dapat mencapai kinerja bank yang lebih sehat dan berkesinambungan.

Kondisi Makro Ekonomi dan Pertumbuhan Industri Perbankan

Tahun 2018 merupakan momentum yang tepat untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk pertama kalinya sejak krisis keuangan global tahun 2008, pertumbuhan ekonomi global meningkat yang didorong oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi hampir seluruh negara. Sementara itu risiko geopolitik global maupun kebijakan normalisasi negara negara maju yang semula dikhawatirkan akan memberikan tekanan pada perekonomian global, selama tahun 2018 relatif tidak signifikan dampaknya.

Dari sisi domestik, reformasi struktural yang konsisten yang dilakukan oleh Pemerintah mulai memperlihatkan hasilnya, yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi tahun 2018 di kisaran 5.1% - 5.2%, nilai tukar Rupiah yang relatif stabil, inflasi yang rendah (3.61% YoY).

Sejalan dengan perkembangan perekonomian

domestik, stabilitas sektor keuangan dan perbankan juga terjaga dengan baik. Capaian ini merupakan modal yang penting bagi industri untuk dapat tumbuh lebih baik dan meningkatkan perannya sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi.

Perkembangan industri perbankan cukup menggembirakan, per Desember 2018, rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tercatat sebesar 22.97%. Kuatnya permodalan perbankan ini juga diikuti dengan likuiditas yang memadai. Pada Desember 2018 rasio Alat Likuid per *Non-Core Deposit* (AL/NCD) perbankan tercatat sebesar 94.78%, diatas *threshold*, sementara aset likuid perbankan tercatat di kisaran Rp. 899 Triliun.

Intermediasi perbankan juga mengalami pertumbuhan yang sejalan dengan kinerja perekonomian domestik. Kredit perbankan pada Desember 2018 tercatat sebesar Rp. 5,358 Triliun atau tumbuh sebesar 12.05% yoy, sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan pada Desember 2018 tercatat sebesar Rp. 5,630 Triliun atau tumbuh 6.45% yoy. Pertumbuhan intermediasi perbankan juga diikuti dengan *trend* penurunan suku bunga, yang mana sepanjang tahun 2018, walaupun suku bunga deposito naik sebesar 118 bps, suku bunga kredit turun 144 bps.

Dari sisi risiko, khususnya kredit ditahun 2018 relatif terkendali. Rasio *Non Performing Earning Asset* (NPL) *gross* untuk perbankan per Desember 2018 tercatat sebesar 1.91%

Kinerja Keuangan Bank Victoria Syariah

Kinerja Bank Victoria Syariah selama tahun 2018 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan naiknya tingkat kepercayaan masyarakat kepada Bank Victoria Syariah.

Total Aset tercatat sebesar Rp. 2,126 Triliun meningkat 6.14% atau Rp. 122 Milyar dibandingkan tahun 2017. Pembiayaan pada akhir tahun 2018 tercatat sebesar Rp.1,23 Triliun dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp 1.26 Triliun, sedangkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga tercatat sebesar Rp. 1,49 Triliun dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp. 1.51 Triliun.

Dari sisi kualitas pembiayaan, NPF (*gross*) pada akhir Desember 2018 sebesar 4.00%, membaik apabila dibandingkan NPF (*gross*) pada tahun 2017 sebesar 4.59%. Hal ini menunjukkan komitmen Bank Victoria Syariah untuk terus memperbaiki kualitas pembiayaan dan meningkatkan nilai perusahaan bagi *stakeholders*.

Perbandingan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) relatif stabil yaitu 96.02% pada tahun 2017 menjadi 96.38% pada tahun 2018. Hal ini menggambarkan bahwa program efisiensi berjalan dengan baik dan BOPO berada dalam koridor batasan yang ditentukan regulator.

Dan hasil dari pertumbuhan portofolio aset produktif, pengelolaan kualitas aset dan program efisiensi, pada tahun 2018 ini Bank Victoria Syariah membukukan laba sebelum pajak sebesar Rp. 6,3 Milyar, yang mana hal ini membaik dibandingkan tahun 2017 yang masih mencatat laba sebelum pajak tahun berjalan sebesar Rp. 6,1 Milyar. Hasil capaian tahun 2018 mendorong rasio-rasio

keuangan Bank Victoria Syariah membaik dibandingkan dengan tahun 2017.

Sumber Daya Insani

Sumber Daya Insani (SDI) Bank Victoria Syariah merupakan aset penting perusahaan dan kualitas SDI menjadi kunci utama guna terwujudnya perkembangan usaha yang berkesinambungan. Oleh karena itu, pengembangan SDI menjadi fokus dan masih diprioritaskan kepada *frontliner* bank.

Disamping itu penerapan pengelolaan kinerja SDI berdasarkan *Key Performance Indicator* dijalankan dengan baik yang disertai dengan evaluasi penerapan budaya kerja yang peduli pada risiko dan kepatuhan, diharapkan akan mendorong kinerja Bank Victoria Syariah ke arah yang lebih baik sesuai Visi dan Misi Perusahaan.

Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) yang memperhatikan prinsip syariah merupakan suatu kerangka kerja yang didorong untuk dijalankan pada setiap aktivitas Bank Victoria Syariah, yang mana tujuannya adalah untuk membangun bank umum syariah yang tangguh dan berdaya saing.

Kerangka kerja dalam pelaksanaan GCG, Bank Victoria Syariah konsisten menggunakan 5 (lima) prinsip utama yaitu Transparansi (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Pertanggungjawaban (*responsibility*), Professional (*professional*) dan Kewajaran (*fairness*), yang mana hasil *self assessment* atas penilaian GCG Bank Victoria Syariah untuk tahun 2018 adalah 2 (baik).

Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility* - CSR)

Bank Victoria Syariah menyadari bahwa proses bisnis tidak semata-mata berpijak pada perolehan keuntungan saja, namun harus memperhatikan tanggung jawab sosial terhadap lingkungannya.

Setiap perusahaan memiliki tanggung jawab perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang merupakan komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Selama tahun 2018, Bank Victoria Syariah telah menjalankan program CSR yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, dan berbagai kegiatan sosial lainnya, antara lain pemberian bantuan dana pendidikan, pemberian bantuan kepada lembaga pendidikan, pemberian santunan kepada anak yatim dan dhuafa, pemberian bantuan untuk biaya kesehatan bagi pekerja dan keluarganya, penyerahan hewan qurban.

Apresiasi

Menutup laporan ini, perkenankan kami atas nama Direksi Bank Victoria Syariah menyampaikan penghargaan dan ungkapan terima kasih kepada segenap nasabah, karyawan, Pemegang Saham, dan semua pihak yang telah berkontribusi terhadap keberhasilan Bank Victoria Syariah.

Dengan komitmen untuk berkualitas dan bersinergi serta dukungan dari pemangku kepentingan, maka Insya Allah Bank Victoria Syariah dapat terus berkiprah memberikan produk dan layanan yang terbaik bagi masyarakat. Dan

kami percaya dengan dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak, Bank Victoria Syariah dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang baik bagi perbankan nasional, khususnya perbankan syariah. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi upaya kita bersama untuk mengembangkan Bank Victoria Syariah yang berkualitas dan menjadikan Bank Victoria Syariah menjadi bank syariah andalan dan pilihan masyarakat.

Wabillahi Taufik walhidayah

Wassallamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Firman Ananda Moeis
Direktur Utama

Halaman ini sengaja dikosongkan

Laporan Dewan Pengawas Syariah



Prof DR. H. Hasanuddin AF. MA
Ketua Dewan Pengawas Syariah

Alhamdulillah dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala berkah dan nikmat-Nya sehingga Bank Victoria Syariah di tahun 2018 berhasil mencatat perkembangan dan kinerja usaha yang positif. Di tengah kondisi perekonomian yang belum stabil, kinerja Bank Victoria Syariah berdasarkan laporan keuangan perusahaan tahun 2018 memperlihatkan adanya fluktuasi baik pada sisi jumlah Aset, pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga serta hasil laba usaha di tahun berjalan.

Meskipun demikian, keadaan ini tentu tidak terlepas dari usaha, kerja keras dari seluruh pihak di Bank Victoria Syariah dan dukungan serta kepercayaan dari masyarakat secara umum dan khususnya nasabah terhadap kinerja Bank Victoria Syariah. Amanah yang diberikan oleh masyarakat dan nasabah tentu haruslah dijaga dan dipertahankan dengan baik.

Dalam kaitan dengan pelaksanaan dan penerapan prinsip syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak pernah berhenti untuk terus menerus mengawasi memastikan pemenuhan prinsip-prinsip syariah didalam kegiatan operasional Bank Victoria Syariah, sebagai upaya memperkuat dan mempertahankan agar amanah tersebut terjaga dengan baik.

DPS menyampaikan usulan, pendapat, arahan dan opini serta memberikan persetujuan disetiap pertemuan rutin yang dilaksanakan dalam rangka tetap menjaga, memenuhi dan mematuhi pelaksanaan prinsip syariah didalam kegiatan operasional perbankan Bank Victoria Syariah. Lebih lanjut diharapkan agar ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, baik yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ataupun fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara konsisten dapat terjaga dengan baik.

Selain itu kami juga melakukan kajian pelayanan guna memastikan pelayanan kepada nasabah serta penjelasan produk melalui brosur sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dari pengawasan kami selama tahun 2018 pada prinsipnya tidak ditemukan masalah fundamental pada layanan yang dijalankan oleh petugas kantor cabang.

DPS juga membuat laporan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank.

DPS mengamanatkan kepada Manajemen Bank Victoria Syariah agar selalu istiqomah dalam menjalankan operasional bank dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Selain itu DPS juga berpesan agar Manajemen terus melakukan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Insani nya atas pemahaman tentang perbankan syariah sehingga operasional bank dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pada kesempatan ini pula kami menyampaikan apresiasi atas kerjasama dan dukungan Direksi berserta seluruh jajarannya dalam upaya menjaga konsistensi dan ketaatan pemenuhan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank.

Semoga segala hal yang kita lakukan untuk memajukan Bank Victoria Syariah diberi keberkahan, serta kita semua selalu mendapat taufik dan hidayah dari Allah SWT, sehingga kita dapat meraih kesuksesan dunia maupun akhirat. Aamin Ya Robbal Alamin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dewan Pengawas Syariah



Prof DR. H. Hasanuddin AF. MA Prof DR. Huzaemah Tahido Yanggo. MA





Tinjauan Industri

Tinjauan Bisnis

Tresuri

Sumber Daya Insani

Teknologi Informasi

Tinjauan Keuangan

Analisis Kinerja



Tinjauan Industri

Perekonomian Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut Bank Indonesia tahun 2018 hanya sebesar 5.18% atau sedikit lebih stabil apabila dibandingkan tahun 2017 sebesar 5.05%. Diantara negara *emerging market*, pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan trend positif. Hal ini dapat diartikan dalam jangka menengah dan jangka panjang perekonomian Indonesia berada dalam kondisi stabil.

Konsumsi masyarakat dan konsumsi Pemerintah memberikan kontribusi paling besar atas pertumbuhan ekonomi tersebut di tengah masih membaiknya ekspor akibat meningkatnya permintaan dan harga komoditas global. Sumber terbesar pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2018 adalah industri pengolahan, yakni 19,82%. Disusul sektor perdagangan 13,00%, sektor konstruksi 11,11%, dan pertanian 4,91%.

Disamping itu, sejumlah sektor yang merupakan fokus Pemerintah seperti infrastruktur, pariwisata dan hilirisasi industri tambang dapat menjadi potensi bisnis baru yang memberikan efek domino bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Inflasi sampai dengan akhir 2018 tetap terkendali dan sesuai dengan kisaran sasaran Pemerintah sebesar $3 \pm 1\%$. Inflasi tahun 2018 tercatat sebesar 2,50% yoy, lebih rendah dari tahun 2017 sebesar 3,61% yoy. Hal ini seiring dengan semakin kuatnya koordinasi Pemerintah dan Bank Indonesia dalam mendorong peningkatan produksi dan memperbaiki distribusi serta meminimalkan berbagai distorsi harga bahan pangan. Perkembangan harga berbagai komoditas pada Desember 2018 secara umum menunjukkan adanya kenaikan dimana kenaikan Indeks Harga Konsumen dari 131,28 pada Desember 2017 menjadi 103,29 pada Desember 2018.

Secara rata-rata, nilai tukar Rupiah melemah, kurs naik dari Rp13.536 (2017) menjadi Rp14.380 (2018). Pergerakan rupiah tersebut dipengaruhi oleh aliran modal asing yang cukup signifikan, perkembangan eksternal dan kondisi domestik.

Sinergi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia telah mendorong optimisme pada perekonomian Indonesia. Hal tersebut terlihat pada inflasi yang diperkirakan terkendali, defisit neraca transaksi berjalan yang aman pada kisaran 2,0%-3,0% di tahun 2018 dan diproyeksikan sebesar 2,5%-3,0% di tahun 2019, serta keseimbangan fiskal yang dapat dikelola dengan baik oleh Pemerintah. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi berada dalam kisaran 5,1%-5,2% di tahun 2018, dan pada kisaran 5,3%-5,5% di tahun 2019.

Industri Perbankan Nasional

Aset perbankan nasional pada akhir tahun 2018 tercatat Rp8.068 Triliun atau tumbuh 9,21% (yoy) dibandingkan

tahun 2017 sebesar Rp7.387 Triliun. Aset Bank Umum menguasai 96,11% pada tahun 2017 bertambah menjadi 98,35% pada tahun 2018, dan sisanya 1,65% merupakan Aset Bank Perkreditan Rakyat.

Sampai akhir tahun 2018, perbankan nasional telah menghimpun DPK sebesar Rp5.630 Triliun yang sebelumnya pada akhir tahun 2017 sebesar Rp5.289 Triliun atau tumbuh 6,45% (yoy). Secara *market share*, DPK perbankan Bank Umum menguasai 98,30% terhadap DPK perbankan nasional. Sedangkan untuk periode yang sama, total kredit perbankan nasional tercatat Rp5.358 Triliun, atau tumbuh 12,05% (yoy). Secara *market share*, kredit perbankan konvensional menguasai 94,33% terhadap total kredit perbankan nasional. Secara umum, rasio kinerja perbankan nasional pada akhir tahun 2018 terhadap 2017 terlihat dari Rasio LDR/FDR menjadi 94,78% dari sebelumnya 90,41%. Rasio pertumbuhan kredit mencapai 12,05% dari sebelumnya 8,36%, dengan Rasio NPL menurun menjadi 2,57% dari sebelumnya 2,93%.

Industri Perbankan Syariah

Hingga akhir tahun 2018, jumlah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah mencapai 201 bank yang terdiri dari 14 bank umum syariah dan 20 unit usaha syariah serta 167 BPR syariah. Sampai Desember 2018, *market share* perbankan syariah terhadap perbankan nasional mencapai 5,92% atau dengan total aset Rp477 triliun. Secara aset, perbankan syariah mengalami growth sebesar 12,53% (yoy).

Pada periode yang sama, DPK perbankan syariah sudah mencapai Rp371 Triliun atau tumbuh 11,03% (yoy). Secara *market share*, DPK perbankan syariah menguasai 6,60% terhadap total DPK perbankan nasional.

Dari sisi penyaluran dana, pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah per Desember 2018 sebesar 12,02%. Secara *market share*, posisi pembiayaan perbankan syariah mencapai Rp321 triliun atau menguasai 6,00% terhadap total pembiayaan perbankan nasional.



Tinjauan Bisnis

Dalam mengakselerasi pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia, perlu dilakukan berbagai program yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan lintas sektor. Permasalahan bersama yang dihadapi oleh keuangan syariah antara lain keterbatasan suplai produk syariah; keterbatasan akses akan produk keuangan syariah; masih rendahnya tingkat literasi keuangan syariah dan tingkat utilitas produk keuangan syariah; keterbatasan sumber daya manusia; perlunya optimalisasi koordinasi dengan para pemangku kepentingan; serta perlunya kebijakan jasa keuangan yang selaras dan dapat saling mendukung perkembangan seluruh sektor keuangan syariah

Kinerja bank syariah masih mencatatkan pertumbuhan positif sampai akhir tahun 2018. Dari sisi penyaluran dana, pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah per Desember 2018 sebesar 12,02%.

Pertumbuhan pembiayaan tersebut juga berhasil mengerek aset bank syariah ke level Rp477 Triliun atau mengalami *growth* sebesar 12,53% (yoy).

Pada tahun 2018 Bank Victoria Syariah terus menata bisnis, khususnya pembiayaan di sektor Komersial dan UKM, beserta pengelolaan portfolio pembiayaannya (Sesuai dengan Rencana Bisnis Bank), terutama untuk mengantisipasi menurunnya kualitas portofolio pembiayaan. Bank Victoria Syariah melakukan sejumlah langkah untuk menangani masalah tersebut. Upaya ini termasuk melalui restrukturisasi pembiayaan, agar aset-aset tersebut dapat kembali menjadi produktif dan penjualan aset bermasalah untuk menjaga NPF di bawah 5% pada tahun ini.

Bercermin dari *performance* tahun sebelumnya, tahun 2018 penyaluran pembiayaan dilakukan lebih selektif dan hati-hati dengan memperhatikan sektor industri mana yang baik dan memperhitungkan tingkat risiko berdasarkan *risk appetite* Bank Victoria Syariah.

Dengan keterbatasan sumber daya insani, Bank Victoria Syariah selalu berupaya meningkatkan kualitas SDI, dengan mempercepat proses pelayanan, meningkatkan peran dan kualitas SDI di bidang pembiayaan serta secara konsisten meningkatkan *account management* ataupun *risk management* di bidang pembiayaan.

Pembiayaan Komersil

Jenis-Jenis Pembiayaan Komersil

Untuk pembiayaan komersial, Bank Victoria Syariah fokus pada penyaluran pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi untuk bisnis umum maupun untuk segmentasi khusus. Segmentasi dilakukan terhadap nominal plafond yang diusulkan dengan minimal sebesar Rp 5 miliar dan maksimal sesuai Batas Maksimum Penyediaan Dana (BMPD) dengan sektor ekonomi yang

telah direkomendasikan oleh Divisi Manajemen Risiko.

Strategi Pengembangan Bisnis Pembiayaan Komersil

Menghadapi kondisi perekonomian yang masih belum kondusif, di tahun 2018, Bank Victoria Syariah melakukan strategi pembiayaan komersil antara lain:

1. Melakukan ekspansi pembiayaan kepada sektor ekonomi yang cukup prospektif dengan lebih selektif. Diutamakan untuk nasabah eksisting yang mempunyai *track record bonafide* dan masih mempunyai ruang untuk penambahan fasilitas.
2. Pola pembiayaan dengan model *value chain* terhadap nasabah komersil guna mendapatkan prospek bisnis yang dapat dikembangkan.
3. Mengoptimalkan peran kantor cabang dan Divisi Pembiayaan Kantor Pusat untuk melakukan penetrasi pasar komersil kepada sektor unggulan, sesuai dengan potensi daerah dan segmen nasabah. Namun dalam hal inisiasi tetap melalui *line of business* pembiayaan komersil untuk memperkuat analisa pembiayaan.
4. Penguatan kerjasama dengan induk Bank Victoria Syariah yaitu PT Bank Victoria International Tbk dibidang pembiayaan terutama untuk pembiayaan komersil.
5. Melakukan *cross selling* untuk *me-reprofile* pendanaan khususnya dalam memperbesar portofolio giro dari nasabah pembiayaan komersil.

Langkah Strategis ke Depan

Ke depannya, inisiatif strategis yang dilakukan antara lain:

1. Memperbaiki proses pembiayaan yaitu melakukan proses pembiayaan yang cepat, tepat dengan tidak mengurangi prinsip kehati-hatian.
2. *Me-review* ulang segmentasi, target market dan *positioning* pembiayaan komersil.
3. Konsolidasi, yaitu melakukan *monitoring account* eksisting dan penataan terhadap kantor cabang yang telah ada dan akan melakukan inisiasi *account* komersil dengan tujuan untuk menjaga kualitas portofolio pembiayaan.
4. Mempertahankan dan meningkatkan pelaksanaan dari strategi sebelumnya yang mendukung kebijakan Bank Victoria Syariah seperti melakukan *cross selling* dalam *me-reprofile* pembiayaan.

Pembiayaan Multifinance

Tahun 2018 merupakan tahun evaluasi industri perbankan dalam menyalurkan pembiayaan kepada perusahaan *Multifinance*, dimana pada tahun tersebut terdapat beberapa perusahaan *multifinance* yang kegiatan usahanya dibekukan, bahkan dicabut ijin usahanya. Untuk itu Bank Victoria Syariah mengevaluasi dan menghentikan sementara dalam menyalurkan pembiayaan baru kepada perusahaan *multifinance*. Porsi pembiayaan *multifinance* dari keseluruhan pembiayaan

Bank Victoria Syariah di tahun 2018 adalah 26,66% atau turun 2,95% dari porsi sebelumnya di tahun 2017 yang sebesar 29,61%.

Langkah Strategis ke Depan

Bank Victoria Syariah akan lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan kepada perusahaan *mutifinance* dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Analisis dan rivi untuk perusahaan *multifinance* mana yang akan menjadi *target market* akan lebih di tingkatkan pelaksanaannya.

Pembiayaan Usaha Kecil Menengah

Pembiayaan Usaha Kecil Menengah di tahun 2018 meningkat, terlihat dari porsinya terhadap total pembiayaan Bank Victoria Syariah.

Bank Victoria Syariah akan terus berkomitmen untuk memenuhi penyaluran pembiayaan UKM sesuai dengan ketentuan regulator.

Bank Victoria Syariah akan lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan pada segmen ini mengingat Bank pernah mengalami kendala terkait dengan pembiayaan UKM.

Pembiayaan Konsumer

Sejalan dengan strategi Bank Victoria Syariah dalam melakukan *reprofiling* pembiayaan ke segmen bisnis retail. Grup Konsumer bertanggung jawab dalam melakukan *set up* produk, bisnis model, bisnis proses dan *sales force* untuk mencapai target bisnis yang ditetapkan. Grup Konsumer juga bertanggung jawab melakukan supervisi cabang-cabang Bank Victoria Syariah dalam melakukan proses penjualan produk-produk Pembiayaan Konsumer.

Jenis Pembiayaan Konsumer yang dimiliki Bank Victoria Syariah adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan Pemilikan Rumah (KPR Vis iB)
KPR Vis iB merupakan pembiayaan kepemilikan rumah (KPR) untuk perorangan dengan akad murabahah dimana Bank Victoria Syariah membiayai pembelian rumah yang diperlukan oleh nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan Bank yang disepakati.
2. Pembiayaan Pemilikan Mobil (KPM Vis iB)
KPM Vis iB merupakan pembiayaan kepemilikan mobil untuk perorangan dengan akad murabahah.
3. Pembiayaan Multiguna (KMG Vis iB)
KMG Vis iB merupakan pembiayaan multiguna untuk perorangan yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan antara lain biaya pendidikan anak, renovasi rumah, dan pernikahan anak.

Target market Pembiayaan Konsumer adalah nasabah perorangan yang berprofesi sebagai karyawan,

pengusaha dan profesional. Pembiayaan untuk kepemilikan rumah difokuskan untuk membiayai nasabah di segmen perumahan menengah dengan harga s/d Rp 5 Miliar. Pembiayaan mobil difokuskan untuk membiayai nasabah karyawan perusahaan/institusi secara kolektif. Sedangkan pembiayaan multiguna difokuskan untuk membiayai kebutuhan nasabah selain pembelian rumah dan mobil.

Strategi Bisnis Pembiayaan Konsumer ke Depan

Strategi bisnis yang akan dilakukan untuk mendorong pertumbuhan bisnis Pembiayaan Konsumer adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan produk pembiayaan KPR yang sesuai dengan kebutuhan pasar, selaras dengan produk yang dikembangkan oleh *developer*.
2. Meningkatkan jumlah kerja sama *developer*, *agent property*, *travel agent* dan *dealer*.
3. Mengembangkan program khusus "*company collective*" untuk pembiayaan kepada karyawan perusahaan/institusi.
4. Menyempurnakan "*Business Process*" dengan mengembangkan sistem untuk meningkatkan *service level approval* kepada nasabah.
5. Mengembangkan kemitraan (aliansi) dengan mitra-mitra strategis untuk penyaluran Pembiayaan Konsumer kepada masyarakat yang wilayahnya tidak terjangkau oleh cabang.

Pendanaan Dana Pihak Ketiga

Bank Victoria Syariah mengedepankan pertumbuhan yang berimbang antara pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga pada rasio yang menguntungkan bagi Bank. Di samping itu Bank Victoria Syariah secara berkesinambungan berusaha menekan DPK berbagi hasil tinggi untuk mengoptimalkan net imbalan.

Pencapaian di Tahun 2018

Salah satu target pencapaian Dana Pihak Ketiga (DPK) di tahun 2018 yaitu adanya peningkatan CASA. Untuk tahun 2018, Bank Victoria Syariah berhasil meningkatkan CASA hingga 23.5% dari total CASA di tahun 2017 sebesar Rp. 81,2 Miliar menjadi Rp.100,3 Miliar di tahun 2018. Adapun hal ini menjadi acuan untuk meningkatkan CASA di tahun-tahun selanjutnya.

Selain itu, Bank Victoria Syariah telah menambah jaringan *switching* yang bekerjasama dengan salah satu lembaga *Switching* (ALTO) untuk meningkatkan layanan transaksi kartu ATM Bank Victoria Syariah.

Adapun penambahan jaringan tidak hanya berupa jaringan *switching* melainkan jaringan kantor yang bersinergi dengan PT. Bank Victoria International Tbk berupa Layanan Syariah Bank yang telah dibuka di PT. Bank Victoria International Tbk Kantor Cabang Fatmawati pada bulan Oktober 2018.

Strategi Penghimpunan Dana Pihak Ketiga

Bank Victoria Syariah fokus untuk meningkatkan jumlah dana retail dibawah Rp. 2 Miliar dan meningkatkan dana CASA secara proaktif dengan penekanan pada pendanaan dari berbagai institusi berlabel islami, dengan strategi sebagai berikut:

1. Mengembangkan kegiatan *marketing communication* dengan industri keuangan lainnya seperti gerakan ekonomi syariah dan iB Vaganza.
2. Meningkatkan pertumbuhan dana ritel melalui kegiatan *open table*, pameran atau kunjungan langsung ke nasabah yang berada dipusat-pusat perdagangan, perbelanjaan atau perkantoran.
3. Melakukan kegiatan promosi melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dll untuk menginformasikan produk-produk dan kegiatan Bank Victoria Syariah sehingga dapat lebih dikenal oleh masyarakat luas.
4. Meningkatkan kerjasama strategis (aliansi strategis) dalam penjualan produk-produk pendanaan dengan cara melakukan pemetaan terhadap komunitas, perusahaan-perusahaan, lembaga pendidikan atau instansi Pemerintah dan Yayasan yang berpotensi, serta secara aktif melakukan pendekatan agar komunitas, perusahaan, lembaga pendidikan atau instansi Pemerintah dan Yayasan mau menggunakan produk Bank Victoria Syariah.
5. Pendanaan dari Lembaga Institusi Islam
 - a. Melakukan kerjasama baru dengan Lembaga Zakat, Lembaga Sosial Islami, dan Mesjid berskala menengah
 - b. Melakukan *Strategic Partnership* dengan Lembaga Islam
6. Menurunkan Rasio Deposita Inti dengan meningkatkan atau memperbanyak Deposita Retail

Strategi Pencapaian Target Penghimpunan CASA

Strategi penghimpunan CASA akan disesuaikan dengan tipe nasabah dan juga keterkaitannya nasabah tersebut dengan bank. Adapun strategi dan program yang dijalankan Bank untuk meningkatkan CASA adalah sebagai berikut:

1. Untuk Nasabah *Existing*, Bank akan meluncurkan program-program sebagai berikut: Kepada Nasabah akan diberikan *Loyalty Program*, berupa pemberian *gimmick* yang menarik.
2. Program Akuisisi Nasabah Baru untuk menambah NOA Deposita Retail di Cabang Bank akan terus berusaha meningkatkan akuisi nasabah baru, untuk memperluas basis *customer*-nya. Program dan strategi Peningkatan Jumlah Customer yang akan dilakukan adalah sbb:
 - a. Bank akan meningkatkan penetrasi terhadap pasar-pasar emosional, yang berbasis organisasi keagamaan dan sosial, terutama pendidikan. Untuk itu, Bank akan membentuk satu lini bisnis, yang khusus menangani nasabah-nasabah yang

berafiliasi dengan organisasi-organisasi Islam, seperti Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama, Persis, Pondok Pesantren, Jaringan Sekolah Islam Terpadu, dll.

- b. Bank juga akan meningkatkan akuisisi nasabah CASA baru dari *value chain* nasabah-nasabah pembiayaan. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari *integrated account management*, dimana *Relationship Manager Funding* dapat mensolusitasi potential customer yang di-referensikan nasabah pembiayaan, utamanya yang ada keterkaitan hubungan bisnis dengan nasabah pembiayaan.

Selain itu, inisiatif-inisiatif lain yang akan dilakukan antara lain:

1. Produk dan Layanan
 - Melakukan *review product lifecycle* dan *review produktifitas* produk dana (*closed or expand*).
 - Melakukan pendalaman terhadap nasabah yang ada (*customer deepening*) melalui pola *marketing* dan komunikasi yang efektif.
2. Peningkatan Sales dan Service
Peningkatan DPK akan dilakukan diantaranya melalui: (i) Pemenuhan tenaga *sales* secara memadai di seluruh jaringan kantor guna menutup *gap* antara kebutuhan dan ketersediaan; (ii) Mendorong peningkatan produktivitas seluruh tenaga *marketing* dan *sales*. Peningkatan produktivitas tersebut dilakukan melalui penetapan fokus tugas antara *marketing* dan *sales funding* dan *financing*. Selain itu, sistem evaluasi kinerja akan diberikan secara lebih ketat dengan mengembangkan *Sales Tracking System* dengan dibarengi oleh sistem *reward* dan *punishment* yang berbasis pada kinerja. *Training* dan pengembangan *skill* akan dilakukan secara reguler terhadap seluruh tenaga *sales* yang ada.

Tresuri

Bagian Tresuri sebagai pengelola likuiditas Bank sepanjang tahun 2018 telah menjalankan fungsi pertanggung jawabannya sebagai pengelola likuiditas dimana hal ini dapat terlihat dengan keberhasilan Bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban nasabah yang jatuh tempo dalam jangka pendek maupun jangka panjang dengan baik. Disamping itu Tresuri juga menjaga dan mengelola *Cash flow* (*Cash in / Cash out*) dalam batas aman serta memenuhi ketentuan Bank Indonesia dalam hal menjaga kewajiban rasio Giro Wajib Minimum (GWM), *Rasio Intermediary Makroprudensial* (RIM) dan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sesuai dengan ketentuan regulator.

Ketersediaan dana yang cukup dalam memenuhi kebutuhan operasional Bank tidak hanya diperoleh dari

divisi pendanaan, namun juga diperkuat dengan cara mencari *back up* sumber pendanaan lain diantaranya adalah dengan memperluas dan meningkatkan kerjasama dengan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah serta Bank Pembangunan Daerah dalam bidang *money market line*.

Dari sisi aset Bank, Tresuri memberikan kontribusi dengan meningkatkan portofolio investasi pada Surat Berharga / Sukuk dari Rp. 320.282 Juta pada periode 2017 menjadi Rp. 408.422 Juta pada periode 2018 dan berhasil meningkatkan pendapatan atas investasi Surat Berharga sebesar 24.65% dari tahun 2017.

Peranan Tresuri sebagai penghasil laba dilakukan dengan hati-hati (*prudent*) melalui analisa yang kuat dan komprehensif, sehingga risiko-risiko yang mungkin timbul dapat diantisipasi sedini mungkin. Untuk memitigasi risiko investasi pada penempatan surat Berharga maka dilakukan proses seleksi dan analisis fundamental disamping mengedepankan prinsip *prudential*.

Investasi surat berharga Bank dibagi dalam kategori sukuk pemerintah dan sukuk korporasi. Mayoritas investasi yang dimiliki sebagai portofolio pada umumnya adalah surat berharga pemerintah yang *zero risk* atau surat berharga korporasi yang memiliki minimum *rating investment grade*.

Tresuri juga menjalankan fungsi tata kelola risiko/ manajemen risiko dengan melakukan *assessment* Penilaian Kualitas Manajemen Risiko (KPMR) dan secara komposit profil penilaian risiko Bank dinilai “2” (*Satisfactory*) pada 2018, khususnya pada Risiko Likuiditas.

Dalam hal untuk mengantisipasi gejolak internal dan eksternal, bagian Tresuri juga melakukan analisis pengukuran *Liquidity Contingency Plan* (LCP) yang dilakukan setiap bulan dengan memperhitungkan beberapa indikator, diantaranya adalah sumber-sumber pendanaan dari Interbank, NPF, FDR dan indikator lainnya.

Kesimpulan hasil analisis dan pengukuran dari aspek-aspek diatas yang dinilai menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2018 Bank berada dalam kondisi likuiditas yang Normal, artinya likuiditas Bank terkendali dengan baik dan aman.

Halaman ini sengaja dikosongkan



Tresuri

Salah satu fungsi utama treasury adalah menjaga dan mengelola likuiditas harian dengan memanfaatkan kelebihan dana yang diperoleh untuk ditempatkan pada berbagai instrumen keuangan yang dapat memberikan imbal hasil yang optimal dengan memperhatikan pemenuhan terhadap ketentuan otoritas yang berwenang (OJK dan BI) seperti menjaga GWM Bank sesuai dengan ketentuan.

Dari segi operasional, kegiatan unit kerja treasury adalah melakukan penempatan pada instrumen keuangan diantaranya seperti:

- Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) yaitu penempatan dana antar bank dalam jangka pendek seperti *overnight placement*, penempatan pada BI (Fasbis, SBIS) dan reksadana pasar uang syariah ataupun pada surat berharga yang berdurasi kurang dari 1 tahun.
- Pasar Modal Syariah yaitu penempatan dana kepada surat berharga negara maupun korporasi dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun.

Di samping itu unit kerja treasury juga berkewajiban mengelola *Asset* dan *Liability* Bank melalui rapat AlsyCo yang wajib diselenggarakan minimal 1 (satu) bulan sekali dengan Direksi dan divisi terkait yang bertujuan membahas perkembangan posisi keuangan Bank dari waktu ke waktu sehingga diperoleh informasi yang akurat untuk menentukan strategi apa yang akan dilakukan Bank kedepan sehingga mencapai kondisi keuangan yang paling optimal.

Disamping fungsi pengelolaan *asset* dan liabilitas Bank, Treasury juga memiliki fungsi penghasil laba, fungsi ALMA (*Asset Liability Management*), termasuk dalam penentuan dan pengelolaan nisbah bagi hasil untuk meminimalkan biaya serta mengatur posisi pada tingkat risiko yang aman dan terhindar dari risiko likuiditas.

Unit kerja treasury dituntut untuk selalu lebih baik dalam mengelola likuiditas Bank dan untuk menjaga agar meminimalisir kerugian sehingga memperkecil *negative spread* atas dana pihak ketiga bank yang belum tersalurkan ke pembiayaan.

Seiring dengan hal tersebut diatas maka rencana kedepan yang ingin dicapai treasury adalah:

- Mencapai target yang telah ditetapkan sesuai dengan RBB.
- Meningkatkan *income* treasury dengan melakukan penempatan pada instrumen keuangan yang memiliki imbal hasil tinggi namun dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
- Mengikutsertakan seluruh staf yang ada untuk uji kompetensi sertifikasi treasury sebagai syarat profesionalisme yang diwajibkan oleh OJK.



Sumber Daya Insani

Pada Tahun 2018 Bank Victoria Syariah terus berupaya mengembangkan kualitas dan produktivitas Sumber Daya Insani untuk dapat mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Pengelolaan SDI difokuskan pada evaluasi kebijakan dan peningkatan kompetensi dalam pelayanan yang berprinsip syariah, yang dimulai proses seleksi dan rekrutmen, pelatihan, evaluasi kinerja yang diikuti dengan program pengembangan karir hingga program-program retensi.

1. Seleksi dan Rekrutmen

Untuk memperkuat organisasi, setiap tahun Bank Victoria Syariah melakukan seleksi karyawan yang ada dan/atau proses rekrutmen melalui website, kerjasama dengan grup usaha, atau *experience hire*. Para karyawan baru tersebut akan diberikan pelatihan berupa induksi agar dapat memahami visi dan misi serta nilai perusahaan dengan lebih baik.

Selama tahun 2018, jumlah karyawan yang telah direkrut sebanyak 32 orang, dimana perekrutan tetap difokuskan untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan operasional maupun administrasi dengan memperhatikan komposisi yang seimbang antara *supporting* dan bisnis. Dan jumlah karyawan Bank Victoria Syariah saat ini adalah 223 orang.

2. Pendidikan dan Pelatihan

Pada tahun 2018 program pelatihan karyawan diutamakan pada pengetahuan tentang teknis operasional perbankan syariah, penanganan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU PPT), fungsi kepatuhan serta *sharing session* unit kerja, juga mengikutsertakan pada sertifikasi manajemen risiko level 1, 2, 3 dan 5, sertifikasi kepatuhan level 1 dan 2, sertifikasi Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) dan sertifikasi *treasury level advance*.

Pelatihan dilakukan secara *in-house* dengan pembicara/narasumber dari pihak internal bank dan/atau eksternal sehingga setiap karyawan memiliki kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Dan selama tahun 2018, Bank Victoria Syariah telah melaksanakan pelatihan sebagai berikut:

Di samping pelatihan tersebut di atas Bank Victoria Syariah

No.	Jenis Pelatihan	Jumlah Peserta
1.	Perkreditan / <i>Treasury</i>	5
2.	<i>Leadership</i>	27
3.	Manajemen Risiko	48
4.	Manajemen Umum	54
5.	Teknologi Informasi	19
6.	Audit	30
7.	Manajemen Perbankan	5
8.	Pelaporan Bank	50
9.	Sosialisasi Ketentuan Perbankan	129

secara konsisten melaksanakan doa bersama, *morning briefing* dan pemberian semangat, agar SDI memiliki kesamaan visi dan misi serta memahami rencana bisnis bank.

3. Program Retensi

Bank Victoria Syariah melaksanakan program employee engagement untuk mempertahankan SDI yang berprestasi dan berpotensi dan dikembangkan melalui berbagi kegiatan antara lain:

- Pemberian penghargaan “BVIS H.E.B.A.T” kepada karyawan yang berprestasi memperbaiki dan atau mengembangkan suatu proses, yang bermanfaat bagi Bank.
- Program pengembangan karyawan melalui perencanaan karir.
- Peningkatan kesejahteraan karyawan.
- Penyelenggaraan kegiatan lain, antara lain olah raga dan musik.

4. Pengelolaan Kinerja

Untuk mendorong karyawan agar senantiasa berupaya mencapai kinerja yang optimal, Bank Victoria Syariah mendorong penerapan dan perbaikan seluruh tahapan dalam proses pengelolaan kinerja yang mencakup penyusunan Indikator Kinerja Utama dan pembinaan periodik dari atasan kepada bawahan dalam memantau pencapaian target kerja.

Untuk pelaksanaan penilaian kinerja karyawan menggunakan parameter yang terukur berupa *key performance indicator* (KPI) yang menjadi dasar obyektif pemberian rewards.

RENCANA KE DEPAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA INSANI

Rencana pengembangan sumber daya insani untuk tahun mendatang adalah menyiapkan *performance oriented personnel* sebagai *key driver* pertumbuhan bisnis yang memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah, melalui strategi utama adalah sebagai berikut:

- Membentuk *Performance Oriented Culture*
Menerapkan *Performance Management Process* di seluruh organisasi yang didukung oleh *key performance indicator* yang jelas dan transparan, serta mekanisme *reward* yang kuat dan adil.
- Melengkapi Cabang dengan tim yang cukup dan kompeten
Menempatkan *Branch Manager* yang memiliki kompetensi yang tinggi untuk memimpin Kantor Cabang dan didukung oleh *sales team* yang cukup, disiplin & dan agresif dalam melakukan penetrasi pasar.
- Memperkuat *Talent Pool*
Memiliki data terkait *talent pool* di Kantor Pusat dan Cabang dengan profil dan kompetensi yang sesuai (*right number, right people on the right place*) yang didukung oleh organisasi yang baku (sebagai *baseline* untuk *recruitment* dan menciptakan *alignment equality*).

- Upaya Penerapan *Code of Conduct*
Code of Conduct berlaku bagi setiap insani yang terdiri dari Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan.

Setiap insan Bank Victoria Syariah memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan penerapan *Code of Conduct* dalam aktivitas sehari-hari. Salah satu bentuk tanggung jawab insan Bank Victoria Syariah adalah melaporkan setiap tindakan pegawai lain atau rekan kerja yang diyakini merupakan suatu pelanggaran *Code of Conduct* dan menyampaikan setiap fakta penyimpangan yang diketahuinya melalui mekanisme *Whistleblowing* kepada Unit Kerja *Anti Fraud*.

Halaman ini sengaja dikosongkan



Teknologi Informasi

Teknologi Informasi (TI) Bank Victoria Syariah memiliki tatanan kelola untuk mengolah data secara terintegrasi, memberikan informasi lebih cepat dan akurat kepada seluruh *stakeholders*. Hal ini tidak lepas dari penerapan Manajemen Risiko, Kebijakan dan Prosedur yang berlaku untuk menciptakan *Good Corporate Governance* yang baik sebagai upaya TI dalam melayani lebih baik sesuai standar perusahaan publik. Tata kelola yang baik dalam melakukan pengembangan TI menjadi salah satu bagian penting dalam proses pemanfaatan TI. Komite Teknologi Informasi yang terdiri dari gabungan berbagai unit kerja melakukan pertemuan secara berkala.

TI terus melakukan introspeksi dan pengembangan untuk mendukung seluruh unit kerja dengan memperkuat Kebijakan dan Prosedur, memberikan dukungan pengetahuan, menyediakan infrastruktur untuk aplikasi yang diterbitkan regulator perbankan diantaranya adalah aplikasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), Aplikasi Pelaporan Online OJK (Apolo), Laporan Stabilitas Moneter dan Keuangan (LSMK) dan GPN (Gerbang Pembayaran Nasional).

TI Bank Victoria Syariah secara konsisten memperkuat infrastruktur teknologi informasi dengan mengkaji kebutuhan perangkat keras secara berkala, menyempurnakan sistem jaringan dan perangkat lunaknya, serta melakukan pembaharuan sistem operasi inti sesuai dengan kebutuhan.

Sejalan dengan upaya mendukung penerapan kebijakan Bank Indonesia terkait Gerbang Pembayaran Nasional dalam pengelolaan sistem pembayaran nasional berbasis kartu debit dan uang elektronik, Bank Victoria Syariah melakukan penyesuaian infrastruktur teknologi informasi yang diperlukan dan telah memiliki 2 (dua) *Switching* untuk penyempurnaan layanan pembayaran digital yang saling terkoneksi satu sama lain.

Sumber Daya Manusia menjadi bagian penting untuk mendukung pengembangan teknologi informasi serta inovasi yang berkelanjutan. Bank Victoria Syariah senantiasa memastikan kecukupan sumber daya insani yang berkualitas serta memiliki keahlian mumpuni di bidang teknologi informasi.

Perjalanan panjang yang telah dilalui pada periode tahun 2018 terkait pembangunan dan pengembangan TI telah sesuai dengan Rencana Bisnis Bank yang telah disusun sebelumnya. Rencana Bisnis Bank merupakan peta perjalanan (*Road Map*) selama satu tahun menjadi panduan bagi seluruh karyawan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Kinerja Teknologi Informasi telah menunjukkan performa yang memuaskan, sesuai dengan target yang ditetapkan pada awal tahun. TI telah mengembangkan aplikasi berbasis web untuk sistem pengelolaan pada Divisi

Sumber Daya Insani (SDI) dan kepatuhan (*Compliance*) yang memberikan solusi berbasis teknologi sehingga mengurangi penggunaan kertas (*paperless*) serta efektif dalam penggunaannya.

Dalam hal kelangsungan dan pemulihan layanan Teknologi Informasi, Bank melakukan *Disaster Recovery* secara berkala guna memitigasi Risiko yang dapat terjadi dan telah menyediakan infrastruktur yang diperlukan pada lokasi *offsite* Bank.

Proyeksi TI tahun 2019

Teknologi Informasi akan terus mengikuti pengembangan teknologi terkini agar Bank selalu mengetahui posisi teknologi terkini untuk mendukung bisnis yang semakin berkembang. Dan bersama-sama dengan para pemegang kepentingan dan pengguna, TI terus meningkatkan kemampuan pengembangan solusi aplikasi yang lebih fleksibel sehingga dapat meningkatkan kecepatan dalam memberikan solusi.

Hal ini dikarenakan bahwa dengan semakin tingginya persaingan di industri jasa keuangan, mendorong bank untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah dengan lebih efektif, efisien serta berkesinambungan dan dalam rangka mendorong efektivitas pelayanan kepada nasabah sehingga bank perlu semakin meningkatkan kapabilitasnya yang diikuti dengan penyesuaian strategi bisnis dan teknologi.

Sebagai salah satu upaya peningkatan kapabilitas Bank, pemanfaatan perkembangan teknologi informasi secara lebih optimal merupakan prasyarat dalam mendukung inovasi layanan bank serta penyesuaian strategi bisnis dan teknologi agar tepat sasaran dan perlu memberikan kemudahan akses layanan perbankan berbasis teknologi tanpa batasan tempat dan waktu.

TI Bank Victoria Syariah selalu berupaya dalam melakukan penyempurnaan terhadap aplikasi-aplikasi yang berkaitan terhadap pelayanan nasabah diantaranya dengan mendukung Bank Indonesia dan OJK sebagai regulator dalam mengembangkan sistem pelaporan yang terintegrasi seperti BI-ANTASENA, dengan menggunakan teknologi yang lebih handal, efektif dari sistem sebelumnya dan berupaya melakukan inovasi teknologi dan pengembangan sistem agar menjadi lebih baik dan tepat guna karena hal ini merupakan bagian komitmen kami dalam melayani kebutuhan operasional dan bisnis bank.

Sejalan dengan misi bank yakni “Komitmen untuk berkualitas” akan menjadi fokus TI pada seluruh aspek, baik dari sisi infrastruktur, organisasi, kompetensi maupun etos kerja, meningkatkan produktivitas dan memitigasi risiko serta meningkatkan kemampuan pengelolaan data dan pengamanan informasi agar peningkatan kualitas dan kehandalan layanan TI dapat terlaksana dengan konsisten.

Implementasi dan penerapan tata kelola teknologi informasi berjalan secara simultan dengan menyesuaikan ketentuan dari regulator yang terdapat dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 38/POJK.03/2016 tentang penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank umum meliputi aspek manajemen, pengembangan dan pengadaan, operasional teknologi informasi, jaringan komunikasi, pengamanan informasi, rencana pemulihan bencana, layanan perbankan elektronik, penggunaan pihak penyedia jasa teknologi informasi dan penyediaan jasa teknologi informasi oleh Bank. Serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 21/SEOJK.03/2017 tentang penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank umum meliputi aspek manajemen, pengembangan dan pengadaan, aktivitas operasional TI, jaringan komunikasi, pengamanan informasi, rencana pemulihan bencana, layanan perbankan elektronik, audit intern TI, penggunaan pihak penyedia jasa TI dan penyediaan jasa TI oleh bank.

Halaman ini sengaja dikosongkan



Operasional

Operasional merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari suatu bisnis di perbankan, untuk mendukung bisnis yang sehat, operasional perbankan harus dijalankan secara *prudent* dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian. Dalam rangka menjaga prinsip kehati-hatian pada setiap aktivitas operasional, maka kompetensi Sumber Daya Insani harus di tingkatkan sejalan dengan Visi dan Misi Bank Victoria Syariah.

Peran Operasional sebagai support bisnis diharapkan mampu memberikan kontribusi yang optimal dengan memberikan layanan yang berkualitas serta percepatan proses operasional yang efektif dan efisien dengan tetap meminimalisasi potensi risiko operasional. Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan terhadap bisnis dan *stakeholder* serta memenuhi ketentuan regulator, Operasional telah mengimplementasikan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dan PSAK 55.

Guna mendukung tercapainya Visi dan Misi Bank Victoria Syariah, Team Operasional meletakkan 4 fungsi dan peranan yang mendasar yaitu:

1. *Service Delivery*, memberikan layanan kepada seluruh *stakeholders* secara tepat waktu, akurat, handal.
2. *Business Partner*, menjadi *partner* yang pro aktif dalam mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat.
3. *Compliance Agent*, seluruh kegiatan operasional harus berlandaskan ketentuan eksternal dan internal dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kehati-hatian.
4. *People Management*, mengelola semua Sumber Daya Insani secara optimal dengan memberikan *Key Performance Indicator* guna meningkatkan produktivitas setiap karyawan serta berdasarkan nilai-nilai dan budaya perusahaan.

Tahun 2019, Team Operasional akan berupaya terus melanjutkan pengembangan operasional guna mendukung rencana bisnis Bank Victoria Syariah dengan tetap memperhatikan dan menjalankan prinsip-prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di industri perbankan syariah.

Strategi Team Operasional tahun 2019 sebagai berikut:

1. Menyempurnakan berbagai proses dan infrastruktur serta melakukan pengkinian kebijakan dan prosedur sesuai regulator guna mendukung efisiensi dan efektifitas layanan kepada seluruh *Stakeholders*.
2. Meningkatkan produktivitas melalui tinjauan komprehensif terhadap SLA.
3. Menyiapkan infrastruktur operasional bekerja sama dengan induk dalam mempersiapkan Layanan Syariah Bank.
4. Menyempurnakan infrastruktur dalam administrasi pembiayaan dengan mengoptimalkan *Core Banking System* agar informasi lebih akurat dan meminimalisir potensi kerugian operasional
5. Meningkatkan kompetensi karyawan berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) serta melakukan sertifikasi Manajemen Risiko guna membangun kesadaran atas pentingnya pengelolaan Risiko.
6. Menetapkan *Zerro Defect* dan *Zerro Fraud* untuk setiap karyawan agar tercapainya produktivitas dan kualitas kerja yang optimal



Sampai dengan 2018, PT Bank Victoria Syariah masih menempatkan dan menunjukkan posisi sebagai bank syariah dengan pangsa pasar dan aset yang diperhitungkan dalam industri perbankan syariah di Indonesia. Per akhir 2018, aset PT Bank Victoria Syariah telah mencapai sebesar Rp2.127 Milyar, pembiayaan yang diberikan sebesar Rp1,235 Milyar, sedangkan dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun dari masyarakat mencapai sebesar Rp1,491 Milyar.

PERKEMBANGAN EKONOMI DAN INDUSTRI PERBANKAN

Sampai dengan akhir tahun 2018, Perekonomian Indonesia menunjukkan perbaikan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun demikian, kondisi tersebut masih terdapat berbagai tantangan di tengah pemulihan perekonomian global baik pada negara-negara maju maupun negara-negara berkembang.

Mengantisipasi berbagai dampak perkembangan ekonomi global dan regional yang belum stabil, pada aspek kebijakan moneter, Bank Indonesia di tahun 2018 ini telah melakukan reformulasi kebijakan suku bunga acuan, dengan mengubah acuan suku bunga dari *BI Rate* dengan *BI 7-Day Repo Rate*. Langkah ini dilakukan bukan untuk mengubah sikap kebijakan, namun dilakukan untuk menyempurnakan transmisi kebijakan moneter. Bank Indonesia juga telah melakukan pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial. Ke depan, Bank Indonesia melihat masih terdapat peluang untuk melakukan pelonggaran kebijakan, tentunya dengan selalu melihat dinamika perekonomian yang terjadi. Dari sisi perkembangan pembiayaan, walaupun saat ini pertumbuhan pembiayaan masih belum optimal, Bank Indonesia optimis di tahun 2018 masih terdapat potensi peningkatan, seiring dengan mulai terjadinya pemulihan harga komoditas.

Pada tahun 2018, perekonomian Indonesia tumbuh 5,18% (*year on year/yoy*), menguat dibandingkan 2017 sebesar 5,05%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar Sumber terbesar pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2018 adalah industri pengolahan, yakni 19,82 persen. Selain itu, disusul sektor perdagangan 13,00 persen, sektor konstruksi sebesar 11,11 persen, dan pertanian 4,91 persen.

Inflasi sampai dengan akhir 2018 tetap terkendali dan sesuai dengan kisaran sasaran inflasi Pemerintah sebesar $3 \pm 1\%$. Inflasi tahun 2018 tercatat sebesar 2,50% yoy, lebih rendah dari tahun 2017 3,61% yoy. Hal ini seiring dengan semakin kuatnya koordinasi Pemerintah dan Bank Indonesia dalam mendorong peningkatan produksi dan memperbaiki distribusi serta meminimalkan berbagai distorsi harga bahan pangan. Perkembangan harga berbagai komoditas pada Desember 2018 secara umum menunjukkan adanya penurunan dengan penurunan Indeks Harga Konsumen dari 131,28 pada Desember

2017 menjadi 103,29 pada Desember 2018.

Secara rata-rata, nilai tukar Rupiah melemah, kurs turun dari Rp13.536 (2017) menjadi Rp14.380 (2018). Pergerakan rupiah tersebut didukung oleh aliran modal asing yang cukup signifikan sejalan dengan perkembangan eksternal dan domestik yang positif.

Sinergi kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia telah mendorong optimisme pada perekonomian Indonesia. Hal tersebut terlihat pada inflasi yang diperkirakan terkendali, defisit neraca transaksi berjalan yang aman pada kisaran 2,0%-3,0% di tahun 2018 dan 2,5%-3,0% di tahun 2019, serta keseimbangan fiskal yang dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi berada dalam kisaran 5,1%-5,2% di tahun 2018, dan pada kisaran 5,3%-5,5% di tahun 2019.

Industri Perbankan Nasional

Aset perbankan nasional pada akhir tahun 2018 tercatat Rp8.068 triliun atau tumbuh 9,21% (*yoy*) dibanding tahun 2017 yang sebesar Rp7.387. Aset Bank Umum menguasai 96,11% pada 2017 bertambah menjadi 98,35% pada 2018, dan selebihnya 1,65% merupakan Aset Bank Perkreditan Rakyat.

Sampai akhir tahun 2018, perbankan nasional telah menghimpun DPK sebesar Rp5.630 triliun yang sebelumnya pada akhir tahun 2017 sebesar Rp5.289 triliun atau tumbuh 6,45% (*yoy*). Secara *market share*, DPK perbankan Bank Umum menguasai 98,30% terhadap DPK perbankan nasional. Sedangkan untuk periode yang sama, total kredit perbankan nasional tercatat Rp5.358 triliun, atau tumbuh 12,05% (*yoy*). Secara *market share*, kredit perbankan konvensional menguasai 94,33% terhadap total kredit perbankan nasional. Secara umum, rasio kinerja perbankan nasional pada akhir tahun 2018 terhadap 2017 terlihat dari Rasio LDR/FDR menjadi 94,78% dari 90,41%. Rasio pertumbuhan kredit mencapai 12,05% dari 8,36%, dengan Rasio NPL mencapai 2,57% dari 2,93%.

Industri Perbankan Syariah

Hingga akhir 2018, bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah mencapai 201 bank yang terdiri dari 14 bank umum syariah dan 20 unit usaha syariah serta 167 BPR syariah. Sampai Desember 2018, *market share* perbankan syariah terhadap perbankan nasional mencapai 5,95% atau dengan total aset Rp316 triliun. Secara aset, perbankan syariah mengalami *growth* sebesar 9,95% (*yoy*).

Pada periode yang sama, DPK perbankan syariah sudah mencapai Rp371 triliun atau tumbuh 11,03% (*yoy*). Secara *market share*, DPK perbankan syariah menguasai 6,60% terhadap total DPK perbankan nasional.

Dari sisi penyaluran dana, pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah per Desember 2018 sebesar 12,02%. Secara *market share*, posisi pembiayaan perbankan syariah mencapai Rp321 triliun atau menguasai 6,00% terhadap total pembiayaan perbankan nasional.

Halaman ini sengaja dikosongkan



Analisis Kinerja

ANALISIS KINERJA USAHA TAHUN 2018

Tinjauan keuangan yang diuraikan berikut ini mengacu pada Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 yang disajikan dalam laporan tahunan ini. Laporan keuangan 2018 dan 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (*an independent member of Moore Stephens International Limited*) dan mendapat opini wajar dalam semua hal yang material.

ASET BANK

Dengan berbagai kendala yang ada antara lain masih tingginya NPF, permodalan, Sumber Daya Insani dan proses bisnis serta jaringan yang masih belum banyak, Bank Victoria Syariah di tahun 2018 mampu melewati itu semua dengan baik dan menunjukkan pertumbuhan kinerja yang positif.

Total Aset Bank di tahun 2018 mengalami pertumbuhan sebesar 6,14% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu dari Rp 2.003.114,4 juta pada akhir tahun 2017, menjadi Rp 2.126.019,4 juta pada akhir tahun 2018.

Kontributor utama pertumbuhan aset di tahun 2018 terutama meningkatnya penempatan surat berharga yang naik sebesar Rp 88.140 juta atau 27,52%, yaitu dari Rp 320.282 juta di tahun 2017 menjadi Rp 408.422 juta di tahun 2018. Kenaikan aset juga karena meningkatnya Penempatan pada bank lain sebesar Rp 61.529 juta atau 29,62% dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp 207.710 juta menjadi Rp 269.239 juta di tahun 2018.

EFEK-EFEK (SURAT BERHARGA YANG DIMILIKI)

Bank Victoria Syariah berupaya meminimumkan "*idle Money*" dengan menempatkannya ke dalam instrument keuangan yang menghasilkan *return* yang menguntungkan dan aman, seperti penempatan pada surat-surat berharga berupa Obligasi yang dikeluarkan Pemerintah, Obligasi Korporasi maupun Surat Berharga Syariah Negara.

Untuk mengefektifkan peningkatan sumber dana dari pihak ketiga yang belum sepenuhnya dapat disalurkan di pembiayaan, Bank meningkatkan menginventarisasi penyaluran dana dengan pembelian obligasi ataupun Surat Berharga Syariah Negara. Total Surat berharga yang dimiliki Bank akhir 2018 adalah sebesar Rp 408.422,4 juta meningkat 27,52% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 320.282,4 juta.

Surat Berharga yang dimiliki 91,89% atau Rp 372.006,4 juta adalah dalam bentuk Surat Berharga Syariah Negara, dan sisanya sebesar Rp 36.416,0 juta dalam bentuk Sukuk korporasi.

Tingkat pengembalian rata-rata atas Surat Berharga Syariah Negara adalah sebesar 7,50% sampai dengan 11,50%. Sementara tingkat pengembalian rata-rata untuk Sukuk Korporasi adalah sebesar 5,45% sampai dengan 8,88%.

PEMBIAYAAN

Total pembiayaan yang disalurkan Bank Victoria Syariah sampai dengan akhir tahun 2018 adalah sebesar Rp. 1.234.571,4 juta, turun 2,25% atau Rp. 28.355,4 juta dibandingkan dengan posisi tahun 2017 yang sebesar Rp. 1.262.926,8 juta.

Pembiayaan pada tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Penyaluran pembiayaan dilakukan lebih selektif terutama pada sektor-sektor yang dinilai potensial dan mempunyai prospek yang baik. Dari sisi kualitas pembiayaan, Bank sangat serius menjaga dan melakukan perbaikan kualitas pembiayaan, upaya-upaya tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Bank sebagaimana target yang ditetapkan. Sehingga Bank sudah berhasil memperbaiki rasio NPF *Gross* dari 4,57% di tahun 2017 menjadi 4,00% di tahun 2018, sedangkan untuk rasio NPF *Nett* juga mengalami perbaikan dari 4,08 di tahun 2017 menjadi 3,46% di tahun 2018.

Pembiayaan berdasarkan Akad

Kontributor utama penurunan pembiayaan ini dikarenakan penurunan pembiayaan berakad Murabahah sebesar Rp 82.071,4 juta atau turun 25,20% dimana pada tahun sebelumnya sebesar Rp 325.631,4 juta di tahun 2017 menjadi Rp 243.560,0 juta di tahun 2018. Di sisi lain pada pembiayaan berakad Musyarakah mengalami kenaikan sebesar Rp. 62.405,4 juta atau 7,19% dari tahun 2017 yang sebesar Rp 868.014,4 juta menjadi Rp 930.419,4 juta di tahun 2018. Komposisi pembiayaan BVIS pada tahun 2018 dan 2017 berturut-turut sebagai berikut : Musyarakah 75,36% dan 68,73%, Murabahah 19,73% dan 25,78%, Mudharabah 4,60% dan 5,08% serta Ijarah 0,31% dan 0,40%.

Pembiayaan berdasarkan Penggunaan

Struktur komposisi pembiayaan yang disalurkan Bank di tahun 2018 berdasarkan jenis penggunaannya meliputi 80,52% untuk pembiayaan Modal Kerja, 13,12% untuk pembiayaan investasi dan sisanya 6,37% merupakan pembiayaan untuk konsumsi.

Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing – NPF)

Kualitas pembiayaan tahun 2018 mengalami perbaikan dibandingkan dengan tahun 2017. *Rasio Non Performing Financing (NPF) Gross* tahun 2018 adalah 4,00% atau turun dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 4,59%. Sedangkan untuk *Rasio Non Performing Financing (NPF) Nett* tahun 2018 adalah 3,46% atau turun dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 4,08%.

Berbagai upaya telah ditempuh bank untuk menekan pertumbuhan pembiayaan bermasalah tersebut, antara dengan meningkatkan *account management*, pola restrukturisasi, pembentukan team Divisi Aset Manajemen, tindakan *persuasive* dan melalui upday litigasi khususnya melalui lelang maupun aset sales.

Cadangan Kecukupan Penurunan Nilai (CKPN) yang dibentuk Bank

Mengantisipasi penurunan kualitas pembiayaan di tahun 2018, Bank membentuk tambahan Cadangan Kecukupan Penurunan Nilai (CKPN) yang mencukupi, sehingga rasio NPF *nett* dapat dijaga pada kisaran dibawah 3,50%.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai untuk pembiayaan yang telah dibentuk Bank adalah memadai untuk menutup kerugian yang timbul akibat tidak tertagihnya piutang.

Mutasi Cadangan Kecukupan Penurunan Nilai (CKPN) untuk masing-masing pembiayaan adalah sebagai berikut :

(dalam Jutaan Rupiah)

Mutasi CKPN Pembiayaan Murabahah	2018	2017	2016
Saldo Awal tahun	3.265	21.769	56.441
Pencadangan selama tahun berjalan	(2.903)	(7.235)	12.629
Penerimaan Kembali pembiayaan yang hapus buku	1.712	8.068	693
Penghapusan	-	(19.338)	(47.993)
Saldo Akhir tahun	2.073	3.265	21.769

Mutasi CKPN Pembiayaan Musyarakah	2018	2017	2016
Saldo Awal tahun	12.208	20.598	4.066
Pencadangan (pemulihan) selama tahun berjalan	215	5.580	18.050
Penerimaan Kembali pembiayaan yang hapus buku	0	4	-
Penghapusan	-	(13.974)	(1.518)
Saldo Akhir tahun	12.423	12.208	20.598

Mutasi CKPN Pembiayaan Mudharabah	2018	2017	2016
Saldo Awal tahun	712	64	64
Pencadangan (pemulihan) selama tahun berjalan	(53)	648	-
Penerimaan Kembali pembiayaan yang hapus buku	-	-	-
Penghapusan	-	-	-
Saldo Akhir tahun	659	712	64

PENGHIMPUNAN DANA PIHAK KETIGA

Total Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun bank tahun 2018 mencapai Rp. 1.491.441 juta, atau mengalami penurunan 1,30% bila dibandingkan dengan posisi tahun 2017. Penurunan Dana Pihak Ketiga tahun 2018 terutama disumbangkan dari deposito berjangka seiring dengan strategi Bank Victoria Syariah yang melakukan pengelolaan penghimpunan DPK untuk menjaga likuiditas sesuai dengan rasio FDR yang optimal dan seiring dengan semakin tingginya tingkat persaingan pemberian nisbah bagi hasil dana khususnya deposito di pasar, berdampak pada tingkat pertumbuhan dan tingginya pencairan dana pihak ketiga.

Kontributor dari penurunan DPK pada tahun 2018 bersumber dari Deposito Berjangka yang tercatat sebesar Rp. 1.391.088 juta, turun 2,72% dibandingkan dengan posisi yang sama pada tahun sebelumnya yang sebesar Rp 1.429.922 juta. Tingkat bagi hasil rata-rata pertahun untuk deposito adalah sebesar 4%-6%, mengalami perbaikan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 7%-8%.

Sementara itu untuk jenis dana CASA masih perlu dioptimalkan kembali agar memenuhi target diatas 10% dari DPK.

EKUITAS

Ekuitas Bank akhir tahun 2018 adalah sebesar Rp. 291.249 Juta, turun sebesar Rp. 8.143 Juta dibandingkan dengan

tahun 2017 yang sebesar Rp 299.393 juta. Penurunan ekuitas tahun 2018 terutama disebabkan karena menurunnya nilai yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang tersedia dijual, Di sisi lain bank juga membukukan laba tahun berjalan positif sebesar Rp 4.974 juta.

PENDAPATAN

Pendapatan Pengelolaan Dana Oleh Bank sebagai Mudharib.

Jumlah Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank Sebagai Mudharib BVIS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 169.987 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp 16.291 juta atau 10,60% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2016 yang sebesar Rp 153.695 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan dari pendapatan usaha lainnya yaitu sebesar Rp. 8.696 juta atau sebesar 27,45% dari Rp. 31.680 juta di tahun 2017 menjadi Rp 40.375 juta di tahun 2018. Kenaikan juga terjadi pada pendapatan dari penjualan murabahah yaitu sebesar Rp 5.922 juta atau sebesar 23,38% dari Rp 25.332 juta di tahun 2017 menjadi Rp 31.254 juta di tahun 2018.

Disamping itu pendapatan bagi hasil pembiayaan *multifinance* mengalami kenaikan sebesar 6,83% dari Rp 33.170 juta di tahun 2017 menjadi Rp 35.434 juta di tahun 2018. Sedangkan pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah menurun sebesar 30,44% dari Rp. 4.594 juta di tahun 2017 menjadi Rp. 3.446 juta pada tahun 2018.

(dalam Jutaan Rupiah)

POS PENDAPATAN	2018	2017	2016
Pendapatan dari penjualan murabahah	31.254	25.332	29.044
Pendapatan dari Bagi Hasil	97.781	96.028	69.403
Pendapatan dari Ijarah bersih	577	655	302
Pendapatan usaha utama lainnya	40.375	31.680	23.515
Jumlah Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib	169.987	153.695	122.263

Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer

Hak Pihak Ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer di tahun 2018 mengalami kenaikan Rp 8.202 Juta atau 8,12% dibanding dengan tahun 2017, dari sebesar Rp. 101.060 juta ditahun 2017 naik menjadi Rp. 109.262 Juta pada tahun 2018. Faktor utama kenaikan ini disebabkan karena kenaikan beban bagi hasil pada Deposito, hal ini sejalan dengan semakin tingginya tingkat persaingan pemberian nisbah bagi hasil dana khususnya deposito di pasar, meskipun manajemen sudah berusaha untuk melakukan penurunan nisbah bagi hasil agar beban bisa diefisienkan, disamping itu kebijakan manajemen juga menjaga rasio FDR sehingga masih berada pada kisaran 82,78% sehingga likuiditas masih bisa terjaga.

(dalam Jutaan Rupiah)

POS PENDAPATAN	2018	2017	2016
SIMA	5.061	1.278	3.398
Giro	571	473	1.493
Tabungan Mudharabah	785	791	2.486
Deposito Mudharabah	102.846	98.518	76.719
Total Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil dana Syirkah temporer	109.262	101.060	84.096

Beban Operasional Lainnya

Jumlah Beban Operasional Lainnya tahun 2018 adalah sebesar Rp 56.195 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp 6.483 juta atau 13,04% dibandingkan dengan tahun 2017 yang sebesar Rp 49.712 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Beban CKPN sebesar Rp 2.825 juta atau 471,67% dibandingkan tahun 2017 yang

mengalami pemulihan sebesar Rp 599 juta di tahun 2017 menjadi Rp 2.226 juta di tahun 2017.

(dalam Jutaan Rupiah)

POS PENDAPATAN	2018	2017	2016
Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	2.226	(599)	31.614
Beban Personalia	30.695	29.903	27.162
Beban Umum dan Administrasi	20.705	18.886	18.396
Beban Lainnya	2.569	1.522	582
Total Beban Operasional Lainnya	56.195	49.712	77.754

Laba (Rugi)

Jumlah laba bersih Bank Victoria Syariah pada tahun 2018 sebesar Rp. 4.974 juta atau naik 8,29% dibandingkan tahun 2017 yang sebesar Rp. 4.593 juta. Kenaikan ini disebabkan oleh kontribusi kenaikan pendapatan pengelolaan dana sebesar Rp. 16.291 juta dan pendapatan non operasional sebesar Rp. 274 juta serta penurunan biaya pajak tangguhan sebesar Rp. 143 juta meskipun terdapat penurunan pendapatan operasional lainnya sebesar Rp. 1.644 juta dan kenaikan beban operasional lainnya sebesar Rp. 6.483 juta.

RENCANA STRATEGIS KE DEPAN

Menyadari beratnya tantangan ke depan, maka kebijakan Bank kedepan adalah menitikberatkan pada percepatan pertumbuhan bisnis yang berkualitas, sehat dan berkesinambungan.

Untuk itu, kebijakan dan strategi bank dalam Rencana Bisnis Bank baik jangka menengah maupun jangka panjang akan didasarkan pada *road map* yang meliputi antara lain percepatan pertumbuhan pembiayaan dengan tetap memperhatikan kualitasnya, percepatan dan perbaikan proses bisnis, penyempurnaan organisasi, strategi pengembangan jaringan, diversifikasi produk serta program program efisiensi dan produktivitas.

Beberapa kebijakan menjadi titik sentral seperti penguatan infrastruktur dan SDI, antara lain peningkatan dan kapabilitas SDI, pengembangan talent, *technical skill* dan kompetensi dan pengembangan TI yang mendukung bisnis dan layanan.

Dengan *road map* sebagaimana tersebut di atas, maka pertumbuhan bisnis Bank Victoria Syariah kedepan diproyeksikan dapat bertumbuh diatas rata-rata pertumbuhan industri perbankan nasional.

Bank Victoria Syariah mempunyai keyakinan positif untuk melangkah kedepan dengan memanfaatkan potensi dan peluang bisnis perbankan yang ada guna pencapaian kinerja yang terbaik.

Berdasarkan optimis di atas, Perumusan rencana strategis Bank Victoria Syariah kedepan senantiasa berprinsip dan berpedoman pada aspek-aspek sebagai berikut :

- Fokus pada *core competence* yang dimiliki.
- Menyesuaikan terhadap perubahan bisnis dengan memberikan layanan sesuai kebutuhan nasabah.
- Memberikan pelayanan yang prima (*service excellence*) kepada para nasabah.

SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN

Pada periode selanjutnya Bank akan menjaga pertumbuhan bisnis dan kinerja usaha yang lebih berkualitas. Upaya-upaya perbaikan proses dilakukan pada berbagai aspek baik sisi bisnis, operasional, dan pendukung lainnya serta

SDI akan terus didorong untuk mencapai kinerja usaha yang lebih baik dibandingkan dengan pencapaian tahun 2018.

Dalam 3 tahun kedepan Bank Victoria Syariah diarahkan telah mempunyai landasan yang kokoh untuk menjadi Bank syariah berskala menengah serta mempunyai brand image yang baik ditengah masyarakat.

Sejalan dengan arah kebijakan Bank di atas, Bank telah menetapkan langkah-langkah strategis yang sekurangnya menyangkut 9 (Sembilan) aspek besar sebagai berikut :

Meningkatkan sinergi dengan grup (*Leverage Sinergy Opportunities with in Group*)

- Menjaga kualitas aset (*Improve Asset Quality*)
- Meningkatkan dan memperkuat program produk ritel dan Nasabah Baru (*Increase Retail Funding and New To Bank (NTB)*)
- Mengembangkan kompetensi karyawan yang berkelanjutan (*Improve People Capabilities*)
- Meningkatkan pertumbuhan dan menjaga alur proses pembiayaan yang sehat dan berkelanjutan (*Improve Financing Turn Around Time (TAT)*)
- Mengoptimalkan peranan operasional support dan teknologi sistem informasi (*Improve Back office support and IT enhancement*)
- Menerapkan budaya kerja perusahaan secara berkelanjutan (*Building Corporate Culture*)
- Menerapkan Tata Kelola Yang Baik, Kepedulian Risiko dan Budaya Kepatuhan (*Building Good Governance, Risk Awareness and Compliance Culture*)
- Meningkatkan produktivitas dan efisiensi dengan memperbaiki *Service Level Agreement* (*Improve Productivity and efficiency*)





Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan

Komitmen Bank Victoria Syariah dalam Tata Kelola Perusahaan

Kerangka Kerja Bank Victoria Syariah dalam Tata Kelola Perusahaan

Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme atau Prinsip Mengenal Nasabah

Rapat Umum Pemegang Saham

Dewan Komisaris

Komite-komite di Bawah Dewan Komisaris

Direksi

Komite Eksekutif Direksi

Dewan Pengawas Syariah

Penerapan Fungsi Kepatuhan

Fungsi Audit Internal atau Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)

Penyimpangan Internal

Audit Eksternal

Penerapan Manajemen Risiko

Pengendalian Internal

Permasalahan Hukum

Nilai-Nilai Budaya Perusahaan

Transaksi dengan Benturan Kepentingan

Kode Etik

Perlindungan Nasabah

Keterbukaan Informasi

Sekretaris Perusahaan

Penilaian GCG Secara *Self Assessment*

Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Manajemen Risiko Tahun 2018



Tata Kelola Perusahaan

1. Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan

Pelaksanaan dan penerapan *Good Corporate Governance* perseroan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPBs tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.8/POJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Secara umum, Bank Victoria Syariah telah menerapkan prinsip-prinsip dasar GCG yang mencakup *transparency, accountability, responsibility, professional, independency* dan *fairness*, dengan keyakinan bahwa hal ini akan menjamin terciptanya peningkatan kualitas pelaksanaan GCG yang merupakan salah satu upaya untuk memperkuat industri perbankan syariah.

2. Komitmen Bank Victoria Syariah dalam Tata Kelola Perusahaan

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas Bank Victoria Syariah dan keragaman produk dan jasa yang ditawarkan, menjadikan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) sangat penting untuk diterapkan guna membangun kepercayaan yang lebih baik dan memberikan kepuasan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Bank Victoria Syariah memiliki Parameter Keberhasilan Bank dalam mencapai Tata Kelola Perusahaan yang baik dan menyadari bahwa setiap individu di dalam organisasi dapat maju apabila perusahaan memiliki budaya kerja yang positif, yang bergantung dari dukungan, kontribusi, dan komitmen dari Sumber Daya Insani Bank yang berkualitas serta memiliki kompetensi yang tepat dalam memaksimalkan kinerja organisasi.

Bank Victoria Syariah terus mendorong Sumber Daya Insani untuk selalu berkarya dengan menerapkan nilai-nilai perusahaan yaitu *honest, energetic, brilliant, accurate* dan *trust* atau HEBAT

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang diiringi dengan penerapan nilai-nilai perusahaan secara konsisten dapat memacu kinerja Bank Victoria Syariah yang akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan nasabah serta melindungi kepentingan *stakeholder*.

Bank Victoria Syariah menyadari bahwa peningkatan implementasi Tata Kelola Perusahaan mendorong peningkatan kinerja Perseroan secara keseluruhan. Kinerja Perseroan yang dicapai pada periode 2018 sebagai berikut.

1. Laba Bersih mencapai Rp.4,9 Miliar
2. Pertumbuhan Aset 6,14% menjadi Rp. 2.126 Miliar
3. Pembiayaan menjadi Rp 1.235 Miliar
4. Dana Pihak Ketiga menjadi Rp 1.491 Miliar
5. Total Ekuitas menjadi Rp 291 Miliar
6. *Non Performing Financing* (NPF) Netto 3,46.%.

Disamping capaian tersebut di atas adalah perolehan 3 (tiga) penghargaan dari lembaga terpercaya yang membuktikan bahwa Bank Victoria Syariah diakui telah melaksanakan Tata kelola Perusahaan dengan baik.

3. Kerangka Kerja Bank Victoria Syariah dalam Tata Kelola Perusahaan

Bank Victoria Syariah senantiasa melakukan penguatan proses penerapan GCG yang dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten dari waktu ke waktu. Penguatan Penerapan GCG mengacu kepada regulasi yang ditetapkan Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa keuangan (OJK). Dan langkah strategis dan rencana bisnis bank disusun sebagai acuan untuk mencapai tujuan yang sejalan dengan visi dan misi dan nilai-nilai Bank Victoria Syariah.

Deklarasi Anti *Fraud*

Bank Victoria Syariah menyatakan komitmennya untuk melakukan bisnis yang sesuai dengan kode etik dan standar hukum yang tinggi dan tidak melakukan tindakan *fraud* dan tindakan tidak sesuai lainnya.

Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*)

Bank Victoria Syariah dalam melaksanakan Pedoman Etika dan Perilaku menerapkan standar etika yang merupakan suatu kerangka ekspektasi dimana semua karyawan dan manajemen Bank diharapkan untuk bertindak sesuai kerangka ekspektasi tersebut. Pedoman Etika dan Perilaku berfungsi sebagai pedoman dasar yang berlaku bagi seluruh karyawan dan manajemen Bank Victoria Syariah serta dikaji secara berkala agar sesuai dengan lingkungan Bank Victoria Syariah yang dinamis dan menyesuaikan dengan Kebijakan Anti *Fraud*.

Customer Awareness

Bank Victoria Syariah melaksanakan edukasi untuk meningkatkan *customer awareness* dengan melalui pemasangan *banner* di Cabang dengan maksud mengingatkan nasabah atas penggunaan layanan yang benar dan tepat, termasuk tanggung jawab ke dua belah pihak baik bank maupun nasabah. Dan juga Bank Victoria Syariah turut aktif mendukung Program Literasi dan Inklusi Keuangan yang diharapkan dapat meningkatkan *customer awareness* pula.

Penerapan Anti Pencucian Uang dan Prinsip Mengenal Nasabah di Bank Victoria Syariah dilaksanakan mengacu pada ketentuan Undang-undang No 8 Tahun 2010 (UU TPPU) tentang Tindak Pidana Pencucian Uang serta

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

4. Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme atau Prinsip Mengenal Nasabah

Dalam rangka menerapkan APU-PPT atau Prinsip Mengenal Nasabah, secara konsisten dan berkelanjutan Unit Kerja APU-PPT Bank Victoria Syariah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- Menyusun program-program dalam rangka penerapan APU-PPT dan Prinsip Mengenal Nasabah.
- Menyusun kebijakan dan prosedur APU-PPT dan Prinsip Mengenal Nasabah.
- Melaksanakan program pelatihan dan sosialisasi APU-PPT dan Prinsip Mengenal Nasabah untuk seluruh karyawan.
- Melakukan pengawasan/audit terhadap penerapan APU-PPT dan Prinsip Mengenal Nasabah
- Menyiapkan organisasi yang bertanggung jawab atas penerapan APU-PPT dan Prinsip Mengenal Nasabah.
- Menyiapkan sistem teknologi informasi untuk mendukung penerapan APU-PPT dan Prinsip Mengenal Nasabah

Melalui upaya-upaya sebagaimana dijelaskan di atas, Bank Victoria Syariah berkomitmen penuh untuk mendukung program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

5. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah salah satu organ di dalam Bank sebagai Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi.

RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya atau disebut RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir sedangkan RUPS lainnya dapat diselenggarakan sewaktu-waktu atas permintaan Direksi ataupun Pemegang Saham dengan hak suara minimal 10% dari total hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, Agenda RUPS Luar Biasa juga bermacam-macam tergantung pada urgensi kepentingan Perseroan pada saat itu misalnya akan merubah susunan Direksi dan Komisarisnya, merubah nama, tempat kedudukan, jangka waktu berdirinya perseroan, dan lain-lain.

Sesuai Anggaran Dasar Bank Victoria Syariah, dalam RUPS Tahunan, Direksi menyampaikan antara lain:

- Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan untuk memperoleh persetujuan dari Pemegang

- Saham sekaligus pembebasan tanggung jawab para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan perseroan.
- Usulan penggunaan laba jika Bank mempunyai saldo laba yang positif.
- Usulan penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan meng-audit buku-buku Bank untuk tahun yang akan datang; dan

Hal-hal lain sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

Dalam setiap penyelenggaraan RUPS, Bank Victoria Syariah senantiasa berpedoman pada peraturan OJK dan Anggaran Dasar Bank, antara lain:

- Kepada para Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan usul mata acara RUPS sesuai dengan peraturan OJK dan Anggaran Dasar.
- Pengumuman RUPS telah mencakup informasi mengenai ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS, ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS, tanggal penyelenggaraan dan tanggal pemanggilan RUPS
- Pemanggilan RUPS telah mencakup informasi mengenai tanggal penyelenggaraan, waktu dan tempat penyelenggaraan, ketentuan Pemegang Saham yang berhak hadir, mata acara termasuk penjelasan atas setiap mata acara RUPS dan informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan sampai dengan RUPS diselenggarakan.
- Pemegang Saham juga dapat melihat Pengumuman, Pemanggilan beserta materi RUPS lainnya melalui media masa terkait.

A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Sepanjang tahun 2018 Bank telah menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan, yaitu pada tanggal 18 Mei 2018.

Mata Acara dan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 18 Mei 2018 adalah sebagai berikut:

Mata Acara RUPS Tahunan

- Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan Pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas dan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas).
- Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) dan Penetapan Honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.

Keputusan RUPS Tahunan

- Mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan Pengesahan Laporan Keuangan serta laporan Tugas dan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun Buku yang berakhir

pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas).

2. Bahwa Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2018 dan Penetapan Honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya, untuk persetujuannya akan didelegasikan kepada Dewan Komisaris.

Penyelenggaraan RUPS Tahunan tersebut telah dibuatkan berita acara rapatnya, berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Tahunan No.29 tanggal 18 Mei 2018, yang dibuat dihadapan Surjadi,SH.,MKn.,MM. Notaris di Jakarta.

B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Sepanjang tahun 2018 Bank telah menyelenggarakan 2 (dua) kali RUPS-LB, yaitu pada tanggal 18 Mei 2018 dan 28 Desember 2018.

Mata Acara dan Keputusan RUPS-LB tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- i. Tanggal 18 Mei 2018 yaitu :
 - Perubahan pasal 14 ayat 9 point b Anggaran Dasar Perseroan perihal Tugas dan Wewenang Direksi.
 - Pengangkatan kembali Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
 - Pengangkatan Kembali Anggota Dewan Pengawas Syariah.
- ii. Tanggal 28 Desember 2018 yaitu:
 - Penambahan Modal Disetor Perseroan sebesar Rp. 50 Milyar

Keputusan RUPS Luar Biasa

- i. Menyetujui perubahan pasal 14 ayat 9 point b Anggaran Dasar Perseroan perihal Tugas dan Wewenang Direksi.
- ii. Menyetujui Pengangkatan kembali Anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Victoria Syariah menjadi sebagai berikut:
 - Direksi Perseroan :
 - Direktur Utama : Firman Ananda Moeis
 - Direktur : Andy Sundoro
 - Direktur : Deddy Effendi Ridwan
 - Direktur Kepatuhan : Nurani Raswindriati
 - Dewan Komisaris Perseroan :
 - Komisaris Utama/
 - Komisaris Independen : Sugiharto
 - Komisaris Independen : Djoko Nugroho
 - Komisaris : Sari IdayantiDengan masa jabatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut diatas berlaku sampai dengan ditutupnya atau dilaksanakannya RUPS Tahunan pada tahun 2020.
- iii. Menyetujui pengangkatan kembali Anggota Dewan Pengawas Syariah, menjadi sebagai berikut:
 - Ketua : Prof.DR.H.Hasanuddin AF, MA
 - Anggota : Prof.DR. Huzaima Tahido Yanggo

Dengan masa jabatan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut diatas berlaku sampai dengan ditutupnya atau dilaksanakannya RUPS Tahunan pada tahun 2020.

- iv. Menyetujui penambahan Modal ditempatkan dan disetor dari perseroan terbatas PT. Bank Victoria International, Tbk selaku pemegang saham pengendali sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) atau sejumlah 50.000.000 (lima puluh juta) lembar saham sehingga perseroan terbatas PT. Bank Victoria International, Tbk tersebut selaku pemegang saham pengendali memiliki/memegang Rp. 359.982.683.000,- atau 359.982.683 lembar saham yang mana penyetoran modal tersebut efektif dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Penyelenggaraan RUPS-LB tersebut telah dibuatkan berita acara rapatnya, berdasarkan Akta Berita Acara RUPS-LB, yang dituangkan dalam akta yaitu sebagai berikut:

- i. Akta Notaris No. 30 tanggal 18 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Surjadi,SH.,MKn.,MM Notaris di Jakarta
- ii. Akta Notaris No. 09 tanggal 9 Januari 2019 yang dibuat dihadapan Ririn, SH pengganti Suwarni Sukirman, SH Notaris di Jakarta.

6. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam pelaksanaannya Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama sebagaimana dalam SK Dewan Komisaris No.047/DEKOM/JKT/ VII/2017 dan SK Direksi No. 035/DIR-SK/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 beserta perubahannya dalam SK Dewan Komisaris No.001/DEKOM/JKT/II/2018 dan SK Direksi No.002/DIR-SK/II/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*).

a. Komposisi dan Kriteria Anggota Dewan Komisaris
Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013, komposisi anggota Dewan Komisaris ditetapkan sebagai berikut:

- i. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga orang) dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
- ii. Paling kurang 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia.
- iii. Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama
- iv. Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen

Berdasarkan hasil RUPS Luar Biasa yang dituangkan dalam Akta Notaril Risalah RUPS Luar Biasa PT. Bank Victoria Syariah No. 30 tanggal 18 Mei 2018 yang dibuat oleh Notaris Surjadi,SH.,MKn.,MM di Jakarta menyetujui pengangkatan kembali Anggota Dewan Komisaris, terdiri atas:

No.	Nama Dewan Komisaris	Jabatan
1	Sugiharto	Komisaris Utama/ Komisaris Independen
2	Djoko Nugroho	Komisaris Independen
3	Sari Idayanti	Komisaris

Susunan anggota Dewan Komisaris Bank telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan terdiri dari 3 (tiga) orang Dewan Komisaris yang kesemuanya berdomisili di Indonesia dan 2 (dua) orang merupakan Komisaris Independen dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi.

Dengan demikian anggota Dewan Komisaris memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.

b. Independensi Dewan Komisaris

Dalam rangka keterbukaan informasi dan pengungkapan hubungan keuangan dan kepengurusan berdasarkan ketentuan GCG, seluruh anggota Dewan Komisaris Bank tidak memiliki hubungan keuangan dan kekeluargaan dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali.

Terkait dengan pengungkapan rangkap jabatan Dewan Komisaris, sampai dengan akhir Desember 2018 Dewan Komisaris Bank tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain melebihi batas maksimum yang diperkenankan sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku.

Dewan Komisaris tidak pernah memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Bank, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS.

c. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- Mengawasi dan memastikan terselenggaranya GCG dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasehat/arahan kepada seluruh Direksi.
- Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank.
- Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali penyediaan dana kepada pihak terkait atau pemberian kredit

melebihi batas jumlah yang ditentukan serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka pelaksanaan tugas dan pengawasan.

- Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

d. Kewenangan Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris memiliki kewenangan melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, antara lain sebagai berikut:

- Meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal mengenai Perusahaan
- Berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris berhak memberhentikan untuk sementara anggota Direksi
- Melakukan tindakan pengurusan perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu
- Menyetujui beberapa kebijakan perusahaan mengacu pada ketetapan otoritas yang berwenang
- Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko
- Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris karena anggota lainnya berhalangan, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris lainnya dalam anggaran dasar berlaku pula baginya.
- Meminta bantuan tenaga ahli dalam jangka waktu terbatas.

e. Board Manual

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bank sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama Nomor 047/DEKOM/JKT/VII/2017 dan Nomor 035/DIR-SK/JKT/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 beserta perubahannya dalam SK Dewan Komisaris No.001/DEKOM/JKT/II/2018 dan SK Direksi No.002/DIR-SK/II/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*), yang mengatur mengenai Organisasi (jumlah, komposisi, kriteria, pengangkatan, dan masa jabatan), Tugas Tanggung jawab dan Wewenang, Penyelenggaraan Rapat, Penilaian Kinerja dan Standar Etika.

f. Masa Jabatan Dewan Komisaris

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 03 tanggal 18 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Surjadi,SH.,MKn.,MM. di Jakarta, masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris berlaku sampai dengan ditutupnya atau dilaksanakannya RUPS Tahunan pada tahun 2020.

g. Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris

- Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan

melalui data yang diperoleh dari sistem informasi manajemen, laporan-laporan rutin, informasi lainnya, dan hasil pemantauan/ review oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko maupun Komite Remunerasi dan Nominasi. Dan Pemberian arahan/nasehat/rekomendasi oleh Dewan Komisaris dilakukan dengan memorandum maupun secara langsung dalam kesempatan rapat dengan Direksi.

- ii. Dalam tahun 2018, Dewan Komisaris telah memberikan arahan/rekomendasi kepada Direksi, antara lain: mengenai penyusunan rencana bisnis bank, evaluasi pencapaian target bisnis bank, penunjukan Kantor Akuntan Publik, pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, perbaikan GCG, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh regulator, KAP dan SKAI.
- iii. Membuat revisi Keputusan Dewan Komisaris tentang Wewenang dan Prosedur Komite Pembiayaan Tingkat Direksi, Pedoman Komite-Komite Dewan Komisaris, mengesahkan revisi dan beberapa pedoman/kebijakan bank.
- iv. Membuat laporan yang wajib disampaikan kepada regulator.
- v. Menyetujui pemberian/perpanjangan pembiayaan dalam rangka pengawasan di atas jumlah tertentu.
- vi. Menjalankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik pada seluruh kegiatan Bank Victoria Syariah dan melanjutkan penyelarasan (harmonisasi) dengan ketentuan OJK sebagai bagian dari upaya meningkatkan nilai Bank Victoria Syariah.

h. Rapat Kerja Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Selain itu, Dewan Komisaris juga secara berkala mengundang Dewan Direksi untuk melakukan Rapat Gabungan untuk membicarakan kinerja dan perkembangan Bank secara umum. Selama periode tahun 2018, telah dilakukan rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris seperti pada tabel berikut:

NAMA PEJABAT	Rapat Dewan Komisaris		Rapat Dewan Komisaris Dengan Direksi	
	Jumlah kehadiran	Persentase	Jumlah Kehadiran	Persentase
Sugiharto	8	100%	10	100%
Djoko Nugroho	8	100%	9	90%
Sari Idayanti	8	100%	10	100%
Total Rapat	8		10	

- Seluruh rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris berlokasi di Jakarta.
- Keputusan dalam setiap rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris serta rapat-rapat Komite dibawah Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

i. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Tidak terdapat kepemilikan saham Dewan Komisaris pada Bank.

7. Komite-Komite Dibawah Dewan Komisaris

Sesuai dengan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, dalam membantu tugasnya, Dewan Komisaris membentuk komite-komite sebagai berikut:

a. Komite Audit

i. Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan-laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain meliputi :

- Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- Melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit ekstern.
- Melakukan evaluasi terhadap Pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh fungsi audit intern.
- Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, Auditor intern, Dewan pengawas syariah dan/atau audit ekstern, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris.
- Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris dan melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.

ii. Struktur, Komposisi, Keahlian dan Independensi Komite

- Struktur

Dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi pada tanggal 25 September 2018 No. 055/DIR-SK/JKT/IX/2018, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua Komite	: Sugiharto
Anggota	: Sari Idayanti
Anggota	: Retno Dwiyantri Widaningsih
Anggota	: Teguh Sukaryanto

- Susunan, komposisi, keahlian dan independensi anggota Komite Audit Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
 - Komite Audit telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Kerja yang akan terus diperbaharui apabila ada perubahan peraturan perundang-undangan.
 - Susunan, komposisi, keahlian dan independensi anggota Komite Audit Bank mengacu/sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- iii. Rapat Komite
- Selama tahun 2018, Komite Audit telah melaksanakan rapat yang dihadiri oleh mayoritas anggota Komite, sebanyak 15 (lima belas) kali rapat dengan agenda, yaitu :
1. Penelaahan atas Laporan Hasil Pemeriksaan SKAI terhadap Kantor Cabang Tegal dilaksanakan tanggal 25 Januari 2018.
 2. Pembahasan atas draft final hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Bank oleh KAP Mirawati Sensi Idris 22 Februari 2018
 3. Penelaahan LHP SKAI KC Denpasar posisi 28 Februari 2018 dilaksanakan tanggal 19 Maret 2018.
 4. Penelaahan LHP SKAI Unit Kerja Treasury posisi 31 Januari 2018 dilaksanakan tanggal 2 April 2018.
 5. Penelaahan LHP SKAI KC Bekasi posisi 31 Desember 2017 dilaksanakan tanggal 14 Mei 2018.
 6. Penelaahan LHP SKAI KC Utama posisi 28 Februari 2018 dilaksanakan tanggal 21 Mei 2018.
 7. Penelaahan LHP SKAI Divisi Reviu Pembiayaan posisi 31 Maret 2018 dilaksanakan tanggal 16 Juli 2018.
 8. Rapat Koordinasi membahas penunjukan KAP & AP untuk General Audit atas Laporan Keuangan BVIS tahun buku 31 Desember 2018 dilaksanakan tanggal 30 Juli 2018.
 9. Penelaahan LHP SKAI Divisi Keuangan & Umum posisi 30 Mei 2018 dilaksanakan tanggal 30 Juli 2018.
 10. Penelaahan LHP SKAI Divisi Operasional posisi 30 Juni 2018 dilaksanakan tanggal 23 Agustus 2018.
 11. Penelaahan LHP SKAI KC Serang posisi 31 Maret 2018 dilaksanakan tanggal 23 Agustus 2018.
 12. Penelaahan LHP Unit Kerja Pengendalian Internal – Divisi Manajemen Risiko periode Juli 2018 dilaksanakan tanggal 24 September 2018.
 13. Penelaahan LHP SKAI KCP Tebet posisi 31 Agustus 2018 dilaksanakan tanggal 29 November 2018.
14. Penelaahan LHP SKAI KCP Kramat Jati posisi 30 September 2018 dilaksanakan tanggal 20 Desember 2018.
 15. Penelaahan LHP SKAI KCP Depok posisi 30 September 2018 dilaksanakan tanggal 20 Desember 2018.
- b. Komite Pemantau Risiko
- i. Tugas dan Tanggung Jawab
 - Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dalam penyusunan dan perbaikan kebijakan manajemen risiko yang berkaitan dengan pengendalian risiko dibidang pengelolaan asset & liability, likuiditas, pembiayaan serta operasional.
 - Melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko.
 - Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
 - Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
 - Memastikan telah dipertimbangkannya segala risiko yang penting dalam produk-produk Bank yang baru dan segala dampak adanya perubahan atau kejadian yang signifikan baik yang berasal dari internal maupun eksternal Bank.
 - Melakukan kajian draft laporan triwulanan profil risiko Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 - Melakukan diskusi dengan Direksi atau unit kerja yang terkait dengan manajemen risiko, bila diperlukan.
 - ii. Struktur, Komposisi, Keahlian dan Independensi Komite
 - Struktur
Dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi pada tanggal 25 September 2018 No. 056/DIR-SK/JKT/IX/2018, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
Ketua Komite : Djoko Nugroho
Anggota : Retno Dwiyantri Widaningsih
Anggota : Teguh Sukaryanto
 - Susunan, komposisi, keahlian dan independensi anggota Komite Pemantau Risiko Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
 - iii. Rapat Komite
Selama tahun 2018, Komite Pemantau Risiko telah dapat melaksanakan rapat yang dihadiri oleh mayoritas anggota Komite, sebanyak 17 (tujuh belas) kali rapat. Berdasarkan dokumen dan data yang tercantum dalam risalah rapat Komite Pemantau Risiko, diketahui bahwa pembahasan yang telah dilakukan oleh Komite Pemantau Risiko selama tahun 2018, antara lain sebagai berikut:

1. Membahas penyelesaian TBO Desember 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2018
2. Membahas draft Final hasil pemeriksaan Lap Keuangan Bank tahun 2017 oleh KAP Mirawati Sensi & Idris yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2018
3. Membahas TKS dan Profil Risiko Bank posisi 31 Desember 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2018
4. Penelaahan laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan semester II 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2018
5. Penelaahan penyelesaian Dokumen TBO yang dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2018
6. Membuat Keputusan pemberian pembiayaan kepada pihak terkait BVIS yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2018
7. Membahas penyelesaian terkait kekurangan dokumen untuk di follow up yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2018
8. Penelaahan profil Risiko Bank per 31 Maret 2018 yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2018
9. Membahas penyelesaian kekurangan dokumen untuk di follow up yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2018
10. Penelaahan laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan TW I 2018 yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2018
11. Membahas evaluasi kinerja rekanan tahunan dan evaluasi calon perusahaan penilai rekanan BVIS yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2018
12. Penelaahan profil Risiko Bank per 30 Juni 2018 yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2018
13. Penelaahan laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan semester I 2018 yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2018
14. Penelaahan action plan pelampauan BMPD yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2018
15. Penelaahan profil Risiko Bank per 30 September 2018 yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2018
16. Penelaahan laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan TW III 2018 yang dilaksanakan pada tanggal 08 November 2018
17. Membahas rencana Kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 2018

c. Komite Remunerasi dan Nominasi

i. Tugas dan Tanggung Jawab

- Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris

dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

- Melakukan evaluasi Kebijakan remunerasi bagi Pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi, wajib memperhatikan Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum pemegang Saham (RUPS).

ii. Struktur, Komposisi, Keahlian dan Independensi Komite

- Struktur

Dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 25 September 2018 No. 057/DIR-SK/JKT/IX/2018 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:sebagai berikut:

Ketua Komite : Sugiharto

Anggota : Sari Idayanti

Anggota : M.Rinaldi Taufik.S

- Susunan, komposisi, keahlian dan independensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

iii. Rapat Komite

Selama tahun 2018, Komite Remunerasi dan Nominasi telah dapat melaksanakan rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite, sebanyak 5 (lima) kali.

- Rapat Komite yang dilaksanakan membahas dan merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:
- Pengkinian struktur organisasi sehubungan dengan adanya perkembangan karyawan.
- Berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atas karyawan bernama Supriyono dan Pangulu O. Simorangkir.
- Key Performance Indicator (KPI) untuk seluruh karyawan.
- Kandidat komite audit.
- Tindak lanjut atas komentar OJK.
- Usulan menyeragamkan fasilitas Direksi.
- Struktur organisasi.
- Kenaikan UMP 2019
- Pembenahan administratif Sumber Daya

Insani terkait panduan penerimaan karyawan baru, formulir standar untuk mutasi dan promosi karyawan.

- Pemberian tunjangan transportasi untuk kepala divisi.
- Pelaksanaan pelatihan Prinsip Dasar Perbankan Syariah (PDPS)
- Pelaksanaan sertifikasi manajemen risiko dan *treasury*.
- Evaluasi pencapaian kinerja karyawan
- Mutasi dan Promosi karyawan
- Hasil *Assesment* direksi terhadap calon *account officer* Kantor Cabang Tegal
- Pelaksanaan kontrak kerjasama dengan konsultan syariah eksternal.

8. Direksi

Direksi merupakan organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan, serta mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar serta mengelola perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam pelaksanaannya Tugas dan Tanggung Jawab Direksi diatur dalam Surat Keputusan Bersama sebagaimana dalam SK Dewan Komisaris No.047/DEKOM/JKT/VII/2017 dan SK Direksi No. 035/DIR-SK/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 beserta perubahannya dalam SK Dewan Komisaris No.001/DEKOM/JKT/II/2018 dan SK Direksi No.002/DIR-SK/II/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*).

a. Komposisi dan Kriteria Anggota Direksi

Sampai dengan akhir tahun 2018, susunan komposisi anggota Direksi sesuai hasil keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 18 Mei 2018 dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013.

Anggota Direksi Bank diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah mempertimbangkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi. Masa jabatan anggota Direksi berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS serta berakhir pada saat ditutupnya RUPS ke-2 (dua) setelah tanggal pengangkatan. Apabila terdapat penambahan/penggantian anggota Direksi, masa kerja anggota Direksi tersebut dimulai sejak tanggal ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan berakhir pada tanggal yang sama dengan masa kerja anggota Direksi lainnya.

Anggaran Dasar menetapkan bahwa Anggota Direksi

yang masa kerjanya telah berakhir dapat dipilih kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk 2 (dua) tahun berikutnya. Pengangkatan anggota Direksi dinyatakan efektif setelah dinyatakan lulus *fit and proper test* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil RUPS Luar Biasa yang dituangkan dalam Akta Notaril Risalah RUPS Luar Biasa PT. Bank Victoria Syariah No. 30 tanggal 18 Mei 2018 yang dibuat oleh Notaris Surjadi,SH.,MKn.,MM di Jakarta menyetujui pengangkatan kembali Anggota Direksi. Seluruh anggota Direksi diangkat dan diberhentikan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, terdiri atas:

No.	Nama Direksi	Jabatan
1	Firman A. Moeis	Direktur Utama
2	Andy Sundoro	Direktur
3	Deddy Effendi Ridwan	Direktur
4	Nurani Raswindriati	Direktur Kepatuhan

b. Independensi Direksi

Anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi lain.

Terkait dengan ketentuan perangkapan jabatan, seluruh anggota Direksi Bank tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank maupun lembaga keuangan lain. Selain hal tersebut, dalam pelaksanaan tugasnya Direksi Bank selalu menjaga independensi antara lain:

- Tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan baik proyek yang bersifat umum maupun proyek yang bersifat khusus.
- Tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- Tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau pihak lain yang dapat mengurangi asset atau mengurangi keuntungan Bank.
- Tidak mengambil atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

c. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan merujuk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan khususnya ketentuan-ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama SK Dewan Komisaris No. 047/DEKOM/JKT/VII/2017 dan SK Direksi No. 035/DIR-SK/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 beserta perubahannya dalam SK Dewan Komisaris No.001/DEKOM/JKT/II/2018 dan SK Direksi No.002/DIR-SK/II/2018 tanggal

10 Januari 2018 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*).

Tugas Direksi antara lain sebagai berikut :

- i. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank Umum Syariah pada seluruh tingkatan atau jenjang operasional berdasarkan dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip Syariah
- ii. Direksi wajib mengelola Bank Umum Syariah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
- iii. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, dan hasil pengawasan otoritas lainnya
- iv. Direksi wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
- v. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank Umum Syariah yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
- vi. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

d. Kewenangan Direksi

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi memiliki kewenangan melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, antara lain sebagai berikut:

- i. Mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan dengan pembatasan tertentu yang ditentukan.
- ii. 2 (dua) orang anggota Direksi bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- iii. Melakukan perbuatan hukum untuk mengalihkan kekayaan perseroan atau menjadinya jaminan utang kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, harus disetujui RUPS.
- iv. Melakukan perbuatan hukum dimana terdapat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham, dengan kepentingan ekonomis perseroan, disyaratkan adanya persetujuan RUPS.
- v. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.

- vi. Menjalankan tindakan lainnya, baik mengenai pengurusan maupun pemilikan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan atau yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

e. *Board Manual*

Tugas dan tanggung jawab Direksi Bank sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama Nomor 047/DEKOM/JKT/VII/2017 dan Nomor 035/DIR-SK/JKT/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 beserta perubahannya dalam SK Dewan Komisaris No.001/DEKOM/JKT/I/2018 dan SK Direksi No.002/DIR-SK/I/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) yang mengatur mengenai Organisasi (jumlah, komposisi, kriteria, pengangkatan, dan masa jabatan), Tugas Tanggung jawab dan Wewenang, Penyelenggaraan Rapat, Penilaian Kinerja dan Standar Etika.

f. Rapat Direksi

Direksi menyelenggarakan rapat minimal setiap bulan dan apabila dipandang perlu, akan tetapi diluar jadwal tersebut salah satu anggota Direksi dapat mengundang Direksi lain untuk mengadakan rapat membahas hal-hal yang perlu diketahui dan/atau mendapat keputusan segera. Selain itu, Direksi juga secara berkala bersama Dewan Komisaris melakukan rapat gabungan mendiskusikan kinerja dan perkembangan Bank secara umum.

Selama tahun 2018, telah diselenggarakan sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali rapat Direksi dan 10 (sepuluh) kali rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris.

Rekapitulasi kehadiran dalam rapat Direksi dan rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Nama Direksi	Rapat Direksi		Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi	
	Jumlah Kehadiran	Prosentase	Jumlah Kehadiran	Prosentase
Direksi				
Firman A. Moels	34	94%	10	100%
Andy Sundoro	34	94%	10	100%
Deddy Effendi Ridwan	35	97%	9	90%
Nurani Raswindriati	34	94%	7	70%
Total Rapat	36		10	

Acara rapat Direksi dan rapat gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris seluruhnya diselenggarakan di Jakarta.

Seluruh anggota Direksi telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Pedoman Kerja Direksi Bank mengenai minimum kehadiran dalam rapat dan jumlah minimum rapat yang diselenggarakan.

Keputusan dalam setiap rapat Direksi dan rapat gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dan seluruh

keputusan rapat telah dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik.

Untuk memastikan bahwa operasional Bank telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direksi dibantu oleh Satuan Kerja Audit Internal, Manajemen Risiko dan Unit Kerja Kepatuhan.

g. Kepemilikan Saham Direksi

Terkait dengan ketentuan GCG mengenai pengungkapan kepemilikan saham, tidak ada anggota Direksi yang memiliki saham pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank atau lembaga

9. Komite Eksekutif Direksi

Dalam pelaksanaan tugasnya, Direksi dibantu oleh Komite-komite yang bertugas untuk memberikan saran dan rekomendasi yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan dan arahan-arahan Direksi.

a. Komite Aset, *Liabilities Committee* & *Temporary Syirkah Fund Management* (ALSyCO)

Komite ALSyCO dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama SK Dewan Komisaris No. 047/DEKOM/JKT/VII/2017 dan SK Direksi No. 035/DIR-SK/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 beserta perubahannya dalam SK Dewan Komisaris No.001/DEKOM/JKT/I/2018 dan SK Direksi No.002/DIR-SK/I/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*).

i. Struktur anggota ALSyCO adalah sebagai berikut:

- Direktur Utama, sebagai Ketua ALSyCO
 - Direktur Bisnis, sebagai Anggota
 - Direktur Kepatuhan, sebagai Anggota
 - Direktur Operasi, sebagai Anggota
 - Kepala Unit kerja *Treasury*, sebagai Sekretaris
- Pihak yang diundang dan tidak memiliki hak suara, antara lain:
- Kepala Divisi Pendanaan dan Produk, sebagai Anggota
 - Kepala Divisi Komersial, sebagai Anggota
 - Kepala Divisi Jaringan Cabang, sebagai Anggota
 - Kepala Divisi Keuangan & Umum, sebagai Anggota

ii. Rapat Komite ALSyCO wajib dilakukan minimum 1 (satu) kali dalam sebulan dan/atau sesuai dengan kebutuhan sehubungan perkembangan dinamika pasar uang. Rapat tersebut diharapkan menghasilkan petunjuk strategis yang disesuaikan dengan perkembangan pasar maupun para pesaing sehingga berguna bagi tujuan penyiapan rencana jangka panjang maupun jangka pendek. Oleh karena itu keputusan ALSyCO merupakan keputusan tertinggi dalam pemilihan strategi dan kebijakan operasional bank.

Pada tahun 2018 ALSyCO telah mengadakan rapat/pertemuan sebanyak 13 (tiga belas) kali.

iii. Wewenang dan Tanggung jawab Komite ALSyCO adalah sebagai berikut :

- Membuat, mengkaji dan menerapkan kebijakan untuk mengelola sumber dana, penggunaan dana yang akan datang dengan tingkat nisbah dan risiko yang wajar.
- Mengkomunikasikan kebijakan yang telah disetujui kepada seluruh Divisi terkait serta memantau dan melakukan penyesuaian semestinya dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.
- Memberikan arahan dalam manajemen risiko terkait alokasi sumber dan penggunaan dana.
- Memantau perkembangan pasar uang dan pasar modal.

b. Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Pengembangan/Penghentian Produk (PTI-PP)

Komite PTI-PP dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama SK Dewan Komisaris No. 047/DEKOM/JKT/VII/2017 dan SK Direksi No. 035/DIR-SK/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 beserta perubahannya dalam SK Dewan Komisaris No.001/DEKOM/JKT/I/2018 dan SK Direksi No.002/DIR-SK/I/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*).

i. Susunan Anggota Komite PTI-PP adalah sebagai berikut:

- Direktur Operasi, sebagai Ketua PTI-PP
- Direktur Utama, sebagai Wakil Ketua PTI
- Direktur Bisnis, sebagai Anggota
- Direktur Kepatuhan, sebagai Anggota
- Kepala Divisi Teknologi dan Informasi, sebagai Sekretaris terkait pembahasan TI dan Kepala Divisi Pendanaan & Produk, sebagai Sekretaris terkait pembahasan pengembangan produk.

Pihak yang diundang dan tidak memiliki hak suara, antara lain:

- Kepala Divisi Operasional
- Kepala Divisi Keuangan & Umum

ii. Wewenang dan Tanggung Jawab

- Mengkaji dan menetapkan kebijakan Teknologi, Sistem dan Informasi (TSI) yang disesuaikan dengan peraturan dari regulator terkini yaitu: Pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi; Pengelolaan operasional teknologi informasi; Pengembangan jaringan komunikasi; Pengelolaan business continuity plan dan disaster recovery plan; Pengelolaan terhadap end user computing; Pengembangan electronic banking; Penggunaan pihak penyedia jasa teknologi informasi.
- Mengkaji dan menetapkan kebijakan terkait pengembangan/penghentian produk/aktivitas baru yang disesuaikan dengan peraturan regulator dan Fatwa DSN yang berlaku, yaitu: Pengelolaan risiko produk dan aktivitas baru; Pengelolaan operasional produk dan aktivitas baru; Pengembangan jaringan

komunikasi yang dibutuhkan; Pengelolaan terhadap produk dan *activity life* yang diharapkan; Pengembangan teknologi dan informasi yang diharapkan; Pengaruh terhadap keuangan Bank.

- Menetapkan dan melakukan evaluasi terhadap Rencana Strategis TSI dan pengembangan produk/*activity* baru secara berkala.

iii. Rapat diadakan 2 (dua) kali selama setahun dan apabila diperlukan.

Selama tahun 2018 rapat komite telah terlaksana sebanyak 4 (empat) kali sehubungan dengan adanya perkembangan TSI terutama untuk mendukung pelaksanaan operasional bank secara efisien dan efektif.

c. Komite Pembiayaan

Komite Pembiayaan adalah Komite operasional yang membantu Direksi baik dalam mengevaluasi dan/atau memutuskan pemberian pembiayaan baru, penambahan, dan perpanjangan dalam batas wewenang sesuai ketentuan yang berlaku. Komite Pembiayaan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama yaitu SK Dewan Komisaris No. 047/DEKOM/JKT/VII/2017 dan SK Direksi No. 035/DIR-SK/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 beserta perubahannya dalam SK Dewan Komisaris No.001/DEKOM/JKT/I/2018 dan SK Direksi No.002/DIR-SK/I/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*).

i. Susunan Anggota Komite Pembiayaan adalah sebagai berikut:

- Direktur Utama
- Direktur Bisnis
- Direktur Operasi*)
- Kepala Divisi Rivi Pembiayaan merangkap sebagai Sekretaris, apabila pengambilan keputusan melalui rapat komite *).

*) Direktur Operasi dan Kadiv. Rivi Pembiayaan dapat ditunjuk sebagai anggota komite pembiayaan sementara (*alternate*), apabila salah satu anggota komite pembiayaan berhalangan hadir dan tidak dapat melaksanakan fungsinya.

ii. Wewenang dan Tanggung Jawab

- Memberikan rekomendasi, persetujuan atau penolakan atas proposal pembiayaan sesuai dengan kewenangannya.
- Melaksanakan tugasnya dengan menjunjung tinggi:
 - Profesionalisme, yaitu melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, efektif, efisien, disiplin dan berorientasi ke masa depan dalam mengantisipasi perkembangan tantangan dan kesempatan.
 - Integritas, yaitu penuh dedikasi, jujur, selalu menjaga kehormatan dan nama baik, taat pada peraturan yang berlaku dan bertindak semata-mata berdasarkan kepentingan perusahaan.

- Mempertimbangkan, mengevaluasi sekurang-kurangnya berdasarkan aspek “5C” yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, and Collateral*. (mengacu pada aspek *5C-Constrain*).
- Pemenuhan terhadap segala prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah yang berlaku agar menghasilkan pembiayaan yang berkualitas.
- Pemenuhan terhadap prosedur internal Bank agar pengendalian risiko dapat terjaga dalam upaya mengurangi kemungkinan kerugian sampai sekecil-kecilnya.
- Menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap proposal pembiayaan yang melebihi Batas Wewenang Komite Pembiayaan.

iii. Rapat diadakan apabila diperlukan.

d. Komite Kebijakan dan Manajemen Risiko

Adalah Komite yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama SK Dewan Komisaris No. 047/DEKOM/JKT/VII/2017 dan SK Direksi No. 035/DIR-SK/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 beserta perubahannya dalam SK Dewan Komisaris No.001/DEKOM/JKT/I/2018 dan SK Direksi No.002/DIR-SK/I/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*).

i. Susunan anggota Komite Kebijakan dan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

- Direktur Kepatuhan, sebagai Ketua
- Direktur Utama, sebagai Wakil Ketua
- Direktur Bisnis, sebagai Anggota
- Direktur Operasi, sebagai Anggota
- Kepala Divisi Manajemen Risiko, sebagai Sekretaris
- Pihak yang diundang dan tidak memiliki hak suara, antara lain:
 - Kepala Divisi SKAI
 - Kepala Divisi Kepatuhan dan Sekretaris Perusahaan
 - Kepala Divisi Komersial
 - Kepala Divisi SDI
 - Kepala Divisi Operasional
 - Kepala Divisi Keuangan & Umum
 - Kepala Divisi *Treasury*
 - Kepala Divisi TSI
 - Kepala Divisi Pengembangan Cabang dan Pendanaan

ii. Wewenang dan Tanggung Jawab

- Mengkaji dan menetapkan kebijakan, strategi dan ketentuan manajemen risiko.
- Menyempurnakan penerapan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.
- Memperbaiki hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis dan proses operasional yang menyimpang dari prosedur normal.
- Mengkaji dan menetapkan kebijakan dan

- ketentuan yang strategis.
- iii. Rapat komite dilaksanakan setiap bulan
Selama tahun 2018, Komite Kebijakan dan Manajemen Risiko Bank telah menyelenggarakan rapat/pertemuan yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite sebanyak 12 (dua belas kali).
- e. Komite Sanksi dan Personalia
Komite Sanksi dan Personalia dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama yaitu SK Dewan Komisaris No. 047/DEKOM/JKT/VII/2017 dan SK Direksi No. 035/DIR-SK/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 beserta perubahannya dalam SK Dewan Komisaris No.001/DEKOM/JKT/I/2018 dan SK Direksi No.002/DIR-SK/I/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*).
Susunan anggota Komite Sanksi dan Personalia adalah sebagai berikut:
- i. Komite Sanksi
Direktur Utama, sebagai Ketua.
Susunan anggota, antara lain:
 - Direktur Operasi.
 - Direktur Bisnis.
 - Direktur Kepatuhan.
 - Kepala Divisi SKAL.
 - ii. Komite Personalia
Direktur Utama, sebagai Ketua.
Susunan anggota, antara lain:
 - Direktur Operasi.
 - Direktur Bisnis.
 - Direktur Kepatuhan.
 - Kepala Divisi SDI
 - iii. Wewenang dan Tanggung Jawab
 - Memberikan masukan kepada Direksi dalam merumuskan Kebijakan ketenagakerjaan.
 - Mengawasi kebijakan yang berhubungan dengan karyawan agar dapat terlaksana secara konsekuen dan konsisten.
 - Memberikan masukan dan solusi untuk permasalahan yang terjadi terkait dengan ketenagakerjaan Bank.
 - Memberikan penghargaan (*reward*) terhadap karyawan yang berprestasi
 - Dalam tahun kinerja dan punishment terhadap karyawan yang memperoleh sanksi
 - iv. Rapat diadakan apabila dipandang perlu.
- f. Komite Pembelian / Pengadaan Barang dan Jasa
Komite Pembelian/Pengadaan Barang dan Jasa dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama yaitu SK Dewan Komisaris No. 047/DEKOM/JKT/VII/2017 dan SK Direksi No. 035/DIR-SK/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) dan Perubahannya Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris No. 002/DEKOM/JKT/I/2018 dan Surat Keputusan Direksi No. 002/DIR-SK/JKT/I/2018

tanggal 10 Januari 2018.

- i. Susunan anggota Komite Pembelian / Pengadaan Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

- Direktur Operasional
- Direktur Utama
- Direktur Bisnis
- Kepala Divisi Keuangan dan Umum, merangkap sebagai sekretaris, apabila pengambilan keputusan melalui rapat komite

Apabila proses persetujuan melalui rapat komite, maka pihak lain dapat diundang dan tidak memiliki hak suara, yaitu:

- Kepala Divisi Operasional
- Kepala Divisi Manajemen Risiko
- Koordinator Pendanaan dan Produk

- ii. Wewenang dan Tanggung Jawab
 - Menyampaikan informasi terkait pembelian / pengadaan barang dan jasa dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal
 - Memberikan rekomendasi dan persetujuan terhadap pembelian/ pengadaan barang dan jasa sesuai dengan kewenangannya.
- iii. Mengevaluasi hubungan dengan vendor secara berkala dengan mengkategorikan penilaian yang "Direkomendasikan" dan "Tidak Direkomendasikan". Hasil penilaian yang masuk daftar direkomendasikan dipakai sebagai masukan dalam proses pembelian / pengadaan barang dan jasa untuk periode tahun berikutnya

10. Dewan Pengawas Syariah

Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pada Bank Victoria Syariah, maka diangkat dan ditempatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan memperhatikan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Syariah Nasional (DSN) serta anggaran dasar Bank Victoria Syariah.

Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Masa jabatan anggota DPS paling lama sama dengan masa jabatan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Bank.

Persyaratan anggota DPS diatur dan ditetapkan oleh DSN.

a. Komposisi dan Kriteria Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai tugas untuk senantiasa mengawasi kegiatan usaha bank dan memberikan opini mengenai kemurnian prinsip syariah yang dianut. Hubungan kerja Dewan

Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan *check and balance* dengan tujuan akhir untuk kemajuan dan kesehatan bank serta pelaksanaan operasional Bank yang senantiasa mematuhi (*comply*) peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan prinsip syariah.

Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, sampai dengan tahun 2018 susunan Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

No.	Nama Dewan Pengawas Syariah	Jabatan
1	Prof. Dr. Hasanuddin AF, MA	Ketua Dewan Pengawas Syariah
2	Prof. DR. Huzaemah Tahido Yanggo, MA	Anggota Dewan Pengawas Syariah

b. Independensi Dewan Pengawas Syariah

Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik dengan sesama anggota Dewan Pengawas Syariah yanglain dan/atau anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Sebagai wujud pelaksanaan prinsip transparansi, anggota DPS Bank juga telah mengungkap rangkap jabatan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia mengenai GCG. DPS Bank yang merangkap jabatan sebagai Ketua/Anggota pada lembaga keuangan bank/bukan bank adalah:

Prof. DR. H.Hasanuddin .AF	Prof.DR.Hj.Huzaemah Tahido, MA
1.Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI) Syariah	1. Asuransi AXA Syariah
2.PT. Jamkrindo Syariah	2. Asuransi Jasa Raharja
	3. Auto Finance CIMB Niaga Syariah

Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank telah memenuhi kriteria jumlah, komposisi, independensi dan kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku dan prinsip GCG.

c. Tugas dan Tanggung Jawab DPS

- DPS wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).
- Pelaksanaan tugas dan ta nggung jawab Dewan Pengawas Syariah sebagaimana telah diatur di dalam Pedoman Tata Kerja Dewan Pengawas Syariah sesuai SK Direksi Nomer 053/DIR-SK/JKT/IX/2017 tanggal 4 September 2017 meliputi antara lain:
 - Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah;

- Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
- Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia;
- Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru yang belum ada fatwanya;
- Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank;
- Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugas DPS;
- Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) secara semesteran. Laporan tersebut wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir.

d. Pedoman Tata Kerja Dewan Pengawas Syariah

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah Bank sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 053/DIR-SK/JKT/IX/2017 tanggal 04 September 2017 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Pengawas Syariah, yang mengatur mengenai Organisasi (jumlah, komposisi, kriteria, pengangkatan, dan masa jabatan), Tugas Tanggung jawab dan Wewenang, Penyelenggaraan Rapat, Penilaian Kinerja dan Standar Etika.

e. Rapat Dewan Pengawan Syariah

- Rapat DPS wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, namun demikian diluar jadwal tersebut salah satu anggota dapat mengundang Direksi untuk mengadakan rapat membahas hal-hal yang perlu diketahui dan/atau mendapat keputusan segera.

Rekapitulasi rapat Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Naman Pejabat	Rapat Dewan Pengawas Syariah	
	Jumlah Kehadiran	Presentase
Prof. Dr. Hasanudin AF, MA	16	100%
Prof. DR. HuzaimaTahido Yanggo	16	100%
Total Rapat	16	

- Pengambilan keputusan Rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- Seluruh keputusan Rapat DPS yang dituangkan dalam risalah rapat merupakan keputusan bersama seluruh anggota DPS.
- Hasil Rapat DPS wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Bank dengan

f. Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah

Selama tahun 2018 dalam memastikan seluruh kegiatan usaha Bank Victoria Syariah telah memenuhi Prinsip Syariah termasuk penerapan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah, antara lain adalah:

- Bank menyediakan data dan informasi yang komprehensif dan terkini kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam upaya penerapan fungsi kepatuhan terhadap prinsip Syariah.
- Setiap produk dan jasa bank telah melalui analisa dan kajian DPS terhadap kesesuaian produk dan jasa tersebut dengan prinsip Syariah.
- DPS senantiasa melakukan pengawasan atas setiap aktifitas operasional bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah yang ditetapkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
- Telah disampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester I Tahun 2018 pada tanggal 21 Agustus 2018 dan Semester II tahun 2018 disampaikan pada tanggal 14 Februari 2019.
- Opini Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2018 sebagai berikut:

No.	Perihal Opini	Nomor Surat
1	Pemberian Pembiayaan Investasi kepada Robertus Nugroho untuk mengakomodasi tahap penyelesaian project pembangunan "Villa Horizon", Gili Trawangan, Lombok, Nusa Tenggara Barat sebanyak 40 unit.	No. 001/DPS-BVIS/I/2018 tanggal 19 Januari 2018
2	Pemberian Pembiayaan kepada PT. Multibuana Corpindo (MBC), dan PT. Buana Artha Indopratama (BAI).	No. 002/DPS-BVIS/I/2018 tanggal 19 Januari 2018
3	Penegasan atas hasil pemeriksaan DPS di tahun 2017 bahwa Bank telah mengikuti Fatwa-fatwa dan ketetapan syariah yang dikeluarkan oleh DSN MUI dan opini-opini syariah dari DPS.	No. 003/DPS-BVIS/II/2018 tanggal 12 Februari 2018
4	Pemberian Pembiayaan kepada PT. Duta Anggada Realty untuk pembangunan Area Retail Citywalk Gajahmada di kawasan Hotel Holiday Inn.	No. 004/DPS-BVIS/II/2018 tanggal 15 Februari 2018
5	Pemberian Pembiayaan kepada Koperasi Simpan Pinjam Nusantara dengan tujuan pembiayaan dana talangan haji dan pinjaman pensiunan.	No. 005/DPS-BVIS/II/2018 tanggal 15 Februari 2018
6	Perubahan Aplikasi dan Perjanjian Pembukaan Rekening Tabungan Bank Victoria Syariah.	No. 006/DPS-BVIS/II/2018 tanggal 27 Februari 2018
7	Perpanjangan Pembiayaan kepada PT Pacific Multi Finance yang belum memiliki Ijin Unit Usaha Syariah (UUS).	No. 007/DPS-BVIS/III/2018 tanggal 21 Maret 2018
8	Pemberian Fasilitas Joint Financing BVIS dengan PT Trihmas Finance untuk Pembiayaan Ibadah Haji kepada End User.	No. 008/DPS-BVIS/III/2018 tanggal 21 Maret 2018
9	Pemberian Pembiayaan kepada PT PNM Ventura Capital yang belum memiliki Ijin Unit Usaha Syariah (UUS).	No. 009/DPS-BVIS/III/2018 tanggal 21 Maret 2018
10	Pemberian Pembiayaan kepada PT Artha Prima Finance yang belum memiliki Ijin Unit Usaha Syariah (UUS).	No. 011/DPS-BVIS/V/2018 tanggal 9 Mei 2018

11	Layanan Kartu Debet PT. Bank Victoria Syariah.	No. 013/DPS-BVIS/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018
12	Pemberian Pembiayaan kepada PT. Pondok Solo Permai dengan tujuan pembiayaan untuk pembangunan Fasum dan Fasos Brothers Inn Hotel.	No. 014/DPS-BVIS/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018
13	Pendapatan akrual dan pendapatan Fee Based yang akan diikutsertakan dalam perhitungan distribusi bagi hasil dan perubahan nisbah pada tanggal tertentu.	No. 015/DPS-BVIS/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018
14	Layanan Syariah Bank (LSB).	No. 016/DPS-BVIS/VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018
15	Pemberian Pembiayaan Kepada PT. Boga Jaya Makmur.	No. 017/DPS-BVIS/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018
16	Hasil pemeriksaan OJK tahun 2018 terhadap nasabah PT. Bangun Olah Sarana Sukses, Herman Hidayat dan Burhanuddin.	No. 018/DPS-BVIS/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018
17	Hasil pemeriksaan OJK tahun 2018 tentang Pengakuan pendapatan bagi hasil terhadap Multifinance yang belum memiliki Ijin Unit Usaha Syariah (UUS).	No. 019/DPS-BVIS/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018
18	Hasil pemeriksaan OJK tahun 2018 tentang Laporan keuangan bulanan yang dikirim nasabah ke Bank sebagai dasar Bank dalam melakukan pendebitan bagi hasil yang menjadi hak Bank atas seluruh pembiayaan Musyarakah.	No. 020/DPS-BVIS/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018
19	Cover asuransi kebakaran untuk pembiayaan atas nama PT. Kaloka Hotel dan Resor.	No. 021/DPS-BVIS/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018
20	Hasil pemeriksaan OJK tahun 2018 tentang Revisi akad (Musyarakah kembali ke Murabahah) pendapatan dari pembiayaan tersebut dapat diakui sebagai pendapatan Bank.	No. 022/DPS-BVIS/XI/2018 tanggal 5 November 2018
21	Hasil pemeriksaan OJK tahun 2018 tentang Implementasi refinancing Al Bai dalam rangka Musyarakah Mutanaqishah (MMQ).	No. 023/DPS-BVIS/XI/2018 tanggal 5 November 2018
22	Hasil pemeriksaan OJK tahun 2018 tentang Standarisasi istilah Tawidhdan Tazir dalam akad pembiayaan notariil dan unnotariil (bawah tangan).	No. 024/DPS-BVIS/XI/2018 tanggal 5 November 2018
23	Hasil pemeriksaan OJK tahun 2018 tentang Akad perjanjian pembiayaan hunian syariah syariah (MMQ).	No. 025/DPS-BVIS/XI/2018 tanggal 5 November 2018
24	Sumber pembayaran kewajiban atas nama PT. Kaloka Hotel dan Resor.	No. 026/DPS-BVIS/XI/2018 tanggal 21 November 2018
25	Rencana pengalihan hutang dari PT. Kaloka Hotel dan Resor (nasabah) ke PT. Rimba Pesona Persada.	No. 027/DPS-BVIS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018
26	Pembiayaan dengan jaminan Cash Collateral atas nama PT. TEZ Capital & Finance.	No. 028/DPS-BVIS/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018

g. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Bank Victoria Syariah telah memenuhi prinsip syariah dalam hal kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank. Hal ini dapat dilihat dari akad-akad yang digunakan dalam produk usaha Bank yang telah memenuhi prinsip keadilan dan keseimbangan, serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, dzalim, riswah dan objek haram.

Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank, telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan melalui Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester I Tahun 2018 pada tanggal 21 Agustus 2018 dan Semester II tahun 2018 disampaikan pada tanggal 14 Februari 2019.

11. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Seiring dengan kompleksitas kegiatan usaha Bank yang semakin berkembang, sehingga dapat berdampak terhadap eksposur risiko yang dihadapi Bank maka diperlukan upaya untuk melakukan mitigasi risiko kegiatan usaha Bank yang salah satunya adalah melalui langkah yang bersifat *ex-ante* dengan mematuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Bank wajib memiliki Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan membentuk satuan kerja kepatuhan sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 46/POJK.3/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, dan dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Divisi Kepatuhan & Sekretaris Perusahaan dan Divisi Manajemen Risiko.

Direktur Kepatuhan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan usaha Bank meliputi bidang Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

- a. Selaku Koordinator Bidang Kepatuhan.
 - i. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia. Perjanjian yang dibuat oleh Bank antara lain Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) atau *Business Plan*. Sedangkan komitmen yang dibuat oleh Bank adalah kesanggupan Bank untuk memenuhi perintah dan larangan dari Otoritas Jasa Keuangan dan atau Bank Indonesia dalam pelaksanaan kegiatan tertentu serta komitmen menindak lanjuti hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dan atau Bank Indonesia.
 - ii. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.
 - iii. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
 - iv. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank, memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah.

- v. Melakukan kajian kepatuhan terhadap proposal Pembiayaan dan penempatan dana oleh Unit Kerja Treasury diatas jumlah tertentu.
- vi. Melakukan pengkajian atas Kebijakan dan Prosedur Bank atau Kebijakan Strategis yang memerlukan persetujuan Direksi.
- vii. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank.
- viii. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan atau Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- ix. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

- b. Selaku Koordinator Bidang Manajemen Risiko
 - i. Menetapkan arah kebijakan dan strategi kegiatan Manajemen Risiko (*Risk Management*) dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance*.
 - ii. Memastikan kegiatan unit kerjanya dikelola dengan efisien, efektif dan akurat, sehingga Bank memiliki kebijakan, prosedur dan metode kerja yang tepat dalam penerapan manajemen risiko secara terpadu.
 - iii. Menjaga agar risiko Bank teridentifikasi, terukur dan dapat dikelola secara baik dan dikendalikan sesuai dengan visi, misi strategi dan risk appetite.
 - iv. Memberikan opini atas rancangan keputusan Bank terhadap kandungan risiko, dan menyampaikan rekomendasi pengelolaan risikonya agar Bank terhindar dari kerugian sampai sekecil-kecilnya.
 - v. Menyampaikan laporan Manajemen Risiko secara berkala kepada OJK dan Bank Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.
 - vi. Menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris tentang hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan Manajemen Risiko secara berkala.
 - vii. Bersama Direktur Utama mengefektifkan kegiatan Komite Manajemen Risiko sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

- c. Tugas dan Tanggung jawab Direktur Kepatuhan
 - i. Mencegah Direksi Bank agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan atau Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
 - ii. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris.
 - iii. Menyampaikan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan mengenai pokok-pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan sebagaimana diatas dan laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan direksi yang menurut pendapat Direktur Kepatuhan telah menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan atau Bank Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Laporan ini disampaikan setiap semester.

- d. Program Kerja Tahun 2018 dan Realisasinya
Program Kerja
Sesuai rapat kerja Tanggal 26 Januari 2018 di Graha BIP - Jakarta, rencana kerja Direktorat Kepatuhan ditetapkan 5 (lima) prioritas atau program unggulan yaitu sebagai berikut:
- Menetapkan keseimbangan antara risiko dan pengendalian dengan pertumbuhan bisnis
 - Mendorong eksekusi melalui *performance culture*
 - Mitigasi Risiko Operasional
 - Terus membangun *image* Bank Victoria Syariah sebagai bank yang bereputasi baik dalam hal GCG
 - Membangun kemampuan kepemimpinan melalui *Talent Management Strategy*

Dan untuk melaksanakan prioritas atau program unggulan tersebut di atas, telah dijabarkan dalam *Key Performance Indicator* antara lain sebagai berikut

- Pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan (*composite*), per jenis Risiko dan/atau per jenis aktivitas fungsional.
- Memberikan rekomendasi kepada seluruh unit kerja terkait (*risk taking unit*) dan/atau kepada Komite Manajemen Risiko.
- Membuat dan menyampaikan Laporan Tingkat Kesehatan Bank secara semesteran ke Otoritas Jasa Keuangan.
- Melakukan kewajiban pelaporan profil risiko bank setiap triwulan ke Otoritas Jasa Keuangan.
- Menyusun dan menyampaikan laporan profil/komposisi Risiko secara berkala kepada Komite Manajemen Risiko, Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
- Uji kepatuhan terhadap proposal pembiayaan dan penempatan dana dalam jumlah tertentu.
- Me-review Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan (*Corporate Compliance*) agar lebih mengakomodasi Peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Fatwa DSN dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- Pemberdayaan Fungsi Unit Kerja Khusus dalam rangka Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris.
- Melakukan sosialisasi Peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan kepada unit-unit kerja terkait.
- Pemantauan tindak lanjut terhadap hasil temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan, Kantor Akuntan Publik (KAP) dan SKAI.
- Penerapan kepatuhan terhadap prinsip syariah.
- Pemantauan pemenuhan ketentuan *Good Corporate Governance* (GCG) Bank Umum Syariah.

Realisasi

Selama tahun 2018, Bank dapat menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan.

Beberapa indikator yang dapat mencerminkan pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank, antara lain:

- Rasio Kecukupan Modal (CAR) dengan memperhitungkan risiko Pembiayaan dan risiko pasar adalah di atas ketentuan minimum Bank Indonesia yaitu sebesar 22,07%
- Giro Wajib Minimum (GWM) yang disyaratkan dalam Rupiah adalah 5% sedangkan realisasi GWM posisi Desember 2018 sebesar 5,11%.
- Rasio NPF gross sebesar 4,00% dan NPF net sebesar 3,46%
- Laporan keuangan Bank tahun 2018 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Mirawati Sensi Idris”, dengan opini “wajar”
- Berdasarkan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, tidak terdapat kasus yang signifikan dalam hal kepatuhan.
- Capaian pembiayaan kepada Usaha Kecil dan Menengah adalah sebesar 20,21%

12. Fungsi Audit Internal atau Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)

Fungsi Audit *Intern* pada Bank Victoria Syariah sangat penting karena peranan yang diharapkan dari fungsi tersebut untuk membantu semua tingkatan manajemen dalam mengamankan kegiatan operasional Bank Victoria Syariah yang mengelola dana masyarakat. Di samping itu, menyadari kedudukan yang strategis dari perbankan dalam perekonomian, Audit *Intern* Bank Victoria Syariah diharapkan juga mampu menjaga perkembangan Bank Victoria Syariah ke arah yang dapat menunjang program pembangunan Pemerintah.

a Struktur dan Kedudukan SKAI

Guna mendukung kinerja SKAI agar senantiasa dalam tingkat optimal, Bank Victoria Syariah memberikan SKAI wewenang, kedudukan dan tanggung jawab dalam organisasi sedemikian rupa sehingga dapat dan mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan ukuran-ukuran standar pekerjaan yang dituntut oleh profesinya.

b Pengangkatan dan Pemberhentian

Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama Bank Victoria Syariah dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada OJK.

c Independensi

Kepala SKAI bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Untuk mendukung independensi dan menjamin kelancaran audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut, maka Kepala SKAI dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit. Pemberian informasi tersebut harus dilaporkan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.

d. Wewenang dan Tanggung Jawab SKAI
Visi dan Misi, wewenang dan tanggung jawab SKAI telah dirumuskan dalam Piagam Audit *Intern (Internal Audit Charter)* yang telah ditetapkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Dalam hal ini Bank Victoria Syariah memberikan SKAI wewenang, kedudukan dan tanggung jawab dalam organisasi sedemikian rupa sehingga dapat dan mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan ukuran-ukuran standar pekerjaan yang dituntut oleh profesinya.

e. Pelaksanaan Kegiatan di Tahun 2018

Aktivitas yang telah dilakukan SKAI selama tahun 2018, antara lain:

i. Melakukan *post audit monitoring* atas temuan SKAI serta menyampaikannya ke Auditee (Divisi maupun Cabang) untuk segera ditindaklanjuti sesuai komitmen.

ii. Audit Umum dan Audit Khusus

- Melaksanakan audit umum terhadap seluruh unit kerja, baik Divisi di Kantor Pusat maupun cabang-cabang, sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja audit intern tahunan.
- Melaksanakan audit khusus sesuai instruksi dari Direksi dan Komite Audit.

iii. Audit dan *Independent Review* Bidang Teknologi Informasi.

iv. Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada karyawan tentang penguatan sistem pengendalian *intern* dan *anti fraud awareness* melalui forum training, sosialisasi maupun pada saat pembahasan hasil audit (*exit meeting audit*). Dalam hal ini SKAI mengembangkan peran *consultative* kepada auditee melalui komunikasi yang efektif dalam membahas temuan audit, sehingga auditee dapat memahami risiko-risiko dari defisiensi/ penyimpangan yang terjadi.

v. Berperan aktif dalam menunjang terciptanya sistem pengendalian intern Bank Victoria Syariah dan pelaksanaan pengawasan GCG, antara lain:

- Bersinergi dengan Internal Control yang ditempatkan di cabang-cabang sebagai bagian dari pilar *early warning system*.
- Menjadi fasilitator (*liaison officer*) pelaksanaan audit ekstern oleh OJK.

f. Tim *Anti-Fraud*

Dalam rangka menunjang penerapan pengendalian intern di Bank Victoria Syariah, manajemen membentuk Tim *Anti-Fraud* (TAF) dimana SKAI turut mengambil peranan strategis, yaitu sebagai ketua TAF dan beranggotakan Kepala Divisi Manajemen Risiko, Kepala Unit Kerja Pengendalian Internal dan Kepala Divisi Sumber Daya Insani (SDI).

Adapun yang melatar belakangi dibentuknya Tim *Anti-Fraud* adalah sebagai berikut:

i. Penguatan sistem pengendalian *intern* Bank Victoria

Syariah dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut POJK No.65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

ii. Terungkapnya berbagai kasus *Fraud* di sektor perbankan yang merugikan nasabah dan/atau bank maka perlu diatur ketentuan mengenai penerapan strategi *Anti-Fraud*.

iii. Mengarahkan Bank Victoria Syariah dalam melakukan pengendalian *Fraud* melalui upaya-upaya yang tidak hanya ditujukan untuk pencegahan, namun juga untuk mendeteksi dan melakukan investigasi serta memperbaiki sistem sebagai bagian dari strategi yang bersifat integral dalam mengendalikan *Fraud*.

Strategi *anti-fraud* yang diterapkan di Bank Victoria Syariah didasarkan pada 4 (empat) pilar, sebagai berikut:

i. Pencegahan

Memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya *fraud*, yang paling kurang mencakup *anti-fraud awareness*, identifikasi kerawanan, dan *know your employee*.

ii. Deteksi

Memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan kejadian *fraud* dalam kegiatan usaha Bank Victoria Syariah, yang mencakup paling kurang kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*, *surprise audit*, dan *surveillance system*.

iii. Investigasi, pelaporan, dan sanksi

Memuat perangkat-perangkat dalam rangka menggali informasi, sistem pelaporan, dan penerapan sanksi atas kejadian *fraud* dalam kegiatan usaha Bank Victoria Syariah, yang paling kurang mencakup standar investigasi, mekanisme pelaporan, dan penerapan sanksi.

iv. Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut

Memuat perangkat-perangkat dalam rangka memantau dan mengevaluasi kejadian *fraud* serta tindak lanjut yang diperlukan, berdasarkan hasil evaluasi yang paling kurang mencakup pemantauan dan evaluasi atas kejadian *fraud* serta mekanisme tindak lanjut.

g. Kaji Ulang Pelaksanaan Audit SKAI

Sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB), SKAI Bank Victoria Syariah diharuskan menyampaikan laporan hasil kaji ulang (*review*) pihak independen yang memuat pendapat tentang hasil kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB. SKAI Bank Victoria Syariah telah melakukan kaji ulang 3 (tiga) tahunan yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik Sudin dan Rekan periode 2014 s/d 2016.

13. Penyimpangan Internal

Selama tahun 2018, tidak terdapat kejadian fraud seperti penyimpangan atau kecurangan yang dilakukan oleh Pegawai Bank Victoria Syariah terkait dengan proses kerja dan/atau kegiatan operasional Bank Victoria Syariah

14. Audit Eksternal

Sebagai bagian dari penerapan *Good Corporate Governance* terkait transparansi kondisi keuangan dan untuk memastikan penyusunan laporan keuangan serta pencatatan akuntansi telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Bank Victoria Syariah memerlukan auditor eksternal yang independen dalam menghasilkan laporan keuangan yang memiliki kualitas yang baik dan terpercaya.

Penunjukan kantor akuntan publik dan akuntan publik dilakukan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris yang telah memperhatikan rekomendasi Komite Audit. Dalam menyusun rekomendasi, Komite Audit mempertimbangkan :

- Independensi kantor akuntan publik dan akuntan publik yang terdaftar dalam catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- Ruang lingkup audit;
- Imbalan jasa audit;
- Keahlian dan pengalaman kantor akuntan publik dan akuntan publik;
- Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh kantor akuntan publik dan akuntan publik untuk kurun waktu yang panjang, dan;
- Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh kantor akuntan publik dan akuntan publik pada periode sebelumnya.

Sesuai dengan hasil RUPS Tahunan dengan akta nomor 29 tanggal 18 Mei 2018 dan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Memorandum No. 014/KA/VII/2018 tertanggal 30 Juli 2018 perihal Rekomendasi Penunjukkan KAP Untuk General Audit Atas Laporan Keuangan PT Bank Victoria Syariah Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018 serta surat persetujuan Dewan Komisaris No. 044/DEKOM/JKT/VIII/2018 tertanggal 9 Agustus 2018 perihal Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan

KAP Untuk Mengaudit Buku-Buku Perseroan Tahun 2018 maka Direksi menetapkan Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (*member firm of Moore Sthepens*) sebagai Auditor Independen Bank Victoria Syariah untuk tahun buku 2018.

Pelaksanaan fungsi audit eksternal oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (*member firm of Moore Sthepens*) atas Laporan Keuangan Bank Victoria Syariah untuk tahun buku 2018 telah memenuhi standar profesional akuntan publik, legalisasi perjanjian kerja dan ruang lingkup yang ditetapkan KAP, telah memenuhi unsur independensi dan memiliki reputasi yang baik.

Hasil audit atas Laporan Keuangan Bank Victoria Syariah untuk tahun buku 2018, Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (*member firm of Moore Sthepens*) memberikan opini Wajar dalam semua hal yang material berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Adapun biaya jasa profesional untuk audit laporan keuangan, Bank Victoria Syariah membayar kepada Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (*member firm of Moore Sthepens*) sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta Rupiah).

15. Penerapan Manajemen Risiko

Manajemen risiko dapat berfungsi sebagai alat pengendali risiko dan juga sebagai alat untuk mendukung kegiatan usaha bank di mana tujuan utama dari manajemen risiko adalah melaksanakan prinsip kehati-hatian bank dalam menjalankan aktivitas operasionalnya dan sesuai dengan prinsip syariah. Pengelolaan operasional Bank Victoria Syariah sedapat mungkin dilaksanakan melalui satu sistem pengelolaan risiko yang akurat dan komprehensif serta mampu menganalisa dan mengelola seluruh risiko yang terkait.

Penerapan manajemen risiko yang baik dapat meningkatkan *shareholder value*, memberikan gambaran kepada Direksi Bank mengenai kemungkinan kerugian Bank di masa datang, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis yang didasarkan atas ketersediaan informasi, digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja Bank, digunakan untuk menilai risiko yang melekat pada instrumen atau kegiatan usaha Bank serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing Bank.

Penerapan Manajemen Risiko Bank mengacu pada Kebijakan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko yang disusun berdasarkan POJK No. 65/POJK.03/2016 perihal

Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah.

- a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi; Efektivitas dari penerapan manajemen risiko di Bank merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi dan dalam upaya untuk melakukan pengawasan serta mitigasi risiko secara aktif maka Dewan Komisaris dan Direksi dituntut untuk memiliki pemahaman yang baik atas risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Adanya Komite Manajemen Risiko yang diadakan secara berkala guna membahas laporan profil risiko yang dibuat oleh Divisi Manajemen Risiko mengenai hasil penilaian Bank terhadap profil risiko yang dihadapi, dapat mendukung Dewan Komisaris dan Direksi untuk memiliki pemahaman yang baik atas risiko-risiko yang Bank hadapi.

- b. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan *Limit*;

Dalam menjalankan visi, misi dan strategi bisnisnya, Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta limit risiko sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko yang efektif. Kebijakan dan prosedur tersebut juga sudah dilengkapi dengan *limit* risiko untuk setiap jenis risiko yang dihadapi Bank dan dievaluasi minimal satu kali dalam dua tahun.

Strategi manajemen risiko yang dibuat oleh Bank dibuat berdasarkan strategi bisnis Bank secara keseluruhan dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil. Penetapan *limit* dilakukan secara komprehensif atas seluruh aspek yang terkait dengan risiko, yang mencakup limit secara keseluruhan dan limit per risiko. *Limit* yang telah ditetapkan tersebut ditinjau secara berkala oleh Direksi dan/atau Divisi Manajemen Risiko untuk menyesuaikan terhadap perubahan kondisi yang terjadi.

- c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko
Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi seluruh sumber risiko yang ada dan potensial pada produk dan aktivitas Bank termasuk risiko dari produk dan aktivitas baru. Prinsip pengidentifikasian risiko adalah sebagai berikut:
 - i. Bersifat proaktif.
 - ii. Mencakup seluruh aktivitas fungsional.
 - iii. Menggabungkan dan menganalisa informasi risiko dari seluruh sumber informasi yang tersedia.
 - iv. Menganalisa probabilitas timbulnya risiko serta dampaknya.

Pengukuran risiko bertujuan untuk mengukur profil risiko guna memperoleh gambaran mengenai efektivitas penerapan manajemen risiko. Metode pengukuran risiko dilakukan secara kuantitatif dan/atau kualitatif. Metode pengukuran yang digunakan untuk risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko operasional menggunakan metode yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka penilaian risiko dan perhitungan modal sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang berlaku.

Pemantauan dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko terhadap implementasi strategi manajemen risiko yang direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko dan yang telah disetujui oleh Direksi serta memantau posisi/eksposur risiko.

Pelaporan Bank mengenai laporan Profil Risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan POJK dan laporan Profil Risiko yang memuat substansi yang sama dengan laporan yang disampaikan kepada Direksi dan Komite Manajemen Risiko.

Pengendalian risiko yang diterapkan Bank disesuaikan dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko yang dapat diterima.

Sistem Informasi Manajemen Risiko yang dikembangkan Bank untuk kebutuhan manajemen risiko secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan volume eksposur risiko dan kemampuan sistem, sehingga Bank dapat mengukur eksposur risiko secara akurat, informatif dan tepat waktu.

16. Pengendalian Internal

Pelaksanaan sistem pengendalian internal Bank yang andal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh satuan kerja operasional dan satuan kerja pendukung serta Satuan Kerja Internal Audit.

Dalam melaksanakan sistem pengendalian internal secara efektif dalam penerapan manajemen risiko, Bank mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan di mana penerapan prinsip pemisahan fungsi (*four eyes principle*) harus memadai dan dilaksanakan secara konsisten.

Unit Kerja Pengendalian Internal dibawah kendali Divisi Manajemen Risiko berfungsi sebagai salah satu "*second line of defense*" yang independen dalam melaksanakan evaluasi terhadap kontrol secara harian yang sudah "*built in*" dalam setiap proses operasional Bank dalam

rangka mendukung pencapaian Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) sesuai Visi dan Misi Bank.

Aktivitas pengendalian internal (*Internal Control*) Bank telah sejalan dengan Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) No.5/22/DPNP, Tanggal 29 September 2003 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern Bank Umum, yang mana penerapannya dievaluasi oleh Unit Kerja Pengendalian Internal antara lain mencakup:

- Melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas operasional Bank secara independen untuk memastikan transaksi telah sesuai Peraturan Otoritas, Kebijakan dan Prosedur Internal Bank serta Prinsip Syariah.
- Melakukan pemantauan terhadap kualitas dan administrasi pembiayaan.
- Melakukan penilaian kualitas penerapan manajemen risiko di cabang-cabang.

Bank mendorong kesadaran dari setiap lini dalam organisasi untuk peduli pada pengendalian internal (*awareness*) yang mana hal ini bisa menciptakan *zero defect* dan menghilangkan potensi *fraud*.

Dan selama tahun 2018 Unit Kerja Pengendalian Internal telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- Melaporkan hasil pemeriksaan setiap bulan terhadap:
 - Bidang Operasional, yang meliputi:
 - Aktivitas *cash count*, *stock opname*, *review* dan *monitoring* pembukaan rekening dan transaksi harian.
 - Pemeriksaan operasional unit kerja di Kantor Pusat.
 - Monitoring* tindak lanjut atas hasil pemeriksaan sebelumnya, antara lain pelaksanaan dual control, pengelolaan user ID, pemenuhan prosedur terkait APU-PPT, kelengkapan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung, pengarsipan dan pengembangan karyawan.
 - Bidang Pembiayaan, yang meliputi:
 - Melakukan *monitoring* terhadap pemenuhan dokumen.
 - Mempertimbangkan posisi NPF menjadi “Boom Faktor” dalam penilaian cabang.
- Melaporkan hasil tindak lanjut komitmen unit kerja Kantor Pusat, Cabang dan Cabang Pembantu terhadap hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan, Kantor Akuntan Publik dan Satuan Kerja Audit Internal.

17. Permasalahan Hukum

Permasalahan Hukum	Jumlah		
	Perdata	Pidana	Hubungan Industrial
Telah selesai (mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	3	Nihil	Nihil
Dalam proses penyelesaian	10	Nihil	Nihil
Dewan Komisaris dan Direksi Bank Victoria Syariah	Nihil	Nihil	Nihil
Telah selesai (mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	Nihil	Nihil	Nihil
Dalam proses penyelesaian	Nihil	Nihil	Nihil
Total	13	Nihil	Nihil

Pokok Perkara	Status Penyelesaian	Pengaruh Terhadap Perusahaan	Sanksi Administrasi
Kasus PT Hanusa Persada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 675/Pdt.G/2016/PN. JKT.SEL Tanggal 27-09-2016	Masih dalam proses banding pada Pengadilan Tinggi Jakarta yg diajukan oleh Penggugat	-	-
Kasus Helga Anastasia dan Lintang Benowo Sakti (Penjamin Pembiayaan Siti Maryani) di Pengadilan Agama Karanganyar No.1215/Pdt.G/2016/PA.Kra tanggal 14-09-2016	Masih dalam proses kasasi, Bank Victoria Syariah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada Mahkamah Agung tanggal 01 Oktober 2018.	-	-
Kasus Topirin di Pengadilan Agama Tegal No. 0655/Pdt.G/2016/PA.TG tanggal 28-11-2016	Telah dikeluarkan Putusan Pengadilan Agama Tegal No. 0655/Pdt.G/2016/PA.Tg tanggal 01 Maret 2019	-	-
Kasus Reni Purba di Pengadilan Negeri Bandung No. 92/PDT.G/2017/PN.BDG tanggal 24-02-2017	Masih dalam proses Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Bank Victoria Syariah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 11 Desember 2017.	-	-
Kasus PT. Hardys Retailindo, PT. Grup Hardys dan Ir. I Gede Hardiawan (Pemegang Saham PT Sarana Rekreasi Keluarga Indonesia dan PT. Sarana Transportasi Indonesia Indah) di Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 29/Pdt.Sus-PKPU/ 2017 / PN.Niaga.Sby	Saat ini sedang proses pencocokan piutang dan dan pajak di Kantor Pengurus	-	-
Kasus Junnaini di Pengadilan Agama Slawi No. 1575/Pdt.G/2018/PA.Slw tanggal 05-06-2018	Telah dikeluarkan Putusan Pengadilan Agama Slawi No. 1575/Pdt.G/2018/PA.Slw tanggal 28 Februari 2019	-	-
Kasus Junnaini di Pengadilan Negeri Tegal No. No. 17/Pdt.G/2019/PN. Tanggal 05-03-2019	Masih dalam proses pengadilan	-	-
Kasus PT Panah Jaya Steel No. 1957/Pdt.G/2018/PA.JS Tanggal 08-06-2018	Masih dalam proses pengadilan	-	-
Kasus CV Yoga Mandiri Utama No. 3902/Pdt.G/2018/PA.Bdg Tanggal 03-09-2018	Masih dalam proses pengadilan	-	-
Kasus Sukuk Ijarah PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (TPS Food) I/2013 sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) Perkara PKPU No. 121/Pdt.Sus-PKPU/2018/ PN.Jkt.Pst Pihak pemohon PKPU PT. Sinarimas Asset Management dan PT. Asuransi Simas Jiwa Tanggal 14-08-2018	Masih dalam proses pengadilan	-	-
Kasus Agus Ardiansyah, Aan Nurlita dan Aep Kurnia (PT Hanusa Persada) No. 2570/Pdt.G/2018/PA.Krw. Tanggal 01-10-2018	Masih dalam proses pengadilan	-	-
Kasus Anang Ruslan No. 440/Pdt.G/2018/PN.Bdg Tanggal 22-10-2018	Telah dikeluarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 440/Pdt.G/2018/PN.Bdg pada tanggal 31 Januari 2019	-	-
Kasus Nastoni No. 498/Pdt.G/2019/PA.Srg Tanggal 26-02-2019	Masih dalam proses pengadilan	-	-

18. Nilai-Nilai Budaya Perusahaan

Untuk lebih mendukung pencapaian Visi dan penerapan Misi dalam aktivitas operasional Perusahaan, maka Bank Victoria Syariah telah menetapkan Nilai-Nilai Budaya Perusahaan (*Core Values*) sebagai dasar budaya

Perusahaan yang diharapkan dapat menjadi acuan utama bagi seluruh Sumber Daya Insani Bank Victoria Syariah tanpa terkecuali.

Adapun Nilai-nilai Budaya Perusahaan yang disepakati dan dianut oleh seluruh Karyawan Bank Victoria Syariah dapat disingkat H-E-B-A-T.

Penjabaran dari HEBAT tersebut adalah sebagai berikut :

- *Honest*
Kejujuran menjadi landasan budaya kerja yang sangat penting bagi setiap perusahaan, terlebih perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan seperti Bank Victoria Syariah. Seluruh Sumber Daya Insani (SDI) Bank Victoria Syariah tanpa terkecuali harus memiliki sikap kejujuran yang tinggi sehingga dapat dipercaya dalam mengemban amanah yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya.
- *Energic*
Seiring dengan era globalisasi dan perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat dinamis saat ini, semangat dan jiwa muda dalam setiap kepribadian karyawan Bank Victoria Syariah menjadi keharusan agar bank dapat terus berkembang dalam menjalankan aktivitas operasional-nya.
- *Brilliant*
Dalam mengembangkan bisnis secara berkesinambungan, setiap individu maupun team harus memiliki kemampuan yang brilliant untuk melihat setiap peluang maupun tantangan yang ada sehingga dapat menjaga pertumbuhan bisnis Bank Victoria Syariah secara berkesinambungan (*sustainable growth*).
- *Accurate*
Sebagai lembaga keuangan dan lembaga kepercayaan masyarakat, keakuratan data terkait dengan penyebaran informasi baik formal maupun informal sudah menjadi suatu kewajiban dari bank untuk dipenuhi.
- *Trust*
Bank merupakan lembaga kepercayaan bagi para nasabah untuk menyimpan dana, untuk itu unsur trust (kepercayaan) wajib menjadi nilai budaya yang harus melekat pada seluruh Sumber Daya Insani Bank Victoria Syariah.

19. Transaksi dengan Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan adalah suatu kondisi tertentu dimana kepentingan ekonomis Bank berbenturan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Dewan Komisaris maupun Direksi.

Selama tahun 2018, tidak terdapat transaksi maupun kejadian dalam bentuk apapun yang menyebabkan timbulnya benturan kepentingan pada anggota Dewan Komisaris maupun Direksi Bank Victoria Syariah.

20. Kode Etik

Bank telah memiliki Pedoman dan Kode Etik bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang

Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

21. Perlindungan Nasabah

Bank Victoria Syariah senantiasa mengutamakan kepentingan nasabah dan kepuasan nasabah dengan memberikan layanan terbaik. Bank tidak hanya menjual produk perbankan yang aman dan bermanfaat bagi masyarakat, namun juga berkomitmen untuk memberikan perlindungan yang maksimal kepada nasabah, memberikan layanan yang baik dan optimal serta secara pro aktif membantu menyelesaikan dengan cepat dan tepat setiap keluhan nasabah.

Bentuk Komitmen Perusahaan

Bentuk Komitmen Bank Victoria Syariah terhadap perlindungan nasabah tersebut, mencakup antara lain sebagai berikut:

- **Jaminan Perlindungan Simpanan Nasabah**
Bank memberikan jaminan perlindungan atas uang di simpan/ diinvestasikan oleh Nasabah melalui Lembaga Penjamin Simpanan
- **Pembentukan Pusat Pengaduan Nasabah (*Customer Care*)**
Bank telah membentuk pusat pengaduan konsumen yang dapat diakses oleh nasabah melalui beberapa sarana antara lain:
 - Call Center: (021) 5672771
 - Website: www.bankvictoriasyariah.co.id
 - Customer service di tiap – tiap kantor cabang terdekat dengan Nasabah.
- **Transparansi dalam memberikan informasi bagi hasil bulan terakhir bagi nasabah dana, yang ditampilkan pada papan informasi yang terletak di masing – masing kantor cabang.**
- **Bank menerapkan prinsip perlindungan data/ informasi nasabah, serta hanya menggunakan data/informasi tersebut sesuai dengan kepentingan dan tujuan.**
- **Memberikan layanan transfer *real time* kepada nasabah dalam rangka mendukung layanan prima kepada nasabah.**

Mekanisme Tindak Lanjut Pengaduan Nasabah

Bank Victoria Syariah menindaklanjuti setiap pengaduan Nasabah melalui mekanisme tindak lanjut sebagai berikut:

- **Pengkategorian pengaduan Nasabah terbagi menjadi 2 (dua) jenis pengaduan yaitu pengaduan lisan dan tertulis. Pengaduan melalui Call Center dianggap sebagai pengaduan lisan dan pengaduan melalui formulir pengaduan Nasabah sebagai pengaduan tertulis.**
- ***Service Level Agreement* (SLA) penyelesaian pengaduan Nasabah, waktu penyelesaian pengaduan lisan maksimal dalam waktu 2 (dua) hari kerja, pengaduan tertulis maksimal dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja dan bisa di perpanjang paling lama 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya dengan kondisi terdapat kendala komunikasi.**

Selama tahun 2018, seluruh pengaduan nasabah telah diselesaikan dengan baik.

22. Keterbukaan Informasi

Di dalam era keterbukaan dan transparansi Bank

Victoria Syariah memberikan informasi tentang kondisi keuangan dan non keuangan kepada para pihak yang memiliki kepentingan terhadap Bank Victoria Syariah, diantaranya melalui:

- Publikasi Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.
- Penyampaian informasi produk melalui brosur dan penjelasan langsung oleh petugas Bank Victoria Syariah, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai Transparansi Informasi Produk Bank Victoria Syariah dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
- Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan (*Annual Report*) Bank Victoria Syariah kepada pihak-pihak tertentu sesuai ketentuan dan dalam website Bank Victoria Syariah.
- Laporan Publikasi Triwulan
- Penyampaian Laporan *Good Corporate Governance* (GCG) kepada pihak-pihak tertentu sesuai ketentuan dan dalam website Bank Victoria Syariah.
- Menerapkan mekanisme pengaduan nasabah baik secara langsung di kantor Bank Victoria Syariah maupun melalui *Call Center* Bank Victoria Syariah, sedangkan terkait dengan penerapan strategi *Anti Fraud* telah diimplementasikan kebijakan *whistle blowing* melalui pelaporan email ke fungsi penanganan *Anti Fraud*.

Hal-hal lain yang dapat disampaikan terkait dengan transparansi kondisi Bank Victoria Syariah adalah sebagai berikut:

- Pemberian Remunerasi dan Fasilitas Lainnya
Pemberian remunerasi dan fasilitas lainnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.

Jenis dan jumlah remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, dan fasilitas lain dalam bentuk non natura) dan fasilitas lain dalam bentuk natura yang diterima oleh Dewan Komisaris, Direksi selama setahun sebagai berikut:

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH DITERIMA OLEH DEWAN KOMISARIS (KOTOR) TAHUN 2018	
	Jumlah (org)	Jutaan Rp.
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	3	1.011
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dll)- dlm rupiah;	3	-
JUMLAH REMUNERASI PER ORANG Tahun 2017*)	JUMLAH DEWAN KOMISARIS	
Diatas Rp. 2 miliar	-	
Diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2 miliar	-	
Diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	-	
Dibawah Rp. 500 juta	3	
Total	3	

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH DITERIMA OLEH DIREKSI (KOTOR) tahun 2018	
	Jumlah (org)	Jutaan Rp.
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	4	3.740
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dll)- dlm rupiah;	4	-
JUMLAH REMUNERASI PER ORANG Tahun 2017*)	JUMLAH DIREKSI	
Diatas Rp. 2 Miliar	-	
Diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2 miliar	-	
Diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	4	
Dibawah Rp. 500 juta	-	
Total	4	

- Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah
Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Bank kepada karyawan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukan.

Gaji yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai tetap Bank per bulan terangkum dalam perbandingan dibawah ini:

- Rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah adalah 12 : 1
- Rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah adalah 2 : 1
- Rasio gaji Komisaris tertinggi dan terendah adalah 1 : 1
- Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 3 : 1

23. Sekretaris Perusahaan

- Fungsi dan Tugas-Tugas Sekretaris Perusahaan
 - Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Website Bank Victoria Syariah.
 - Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu.
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham.
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.
 - Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
 - Sebagai penghubung antara Bank Victoria Syariah dengan pemegang saham, OJK, dan pemangku kepentingan lain.
 - Menyiapkan Daftar Khusus yang berkaitan dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan keluarganya baik yang ada dalam Bank

maupun afiliasinya, mencakup kepemilikan saham, hubungan bisnis dan peranan lain yang menimbulkan benturan kepentingan dengan Bank

- iii. Membuat daftar pemegang saham termasuk kepemilikan saham 5% atau lebih
- b. Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2018
Beberapa tugas yang telah dilaksanakan oleh Sekretaris Perusahaan di tahun 2018, antara lain:
 - i. Mengelola dan menyimpan Daftar Khusus (yaitu daftar berkaitan dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan keluarganya baik yang ada dalam Bank maupun afiliasinya, mencakup kepemilikan saham, hubungan bisnis dan peranan lain yang menimbulkan benturan kepentingan dengan Bank Victoria Syariah)
 - ii. Menyimpan dan mengelola Daftar Pemegang Saham termasuk kepemilikan saham 5% atau lebih serta Daftar Pemegang Waran secara bulanan.
 - iii. Menghadiri pelaksanaan Rapat Direksi sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali dan membuat minuta hasil Rapat Direksi.
 - iv. Membantu Direksi dalam menyelenggarakan RUPS Tahunan yang telah diselenggarakan pada tanggal 18 Mei 2018 serta RUPS Luar Biasa yang telah diselenggarakan pada tanggal 18 Mei 2018 dan 28 Desember 2018.
- c. Profil Sekretaris Perusahaan
Sekretaris perusahaan dalam pelaksanaan tugasnya ditunjuk sesuai dengan Surat Penunjukan Direksi Bank Victoria Syariah No 041/DIR-SK/JKT/VIII/2018.
- d. Struktur Sekretaris Perusahaan
Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Perusahaan Bank bertanggung jawab langsung kepada Kepala Divisi Kepatuhan dan Sekretaris Perusahaan.

24. Penilaian GCG secara *Self Assessment*

Untuk memastikan peningkatan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) kepada manajemen maupun kepada pemangku kepentingan lainnya, Bank Victoria Syariah melakukan *self assessment* atas pelaksanaan GCG 2 (dua) kali dalam setahun.

Meskipun belum menggunakan jasa pihak ketiga yang independen, pelaksanaan *self assessment* memiliki akurasi dan objektivitas yang baik karena dilakukan sesuai dengan metodologi yang diberikan oleh Regulator dan dengan melibatkan seluruh elemen Bank. Adapun hasilnya dilaporkan Ke Otoritas Jasa Keuangan dan kepada Bank Victoria International Tbk (BVIC) sebagai Entitas Utama dan atau pemegang saham. Pelaksanaan *self assessment* secara semesteran ini juga digunakan sebagai alat yang penting bagi BVIC untuk mengukur Tata Kelola Secara Terintegrasi dan tingkat kesehatan.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi BUS dan UUS, maka Bank diwajibkan untuk melakukan *self assessment* atas implementasi GCG di Bank Umum Syariah.

Hasil Penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan GCG melalui penetapan peringkat faktor-faktor GCG yang dilakukan secara faktual terhadap tata kelola (*governance*) terdiri dari 3 (tiga) aspek utama, yaitu : *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome*.

Pemeringkatan atas aspek-aspek tersebut didasarkan pada kinerja implementasi GCG di Bank yang telah ditetapkan kriteria minimumnya oleh Bank Indonesia dan Hasil *self assessment* GCG tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Periode	Nilai	Predikat
Semester I	1.64	Baik
Semester II	1.56	Baik

Dan parameter penilaian *self assessment* adalah:

Nilai	Predikat
< 1,5	Sangat Baik
< 2,5	Bagus
< 3,5	Cukup Baik
< 4,5	Kurang Baik
≤ 5	Tidak Baik

Berdasarkan hasil *self assessment* yang dilakukan, hasil penilaian GCG pada Bank tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Governance Structure

a. Faktor-Faktor positif aspek *governance structure*

- Bank telah melakukan re-organisasi di bulan Desember 2018 dimana fungsi Direktur Bisnis yang semula dirangkap oleh Direktur Utama menjadi berdiri sendiri/terpisah, dan telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Komisaris dengan surat No.001/DEKOM/JKT/I/2019 dan Direksi dengan surat No. 001/DIR-SK/I/2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang Struktur Organisasi, yang berlaku efektif per 28 Desember 2018.
- Bank telah melakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Insani (SDI) melalui sertifikasi kompetensi sesuai fungsinya, dan selama tahun 2018 Bank mengikutsertakan sertifikasi untuk Komisaris, Direksi, dan beberapa karyawan, yaitu sebagai berikut:
 - Manajemen Risiko sebanyak 39 orang (level 1, 2, 3, 4, dan 5)
 - *Refreshment* Manajemen Risiko sebanyak 3 orang (level 4)
 - Kepatuhan sebanyak 3 orang (level 1 dan 2)
 - *Treasury* sebanyak 2 orang (level advance)

- Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) Penilaian Jaminan PDP 1 sebanyak 1 orang.
- Sertifikasi Profesi bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebanyak 2 orang
- Bank telah memiliki Pedoman Tata Kerja yang mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat sebagaimana SKB Dewan Komisaris No. 002/DEKOM/JKT/I/2018 dan Surat Keputusan Direksi No. 002/DIR-SK/JKT/I/2018.
- Bank telah memiliki kebijakan, system dan prosedur tertulis yang memadai, dan secara berkala melakukan pengkinian serta menerbitkan kebijakan dan prosedur baru sesuai kebutuhan. Selama tahun 2018 bank telah menyelesaikan 38 (tiga puluh delapan) kebijakan dan prosedur
- b. Faktor-faktor negatif aspek *governance structure*
Dewan Pengawas Syariah (DPS) belum memiliki pegawai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, dan saat ini masih dirangkap oleh staf Divisi Kepatuhan dan Sekretaris Perusahaan, yang mana perangkatan ini masih terkendali serta tidak mengganggu aktivitas staf DKSP dimaksud.
- Bank melakukan *sharing session* di tahun 2018 sebanyak 13 (tiga belas) kali.
- Capaian kinerja cabang dan hasil pemeriksaan oleh Unit Kerja Pengendalian Internal berupa Laporan Hasil Pemeriksaan di monitor dan dipastikan tindaklanjutnya setiap bulan melalui *tele conference meeting* oleh yang dipimpin oleh Direktur Operasi.
- *Zero Defect* dipantau secara ketat oleh unit Kerja Pengendalian Internal.
- Melakukan *refreshment* atas penerapan program APU PPT pada tanggal 20 Oktober 2018, yang diikuti oleh seluruh UKK APU PPT Kantor Cabang dan Cabang Pembantu termasuk karyawan baru yang belum pernah mengikutinya.
- Pelatihan/*training* dalam rangka peningkatan mutu keterampilan SDI terlaksana secara berkala dan berkesinambungan serta telah sesuai dengan Rencana Bisnis Bank tahun 2018.
- b. Faktor-faktor negatif aspek *governance process*
Atas rencana pemeriksaan SKAI belum berjalan sebagaimana jadwal yang ada, yang mana hal ini karena aktivitas pemeriksaan SKAI diganti dengan aktivitas pemeriksaan kelengkapan dokumen beberapa nasabah *multi finance* dalam rangka antisipasi kondisi yang *unfavourable* pada bisnis dimaksud.

Governance Process

- a. Faktor-faktor positif aspek *governance process*
 - Pengambilan keputusan rapat Dekom telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.
 - Direksi telah mengkomunikasikan RBB kepada pemegang saham Bank dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.
 - Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas KMR dan SKMR.
 - Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa Bank telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI dan pendapat syariah dari DPS.
 - Bank melakukan identifikasi dan inventarisasi fasilitas pembiayaan untuk pencapaian rasio pembiayaan UMKM minimal 20% pada Desember 2018.
 - Bank melaksanakan Literasi, Edukasi dan Inklusi Keuangan selama tahun 2018 sebagai berikut:
 - Tanggal 10 Oktober 2018 di Solo
 - Tanggal 16 Oktober 2018 di Serang
 - Tanggal 17 Oktober 2018 di Solo
 - Tanggal 14 November 2018 di Serang
 - Bank melakukan BCP Live production (BI-RTGS, SSSS, dan ETP) di KC Bekasi pada tanggal 21 Desember 2018 dan berhasil sukses.
 - Bank menerapkan program aplikasi E-Policy pada intranet BVIS sejak tanggal 21 September 2018.
 - Realisasi atas rencana pemeriksaan SKAI terpenuhi.
- c. *Governance Outcome*
 - a. Faktor-faktor positif aspek *governance outcome*
 - Selama tahun 2018 tidak terjadi benturan kepentingan anggota Dekom, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dapat mengurangi asset Bank.
 - Bank melakukan re-definisi Visi dan Misi dibulan November 2018 dan melakukan sosialisasi kepada karyawan.
 - Bank berhasil memenuhi pencapaian rasio pembiayaan UMKM sebesar 20,21% dibulan Desember 2018.
 - Bank menambah 1(satu) jaringan kantor berupa Layanan Syariah Bank (LSB) pada tanggal 22 Oktober 2018 di Cabang Bank Victoria International Tbk. – Fatmawati, Jakarta Selatan.
 - Selama tahun 2018 tidak terjadi fraud.
 - Komitmen atas temuan OJK tahun 2018 terpenuhi sesuai *target date*.
 - Bank dapat memenuhi capaian 8 (delapan) rasio keuangan dari 13 (tiga belas) target pada RBB 2018.
 - Bank telah melaksanakan prinsip kehati-hatian, prinsip syariah, APU-PPT dan Peraturan Perundangan lainnya.
 - Seluruh produk yang dikeluarkan oleh Bank telah disesuaikan dengan fatwa DSN-MUI dan dilengkapi dengan pendapat/opini DPS.
 - Kinerja Bank di semester II tahun 2018 menunjukan hal yang positif dibandingkan dengan semester II tahun 2017, antara lain:
 - Total aset meningkat dari Rp.2.003 Milyar menjadi Rp.2.126 Milyar

- Laba tahun berjalan meningkat dari Rp.4.593 Juta menjadi Rp.4.974 juta.
 - Rasio KPMM meningkat dari 19,29% menjadi 22,07% jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rasio KPMM yang ditetapkan dalam POJK No.21/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum BUS pasal 2 bahwa rasio KPMM sesuai profil risiko Bank dengan peringkat 2 (dua) adalah 9% s/d dibawah 10%.
 - Bank telah memenuhi ketentuan yang berlaku tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD).
- b. Faktor-faktor negatif aspek governance outcome
Masih terdapat denda atas kesalahan pelaporan LSMK.

Berdasarkan pelaksanaan GCG selama tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa kondisi pelaksanaan GCG di Semester II 2018 lebih baik dibandingkan dengan pelaksanaan GCG di Semester I 2018, dengan beberapa pertimbangan:

1. Perbaikan pada Governance Structure yaitu antara lain:
 - a. Melaksanakan pemisahan tugas direktur utama dimana sebelumnya merangkap membawahi fungsi bisnis.
 - b. Peningkatan kompetensi bagi pejabat bidang tertentu melalui sertifikasi, termasuk sertifikasi Profesi Dewan Pengawas Syariah (DPS).
 - c. SKAI telah melaksanakan seluruh jadwal rencana pemeriksaan sesuai rencana kerja.
2. Perbaikan Governance Process
 - a. Mengkinikan hampir seluruh kebijakan dan prosedur Bank, termasuk melakukan evaluasi parameter penilaian profil risiko.
 - b. *Sharing session* dilaksanakan sebagai bentuk pemahaman terhadap pengelolaan fungsi Bank dan selama tahun 2018 telah dilaksanakan sebanyak 13 (tiga belas) kali.
 - c. Melaksanakan literasi, edukasi dan inklusi keuangan.
 - d. Sebagai bentuk kepedulian dan kontribusi kepada masyarakat serta lingkungan, Bank melaksanakan CSR secara konsisten dan penyaluran dana UPZ sesuai dengan peruntukannya.
 - e. Bank sudah berhasil melaksanakan *Business Continuity Plan* (BCP) untuk SKN BI pada tanggal 18 Mei 2018 dan BI-RTGS/BI-SSSS/BI-ETP pada tanggal 21 Desember 2018.
3. Perbaikan Governance Outcome
 - a. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) senantiasa diatas ketentuan profil Bank dengan rata-rata diatas 20 %.
 - b. Rasio *Non Performing Finance* (NPF) sebesar 3,46% masih dibawah batasan rasio yang

- ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Penghargaan dari pihak independen yaitu:
- Financial Award 2018 “*The Most Efficient Bank*” kategori Bank Syariah yang diberikan oleh Bisnis Indonesia tanggal 27 Agustus 2018.
 - *Indonesia Best Banking Award* “Bank Berpredikat Sehat” Kategori Syariah BUKU I yang diberikan oleh Warta Ekonomi tanggal 30 November 2018.
 - *Top 50 Bank Ranks 2018* yang diberikan oleh Bisnis Indonesia.

25. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Manajemen Risiko Tahun 2018

Gambaran Umum Manajemen Risiko

Manajemen risiko memiliki peran dalam meningkatkan kualitas pengelolaan Bank. Dengan pertumbuhan dan perkembangan bisnis yang makin pesat, maka Bank Victoria Syariah menerapkan pola pengelolaan risiko secara terpadu yaitu dengan mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan eksposur risiko diseluruh lini organisasi. Untuk mendukung penerapan manajemen risiko yang efektif, Bank Victoria Syariah membentuk kerangka manajemen risiko yang dituangkan dalam kebijakan, prosedur, limit-limit transaksi dan kewenangan dan ketentuan lain yang berlaku di seluruh lingkup aktivitas usaha Bank Victoria Syariah.

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan Manajemen Risiko di Bank Victoria Syariah, didasarkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah serta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut.

Unit manajemen risiko di Bank Victoria Syariah merupakan suatu fungsi yang bersifat independen terhadap unit bisnis maupun terhadap unit satuan audit internal. Namun ketiga unit tersebut saling berkaitan dan berperan aktif dalam menerapkan manajemen risiko dengan kewenangan yang berbeda sebagai *first line, second line, & third line of defense*. Penerapan konsep tersebut dilaksanakan secara konsisten sehingga menjaga independensi dalam proses pengambilan keputusan, agar tidak memihak, menguntungkan unit kerja operasional tertentu atau mengabaikan unit operasional kerja lainnya.

Meningkatkan Peran Manajemen Risiko

Kegiatan usaha perbankan syariah senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Perkembangan lingkungan dan eksternal perbankan syariah yang semakin pesat mengakibatkan risiko kegiatan usaha perbankan syariah semakin kompleks. Dalam hal ini perbankan syariah dituntut untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan melalui penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip syariah serta sejalan dengan aturan baku yang dikeluarkan oleh *Islamic Financial Services Board* (IFSB). Seiring dengan perkembangan

globalisasi, teknologi informasi dan inovasi produk serta aktivitas perbankan syariah telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis dan saling terkait antar masing-masing sektor keuangan baik dalam produk dan kelembagaan maupun kepemilikan yang menyebabkan meningkatnya eksposur risiko.

Menghadapi kondisi tersebut, Bank Victoria Syariah memperhatikan seluruh risiko yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha. Melalui penerapan manajemen risiko yang menyeluruh, dan berupaya untuk meningkatkan kualitas manajemen risiko secara lebih baik dan penetapan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) serta toleransi risiko (*risk tolerance*) sesuai dengan kompleksitas dan karakteristik usaha Bank.

Penerapan kerangka manajemen risiko dilakukan antara lain melalui organisasi yang tersrtuktur, serangkaian prosedur dan metodologi yang berguna untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, mengendalikan dan melaporkan risiko-risiko yang sudah ada maupun yang mungkin akan timbul.

Struktur manajemen risiko menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi unit-unit organisasi serta elemen penting dalam memastikan kecukupan dan kualitas SDI untuk mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif. Unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian intern dan unit kerja manajemen risiko, independen terhadap unit kerja operasional maupun bisnis. Kerangka pendelegasian wewenang disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas produk, tingkat risiko yang akan timbul serta pengalaman dan keahlian personel yang menangani.

Bank Victoria Syariah mengembangkan kebijakan manajemen risiko sebagai arahan tertulis dalam penerapan manajemen risiko dan harus sejalan dengan visi, misi dan strategi bisnis dimana penyusunannya harus dikoordinasikan dengan fungsi atau unit kerja terkait. Kebijakan dan prosedurnya didesain dan diimplementasikan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha, risk appetite, risk tolerance, profil risiko serta peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas dan/ atau praktek perbankan yang sehat.

Secara konsisten Bank Victoria Syariah memperbaiki kebijakan, menyempurnakan prosedur dan menyesuaikan batas toleransi risiko untuk memastikan keseimbangan yang optimal antara kualitas aset dan profitabilitas usaha, serta menjaga agar penerapan manajemen risiko sejalan dengan perubahan ekonomi makro maupun perkembangan bisnis Bank Victoria Syariah dan induk perusahaan.

Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan manajemen risiko bank mengacu pada POJK No 65/POJK.03/2016 tentang penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan ketentuan terkait risiko lainnya serta best practice penerapan manajemen risiko di

perbankan. Bank mengelola 10 risiko, yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, dan risiko kepatuhan, risiko investasi, dan risiko imbal hasil.

Sejalan dengan pertumbuhan bisnis maka Bank harus meningkatkan pula monitoring atas risiko-risiko yang ada dan selalu dijaga serta disempurnakan agar lebih baik dan dapat memberikan mitigasi Risiko-risiko yang mungkin timbul.

Penerapan atas Manajemen Risiko yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- Melakukan rapat Komite Manajemen Risiko (KMR) rutin secara berkala.
- Melakukan pemantauan/*monitoring* terhadap Risiko yang melekat pada aktivitas dan kegiatan bisnis Bank.
- Membuat kajian Manajemen Risiko terkait dengan produk dan aktifitas baru Bank.
- Melakukan evaluasi tentang hasil perbaikan atau mitigasi yang telah dilakukan apakah sudah dilakukan dengan efektif.
- Membuat Laporan Tingkat Kesehatan Bank secara berkala dengan menggunakan pendekatan Risiko (*Risk-based Bank Rating/ RBBR*), dengan cakupan penilaian meliputi faktor-faktor sebagai berikut: Profil Risiko (*Risk Profile*), penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), aspek Rentabilitas (*Earnings*) dan Pemenuhan Permodalan (*Capital*) untuk menghasilkan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank dan menyempurnakan identifikasi Risiko dalam laporan profil Risiko maupun laporan Tingkat Kesehatan Bank agar lebih akurat sehingga dapat dilakukan antisipasi dan mitigasi yang lebih cepat dan lebih baik.
- Meningkatkan Budaya Risiko pada seluruh jajaran organisasi (*risk taking unit*) dan setiap aspek kegiatan operasional Bank antara lain melalui rapat-rapat di masing-masing unit kerja dan dalam pengambilan keputusan bisnis.
- Mengikutsertakan jajaran Komisaris, Direksi, pejabat eksekutif Bank dan Karyawan untuk mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko sesuai ketentuan Program Sertifikasi Manajemen Risiko termasuk *Refreshment Program*.
- Meningkatkan peran Unit Kerja Independen (Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan dan Unit Pengendalian Internal) dalam rangka memperbaiki fungsi pengendalian intern.
- Mempertimbangkan hasil penilaian oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dalam kajian dan atau Opini Kepatuhan dalam proses usulan penyediaan dana Tresuri dan pembiayaan untuk jumlah tertentu oleh unit terkait.

Jenis Risiko dan Pengelolaannya

Manajemen risiko pada aktivitas fungsional Bank Victoria Syariah meliputi atas 10 (sepuluh) jenis risiko sebagaimana penjelasan sebagai berikut:

1. Risiko Kredit

Adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Proses

kredit dan pengelolaan risiko kredit dilakukan secara terintegrasi oleh unit bisnis, unit operasional, dan unit risiko kredit yang dalam pelaksanaannya didukung oleh sistem yang terintegrasi dan dilakukan secara *end to end*.

Key Risk Indicator yang digunakan dalam risiko kredit adalah sebagai berikut:

- a. Kualitas pembiayaan yang ditunjukkan dengan *Non Performing Financing* (NPF)
- b. Kualitas penyediaan dana dan besarnya *coverage* yang dibentuk, pembiayaan yang direstrukturisasi
- c. Tingkat konsentrasi pembiayaan
- d. Strategi penyediaan dana dan sumber timbulnya penyediaan dana
- e. Faktor eksternal

2. Risiko Pasar

Adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. *Key Risk Indicator* untuk risiko pasar yaitu sebagai berikut:

- a. Perubahan nilai tukar
- b. *Cover* risiko atas transaksi valuta asing dengan menggunakan metode pengukuran *Value at Risk* (VaR).
- c. Penilaian volume dan komposisi portofolio
- d. Potensial kerugian (*potensial loss*) dari risiko *Benchmark Suku Bunga dalam Banking Book* (RBRR)
- e. Strategi dan kebijakan bisnis

3. Risiko Likuiditas

Adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. *Key Risk Indicator* untuk risiko likuiditas adalah sebagai berikut:

- a. Kecukupan rasio *Secondary Reserve*
- b. Tingkat *Financing to Deposit Ratio*
- c. Komposisi dari Aset, Kewajiban dan Transaksi Rekening Administratif
- d. Konsentrasi dari aset dan kewajiban
- e. Kerentanan pada kebutuhan pendanaan
- f. Akses pada sumber-sumber pendanaan

4. Risiko Operasional

Adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Bank melakukan manajemen risiko operasional yang efektif agar dapat menekan kerugian akibat risiko operasional. *Key Risk Indicator* risiko operasional adalah sebagai berikut:

- a. *Selfassessment* terhadap potensi risiko perusahaan
- b. Kerugian aktual akibat risiko operasional
- c. Karakteristik dan kompleksitas bisnis
- d. Sumber daya insani
- e. Teknologi informasi dan infrastruktur pendukung
- f. Kejadian fraud
- g. Kejadian eksternal

5. Risiko Hukum

Adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko hukum dapat terjadi diseluruh aspek transaksi dan operasional yang ada di Bank Victoria Syariah, termasuk pula perjanjian yang dilakukan nasabah maupun pihak lain yang dapat berdampak terhadap risiko-risiko lain antara lain risiko kepatuhan, risiko pasar, risiko reputasi maupun risiko likuiditas.

Key Risk Indicator risiko hukum adalah sebagai berikut:

- a. Besarnya gugatan pihak ketiga yang berpotensi menimbulkan kerugian bank
- b. Faktor litigasi
- c. Faktor kelemahan perikatan
- d. Faktor ketiadaan/perubahan perundang-undangan

6. Risiko Strategik

Adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Manajemen Risiko Strategik dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan strategis (*planning and budgeting*) yang mencakup penyelarasan strategi perusahaan.

Key Risk Indicator untuk risiko strategik adalah sebagai berikut:

- a. Kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis
- b. Strategi berisiko tinggi dan Strategi berisiko rendah
- c. Posisi Bisnis Bank
- d. Pencapaian Rencana Bisnis Bank (RBB)

7. Risiko Kepatuhan

Adalah risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta Prinsip Syariah. Pada praktiknya, aktivitas bisnis Bank terkait dengan banyak peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku, seperti risiko kredit terkait dengan ketentuan kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank Umum Syariah, Kualitas Aktiva Produktif, Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP), Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD), risiko pasar terkait dengan ketentuan Posisi Devisa Neto (PDN). *Key Risk Indicator* untuk risiko kepatuhan adalah sebagai berikut:

- a. Jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan
- b. Frekuensi pelanggaran yang dilakukan
- c. Pelanggaran terhadap ketentuan atau standar bisnis yang berlaku umum untuk transaksi keuangan tertentu

8. Risiko Reputasi

Adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. Cakupan risiko reputasi cukup luas dan tidak terbatas hanya pada reputasi dari sebuah bank saja, namun dapat

memicu risiko lainnya bahkan risiko reputasi dapat berdampak pada munculnya risiko lainnya. Risiko reputasi pun dapat mempengaruhi kinerja sektor industri perbankan secara menyeluruh. Kejadian risiko mungkin terjadi hanya pada satu bank yang pengendalian risikonya tidak memadai, selanjutnya reputasi dari masing-masing produk atau sektor dapat mempengaruhi keseluruhan industri perbankan.

Key Risk Indicator yaitu sebagai berikut:

- a. Pemberitaan negatif di media massa
- b. Pengaruh reputasi negatif dari pemilik bank dan perusahaan terkait
- c. Pelanggaran etika bisnis
- d. Kompleksitas produk dan kerja sama bisnis bank
- e. Frekuensi materialitas dan eksposur pemberitaan negatif
- f. Frekuensi dan materialitas keluhan nasabah

9. Risiko Imbal Hasil (Rate of Return Risk)

Adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank.

Key Risk Indicator yaitu sebagai berikut:

- a. Tingkat bagi hasil kepada nasabah Bank Victoria Syariah dibandingkan dengan industri
- b. Komposisi dana pihak ketiga
- c. Strategi dan kinerja bank dalam menghasilkan laba/pendapatan
- d. Perilaku nasabah dana pihak ketiga

10. Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*)

Adalah risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis profit and loss sharing.

Key Risk Indicator adalah sebagai berikut:

- a. Komposisi dan tingkat konsentrasi pembiayaan berbasis bagi hasil
- b. Kualitas pembiayaan berbasis bagi hasil
- c. Faktor eksternal

Proses pengidentifikasian Risiko-Risiko yang melekat (Risiko Inheren) dilakukan oleh unit kerja terkait/ *risk taking unit* dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. Identifikasi Risiko-risiko tersebut terus dilakukan dan disempurnakan bersama-sama dengan penentuan limit/ *risk appetite* dan penghitungan bobot untuk masing-masing Risiko dan dibicarakan dalam rapat Komite Manajemen Risiko sehingga dapat lebih menggambarkan profil Risiko Bank yang sebenarnya.

Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko diterapkan dengan gambaran sebagai berikut :

1. Tata kelola risiko

Sebagai bagian dari tata kelola risiko, Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah di Bank Victoria Syariah telah melaksanakan pengawasan aktif, antara lain:

- Pengawasan aktif Dewan Komisaris melalui komite yang berada di bawahnya, yaitu Komite

Audit (Audit Committee) yang membantu dalam pelaksanaan fungsi pengawasan internal, pengawasan yang berkaitan dengan pelaporan auditor internal dan eksternal; Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring Committee*), yang membantu dalam mengawasi efektivitas pengelolaan risiko Bank dan Komite Remunerasi dan Nominasi (*Remuneration and Nomination Committee*), yang membantu dalam mengawasi kebijakan remunerasi dan nominasi.

- Pengawasan aktif Direksi melalui rapat Direksi yang dilakukan secara rutin, melalui rapat-rapat Direksi dan rapat Komite yang berada di bawah Dewan Direksi, yaitu Komite Aset, Liabilitas dan Dana Syariah Sementara (*Asset, Liability Committee & Temporary Syariah Fund Management/ALSYCO*), Komite Kebijakan dan Manajemen Risiko, Komite Pembiayaan, Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Pengembangan/Penghentian Produk serta Komite Sanksi dan Personalia.
 - Dewan Pengawas Syariah bertugas untuk memastikan bahwa transaksi dan operasional Bank telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Termasuk di dalam tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syariah antara lain memberikan arahan dan masukan dari sisi kesesuaian terhadap syariah untuk produk dan aktivitas baru serta melakukan pengawasan dan check on the spot secara sampling atas penerapan prinsip syariah pada unit-unit bisnis maupun cabang. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah juga bertugas meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum memiliki fatwa.
2. Kerangka manajemen risiko dalam bentuk kebijakan, prosedur, maupun limit
- Bank telah menyusun ketentuan internal mengenai manajemen risiko, pembiayaan operasional, pasar, likuiditas serta prosedur terkait dengan prosedur dan produk pembiayaan per segmen bisnis dan kegiatan operasional Bank lainnya. Ketentuan internal Bank Victoria Syariah disusun berdasarkan hierarki yang terdiri dari level kebijakan dan prosedur, dimana kebijakan mengatur hal-hal yang bersifat high level sementara prosedur mengatur hal-hal yang lebih bersifat teknis.

Penyusunan ketentuan internal dilakukan dengan melibatkan unit kerja terkait, termasuk di dalamnya unit manajemen risiko, kepatuhan, legal dan internal audit.

Dalam pembiayaan, Bank memperhatikan bahwa pembiayaan kepada satu group usaha nasabah tidak melebihi Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan. Dan juga memastikan bahwa transaksi dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan, maka Bank mengimplementasikan limit terkait dengan pemutusan pembiayaan, operasional secara berjenjang untuk mencegah terjadinya konsentrasi pemutusan pada satu level tertentu saja.

3. Proses manajemen risiko yang mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko; kecukupan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas, serta kecukupan sistem informasi manajemen risiko.

Hal-hal yang telah dilakukan terkait dengan aktivitas ini antara lain:

- Melakukan analisis risiko *inheren* atas setiap produk dan aktivitas Bank yang dilakukan oleh masing-masing pemilik produk, dan selanjutnya dikaji antara lain oleh unit manajemen risiko, kepatuhan dan legal;
- Melakukan penilaian profil risiko secara berkala atas 10 (sepuluh) jenis risiko dan melaporkannya kepada manajemen dan Otoritas Jasa Keuangan. Metodologi atas penilaian profil risiko dikaji dan dikembangkan secara berkala;
- Proses rekrutmen pegawai secara selektif;
- Peningkatan kualitas SDI secara berkelanjutan melalui pelaksanaan pelatihan yang sesuai dengan rencana pelatihan dan disusun berdasarkan kebutuhan kompetensi pegawai
- Secara aktif melakukan sosialisasi dan sharing session, baik karyawan *front-end*, *back office* dan karyawan Kantor Pusat Non Operasional, yang mendukung peningkatan kompetensi pegawai serta peningkatan pengetahuan pegawai mengenai proses operasional Bank;
- Melakukan penilaian kinerja portofolio pembiayaan secara berkala oleh unit bisnis dan unit support bisnis (*reviewer*) untuk seluruh segmen pembiayaan;
- Melakukan *assesment* atas kegiatan terkait dengan IT dan *Business Continuity Management* (BCM).

4. Kecukupan sistem pengendalian risiko yang mencakup pengendalian internal oleh unit Internal Audit dan *Anti Fraud* Team serta independent review yang dilakukan oleh auditor eksternal dan juga pihak konsultan.

Satuan Kerja Audit Internal melaksanakan audit secara berkala dan atau melakukan audit khusus atas permasalahan yang muncul di Bank. Laporan audit tersebut disampaikan kepada manajemen untuk dapat ditindaklanjuti segera dan disampaikan kepada unit manajemen risiko dan kepatuhan untuk ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan kualitas manajemen risiko. Untuk beberapa kasus tertentu, audit dapat dilakukan oleh auditor eksternal berdasarkan persetujuan manajemen, sehingga diperoleh penilaian yang independen dari pihak lain di luar Bank.

Bank telah memiliki Bagian *Anti Fraud* yang berkoordinasi erat dengan unit internal audit atas permasalahan dan kasus yang muncul. Bersama dengan team dari Divisi SDI, telah dibentuk Komite Sanksi yang memberikan pandangan yang komprehensif atas permasalahan atau kasus yang perlu diselesaikan. Divisi *Anti Fraud* melaporkan tindak lanjutnya secara berkala kepada manajemen dan/atau Direktur Utama.

Penilaian Profil Risiko

Penilaian profil risiko bertujuan untuk memberikan informasi kepada seluruh *stakeholder* mengenai kondisi risiko usaha yang dihadapi bank. Profil risiko meliputi penilaian terhadap risiko inheren dan efektifitas kualitas penerapan manajemen risiko.

Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko mencerminkan penilaian terhadap kecukupan Sistem Pengendalian Risiko yang mencakup seluruh pilar penerapan Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Selama 2018 Bank telah melakukan *self assessment* terhadap penilaian profil Risiko Bank. Peringkat komposit profil risiko Bank Victoria Syariah adalah 2 atau *low to moderate* dengan penilaian Risiko *Inheren* adalah Komposit 2 atau *Low to Moderate* dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Bank adalah Komposit 2 atau *Satisfactory*.

Hasil penilaian masing-masing jenis risiko pada bulan Desember 2018 yang dilakukan secara *self assessment* adalah:

No	Nilai	Penilaian Individu per 31 Desember 2018		
		Risiko Inheren	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Tingkat Risiko Komposit
1.	Kredit	3 (Moderate)	Satisfactory	2 (Low to moderate)
2.	Pasar	2 (Low to moderate)	Satisfactory	2 (Low to moderate)
3.	Likuiditas	2 (Low to moderate)	Satisfactory	2 (Low to moderate)
4.	Operasional	2 (Low to moderate)	Satisfactory	2 (Low to moderate)
5.	Hukum	2 (Low to moderate)	Satisfactory	2 (Low to moderate)
6.	Strategik	2 (Low to moderate)	Satisfactory	2 (Low to moderate)
7.	Kepatuhan	2 (Low to moderate)	Satisfactory	2 (Low to moderate)
8.	Reputasi	1 (Low)	Satisfactory	1 (Low)
9.	Imbal Hasil	3 (Moderate)	Satisfactory	2 (Low to moderate)
10.	Investasi	3 (Moderate)	Satisfactory	2 (Low to moderate)
Peringkat Komposit		2 (Low to moderate)	Satisfactory	2 (Low to moderate)

Konsolidasi dan Integrasi Manajemen Risiko dengan Perusahaan Induk

Sesuai dengan POJK No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi keuangan, serta dalam rangka mensinergikan dan mengintegrasikan penerapan manajemen risiko antara perusahaan anak dan perusahaan induk, Bank Victoria Syariah selaku perusahaan anak selalu mendukung konsolidasi penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh entitas utama yaitu Bank Victoria International, Tbk.

4 BAB 4





Profil Dewan Komisaris

Profil Direksi

Profil Dewan Pengawas Syariah

Profil Pejabat Eksekutif

Profil Pimpinan Cabang

Profil Komite

Produk dan Layanan



Profil Komisaris

Sugiharto SE, MBA

Komisaris Utama

- WNI, lahir di Solo 13 Januari 1955
 - Sarjana Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, tahun 1979
 - Master Of Business Administration (MBA), The University Of Texas - Austin, USA tahun 1996
-
- 1981-1999 : Bank Exim, dengan berbagai jabatan yaitu Credit Analyst, Treasury Manager (New York), Head of Money Market and Foreign Exchange Trading, Head of Assets and Liabilities Management Group, Head of Trade and Financial Services Division (Singapore), Head of Treasury & Capital Market, Bank Exim – (Head Office, Jakarta).
 - 1999-2009 : Bank Mandiri, dengan berbagai jabatan yaitu Vice President Treasury and Capital Market, Vice President Of Financial Institution and Overseas Network, Executive Vice President/Head Of Treasury Group.
 - 2009-2010 : President Director Dana Pensiun Bank Mandiri
 - 2010-2014 : Bank Mega dengan berbagai jabatan yaitu Managing Director Treasury and International Banking, Treasury and International Banking Advisor.
 - 2007-2011 : President of Indonesia Foreign Exchange Dealer Association ACII/Forexindo) dua periode tahun 2007-2011.
 - Sejak Juni 2015 sebagai Komisaris Utama Bank Victoria Syariah



Sari Idayanti

Komisaris

- WNI, lahir di Jakarta 21 Desember 1966
 - Sarjana Ekonomi Universitas Jayabaya Jakarta, tahun 1990
-
- 1989-1995 : PT. Bank Bira dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Seksi Akunting & Administrasi Keuangan
 - 1995-2007 : PT. Bank Victoria International Tbk, sebagai Kepala Divisi Akuntansi dan Pengawasan Keuangan
 - September 2007 - Mei 2008 : PT. Bank Swaguna dengan berbagai jabatan yaitu Direktur Operasional dan Direktur Utama
 - April 2010 - September 2016 : PT. Bank Victoria Syariah dengan berbagai jabatan yaitu Direktur Utama dan Direktur Operasional
 - Sejak 8 September 2016 sebagai Komisaris PT. Bank Victoria Syariah



Djoko Nugroho

Komisaris – Independen

- WNI, lahir di Klaten 7 Maret 1962
 - Sarjana Matematika di Institut Teknologi Bandung, tahun 1986
-
- 1987-1989 : PT Bank Panin sebagai Account Officer
 - 1990-1993 : PT Bank Summa dengan jabatan terakhir sebagai Pimpinan Cabang
 - 1997- 2003 : PT Bank IFI dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Divisi Unit Usaha Syariah
 - 2007 : PT Bank Victoria International, Tbk
 - 2008-2010 : PT. Bank Swaguna dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Kepatuhan
 - 2010-2016 : PT. Bank Victoria Syariah dengan berbagai jabatan yaitu Direktur Kepatuhan dan Direktur Operasional
 - Sejak 8 September 2016 sebagai Komisaris Independen PT. Bank Victoria Syariah



Halaman ini sengaja dikosongkan



Profil Direksi

Firman Ananda Moeis

Direktur Utama

- WNI, lahir di Jakarta 29 Mei 1961
 - Business Administration (Bachelor Degree), University of Southern California (USA)
-
- 1985-1989 : Bank Swaguna sebagai Branch Manager
 - 1989-2016 : PT. Bank Niaga, Tbk dan PT. CIMB Niaga, Tbk dengan berbagai jabatan yaitu Branch Operation Head Cabang Gambir, Marketing Division Head Cabang Gambir, Branch Manager Cabang Lampung, Business Manager Area Fatmawati & Gambir, Banking Head Commercial Cabang Utama Gajah Mada, Area Manager UKM untuk Area Lampung-Bandung-Semarang-Jogyakarta-Surabaya-Bali, Area Manager Jkt-I Sales and Services, Head of Commercial Linkage dan Head of Syariah Banking yang membawahi 29 Cabang Syariah di wilayah Sumatera, Jawa , Bali dan Indonesia Timur.
 - Sejak Mei 2016 sebagai Direktur Utama Bank Victoria Syariah



Andy Sundoro

Direktur Bisnis

- WNI, lahir di Yogyakarta 11 Maret 1968
 - Sarjana Teknik Elektro, Universitas Trisakti Jakarta, tahun 1990
 - Master of Business Administration, Colorado State University - USA, tahun 1994
-
- 1989 : PT Suwantara Indonesia sebagai Engineering Sales
 - 1994-1997 : PT Bank LTCB Central Asia sebagai Account Officer
 - 1997-2005 : PT Bank Panin Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Senior Manager Corporate Banking
 - 2005-2006 : PT Bank DBS Indonesia sebagai Relationship Manager Enterprise Banking
 - Juli 2006 - 2015 : PT Bank Victoria International, Tbk dengan berbagai jabatan yaitu Kepala Divisi Commercial Banking, Kepala Divisi Corporate Banking, dan Kepala Divisi Credit Analyst
 - Sejak Juni 2015 sebagai Direktur PT Bank Victoria Syariah



Deddy Effendi Ridwan

Direktur Operasional

- WNI, lahir di Pekanbaru 19 November 1958.
 - Sarjana Ekonomi - Akuntansi, Universitas Indonesia, tahun 1986
 - Magister Ekonomi Syariah, Universitas Trisakti, tahun 2015
-
- 1986-2015 : PT. Bank Niaga, Tbk dan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk dengan berbagai jabatan yaitu Internal Audit (Credit, Operation, IT, Human Resources dan pengembangan metode/kebijakan Audit), Area Operation Head – Wilayah Jakarta, Control Unit Head Area Jakarta, Group Head of System and Operation, yang merangkap Information Security, Group Head of Finance and Accounting, Group Head of Budgeting & Cost Management dan Corporate Banking Advisor
 - Proyek khusus, 1998 : PT. Bank Niaga, Tbk yaitu Project Perubahan Core Banking System; Business Process Reengineering dan pengembangan/pemeliharaan System Parameter pada Group Teknologi Sistem Informasi
 - Proyek khusus, 2008-2009 : PT. Bank CIMB Niaga, proyek integrasi proses di Finance & Accounting Bank hasil merger
 - 2008-2010 : Niaga Management Citra (afiliasi perusahaan Bank CIMB Niaga) sebagai Komisaris
 - 2010-2013 : PT. Bank CIMB Niaga, Tbk sebagai Head of Finance
 - 2015-2016 : PT. Bank BTN, Tbk sebagai Anggota Komite Audit
 - Sejak 8 September 2016 sebagai Direktur Bank Victoria Syariah



Nurani Raswindriati

Direktur Kepatuhan

- WNI, lahir di Malang 1 Juni 1962
 - Sarjana Ekonomi-Akuntansi, Universitas Padjadjaran-Bandung, tahun 1986
 - Magister Manajemen Universitas Gajah Mada-Yogyakarta, tahun 2005
-
- 1986-2007 : PT. Bank Niaga, Tbk dengan berbagai jabatan yaitu Credit Auditor, Credit Audit policy, Credit and Support Head untuk Wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta, Agency Unit Head di Corporate Banking Group, Credit Compliance and Support Head, Commercial Banking Audit Head dan Special Asset and Recovery Head untuk Wilayah Timur.
 - 2002-2005 : PT Niaga International Factors (anak perusahaan dari Bank Niaga) Director Finance and Operation
 - 2007-2012 : PT. Bank Permata sebagai Credit Risk Control Head, Risk Management Group
 - 2012-2015 : Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan berbagai jabatan yaitu Senior Bank Examiner, Director Banking Risk Analysis Group dan Senior Advisor untuk Policy and Standard Operating Procedure Development
 - 2015-2016 : PT. Bank BTN, Tbk dan PT. Bank Resona Perdania sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko
 - Sejak 8 September 2016 sebagai Direktur Kepatuhan Bank Victoria Syariah



Halaman ini sengaja dikosongkan



Profil Dewan Pengawas Syariah

Prof. DR. H. Hasanuddin A.F. MA

Ketua Dewan Pengawas Syariah

- WNI, lahir di Majalengka, tahun 1945
 - Sarjana Syariah, IAIN Syarif Hidayatullah-Jakarta, tahun 1974
 - S2 (MA), IAIN Syarif Hidayatullah-Jakarta, tahun 1989
 - S3 (Doktor), IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 1994
-
- Sejak 26 Maret 2010 Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank Victoria Syariah



Prof. DR. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo MA

Anggota Dewan Pengawas Syariah

- WNI, lahir di Donggala-Sulawesi Tenggara, tahun 1945.
 - Sarjana Syariah (S1), Universitas Al-Khiraat Palu, tahun 1975.
 - S2 (MA), Universitas Al-Azhar (Cairo-Mesir), tahun 1981
 - S3 (Doktor), Universitas Al-Azhar (Cairo-Mesir), tahun 1984
-
- Sejak 10 November 2011 sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Victoria Syariah



Profil Pejabat Eksekutif

M. Fajar Hermawan

Kepala SKAI

- Lahir di Jakarta 22 Januari 1970
 - D3 Marketing Manajemen, Akademi Pimpinan Perusahaan, tahun 1993
-
- 1993-1995 : PT. Bank Muamalat Indonesia sebagai Staf Operasional Cabang Cipulir
 - 1995-1996 : PT. Bank Sinergy dan PT. Bank Ratu sebagai Staff Operasional
 - 1998-2005 : PT. Bank Mega dengan posisi terakhir sebagai Auditor SKAI
 - 2011-2013 : PT. Bank Capital sebagai Staf Sistem dan Prosedur
 - 2013-2015 : PT. Bank Victoria International, Tbk. sebagai Kepala Bagian Sistem dan Prosedur
 - Sejak 2015 di PT. Bank Victoria Syariah sebagai Kepala SKAI



Tumbur Parulian Limbong

Kepala Divisi Keuangan Dan Umum

- Lahir di Jakarta 19 Juli 1974
 - Sarjana Ekonomi, Universitas Borobudur Jakarta, tahun 1996
-
- 1997 – 1999 : PT Bank Victoria International, Tbk sebagai staf Akunting
 - 1999 – 2000 : PT Bank Victoria International, Tbk sebagai Staf Biro Direksi
 - 2000 – 2003 : PT Bank Victoria International, Tbk sebagai Staf Akunting
 - 2003 – 2005 : PT Bank Victoria International, Tbk sebagai Kepala Seksi Akunting
 - 2005 – 2007 : PT Bank Victoria International, Tbk sebagai Kepala Bagian Akunting & Pengawasan Keuangan
 - 2007 – 2018 : PT Bank Victoria International, Tbk sebagai Kepala Divisi Akunting & Pengawasan Keuangan
 - Juni 2018 – sekarang : PT Bank Victoria Syariah sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Umum



Bambang Hariyanto

Kepala Divisi Rivi Pembiayaan

- Lahir di Semarang 20 April 1984
 - Sarjana Ekonomi, Universitas Indonesia, tahun 2006
-
- 2007-2014 : PT. Bank Victoria International, Tbk dengan berbagai jabatan antara lain lulus Officer Development Program (ODP) pada tahun 2007 dan jabatan terakhir sebagai Kepala Bagian Kredit Komersial pada tahun 2014
 - Sejak November 2014 di PT. Bank Victoria Syariah dengan berbagai jabatan yaitu Kepala Divisi Pembiayaan, Kepala Divisi Jaringan Cabang dan Pendanaan dan Kepala Divisi Rivi Pembiayaan



Bambang Febri

Kepala Divisi Jaringan Cabang dan Pendanaan Produk

- Lahir di Palembang, 04 Februari 1976.
 - Sarjana Teknik Universitas Gajah Mada Yogyakarta, tahun 2000.
-
- 2001 : Majalah Gatra sebagai Jurnalis
 - 2002-2003 : PT Surveyor Indonesia
 - 2003-2013 : Bank Mega dengan jabatan terakhir sebagai Branch Manager
 - 2013 : PT. Bank Victoria International, Tbk sebagai Team Leader Divisi Kredit Korporasi Kantor Pusat
 - 2017 : PT. Bank Victoria Syariah sebagai Kepala Divisi Pembiayaan Komersial & Jaringan Cabang



Profil Pejabat Eksekutif

Endro Purwoko

Kepala Divisi TSI

- Lahir di Jakarta 23 Juni 1969
 - Sarjana Management Informatika, STMIK Gunadarma Depok, tahun 1994
-
- 1995-1999 : PT. Bank Dagang dan Industri, Tbk sebagai IT and Operation Staff
 - 2000-2011 : PT. Bank ICB Bumiputera Tbk dengan berbagai jabatan antara lain IT & Support Unit, ATM, E-Banking, Core Banking System
 - 2011-2017 : PT. Bank Victoria International, Tbk sebagai Kepala Bagian Teknologi Sistem Informasi
 - Sejak 1 Oktober 2017 di PT. Bank Victoria Syariah sebagai Kepala Divisi Teknologi Sistem Informasi



Gumanda Haposan Tambunan

Kepala Divisi Pengelolaan Aset Khusus

- Lahir di Jakarta 20 September 1961.
 - Sarjana Ekonomi Akuntansi, STIE Perbanas, tahun 1984
-
- 1985-2016 : PT. Bank Niaga, Tbk dan PT. CIMB Niaga, Tbk dengan berbagai jabatan yaitu Senior Checker Accounting Dept., Account Officer Jakarta, Senior Manager Special Asset Management, dan terakhir sebagai Vice President - Asset Quality Management
 - Sejak 2016 di PT. Bank Victoria Syariah sebagai Kepala Divisi Pengelolaan Aset Khusus



Medi Sejati

Kepala Divisi Kepatuhan dan Sekretaris Perusahaan

- Lahir di Jakarta 29 September 1965
 - D3 Manajemen Perbankan, AKPI, tahun 1989
-
- 1984 - 1986 : PT Jasa Marga sebagai Kolektor/ Pengumpul Tol
 - 1990-1991 : PT. Bank Swadesi sebagai Teller
 - 1991-1999 : PT. Bank Intan sebagai Kepala Seksi Kredit Support
 - 1999 - 2002 : Kantor Akuntan Publik Edi Kaslim dan Kantor Akuntan Publik Gatot Permadi Djuwono (GPJ) sebagai Auditor
 - 2002-2007 : PT. Bank Harmoni sebagai Kepala Bagian Akunting
 - 2007-2008 : PT. Bank Index Selindo sebagai Kepala Bagian Akunting
 - 2008-2010 : PT. Bank Swaguna sebagai Kepala Divisi Akunting
 - Sejak 2010 di PT Bank Victoria Syariah dengan jabatan saat ini sebagai Kepala Divisi Kepatuhan dan Sekretaris Perusahaan



Rinaldi Taufik

Kepala Divisi SDI

- Lahir di Bandung 06 November 1967
 - Sarjana Informatika, ST Inten Bandung, tahun 1993
-
- 1996-2011 : PT. Bank International Indonesia dengan berbagai jabatan yaitu Kepala Bagian EDP, Dept. Head Development Analyst, E-Learning & Library Management dan Dept. Head Hubungan Industrial & Outsourcing
 - 2011-2012 : Smart Multi Finance (SMF) dengan jabatan sebagai Kepala Bagian HR Policy & System
 - 2012-2016 : PT. Bank Victoria International, Tbk sebagai Kepala Bagian pada Human Capital Management
 - Sejak 2016 di PT. Bank Victoria Syariah sebagai Kepala Divisi Sumber Daya Insani



Profil Pejabat Eksekutif

Nikson Lumban Tungkup Kepala Divisi Manajemen Risiko

- Lahir di Nainggolan, 4 Oktober 1964
 - Sarjana Ekonomi di UPN Veteran Jakarta
-
- 1981 – 1999 : PT Bank Danamon Indonesia, Tbk dengan berbagai jabatan yaitu Kliring, Accounting, Marketing, Proof & Certification dan Auditor.
 - 2000 – 2008 : PT Bank Nusantara Parahyangan, Tbk
 - 2008 – 2010 : PT Bank Victoria International, Tbk sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko
 - 2008 – 2010 : PT Bank Swaguna sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko dan Anggota Komite Audit
 - 2010 – 2015 : PT Bank Victoria Syariah sebagai Kepala SKAI
 - 2015 – 2018 : PT Bank Victoria Syariah sebagai Kepala Bagian Pengendalian Internal
 - Sejak September 2018 : PT Bank Victoria Syariah sebagai Kepala Divisi Manajemen Risiko



Soni Sonjaya Kepala Divisi Pembiayaan

- Lahir di Jakarta 20 Mei 1971
 - Sarjana Ekonomi - Manajemen Keuangan dan Perbankan, STIE Perbanas, tahun 1995
-
- 1995 : Asuransi Sewu New York Life sebagai Agency Supervisor
 - 1995-2003 : PT. Bank Universal sebagai Account Officer
 - 2003-2016 : PT. Bank CIMB Niaga, Tbk dengan berbagai jabatannya yaitu UKM Center Head, Automotive Indirect Business Div. Head, Automotive Indirect Business & Product Development, Automotive Direct Business Group Head, Group Head Financial Distribution & Commercial Linkage Syariah, Group Head Small Medium Micro Enterprise dan Special Project Manager pada Special Asset Management - Asset Restructuring & Recovery
 - Sejak 2016 di PT Bank Victoria Syariah sebagai Kepala Divisi Komersial Linkage



Suyat

Kepala Divisi Operasional

- Lahir di Yogyakarta 21 Juni 1978
 - Sarjana Ekonomi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Jakarta
-
- 2002-2008 : PT. Bank Kesawan (QNB) dengan jabatan terakhir Kepala Seksi Operasional KC Tanah Abang
 - 2008-2011 : PT. Bank Mega Syariah dengan jabatan terakhir Regional Internal Control Manager
 - Sejak 2011 di PT. Bank Victoria Syariah dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Divisi Operasional



Profil Pimpinan Cabang

Ikawati

Kepala Kantor Cabang Utama

- Lahir di Jakarta 07 April 1967
 - Sarjana Ekonomi, Dharma Persada University
-
- 1991 : PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional sebagai Teller
 - 2008-2010 : PT. Bank Danamon Syariah sebagai Team Leader
 - 2010-2013 : PT. Bank Sinarmas Syariah sebagai Relationship Manager
 - Sejak Agustus 2013 di PT. Bank Victoria Syariah dengan berbagai jabatan yaitu Pimpinan Capem Depok, Pimpinan Capem Tebet dan Pimpinan Cabang Utama



Rr Mini Sumandari

Kepala Kantor Cabang Bekasi

- Lahir di Yogyakarta 26 Mei 1975
 - Sarjana Ekonomi Akuntansi Keuangan dan Perbankan, STIE Perbanas Jakarta, tahun 1998
-
- 1998-2007 : PT. Bank Bali dan PT. Bank Permata dengan berbagai jabatan yaitu Teller Cabang Iskandarsyah Jakarta, Customer Service Cabang Iskandarsyah Jakarta, Customer Service Cabang Wolter Monginsidi Jakarta, Personal Financial Consultant Cabang Wolter Monginsidi Jakarta
 - 2007-2014 : PT. Bank Mega Syariah dengan berbagai jabatan yaitu Funding Officer pada Capem Panglima Polim Jakarta, Senior Funding Officer di KCU Tendean Jakarta, Funding Manager KCU Tendean Jakarta, dan Kepala Capem Enggano Jakarta
 - Sejak 2014 di Bank Victoria Syariah sebagai Kepala Cabang Bekasi



Yunus Syahrizal Bahar

Kepala Kantor Cabang Serang

- Lahir di Jakarta 17 Juni 1971
 - Sarjana Komputer-Management Informatika, STMIK Gunadarma, tahun 1995
 - Master Of Commerce In Information Systems and Technology, Macquarie University of Sydney Australia, tahun 2001
-
- 1996-2008 : PT. Bank Niaga, Tbk dan PT. CIMB Niaga Tbk dengan berbagai jabatan yaitu lulus Management Trainee, Sales Head di Unit Syariah Surabaya
 - 2011 : PT. Bank BJB Syariah sebagai Kepala Cabang
 - Sejak 1 Juni 2016 di PT. Bank Victoria Syariah sebagai Kepala Cabang Serang



Wb. Wisnubrata .Dp, Ir.

Kepala Kantor Cabang Bandung

- Lahir di Jakarta 11 Oktober 1971
 - Sarjana Manajemen Informatika, Universitas Gunadarma Jakarta
-
- 1994-2007 : PT. Bank Niaga, Tbk dengan posisi terakhir sebagai AO Lending Commercial
 - 2007-2013 : PT. Bank Mega dengan jabatan antara lain sebagai Branch Manager Cinere dan Branch Retail Banking Manager
 - Sejak 2013 di Bank Victoria Syariah dengan berbagai jabatan antara lain Kepala Sie. Pembiayaan Commercial, Branch Manager Serang, Senior Special Asset Management, dan terakhir sebagai Branch Manager Bandung



Profil Pimpinan Cabang

Edi Sasmita

Kepala Kantor Cabang Cirebon

- Lahir di Cirebon 14 Februari 1974
 - Sarjana Ahli Madya, IKOPIN Bandung, tahun 1997
-
- 2003-2010 : PT. Bank Swaguna sebagai Account Officer
 - 2010-sekarang : PT. Bank Victoria Syariah dengan berbagai jabatan yaitu Senior Account Officer, Kepala Operasional Capem Arjawinangun, Kepala Capem Arjawinangun & Kuningan dan terakhir sebagai Pimpinan Cabang Cirebon



Lamhot Tua Tomu Pardamean

Pjs Kepala Kantor Cabang Tegal

- Lahir di Bandung, 20 September 1974
 - Sarjana Manajemen Keuangan & Perbankan dari Universitas Nasional Bandung (UNB)
 - Diploma Keuangan & Perbankan di Banking Business Institute (BBI) Bandung
 - Program Akta Mengajar IV di Universitas Pancasakti (UPS) Tegal
-
- 2007 sebagai Sales Officer di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. - Danamon Simpan Pinjam (DSP) Cluster Tegal
 - 2008 – 2011 sebagai *Relationship Officer* merangkap sebagai *Alternate Branch Manager* di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk. (BTPN) – Mitra Usaha Rakyat (MUR) Area Tegal
 - 2011 bergabung di PT. Bank Victoria Syariah Cabang Tegal sampai saat ini dengan jabatan dari *Account Officer*, *Team Leader* dan sekarang sebagai Kepala Cabang.



Rusmiati

Kepala Kantor Cabang Solo

- Lahir di Magetan, 02 Februari 1972
 - Sarjana Sastra Inggris, Universitas Muhammadiyah Malang, tahun 1994
-
- Mulai berkarier di Bank sejak tahun 1995 dengan start karier sebagai Customer Service
 - 2009-2013 : PT. Bank Mega Syariah sebagai Branch Manager
 - Sejak 2013 di PT. Bank Victoria Syariah sebagai Branch Manager Solo



I Gusti Ayu Ngurah Tri Meiniyanti

Kepala Kantor Cabang Denpasar

- Lahir di Malang 31 Mei 1971
 - Lulus Pendidikan Sekretaris, STIMI Handayani, tahun 1995
-
- 1993-1994 : PT. Rasenta sebagai Administrasi
 - 1994-2016 : PT. Bank Niaga, Tbk dan PT. CIMB Niaga, Tbk dengan berbagai jabatan antara lain Teller dan jabatan terakhir sebagai Sales Manager KPR
 - Sejak September 2016 di PT. Bank Victoria Syariah sebagai Kepala Kantor Cabang Denpasar



Profil Komite

Retno Dwijanti Widaningsih

Anggota Komite Audit

- WNI, lahir di Jakarta tahun 1959
 - Sarjana Ekonomi Keuangan dan Perbankan, Institut Bankir Indonesia, tahun 1998
-
- 1980-1982 : Bank Dagang Negara Hotel Borobudur Branch Jakarta
 - 1982-2006 : Deutsche Bank AG, sebagai Head of Group Audit dari tahun 2001 sampai 2006
 - Sejak 2013 di PT. Bank Victoria Syariah sebagai anggota Komite Audit di Bank Victoria Syariah



Teguh Sukaryanto

Anggota Komite Audit

- WNI, lahir di Tanjungkarang pada tahun 1962.
 - Sarjana Ekonomi dari Universitas Lampung pada tahun 1987.
-
- Mulai berkarir di perbankan pada tahun 1990 sebagai Internal Audit di Bank Duta dan selanjutnya berbagai jabatan pernah dipegang pada Bank Yakin Makmur, Bank Akita dan Bank Barclays Indonesia.
 - 2011 – 2012 : Bank Victoria sebagai Kepala Divisi Kepatuhan
 - 2012 – 2015 : Bank Victoria sebagai Kepala Divisi Sistem dan Prosedur tahun
 - 2015 – 2018 : Bank Victoria sebagai Kepala Divisi Audit Internal/Integrated and Anti Fraud
 - Maret 2018 – saat ini : Bank Victoria sebagai Komite Audit sampai saat ini
 - September 2018 – saat ini : Bank Victoria Syariah sebagai anggota Komite Audit



Halaman ini sengaja dikosongkan

Produk dan Layanan

bank **victoria**
Syariah



Tabungan VISYA iB
GRATIS tarik tunai di seluruh ATM berlogo PRIMA & ALTO

Tabungan VISYA iB

Simpanan dalam bentuk investasi Syariah dengan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan.

bank **victoria**
Syariah



Tabungan V-PLAN iB
Wujudkan impian Anda mulai dari sekarang

Tabungan V-Plan iB

Simpanan dengan prinsip Mudharabah (Bagi Hasil) yang penarikannya memiliki jangka waktu sesuai kesepakatan dengan nasabah.

bank **victoria**
Syariah



Tabungan BISNIS iB
Dapatkan bagi hasil yang maksimal

Tabungan V-Bisnis iB

Merupakan Jenis Tabungan dengan prinsip mudharabah (Bagi Hasil), diperuntukkan bagi nasabah Perorangan dan Perusahaan yang mendapatkan Bagi Hasil Setara Deposito.

bank **victoria**
Syariah



Tabungan VIS BERHADIAH X-TRA iB
Tentukan hadiahmu diawal

Tabungan Vis Hadiah X-tra iB

Merupakan tabungan yang diperuntukkan untuk perorangan dan perusahaan yang mendapat hadiah dimuka sesuai keinginan nasabah dengan penempatan nominal tertentu (diblokir) dan jangka waktu tertentu.

bank **victoria**
Syariah



Tabungan PAYROLL iB
Bagi hasil yang menguntungkan

Tabungan Visya Payroll iB

Simpanan dalam bentuk investasi syariah dengan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan.

bank **victoria**
Syariah



Tabungan SIMPEL iB
Tabungan untuk pelajar Indonesia

Tabungan Simpel iB

Tabungan yang diperuntukkan bagi pelajar Indonesia.



GIRO iB

Kemudahan anda bertransaksi

Giro iB - Wadiah

Merupakan Rekening Giro untuk nasabah perorangan maupun badan hukum, yang memiliki fasilitas cek dan Bilyet Giro.



GIRO PRIMA iB

Bisnis dengan bagi hasil prima

Giro Vis Prima

Merupakan Giro yang diperuntukan untuk segmen perusahaan dengan akad mudharabah yang mendapat bagi hasil tearing sesuai dengan saldo harian nasabah.



DEPOSITO iB

Tumbuh bersama investasi yang aman dan terpercaya

Deposito iB

Jenis simpanan dalam mata uang rupiah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara deposan dengan pihak Bank dengan Akad yang digunakan adalah akad mudharabah.



Halaman ini sengaja dikosongkan

PT Bank Victoria Syariah

Laporan Keuangan/
Financial Statements

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017/
For the Years Ended December 31, 2018 and 2017

	<u>Halaman/ Page</u>
Laporan Auditor Independen/ Independent Auditors' Report	
Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan PT Bank Victoria Syariah untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017/ <i>The Directors' Statement on the Responsibility for Financial Statements of PT Bank Victoria Syariah for the Years Ended December 31, 2018 and 2017</i>	
LAPORAN KEUANGAN - Untuk Tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017/ FINANCIAL STATEMENTS – For the Years Ended December 31, 2018 and 2017	
Laporan Posisi Keuangan/ <i>Statements of Financial Position</i>	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain/ <i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>	3
Laporan Perubahan Ekuitas/ <i>Statements of Changes in Equity</i>	4
Laporan Arus Kas/ <i>Statements of Cash Flows</i>	5
Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil/ <i>Statements of Reconciliation of Income and Revenue Sharing</i>	6
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat/ <i>Statements of Sources and Distribution of Zakah Funds</i>	7
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan/ <i>Statements of Sources and Uses of Benevolence Funds</i>	8
Catatan atas Laporan Keuangan/ <i>Notes to Financial Statements</i>	9

Laporan Auditor Independen

No. 00101/2.1090/AU.4/07/0148-3/1/III/2019

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris,
 dan Direksi
 PT Bank Victoria Syariah**

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Victoria Syariah terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2018, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ringkasan kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang ditentukan perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

No. 00101/2.1090/AU.4/07/0148-3/1/III/2019

**The Stockholders, Board of Commissioners,
 and Directors
 PT Bank Victoria Syariah**

We have audited the accompanying financial statements of PT Bank Victoria Syariah, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2018, and statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, statement of cash flows, statement of reconciliation of income and revenue sharing, statement of sources and distribution of zakah funds, and statement of sources and uses of benevolence funds for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Victoria Syariah tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan, arus kas, rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, sumber dan penyaluran dana zakat, dan sumber dan penggunaan dana kebajikannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

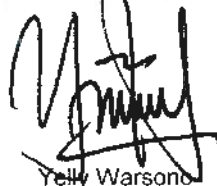
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Bank Victoria Syariah as of December 31, 2018, and its financial performance, cash flows, reconciliation of income and revenue sharing, sources and distribution of zakah funds, and sources and uses of benevolence funds for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

MIRAWATI SENSI IDRIS



Yelly Warsono

Izin Akuntan Publik No. AP.0148/Certified Public Accountant License No. AP.0148

22 Februari 2019/February 22, 2019

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

PT BANK VICTORIA SYARIAH

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama/Name
Alamat Kantor/Office address

Alamat Domisili/sesuai KTP atau
Kartu identitas lain/Residential
Address/in accordance with
Personal Identity Card

Nomor Telepon/Telephone number
Jabatan/Title
2. Nama/Name
Alamat Kantor/Office address

Alamat Domisili/sesuai KTP atau
Kartu identitas lain/Residential
Address/in accordance with
Personal Identity Card
Nomor Telepon/Telephone number
Jabatan/Title

menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan untuk tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017.
2. Laporan keuangan Perusahaan tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**DIRECTORS' STATEMENT
ON THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2018 AND 2017**

PT BANK VICTORIA SYARIAH

We, the undersigned:

- : **FIRMAN ANANDA MOEIS**
: Gedung The VICTORIA Lt.3
: Jl. Tomang Raya Kav 35-37
: JAKARTA BARAT 11440

: Jl. H.SAIDI 3/17
: RT 010/002, Cipete Selatan
: Cilandak -- JAKARTA SELATAN

: (021) 5600467
: Direktur Utama / President Director
- : **DEDDY EFFENDI RIDWAN**
: Gedung The VICTORIA Lt.3
: Jl. Tomang Raya Kav 35-37
: JAKARTA BARAT 11440

: Taman Sari Persada Blok 16 No.7
: RT 003/001, Jatibening Baru
: Pondok Gede -- BEKASI

: (021) 5600467
: Direktur / Director

declare that:

1. We are responsible for the preparation and presentation of the Company's financial statements for the years ended December 31, 2018 and 2017.
2. The Company's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
- b. Laporan keuangan Perusahaan tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

3. a. All information has been fully and correctly disclosed in the Company's financial statements, and

- b. The Company's financial statements do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any information or facts.

4. We are responsible for the Company's internal control system.

This statement has been made truthfully.

22 Februari 2019 / February 22, 2019



Firman Ananda Moeis
Direktur Utama / President Director

Deddy Effendi Ridwan
Direktur / Director

	2018	Catatan/ Notes	2017	
ASET				ASSETS
Kas	2.511.492.700		5.410.839.600	Cash
Giro pada Bank Indonesia	35.378.223.111	4	85.512.539.440	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada Bank lain	4.238.825.168	5	2.710.051.260	Current accounts with other banks
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia	295.000.000.000	6	274.000.000.000	Placement with other banks and Bank Indonesia
Efek-efek	409.679.403.126	7	320.281.945.394	Marketable securities
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.300.000.000)		-	Less: Allowance for impairment losses
Jumlah efek-efek - bersih	408.379.403.126		320.281.945.394	Total marketable securities - net
Piutang murabahah	243.560.441.515	8	325.631.988.276	Murabahah receivables
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.072.981.878)		(3.264.568.617)	Less: Allowance for impairment losses
Jumlah piutang murabahah - bersih	241.487.459.637		322.367.419.659	Total murabahah receivables - net
Pembiayaan musyarakah	930.419.355.069	9	868.014.110.047	Musyarakah financing
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(12.423.139.991)		(12.208.263.314)	Less: Allowance for impairment losses
Jumlah pembiayaan musyarakah - bersih	917.996.216.078		855.805.846.733	Total musyarakah financing - net
Pembiayaan mudharabah	58.739.552.733	10	64.197.635.203	Mudharabah financing
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(659.091.793)		(711.865.985)	Less: Allowance for impairment losses
Jumlah pembiayaan mudharabah - bersih	58.080.460.940		63.485.769.218	Total mudharabah financing - net
Piutang ijarah	171.179.684		181.738.611	Ijarah receivables
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	-		(5.937.500)	Less: Allowance for impairment losses
Jumlah pendapatan ijarah - bersih	171.179.684		175.801.111	Ijarah receivables - net
Pendapatan bagi hasil yang akan diterima	9.766.790.091	11	8.311.142.412	Revenue sharing receivable
Aset yang diperoleh untuk ijarah - bersih	3.851.594.547		5.082.670.332	Assets acquired for ijarah - net
Penyertaan saham	60.468.550		60.468.550	Investments in shares
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(604.686)		(604.686)	Less: Allowance for impairment losses
Jumlah penyertaan saham - bersih	59.863.864		59.863.864	Total investments in shares - net
Aset tetap	11.189.803.880	12	10.592.740.180	Property and equipment
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(9.833.000.484)		(9.165.435.733)	Less: Accumulated depreciation
Jumlah aset tetap - bersih	1.356.803.396		1.427.304.447	Total property and equipment - net
Aset tak berwujud	6.864.553.930	13	5.319.382.677	Intangible assets
Dikurangi: Akumulasi amortisasi	(4.418.733.616)		(3.247.975.923)	Less: Accumulated amortisation
Jumlah aset tak berwujud - bersih	2.445.820.314		2.071.406.754	Total intangible assets - net
Biaya dibayar di muka	9.075.083.274	14	7.331.357.227	Prepaid expenses
Aset lain-lain	124.802.567.803	15	29.857.259.254	Other assets
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(7.573.948.142)		(3.906.782.129)	Less: Allowance for impairment losses
Jumlah aset lain-lain - bersih	117.228.619.661		25.950.477.125	Total other assets - net
Aset pajak tangguhan	20.990.989.870	34	23.129.287.079	Deferred tax assets
JUMLAH ASET	2.126.018.826.461		2.003.113.721.665	TOTAL ASSETS

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

	2018	Catatan/ Notes	2017	
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER, DAN EKUITAS				LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS, AND SHAREHOLDERS' EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas segera	4.375.051.060	16	4.494.773.026	Liabilities immediately payable
Simpanan giro wadiah	41.421.592.792	17	37.470.907.665	Wadiah demand deposits
Simpanan dari bank lain	217.000.000.000	18	150.000.000.000	Deposits from other banks
Bagi hasil yang belum dibagikan	4.616.346.935	19	4.752.842.657	Undistributed revenue sharing
Pendapatan ditangguhkan	1.134.905.621		1.423.934.903	Deferred income
Utang pajak	2.244.904.413	20	2.161.557.370	Taxes payable
Liabilitas lain-lain	896.748.261		676.933.643	Other liabilities
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	5.360.099.147	33	7.452.301.217	Long term employment benefit liabilities
JUMLAH LIABILITAS	277.049.848.229		208.433.250.481	TOTAL LIABILITIES
DANA SYIRKAH TEMPORER		21		TEMPORARY SYIRKAH FUNDS
Tabungan mudharabah	54.065.919.243		43.765.684.409	Mudharabah saving deposits
Deposito mudharabah	1.498.787.587.023		1.451.521.737.764	Mudharabah deposits
Giro mudharabah	4.866.175.990		150.000	Mudharabah demand deposits
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER	1.557.719.692.256		1.495.287.572.173	TOTAL TEMPORARY SYIRKAH FUNDS
EKUITAS				SHAREHOLDERS' EQUITY
Modal saham				Share capital
Nilai nominal Rp1.000 per saham, Modal dasar - 1.000.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor 310.000.000 saham dan 270.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017	310.000.000.000	22	270.000.000.000	Nominal value Rp 1,000 per share, Authorized - 1,000,000,000 shares issued and paid-up capital - 310,000,000 shares and 270,000,000 shares as of December 31, 2018 and 2017, respectively.
Uang muka setoran modal	-	23	40.000.000.000	Capital paid-up in advance
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang tersedia untuk dijual	(15.485.841.683)		29.032.674	Unrealised gain (loss) from changes in fair value of available-for-sale marketable securities
Saldo laba (Defisit)				Retained Earnings (Deficit)
Telah ditentukan penggunaannya	9.156.165.256	24	9.156.165.256	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya	(12.420.838.617)		(19.792.298.929)	Unappropriated
JUMLAH EKUITAS	291.249.484.976		299.392.899.001	TOTAL SHAREHOLDER'S EQUITY
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	2.126.018.825.461		2.003.113.721.655	TOTAL LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS, AND SHAREHOLDER'S EQUITY

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

	2018	Catatan/ Notes	2017	
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				OPERATING INCOME AND EXPENSES
Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib		25		Income from fund management by Bank as mudharib
Pendapatan dari penjualan - murabahah	31.254.020.624		25.332.378.995	Income from sales - murabahah
Pendapatan dari bagi hasil:				Income from profit sharing:
Musyarakah	94.334.018.555		91.073.496.425	Musyarakah
Mudharabah	3.446.723.052		4.954.283.252	Mudharabah
Pendapatan dari ijarah - bersih	576.677.451		655.391.320	Income from ijarah - net
Pendapatan usaha utama lainnya	40.375.374.055		31.679.872.730	Other main operating income
Jumlah pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib	169.986.811.737		153.695.422.722	Total income from fund management by Bank as mudharib
Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer	(109.262.417.070)	26	(101.060.090.114)	Third parties' share on returns of temporary syirkah funds
Hak bagi hasil milik Bank	60.724.394.667		52.635.332.608	Bank's share in profit sharing
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA				OTHER OPERATING INCOME
Pendapatan operasional lainnya	1.688.435.829	27	3.332.227.019	Other operating income
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA				OTHER OPERATING EXPENSES
Pemulihan (beban) cadangan kerugian penurunan nilai	(2.225.982.139)	30	598.911.929	Recovery (allowances) for impairment losses expenses
Beban personalia	(30.695.088.533)	29	(29.903.114.028)	Personnel expenses
Beban umum dan administrasi	(20.705.107.071)	28	(18.886.443.554)	General and administrative expenses
Kerugian dari penurunan nilai wajar efek yang diperdagangkan - bersih	(334.800.286)		-	Loss on decrease in fair value of trading securities - net
Beban lainnya	(2.234.001.232)		(1.521.646.342)	Other expenses
Jumlah beban operasional lainnya	(56.194.979.261)		(49.712.291.995)	Total other operating expenses
LABA OPERASIONAL	6.217.851.235		6.255.267.632	PROFIT FROM OPERATIONS
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL - BERSIH	118.001.461	31	(156.315.645)	NON OPERATING INCOME (EXPENSE) - NET
LABA SEBELUM PAJAK	6.335.852.696		6.098.951.987	PROFIT BEFORE TAX
BEBAN PAJAK	1.361.709.301	34	1.505.463.924	TAX EXPENSE
LABA TAHUN BERJALAN	4.974.143.395		4.593.488.063	PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				Item that will be reclassified subsequently to profit and loss
Laba (rugi) yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang tersedia untuk dijual	(15.514.874.337)		207.360.132	Unrealised gain (loss) on changes in fair value of available for sales marketable securities
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				Item that will not be reclassified subsequently to profit and loss
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti - setelah dampak pajak tangguhan	2.397.316.917	33	262.519.431	Remeasurement of defined benefit liability - net of tax
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	(8.143.414.025)		5.063.367.626	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

PT BANK VICTORIA SYARIAH

Laporan Perubahan Ekuitas

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH

Statements of Changes in Equity

For the Years Ended December 31, 2018 and 2017
(Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	Modal Saham/ Share Capital	Uang Muka/ Setoran Modal/ Capital Paid-up in Advance	Laba (Rugi) yang Belum Direalisasi atas Perubahan Nilai Wajar Surat - surat Bertarga yang Tersedia untuk Dijual/ Unrealised Gain (Loss) from Changes in Fair Value of Available-for-sale Marketable Securities	Saldo Laba (Defisit)/ Retained Earnings (Deficit) Telah Ditentukan/ Penggunaannya/ Appropriated	Jumlah Ekuitas/ Shareholders' Equity
Saldo pada tanggal 1 Januari 2017		210.000.000.000	-	(178.327.458)	9.156.165.256	194.329.531.375
Penghasilan Komprehensif						
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	-
Penghasilan komprehensif lain - setelah pajak tangguhan		-	-	-	4.593.488.063	4.593.488.063
Laba yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar aset keuangan		-	-	207.360.132	-	207.360.132
Pengukuran kembali liabilitas tersedia untuk dijual		-	-	-	262.519.431	262.519.431
Imbalan kerja jangka panjang	33	-	-	-	-	-
Jumlah penghasilan komprehensif		-	-	-	4.856.007.494	5.063.367.626
Uang muka setoran modal	23	-	40.000.000.000	-	-	40.000.000.000
Setoran modal	22, 23	60.000.000.000	-	-	-	60.000.000.000
Saldo pada tanggal 31 Desember 2017		270.000.000.000	40.000.000.000	29.032.674	(19.792.298.929)	299.392.899.001
Rugi Komprehensif						
Laba tahun berjalan		-	-	-	4.974.143.395	4.974.143.395
Penghasilan (rugi) komprehensif lain - setelah pajak tangguhan		-	-	-	-	-
Laba yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar aset keuangan		-	-	(15.514.874.337)	-	(15.514.874.337)
Pengukuran kembali liabilitas tersedia untuk dijual		-	-	-	2.397.316.917	2.397.316.917
Imbalan kerja jangka panjang	33	-	-	-	-	-
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif		-	-	-	7.371.460.312	(8.143.414.025)
Reklasifikasi ke modal saham	22, 23	40.000.000.000	(40.000.000.000)	-	-	-
Saldo pada tanggal 31 Desember 2018		310.000.000.000	-	(15.485.841.663)	(12.420.839.617)	281.249.494.976

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements
which are an integral part of the financial statements.

	2018	Catatan/ Notes	2017	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib:		11,25		Receipt of income from fund management by Bank as mudharib:
Penerimaan dari penjualan murabahah	32.290.548.825		25.850.940.159	Receipt from sales murabahah
Penerimaan dari pendapatan bagi hasil	97.644.243.885		98.782.438.900	Receipt from profit sharing income
Penerimaan dari pendapatan ijarah	578.710.584		655.800.095	Receipt from income ijarah
Penerimaan dari usaha lainnya:		11,25		Receipt from other main operating income:
Efek-efek syariah	28.672.466.566		19.413.393.197	Sharia marketable securities
Administrasi	4.977.767.225		5.749.490.704	Administration income
Fasilitas Simpanan				Bank Indonesia Sharia
Bank Indonesia Syariah (FASBIS)	1.250.802.778		1.593.579.860	Deposit Facility (FASBIS)
Deposito pada bank lain	2.693.099.211		3.782.212.648	Current deposit
Pembayaran bagi hasil dana syirkah temporer	(109.262.417.070)	19,26	(101.080.090.114)	Payment of profit sharing of temporary syirkah funds
Penerimaan operasional lainnya	584.681.867	27	825.362.362	Receipt from other operating income
Pembayaran beban operasional lainnya	(20.253.493.841)	30	(18.843.327.111)	Payment for other operating expenses
Pembayaran beban kepegawaian	(29.590.868.047)	29	(28.538.144.573)	Payment for personnel expenses
Penerimaan (pembayaran) non-operasional	116.201.460	31	(232.471.609)	Income (payment) of non-operating income
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	9.699.753.423		5.978.984.518	Cash flows before changes in operating assets and liabilities
Penurunan (kenaikan) aset operasi:				Decrease (increase) in operating assets:
Piutang murabahah	83.783.146.381	8	(77.133.752.476)	Murabahah receivables
Pembiayaan musyarakah	(62.405.146.022)	9	47.550.831.451	Musyarakah financing
Pembiayaan mudharabah	7.458.082.470	10	(44.127.011.134)	Mudharabah financing
Aset yang diperoleh untuk ijarah - bersih	107.302.658		(1.780.547.575)	Assets acquired for ijarah - net
Aset lainnya	(96.684.413.170)	15	(748.156.185)	Other assets
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:				Increase (decrease) in operating liabilities:
Liabilitas segera	(119.721.966)	16	1.121.845.390	Liabilities immediately payable
Simpanan giro wadiah	3.950.685.127	17	338.558.160	Wadiah demand deposit
Simpanan dari bank lain	67.000.000.000	18	(28.000.000.000)	Deposit from other Banks
Liabilitas lain-lain	219.814.618		182.347.584	Other liabilities
Utang pajak lainnya	83.347.043	20	839.269.384	Other tax payable
Dana syirkah temporer	62.432.120.083	21	296.488.570.221	Temporary syirkah fund
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	76.624.970.646		200.730.939.348	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Pembelian surat-surat berharga diukur pada biaya perolehan	(89.397.457.732)	7	(34.334.167.425)	Purchase of marketable securities at cost
Pembelian surat-surat berharga tersedia untuk dijual	(14.475.445.280)		(46.148.682.316)	Purchase of marketable securities available for sale
Hasil penjualan aset tetap	1.800.000	12	88.183.119	Sale of property and equipment
Perolehan aset tetap	(613.585.700)	12	(330.757.317)	Acquisition of property and equipment
Perolehan aset tak berwujud	(1.545.171.254)	13	(19.680.002)	Purchase of intangible assets
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(106.029.859.966)		(80.745.103.941)	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOW FROM A FINANCING ACTIVITIES
Penambahan modal disetor	-	22	60.000.000.000	proceeds from additional issuance of share capital
Uang muka setoran modal	-	23	40.000.000.000	Capital paid-up in advance
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	-		100.000.000.000	
KENAikan (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(30.504.889.321)		219.985.835.407	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	367.633.430.300		147.647.594.893	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	337.128.540.979		367.633.430.300	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF THE YEAR
Kas dan setara kas terdiri dari:				Cash and cash equivalents consist of:
Kas	2.511.492.700		5.410.839.600	Cash
Giro pada Bank Indonesia	35.378.223.111	4	85.512.539.440	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	4.238.825.188	5	2.710.051.260	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia yang jatuh tempo dalam 3 bulan atau kurang dari tanggal perolehan	295.000.000.000	6	274.000.000.000	Placement with Bank Indonesia and other Bank with maturity three months or less from acquisition date
JUMLAH	337.128.540.979		367.633.430.300	TOTAL

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Statements of Reconciliation of Income and Revenue Sharing
For the Years Ended December 31, 2018 and 2017
(Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2018	Catatan/ Notes	2017	
Pendapatan usaha utama (akrual)		25		Main operating income (accrual)
Pendapatan dari jual beli	31.254.020.624		25.332.378.995	Income from sales and purchases
Pendapatan bagi hasil	97.780.739.607		96.027.779.677	Income from profit sharing
Pendapatan dari ijarah - bersih	576.677.451		655.391.320	Income from ijarah - net
				Income from sharia marketable securities
Pendapatan efek-efek Syariah	31.453.704.841		20.554.589.518	Administration income
Pendapatan administrasi	4.977.767.225		5.749.490.704	FASBIS bonus income
Pendapatan bonus FASBIS	1.250.802.778		1.593.579.860	Current accounts and deposit with other banks income
Pendapatan giro dan deposito pada bank lain	2.683.099.211		3.782.212.648	
	<u>169.986.811.737</u>		<u>153.695.422.722</u>	
Pengurang				Deductions
Pendapatan tahun berjalan yang kas dan setara kasnya belum diterima:		11		Current year income in which the cash and cash equivalents were not received:
Pendapatan keuntungan murabahah	1.169.699.764		2.495.257.247	Revenue sharing murabahah receivables
Pendapatan ijarah	11.671.501		11.704.614	Ijarah income
				Revenue sharing marketable securities
Pendapatan bagi hasil efek-efek	8.104.160.493		5.270.002.774	Revenue sharing placement with other banks
Pendapatan bagi hasil penempatan pada bank lain	<u>481.258.333</u>		<u>534.177.777</u>	
	<u>9.766.790.091</u>		<u>8.311.142.412</u>	
Penambah				Additions
Pendapatan tahun sebelumnya yang kasnya diterima pada tahun berjalan:		11		Prior year income in which the cash were received during the current year:
Penerimaan pelunasan pendapatan keuntungan murabahah	2.495.257.247		2.886.907.254	Receipt of settlement from murabahah margin income
Penerimaan pendapatan ijarah	11.704.614		11.913.389	Receipt of ijarah income
				Revenue sharing marketable securities
Pendapatan bagi hasil efek-efek	5.270.002.774		4.491.567.563	Revenue sharing placement with other banks
Pendapatan bagi hasil penempatan pada bank lain	<u>534.177.777</u>		<u>171.416.667</u>	
	<u>8.311.142.412</u>		<u>7.561.804.873</u>	
Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil	<u>168.531.164.058</u>		<u>152.946.085.183</u>	Available income for revenue sharing
Bagi hasil yang menjadi hak Bank	<u>59.268.746.988</u>		<u>51.885.995.069</u>	Bank's share from revenue sharing
Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana	<u>109.262.417.070</u>	26	<u>101.060.090.114</u>	Fund owners' share from revenue sharing
Dirinci atas:				Details of:
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan	104.646.070.135		96.307.247.457	Fund owners' share on distributed revenue sharing
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan	<u>4.616.346.935</u>	19	<u>4.752.842.657</u>	Fund owners' share on undistributed revenue sharing
Jumlah	<u>109.262.417.070</u>		<u>101.060.090.114</u>	Total

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Statements of Sources and Distribution of Zakah Funds
For the Years Ended December 31, 2018 and 2017
(Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2018	2017	
Sumber Dana Zakat			Sources of Zakah Funds
Zakat dari pihak luar bank	31.365	215.960	Zakah from external banks
Lain-lain	28.625.250	32.361.524	Others
Jumlah	28.656.615	32.577.484	Subtotal
Penyaluran Dana Zakat			Distribution of Zakah Funds
BAZNAS	(14.697.075)	(55.257.440)	BAZNAS
Kenaikan (Penurunan) Dana Zakat	13.959.540	(22.679.957)	Increase (decrease) in Zakah Funds
Dana Zakat pada Awal Tahun	2.502.002	25.181.959	Zakah Funds at Beginning of The Year
Dana Zakat pada Akhir Tahun	16.461.542	2.502.002	Zakah Funds at End of The Year

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

	2018	2017	
Sumber Dana Kebajikan			Sources of Benevolence Funds
Denda	265.059.048	-	Penalties
Pendapatan non-halal	1.268.262	394.719.119	Non-halal income
Infaq dan shadaqah	33.945.000	36.778.368	Infaq and shadaqah
Lainnya	1.409.190	2.384.028	Others
Jumlah	301.681.500	433.881.515	Subtotal
Penggunaan Dana Kebajikan			Use of Benevolence Funds
Sumbangan	(438.462.500)	(323.700.000)	Donation
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	(66.545.000)	(40.764.707)	Use for other public interest
Jumlah	(505.007.500)	(364.464.707)	Subtotal
Kenaikan (penurunan) Sumber Dana Kebajikan	(203.326.000)	69.416.808	Increase (decrease) in Benevolence Funds
Dana Kebajikan pada Awal Tahun	308.195.208	238.778.400	Benevolence Funds at Beginning of The Year
Dana Kebajikan pada Akhir Tahun	104.869.208	308.195.208	Benevolence Funds at End of The Year

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

1. Umum

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Bank Victoria Syariah (dahulu PT Bank Swaguna) ("Bank") didirikan berdasarkan Akta No. 9 tanggal 15 April 1966 dari Bebas Daeng Lalo, SH, notaris di Jakarta. Akta pendirian Bank telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. JA.5/79/5 tanggal 7 Nopember 1967 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 42, Tambahan No. 62 tanggal 24 Mei 1968.

Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir adalah berdasarkan Akta No. 46 tanggal 14 November 2017 dari Surjadi, S.H., M.Kn., M.M., notaris di Jakarta, tentang peningkatan modal dasar dari Rp 320.000.000.000 menjadi Rp 1.000.000.000.000. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH 02731.AH.01.03-0191022 Tahun 2017 tanggal 15 November 2017.

Perubahan kegiatan usaha bank dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah mendapatkan izin dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/8/KEP.GBI/DpG/2010 tertanggal 10 Februari 2010. Bank beroperasi dengan prinsip Syariah mulai tanggal 1 April 2010.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Bank, maksud dan tujuan kegiatan usaha Bank adalah menjalankan usaha bank dengan prinsip syariah. Bank merupakan bank non devisa.

Kantor Pusat Bank berlokasi di Gedung The Victoria, Jalan Tomang Raya Kav. 33-37 Jakarta Barat 11440 yang juga merupakan Kantor Pusat Operasional dan Kantor Pusat Non Operasional. Bank memiliki kantor cabang di Bekasi, Serang, Bandung, Cirebon, Tegal, Denpasar dan Solo dan kantor cabang pembantu di Tebet, Kramat Jati, Depok, dan Tangerang. Bank memiliki kantor Layanan Syariah Bank (LSB) di Kebayoran Baru.

1. General

a. Establishment and General Information

PT Bank Victoria Syariah (formerly PT Bank Swaguna) ("Bank") was established based on Notarial Deed No. 9 dated April 15, 1966 of Bebas Daeng Lalo, SH, a public notary in Jakarta. The Article of Association was approved by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia under Decree No. JA.5/79/5 dated November 7, 1967 and published in State of Gazette of Republic of Indonesia No. 42, Addendum No. 62 dated May 24, 1968.

The Bank's Articles of Association have been ammended several times, with the latest amendment based on Deed No. 46 dated November 14, 2017 of Surjadi, S.H., M.Kn., M.M., a public notary in Jakarta, concerning the increase in authorized share capital from Rp 320,000,000,000 to Rp 1,000,000,000,000. Amendments to the Articles of Association was approved by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia based on its Decision Letter No. AHU-AH 02731.AH.01.03-0191022 Year 2017 dated November 15, 2017.

The change of Bank's operation from conventional Bank to Sharia bank was approved by Bank Indonesia based on the Decision Letter of Governor of Bank Indonesia No. 12/8/KEP.GBI/DpG/2010 dated February 10, 2010. The Bank starts to operate based on sharia principle from April 1, 2010.

In line with article 3 of the Bank's Articles of Association, the aim and objective of the Bank is to provide banking services based on sharia principle. The Bank is non foreign exchange bank.

The Bank's Head Office is located in The Victoria Building, Jalan Tomang Raya Kav 33-37 West Jakarta 11440 which is also the Operating Head Office and Non Operating Head Office. The Bank has branches in Bekasi, Serang, Bandung, Cirebon, Tegal, Denpasar, and Solo, and sub-branches in Tebet, Kramat Jati, Depok, and Tangerang. The Bank has Sharia Services Bank (SSB) in Kebayoran Baru.

b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, susunan pengurus Bank adalah sebagai berikut:

b. Board of Commissioners, Directors and Employees

As of December 31, 2018 and 2017, the Bank's management consists of the following:

2018 dan/and 2017

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
 Komisaris Independen
 Komisaris

Sugiharto
 Djoko Nugroho
 Sari Idayanti

Board of Commissioners

President Commissioner
 Independent Commissioner
 Commissioner

Direksi

Direktur Utama
 Direktur
 Direktur
 Direktur Kepatuhan

Firman Ananda Moeis
 Deddy Effendi Ridwan
 Andy Sundoro
 Nurani Raswindriati

Board of Directors

President Director
 Director
 Director
 Compliance Director

Susunan Dewan Pengawas Syariah pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

The composition of the Sharia Supervisory Boards as of December 31, 2018 and 2017 are as follows:

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Prof. DR. H. Hasanuddin AF, MA
 Anggota : Prof. DR. Huzaemah Tahido Yanggo, MA

Board of Sharia Supervisory

Chairman
 Member

Susunan Komite Audit pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

The composition of Audit Committee as of December 31, 2018 and 2017 are as follows:

2018

2017

Komite Audit

Ketua
 Anggota

Sugiharto
 Retno Dwiyantri Widaningsih
 Sari Idayanti
 Teguh Sukaryanto

Sugiharto
 Retno Dwiyantri Widaningsih
 Sari Idayanti

Audit Committee

Chairman
 Member

Susunan Komite Pemantau Risiko pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

The composition of Risk Monitoring Committee as of December 31, 2018 and 2017 are as follows:

2018

2017

Komite Pemantau Resiko

Ketua
 Anggota

Djoko Nugroho
 Retno Dwiyantri Widaningsih
 Teguh Sukaryanto

Djoko Nugroho
 Pangulu Oloan Simorangkir
 Supriyono

Risk Monitoring Committee

Chairman
 Member

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

The composition of Remuneration and Nomination Committee as of December 31, 2018 and 2017 are as follows:

2018 dan/and 2017

Komite Remunerasi dan Nominasi

Ketua
 Anggota

Sugiharto
 Sari Idayanti
 M.Rinaldi Taufik Sukarsa

Remuneration and Nomination Committee

Chairman
 Member

Personel manajemen kunci Bank terdiri dari Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif, dan Dewan Pengawas Syariah.

Key management personnel of the Bank consists of Commissioners, Directors, Executive Officer, and Board of Sharia Supervisory.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, jumlah karyawan Bank masing-masing adalah sejumlah 223 orang dan 221 orang (tidak diaudit).

As of December 31, 2018 and 2017, the total employees of the Bank are 223 and 221 people, respectively (unaudited).

Laporan keuangan PT Bank Victoria Syariah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi Bank pada tanggal 22 Februari 2019. Direksi Bank bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut.

The financial statements of PT Bank Victoria Syariah for the year ended December 31, 2018 was completed and authorized for issuance on February 22, 2019 by the Bank's Directors who are responsible for the preparation and presentation of the financial statements.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting

2. Summary of Significant Accounting and Financial Reporting Policies

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

a. Basis of Financial Statements Preparation and Measurement

Laporan keuangan disusun dan disajikan dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI, Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan PSAK lain selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards "SAK", which comprise the statements and interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI) and the Board of Sharia Accounting Standards of IAI, Indonesia Sharia Banking Accounting Guidelines (PAPSI), Otoritas Jasa Keuangan Regulations and other PSAK as long as does not contradict with sharia principle.

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan disusun dengan metode akrual kecuali laporan arus kas dan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, yang disusun menggunakan dasar kas.

The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies. The financial statements are prepared under the accrual basis of accounting except for statement of cash flows and statement of reconciliation of income and revenue sharing which are prepared under cash basis.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk penyajian laporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada bank lain, giro dan penempatan pada Bank Indonesia, yang jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehan.

The statements of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities. For the presentation of cash flows statement, cash and cash equivalents consist of cash, current accounts with other banks, current accounts and placements with Bank Indonesia with maturities of 3 (three) months from the date of acquisition.

Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil merupakan rekonsiliasi antara pendapatan bank syariah yang menggunakan dasar akrual dengan pendapatan yang dibagikan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas.

Statements of reconciliation of income and revenue sharing represents the reconciliation between income of sharia bank under accrual basis and income distributed to funds owners under cash basis.

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan keuangan yang mencerminkan peran Bank sebagai pemegang amanah dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber penggunaan dana zakat dalam jangka waktu tertentu, serta dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal pelaporan.

Statements of sources and distribution of zakah funds and statements of sources and uses of benevolence funds represents the financial statements reflecting the Bank's role as the mandate holder of social activity funds which are separately managed. Statements of sources and distribution of zakah funds shows the sources and distribution of zakah funds for a certain period, and the undistributed zakah funds at the reporting date.

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan dalam jangka waktu tertentu serta saldo dana kebajikan pada tanggal pelaporan.

Statements of sources and uses of benevolence funds shows the sources and uses of benevolence funds for a certain period, and benevolence funds balance at the reporting date.

Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki (pembayar zakat) untuk diserahkan kepada mustahiq (penerima zakat). Sumber dana zakat berasal dari Bank dan pihak lain yang diterima Bank untuk disalurkan kepada pihak yang berhak sesuai dengan prinsip syariah.

Zakah is a portion of the wealth that must be taken out by muzakki (the zakah payer) to be given to mustahiq (the zakah receiver). The sources of zakah funds are from Bank and other parties to be distributed to parties eligible in accordance with sharia principle.

Bank tidak secara langsung menjalankan fungsi pengelolaan dana zakat dan dana kebajikan. Dana yang terkumpul oleh Bank seluruhnya disalurkan kepada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional).

The Bank is not directly involved in the management of zakah and benevolence funds. All funds collected by the Bank have been transferred to BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional).

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017.

The accounting policies adopted in the preparation of the financial statements for the year ended December 31, 2018 are consistent with those adopted in the preparation of the financial statements for the year ended December 31, 2017.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp). Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan, kecuali bila dinyatakan secara khusus, adalah disajikan dalam Rupiah penuh.

The currency used in the financial statements is Rupiah (Rp). The figures presented in the financial statements, unless otherwise stated, are presented in full amount of Rupiah.

b. Transaksi Pihak Berelasi

Orang atau entitas dikategorikan sebagai pihak berelasi Bank apabila memenuhi definisi pihak berelasi berdasarkan PSAK No. 7 "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Semua transaksi signifikan dengan pihak berelasi telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

b. Transactions with Related Parties

A person or entity is considered a related party of the Bank if it meets the definition of a related party in PSAK No. 7 "Related Party Disclosures".

All significant transactions with related parties are disclosed in the financial statements.

c. Kas dan Setara Kas

Kas terdiri dari kas dan bank. Setara kas adalah semua investasi yang bersifat jangka pendek dan sangat likuid yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dengan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya, dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi pencairannya.

c. Cash and Cash Equivalents

Cash consists of cash on hand and in banks. Cash equivalents are short-term, highly liquid investments that are readily convertible to known amounts of cash with original maturities of three (3) months or less from the date of placements, and which are not used as collateral and are not restricted.

d. Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia

Giro dan penempatan pada Bank Indonesia dinyatakan sebesar saldo giro dan penempatan.

d. Current Accounts and Placements with Bank Indonesia

Current accounts and placements with Bank Indonesia are stated at their outstanding balances.

e. Giro pada Bank Lain

Giro pada bank lain dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Bonus yang diterima Bank dari bank umum syariah diakui sebagai pendapatan usaha lainnya. Penerimaan jasa giro dari bank umum konvensional (jika ada) tidak diakui sebagai pendapatan Bank dan digunakan untuk dana kebajikan.

e. Current Accounts with Other Banks

Current accounts with other banks are stated at their outstanding balances, net of allowance for impairment losses. Bonuses received from sharia commercial banks are recognised as other operating income. Interest income from conventional commercial banks (if any) are not recognised as the Bank's income but are used as part of the benevolence funds.

f. Penempatan Bank Lain

Penempatan pada bank lain adalah penanaman dana Bank pada bank lainnya yang beroperasi dengan menggunakan prinsip syariah berupa deposito berjangka *mudharabah* dan/ atau bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.

f. Placement with Other Banks

Placement with other banks represent placements in the form of Mudharabah time deposits and/or other forms of placement based on sharia principles.

Penempatan pada bank lain dinyatakan sebesar saldo penempatan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Placement with other banks are stated at their outstanding balance net of allowance for impairment losses.

Investasi *wakalah* merupakan perjanjian investasi berbasis *wakalah* dimana Bank akan mendapatkan tingkat keuntungan berupa laba diantisipasi. Dana yang diberikan Bank kemudian diinvestasikan pada produk yang halal. Hasilnya diberikan kepada Bank sebesar laba aktual jika hasil investasi berupa laba aktual lebih kecil dari laba diantisipasi. Jika hasil investasi berupa laba aktual lebih besar dari laba diantisipasi maka yang diterima Bank penerima adalah sebesar laba diantisipasi dan selisihnya akan menjadi pendapatan Bank.

Wakalah investment is placed fund based on wakalah that the Bank will receive return in form of anticipated profit. Funds given by the Bank will be invested in sharia products. Return distributed to customer were based on actual profit if the return from investment was lower than the anticipated profit. If return from investment were higher than the anticipated profit, the investee will receive an amount based on anticipated profit whilst the difference will be recognized as income of the Bank.

g. Efek-efek

Efek-efek Syariah adalah surat bukti investasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan dipasar uang syariah dan/atau pasar modal syariah antara lain obligasi syariah (sukuk) dan reksadana syariah.

Pada saat pengakuan awal, entitas menentukan klasifikasi investasi pada sukuk sebagai diukur pada biaya perolehan, diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Sukuk yang diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan dan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, biaya perolehan termasuk biaya transaksi.

Sukuk yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, biaya perolehan tidak termasuk biaya transaksi.

Investasi pada sukuk Ijarah dan sukuk Mudharabah setelah pengukuran awal diukur sebagai berikut:

1. Diukur pada biaya perolehan jika investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan terdapat persyaratan kontraktual menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau hasilnya. Selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk. Rugi penurunan nilai diakui jika jumlah terpulihkan lebih kecil dari jumlah tercatat dan disajikan sebagai penurunan nilai dalam laba rugi.

g. Marketable Securities

Sharia Securities are proof of investment based on sharia principles that are commonly traded in the sharia money market and/or sharia capital markets, including sharia bonds (sukuk) and sharia mutual funds.

At initial recognition, the entity determines the classification of investments in sukuk as measured at cost, at fair value through other comprehensive income or at fair value through profit and loss.

Sukuk classified as measured at cost and at fair value through other comprehensive income, is measured at acquisition cost including transaction costs.

Sukuk classified as at fair value through profit and loss, is measured at acquisition cost excluding transaction costs.

Investment at sukuk Ijarah and Mudharabah after the initial measurement are measured as follows:

1. Measured at acquisition cost if the investment is held within a business model whose primary goal is to obtain the contractual cash flows and there is a contractual requirements that specify a specific date of payment of principal and/or the results. Difference between the acquisition cost and the nominal value is amortized using straight line basis for a period of the sukuk. Impairment loss is recognized if the recoverable amount is less than the carrying amount and are presented as an impairment in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

2. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dengan mengacu kepada kuotasi harga di pasar aktif atau harga yang terjadi pada transaksi terkini jika tidak ada kuotasi harga di pasar aktif atau nilai wajar instrumen sejenis jika tidak ada kuotasi harga di pasar aktif dan tidak ada harga yang terjadi dari transaksi terkini.
3. Investasi diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual (pokok dan bagi hasil/ujrah) dan melakukan penjualan sukuk. Persyaratan kontraktual menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau hasilnya. Selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat diakui dalam laba rugi.

h. Piutang Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar beban perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan beban perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Piutang murabahah diklasifikasikan sebagai aset keuangan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang sesuai PSAK No. 55.

Piutang murabahah pada awalnya diukur pada nilai bersih yang dapat direalisasi ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut, dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode tingkat imbal hasil efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

2. Measured at fair value through profit or loss with reference to the price quotations in an active market or the price that occurs in the current transaction if there is no price quotations in an active market or the fair value of similar instrument if no price quotation in active market and no available price from the current transaction.
3. Investments are classified as fair value through other comprehensive income if it belongs in a business model whose primary purpose is to obtain contractual cash flows (principal and profit/ujrah) and selling sukuk. Contractual terms determine the specific date of payment of principal and/or results. The difference between the fair value and the carrying amount is recognized in the statement of profit or loss.

h. Murabahah Receivables

Murabahah is an agreement of sales transaction for goods in which the selling price is determined based on acquisition price added with mutually agreed margin and the seller shall disclose the acquisition cost to buyer.

Murabahah receivables are classified as financial assets under category loans and receivables in accordance with PSAK No. 55.

Murabahah receivables are initially measured at net realisable value plus transaction costs that are directly attributable and additional costs to obtain financial assets, and subsequent recognition are measured at amortised cost based on effective rate of return method less allowance for impairment losses.

Berdasarkan PSAK No. 102 (Revisi 2013), penjual yang tidak memiliki risiko yang signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan untuk transaksi murabahah merupakan penjual yang melaksanakan transaksi pembiayaan murabahah. Perlakuan akuntansi atas transaksi tersebut mengacu pada PSAK No. 50: Instrumen Keuangan: Penyajian, PSAK No. 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, dan PSAK No. 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan untuk aset keuangan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang, yang dalam penerapannya disesuaikan dengan prinsip, karakteristik dan istilah transaksi syariah.

Based on PSAK No. 102 (Revised 2013), the sellers who do not have significant risks associated with the ownership of the inventory for a murabahah transaction are sellers who implement murabahah financing transactions. The accounting treatment of these transactions refer to PSAK No. 50: Financial Instruments: Presentation, PSAK No. 55: Financial Instruments: Recognition and Measurement, and PSAK No. 60: Financial Instruments: Disclosures, related to financial assets in the category of loans and receivables, which in the implementation is adapted to the principle, characteristics and the term of sharia transaction.

i. Penyertaan Saham

Penyertaan saham merupakan investasi jangka panjang pada perusahaan non-publik.

Penyertaan dalam bentuk saham dengan kepemilikan kurang dari 20% yang nilai wajarnya tidak tersedia dan dimaksudkan untuk penyertaan jangka panjang dinyatakan sebesar biaya perolehan (metode biaya). Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut yang ditentukan untuk setiap investasi secara individu dan kerugiannya dibebankan pada laba rugi.

Bank memiliki penyertaan saham pada PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia dan Yayasan Perbanas dengan kepemilikan masing-masing kurang dari 5%.

i. Investment in shares

Investments in shares are long-term investment in non-public companies.

Investments in shares with ownership of less than 20% which the fair value is not available and intended for long-term investments are stated at cost (cost method). If there is a permanent impairment, the carrying amount is reduced to recognise the decline that specified for every investment individually and the loss which is charged to the profit or loss.

The Bank has investment in shares at PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia and Yayasan Perbanas with each percentage of ownership less than 5%.

j. Pembiayaan

Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan menggunakan bagi hasil (*profit sharing*) atau metode bagi hasil usaha (*gross profit margin*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Bank mengenakan bagi hasil berdasarkan metode margin laba kotor.

j. Financing

Mudharabah Financing

Mudharabah financing is investment of funds from the owner of funds (shahibul maal) to the fund manager (mudharib) to conduct certain business activity, with profit sharing or gross profit margin method between the two parties based on a mutually agreed predetermined ratio. The Bank uses profit sharing scheme based on gross profit margin method.

Pembiayaan mudharabah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Bank menetapkan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan. Apabila sebagian pembiayaan mudharabah hilang sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka rugi tersebut mengurangi saldo pembiayaan mudharabah dan diakui sebagai kerugian Bank. Apabila sebagian pembiayaan mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka rugi tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. Kerugian pembiayaan mudharabah akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi saldo pembiayaan mudharabah.

Pembiayaan musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset non-kas yang diperkenankan oleh syariah. Pembiayaan musyarakah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Bank menetapkan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan.

k. Aset yang Diperoleh untuk Ijarah

Aset yang diperoleh untuk ijarah adalah aset yang dijadikan objek sewa (ijarah) dan diakui sebesar harga perolehan. Objek sewa dalam transaksi ijarah disusutkan sesuai kebijakan penyusutan aset sejenis, sedangkan objek sewa dalam ijarah muntahiyah bittamlik disusutkan sesuai masa sewa. Aset yang diperoleh untuk ijarah disajikan sebesar nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan amortisasi.

Mudharabah financing is stated at the outstanding balance, net of allowance for possible losses. The Bank provides allowance for impairment losses based on the financing quality as determined by a review of each account. In the event that a portion of the mudharabah financing is lost prior to the start of operations due to damage or any other reasons without negligence or error by the fund manager, the loss shall be deducted from mudharabah financing balance and shall be recognised as a loss by the Bank. If part of mudharabah financing is lost after the commencement of business without negligence or fault of the fund manager, such loss is calculated during profit sharing. Loss on mudharabah financing due to negligence or error by the fund manager is charged to the fund manager and not deducted from the balance of mudharabah financing.

Musyarakah financing

Musyarakah financing is an agreement between two or more parties for a particular business, in which each party contributes funds provided that the profits are divided according to the agreement, while losses are based on the portion of fund contributions. The fund consists of cash or non-cash assets allowed by sharia. Musyarakah financing is stated at outstanding balance, net of allowance for impairment losses. The Bank provides allowance for impairment losses based on the financing quality as determined by a review of each account.

k. Assets Acquired for Ijarah

Assets acquired for ijarah represent assets that are objects of lease transactions (ijarah) and are recognised at the acquisition cost. The assets in an ijarah transaction are depreciated based on the depreciation policy for similar assets, while in an ijarah muntahiyah bittamlik transactions, the asset for lease is depreciated over the lease period. Assets acquired for ijarah are presented at the acquisition cost less accumulated depreciation and amortisation.

I. Aset Tetap

Aset tetap, kecuali tanah dan bangunan, dinyatakan berdasarkan biaya perolehan, tetapi tidak termasuk biaya perawatan sehari-hari, dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada. Tanah tidak disusutkan dan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan.

Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus untuk bangunan, dan metode saldo menurun ganda untuk penyusutan mesin dan peralatan serta kendaraan bermotor selama masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

Tahun/Years

Bangunan	20
Mesin dan peralatan	4 - 8
Kendaraan bermotor	4 - 8

Nilai tercatat aset tetap ditelaah kembali dan dilakukan penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan kondisi tertentu yang mengindikasikan nilai tercatat tersebut tidak dapat dipulihkan sepenuhnya.

Dalam setiap inspeksi yang signifikan, biaya inspeksi diakui dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian apabila memenuhi kriteria pengakuan. Biaya inspeksi signifikan yang dikapitalisasi tersebut diamortisasi selama periode sampai dengan saat inspeksi signifikan berikutnya.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap diakui dalam laba rugi pada tahun terjadinya penghentian pengakuan.

I. Property and Equipment

Property and equipment, except land, and buildings, are carried at cost, excluding day to day servicing, less accumulated depreciation and any impairment in value. Land is not depreciated and is stated at cost less any impairment in value.

The initial cost of property and equipment consists of its purchase price, including import duties and taxes and any directly attributable costs in bringing the property and equipment to its working condition and location for its intended use.

Depreciation are computed on a straight-line method for building and double declining balance method for machine and equipment and motor vehicle over the useful lives as follows:

Building
Machine and equipments
Motor vehicle

The carrying values of property and equipment are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be recoverable.

When each major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the item of property and equipment as a replacement if the recognition criteria are satisfied. Such major inspection is capitalized and amortized over the next major inspection activity.

An item of property and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gains or loss arising from de-recognition of property and equipment is included in profit or loss in the year the item is derecognized.

Nilai residu, umur manfaat, serta metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan dilakukan penyesuaian apabila hasil telaah berbeda dengan estimasi sebelumnya.

The asset's residual values, if any, useful lives and depreciation method are reviewed and adjusted if appropriate, at each financial year end.

m. Aset Tak berwujud

Aset tak berwujud yang dimiliki oleh Bank berupa aplikasi, perangkat lunak dan lisensi ATM.

Aplikasi, perangkat lunak, dan lisensi ATM dicatat sebagai aset tak berwujud dan dinyatakan sebesar nilai tercatat, yaitu sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi.

Aplikasi, perangkat lunak dan lisensi ATM diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama estimasi masa manfaat ekonomis aset yaitu 5 (lima) tahun.

m. Intangible Assets

Intangible assets held by the Bank are application, software and ATM license.

The application, software and ATM license is recorded as an intangible asset and is stated at cost less accumulated amortisation.

The application, software and ATM license are amortised using straight-line method over the estimated useful life of the assets, which is 5 (five) years.

n. Aset Lain-lain

Aset lain-lain antara lain terdiri dari setoran jaminan, uang muka, agunan yang diambil alih ("AYDA"), properti terbengkalai dan tagihan lain yang tidak dapat diklasifikasikan ke pos-pos sebelumnya.

AYDA diukur pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjualnya, maksimum sebesar kewajiban nasabah pembiayaan. Bank tidak dapat mengakui keuntungan pada saat pengambilalihan aset. Setelah pengakuan awal, AYDA dicatat sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dengan nilai wajarnya setelah dikurangi biaya untuk menjualnya. AYDA tidak disusutkan.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pelepasan AYDA (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan nilai tercatat dari AYDA) diperhitungkan dalam laba rugi pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

n. Other Assets

Other assets consist of deposit guarantee, advances, foreclosed assets, abandoned properties and other assets that cannot be classified to previous accounts.

At initial recognition, foreclosed assets are measured at carrying amount and its fair value less cost to sell, whichever is lower such that the maximum amount represents the customer's outstanding amount balance. The Bank cannot recognise profit when acquiring the assets. After initial recognition, foreclosed assets are recognised at carrying value and fair value less cost to sell, whichever is lower. Foreclosed assets are not depreciated.

Any gain or loss arising from the sale of foreclosed asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the foreclosed asset) is included in the profit or loss in the period such asset is derecognized.

o. Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan aset non-produktif

Aset produktif terdiri dari giro pada Bank Indonesia dan penempatan pada Bank Indonesia dalam bentuk Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, investasi pada efek-efek, piutang murabahah, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, aset yang diperoleh untuk ijarah, serta komitmen dan kontinjensi yang berisiko kredit.

Aset non-produktif adalah aset selain aset produktif yang memiliki potensi kerugian, dan antara lain terdiri dari rekening antar kantor, rekening rupa-rupa, agunan yang diambil alih, dan properti terbengkalai.

Cadangan kerugian penurunan nilai – Aset produktif

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI), Bank mengklasifikasikan aset produktif ke dalam satu dari lima kategori dan aset non-produktif ke dalam satu dari empat kategori. Aset produktif tidak bermasalah (*performing*) diklasifikasikan sebagai “Lancar” dan “Dalam Perhatian Khusus”, sedangkan aset produktif bermasalah (*non-performing*) diklasifikasikan kedalam tiga kategori yaitu: “Kurang Lancar”, “Diragukan” dan “Macet”. Kategori untuk aset non-produktif terdiri dari “Lancar”, “Kurang Lancar”, “Diragukan” dan “Macet”.

Penilaian kualitas aset bank umum berdasarkan prinsip syariah diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 8/SEOJK.03/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang “Penilaian Kualitas Aset bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah”.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas pembiayaan musyarakah dan mudharabah

Pedoman pembentukan pencadangan kerugian aset produktif berupa pembiayaan musyarakah dan mudharabah berdasarkan prinsip syariah diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 8/SEOJK.03/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang “Penilaian Kualitas Aset bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah”.

o. Allowance for impairment losses on earning assets and non-earning assets

Earning assets consist of current accounts with Bank Indonesia, placements with Bank Indonesia in the form of Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities (FASBIS), current accounts with other banks, placements with other banks, marketable securities, mudharabah and musyarakah financing, assets acquired for ijarah, and commitments and contingencies which carry credit risk.

Non-earning assets are the Bank’s assets other than the earning assets, which have potential loss, and consists of inter-office accounts, suspense accounts, foreclosed assets, and abandoned properties.

Allowance for impairment losses – Earning assets

In accordance with Bank Indonesia Regulations (PBI), the Bank classifies earning assets into one of five categories and non-earning assets into one of four categories. Performing earning assets categorised as “Current” and “Special Mention”, while non-performing earning assets are categorized into three categories: “Substandard”, “Doubtful”, and “Loss”. Non-Earning assets are divided into “Current”, “Substandard”, “Doubtful”, and “Loss”.

The assessment of asset quality of commercial banks under sharia circular letter is regulated by Otoritas Jasa Keuangan Regulations (SEOJK) No. 8/SEOJK.03/2015 dated March 10, 2015 regarding “Assessment of the Quality of Assets of Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit”.

Allowance for impairment losses on musyarakah and mudharabah financing

The guidelines in determining the allowance for impairment losses on earning assets of musyarakah and mudharabah financing under sharia circular letter is regulated by Otoritas Jasa Keuangan Regulations (SEOJK) No. 8/SEOJK.03/2015 dated March 10, 2015 regarding “Assessment of the Quality of Assets of Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit”.

Cadangan kerugian penurunan nilai
atas piutang murabahah

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa piutang murabahah telah mengalami penurunan nilai. Piutang murabahah mengalami penurunan nilai jika bukti obyektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal, dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang yang dapat diestimasi secara andal.

Kriteria yang digunakan oleh Bank untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut:

1. kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
2. pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau margin;
3. pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
4. terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit;
5. melakukan reorganisasi keuangan lainnya; hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau
6. data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk:
 - a. memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; dan
 - b. kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Allowance for impairment losses on
murabahah receivables

At each of the statement of financial position date, the Bank assesses whether there is objective evidence that murabahah receivables are impaired. Murabahah receivables are impaired when objective evidence demonstrates that loss event has occurred after the initial recognition and that the loss event has an impact on the future cash flows that can be estimated reliably.

The criteria used by the Bank to determine that there is objective evidence of impairment include:

1. significant financial difficulty of the issuer or obligor;
2. a breach of contract, such as a default or delinquency in margin or principal payments;
3. the lender, for economic or legal reasons relating to the borrower's financial difficulty, grants the borrower a concession that the lender would not otherwise consider;
4. there is a probability that the borrower will enter into bankruptcy;
5. conduct other financial reorganization, the disappearance of an active market for the financial asset because of financial difficulties; or
6. observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a portfolio of financial assets since the initial recognition of those assets, although the decrease has yet been identified individually in the portfolio, including:
 - a. adverse changes in the payment status of borrowers in the portfolio; and
 - b. national or local economic conditions that correlate with defaults on the assets in the portfolio.

Estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi. Pada umumnya, periode tersebut bervariasi antara 3 sampai 12 bulan, untuk kasus tertentu diperlukan periode yang lebih lama.

Bank pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif penurunan nilai secara individual atas piutang murabahah. Jika Bank menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas piutang murabahah yang dinilai secara individual, maka Bank memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok piutang murabahah yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Piutang murabahah yang penurunan nilainya dilakukan secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai telah diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Perhitungan penurunan nilai secara individu

Bank menetapkan piutang murabahah yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika piutang murabahah tersebut memiliki bukti obyektif penurunan nilai.

Berdasarkan kriteria di atas, Bank melakukan penilaian secara individual untuk piutang murabahah dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet.

Jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat piutang murabahah dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang (tanpa memperhitungkan kerugian penurunan nilai dimasa datang yang belum terjadi) yang didiskontokan menggunakan tingkat imbal hasil efektif awal dari piutang murabahah tersebut. Nilai tercatat aset tersebut dikurangi melalui akun cadangan kerugian penurunan nilai dan beban kerugian diakui pada laba rugi.

Perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas piutang murabahah dengan agunan mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak.

The estimated period between the occurrence of the event and identification of loss is determined by management for each identified portfolio. In general, the periods used vary between 3 months to 12 months; in exceptional cases longer periods are warranted.

The Bank first assesses whether the objective evidence of impairment exist or not. If the Bank determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed murabahah receivables, it includes the asset in a group of murabahah receivables with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. Murabahah receivables that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is or continues to be recognised are not included in a collective assessment of impairment.

Individual impairment calculation

The Bank determines that murabahah receivables should be evaluated for impairment individually if murabahah receivable which have an objective evidence of impairment.

Based on the above criteria, the Bank performs individual assessment for murabahah receivables with substandard, doubtful and loss collectability.

The amount of impairment loss is measured as the difference between the murabahah receivables' carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future credit losses that have not been incurred) discounted at the murabahah receivables' original effective rate of return. The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance for impairment loss account and the amount of the loss is recognised in the profit or loss.

The calculation of the present value of the estimated future cash flows of a collateralised murabahah receivables reflects the cash flows that may result from foreclosure less costs for obtaining and selling the collateral, whether or not foreclosure is probable.

Perhitungan penurunan nilai secara kolektif

Bank menetapkan piutang murabahah yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif jika piutang murabahah tidak memiliki bukti obyektif penurunan nilai.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang murabahah yang dinilai secara kolektif dihitung berdasarkan pengalaman kerugian historis. Pengalaman kerugian historis disesuaikan menggunakan dasar data yang dapat diobservasi untuk mencerminkan efek dari kondisi saat ini terhadap Bank dan menghilangkan efek dari masa lalu yang sudah tidak berlaku saat ini. Piutang murabahah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit yang sama antara lain dengan mempertimbangkan segmentasi dan tunggakan debitur.

Bank menggunakan metode analisis model statistik yaitu metode analisis migrasi untuk menilai cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif dengan menggunakan data historis 3 tahun.

Kerugian yang terjadi diakui pada laba rugi dan dicatat pada akun cadangan kerugian penurunan nilai sebagai pengurang terhadap piutang murabahah yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Pendapatan atas piutang murabahah yang mengalami penurunan nilai tetap diakui atas dasar imbal hasil yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam pengukuran kerugian penurunan nilai. Ketika peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai menyebabkan jumlah kerugian penurunan nilai berkurang, kerugian penurunan nilai uang sebelumnya diakui harus dipulihkan dan pemulihan tersebut diakui pada laba rugi.

Cadangan kerugian penurunan nilai – aset non-produktif

Agunan yang diambil alih ("AYDA") disajikan dalam akun aset lain-lain, diakui sebesar nilai realisasi bersih. Nilai realisasi bersih adalah nilai wajar aset setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan.

Bank wajib melakukan upaya penyelesaian rekening antar kantor dan rekening rupa-rupa.

Collective impairment calculation

The Bank determines murabahah receivables to be evaluated for impairment through collective evaluation if murabahah receivables do not have objective evidence of impairment.

Allowance for impairment lossess on murabahah receivables that are collectively evaluated, are calculated on the basis of historical loss experience. Historical loss experience is adjusted on the basis of current observable data to reflect the effects of current conditions affecting the Bank and to remove the effects of conditions in the historical period that do not currently exist. Murabahah receivables are grouped on the basis of similar credit risk characteristics by considering the segmentation and past due status of the debtors, among others.

The Bank applies statistical model analysis method, which are migration analysis methods, to assess the allowance for impairment losses which collectively assessed, using 3 years historical data.

Losses are recognised in the profit or loss and reflected in an allowance for impairment losses account against murabahah receivables carried at amortised cost. Income on the impaired murabahah receivables continues to be recognised using the rate of return used to discount the future cash flows for the purpose of measuring the impairment loss. When a subsequent event causes the amount of impairment loss to decrease, the impairment loss previously recognised is reversed through profit or loss.

Allowance for impairment losses – Non-earning assets

Foreclosed assets presented as other asset, are recognised based on net realisable value. Net realisable value is the fair value less estimated cost of disposal.

The Bank is required to settle its inter-branch account and suspense account.

Kualitas rekening antar kantor dan rekening rupa-rupa ditetapkan sebagai berikut:

- a) Lancar, apabila tercatat dalam pembukuan Bank sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari.
- b) Macet, tercatat dalam pembukuan Bank lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari.

p. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

q. Liabilitas Segera

Liabilitas segera merupakan kewajiban Bank kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai perintah pemberi amanat perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Liabilitas segera dinyatakan sebesar nilai kewajiban Bank.

r. Simpanan dari Nasabah dan Bank Lain

Simpanan merupakan titipan pihak lain berdasarkan prinsip wadiah yadh dhamanah dalam bentuk giro wadiah.

Giro wadiah merupakan giro wadiah yadh dhamanah yakni titipan dana pihak lain dimana pemilik dana mendapatkan bonus berdasarkan kebijakan Bank. Giro wadiah dicatat sebesar nilai titipan pemegang giro wadiah.

Simpanan dari bank lain adalah simpanan syariah dalam bentuk Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA). Simpanan dari bank lain dinyatakan sebesar liabilitas Bank kepada bank lain.

s. Dana Syirkah Temporer

Dana syirkah temporer merupakan investasi dari pihak lain dengan akad mudharabah mutlaqah, dimana pemilik dana (shahibul maal) memberikan kebebasan kepada pengelola dana (mudharib/Bank) dalam pengelolaan investasinya dengan keuntungan dibagikan sesuai kesepakatan. Dana syirkah temporer terdiri dari tabungan mudharabah, deposito mudharabah, dan giro mudharabah.

The quality of inter-branch account and suspense account are determined as:

- a) Current, the transaction has been recorded in the Bank's book up to 180 (one hundred and eighty) days.
- b) Loss, the transaction has been recorded in the Bank's book over 180 (one hundred and eighty) days.

p. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over their beneficial or contract periods using the straight-line method.

q. Liabilities Immediately Payable

Liabilities immediately payable represents the Bank's obligations to other parties which should be settled immediately based on predetermined instructions by those having the authority which are stated at the amounts of the Bank's liabilities.

r. Deposits from Customers and Other Banks

Deposits represent other parties' deposits based on the wadiah yadh dhamanah principle in the form of wadiah demand deposit.

Wadiah demand deposit is a yadh dhamanah demand deposit in which the funds owner will get a bonus based on the Bank's policy. Wadiah demand deposits are stated at the amount of wadiah demand deposit value.

Deposits from other banks are sharia deposits in the form of Interbank Mudharabah Investment Certificate (SIMA). Deposits from other banks are stated at the amounts payable to other banks.

s. Temporary Syirkah Funds

Temporary syirkah funds represent investments from other parties conducted on the basis mudharabah mutlaqah contract in which the owners of the funds (shahibul maal) grant freedom to the fund manager (mudharib/Bank) to manage investments with profit distributed based on the contract. Temporary syirkah funds consist of mudharabah saving deposits, mudharabah time deposits, and mudharabah demand deposits.

Tabungan mudharabah dan giro mudharabah merupakan investasi yang bisa ditarik kapan saja atau sesuai dengan persyaratan tertentu yang disepakati. Tabungan mudharabah dinyatakan sebesar saldo tabungan nasabah di Bank.

Mudharabah savings deposits and mudharabah demand deposits represent investment which could be withdrawn anytime (on call) or can be withdrawn based on certain agreed terms. Mudharabah savings deposits are stated based on the customer's savings deposit balance.

Deposito mudharabah merupakan investasi yang hanya bisa ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito mudharabah dengan Bank. Deposito mudharabah dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito dengan Bank.

Mudharabah time deposits represent investment that can only be withdrawn at a certain time based on the agreement between the customer and the Bank. Mudharabah time deposits are stated at nominal amount as agreed between the deposit holder and the Bank.

Dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai liabilitas. Hal ini karena Bank tidak berkewajiban untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana, kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi ketika mengalami kerugian. Di sisi lain, dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham seperti hak voting dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non-investasi (*current and other non-investment accounts*).

Temporary syirkah fund cannot be classified as liability. This was due to the Bank does not have any liability to return the initial fund to the owners, except for losses incurred due to the Bank's management negligence or default of loss is incurred. On the other hand, temporary syirkah fund cannot be classified as shareholders' equity, because it has maturity period and the depositors do not have the same rights as the shareholders' such as voting rights and the rights of realised profit from current assets and other non-investment accounts.

Pemilik dana syirkah temporer mendapatkan imbalan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati.

The owner of temporary syirkah funds receives a return from the profit sharing based on a predetermined ratio (nisbah).

t. Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib

t. Revenue from Fund Management by the Bank as Mudharib

Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib terdiri atas pendapatan dari jual dan beli transaksi murabahah, pendapatan bagi hasil dari mudharabah dan musyarakah, pendapatan dari sewa (ijarah) dan pendapatan usaha utama lainnya.

Revenue from fund management by Bank as mudharib consists of income from sales and purchases murabahah transactions, profit sharing from mudharabah and musyarakah financing, income from lease (ijarah) and other main operating income.

Bank menetapkan kebijakan tingkat risiko berdasarkan ketentuan internal. Bank melakukan penghentian amortisasi pendapatan ditangguhkan pada saat pembiayaan diklasifikasikan sebagai non-performing. Pendapatan Bank dari transaksi usaha yang diklasifikasikan sebagai non-performing dicatat sebagai pendapatan yang akan diterima pada laporan komitmen dan kontinjensi.

The Bank determines the risk rate policies based on the internal regulation. The Bank terminates the amortisation of deferred income when financing is classified as non-performing. The Bank's income from business transactions that are classified as non-performing is recorded as revenue to be received in the statement of commitments and contingencies.

Pengakuan pendapatan transaksi ijarah

Pendapatan ijarah diakui selama masa akad secara proporsional.

Pengakuan pendapatan transaksi musyarakah dan mudharabah

Pendapatan bagi hasil musyarakah yang menjadi hak mitra pasif diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.

Pendapatan bagi hasil mudharabah diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati dan tidak diperkenankan mengakui pendapatan dan proyek hasil usaha.

Pengakuan pendapatan transaksi murabahah

Pengakuan pendapatan atas piutang murabahah diakui pada laba rugi dengan menggunakan metode tingkat imbal hasil efektif.

Tingkat imbal hasil efektif merupakan metode alokasi pengakuan pendapatan dan merupakan tingkat imbal hasil yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa depan selama perkiraan umur dari piutang murabahah untuk memperoleh biaya perolehan diamortisasi dari piutang murabahah. Pada saat menghitung tingkat imbal hasil efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam piutang murabahah tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian piutang di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi, dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam akad yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari tingkat imbal hasil efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

u. Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer

Hak nasabah atas bagi hasil dana syirkah temporer merupakan bagian bagi hasil milik nasabah yang didasarkan pada prinsip mudharabah atas hasil pengelolaan dana mereka oleh Bank. Pendapatan yang dibagikan adalah kas yang telah diterima dari bagi hasil.

Pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil usaha yaitu dari laba kotor Bank (*gross profit margin*).

Revenue recognition of ijarah transaction

Income from ijarah is recognised proportionally over the period of the contract.

Revenue recognition of musyarakah and mudharabah transaction

Profit sharing income for passive partner in musyarakah is recognised in the period when the right arises in accordance with the agreed sharing ratio.

Profit sharing income from mudharabah is recognised in the period when the right arises in accordance with the agreed sharing ratio and the recognition based on projection of income is not allowed.

Revenue recognition of murabahah transaction

The revenue recognition of murabahah receivables are recognised in profit or loss using the effective rate of return method.

Effective rate of return is an allocation method of revenue recognition and the rate that exactly discounts the estimated future cash receipts through the expected life of the murabahah receivable to obtain the carrying amount of a murabahah receivable. When calculating the effective rate of return, the Bank estimates future cash flows by considering all contractual terms of the murabahah receivable, but does not consider the loss of receivables in the future. This calculation includes all commissions, fees, and other forms received by the parties in a contract that are an integral part of the effective rate of return, transaction costs, and all other premiums or discounts.

u. Third Parties' Share on Returns of Temporary Syirkah Funds

Third parties' share on returns of temporary syirkah funds represents customer's share on the Bank's income derived from the management of their funds by the Bank under mudharabah principles. Income that will be distributed is the cash received from the share.

The distribution of revenue is based on profit sharing scheme on the Bank's gross profit margin.

Pendapatan margin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan atas aset produktif lainnya akan dibagikan kepada nasabah penyimpan dana dan Bank sesuai dengan proporsi dana yang dipakai dalam pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya. Pendapatan margin dan bagi hasil yang tersedia untuk nasabah tersebut kemudian didistribusikan ke nasabah penabung dan deposan sebagai shahibul maal dan Bank sebagai mudharib sesuai porsi nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya. Pendapatan margin dan bagi hasil dari pembiayaan dan aset produktif lainnya yang memakai dana Bank, seluruhnya menjadi milik Bank, termasuk pendapatan dari investasi Bank berbasis imbalan.

v. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan administrasi merupakan pendapatan atas jasa administrasi pembiayaan dan jasa perbankan lainnya. Pendapatan administrasi diakui langsung dalam laporan laba rugi pada saat transaksi dilakukan, kecuali atas pendapatan administrasi yang diperhitungkan dalam imbal hasil efektif atas piutang murabahah.

Pendapatan dan beban lainnya diakui pada saat terjadinya, dengan menggunakan dasar akrual. Pendapatan dan beban dicatat antara lain sesuai dengan PSAK 23 - Pendapatan.

w. Imbalan Kerja

Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui sebesar jumlah yang tak-terdiskonto sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan setelah dikurangi dengan jumlah yang telah dibayar dan sebagai beban dalam laba rugi.

Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang merupakan imbalan pasca-kerja manfaat pasti yang dibentuk tanpa pendanaan khusus dan didasarkan pada masa kerja dan jumlah penghasilan karyawan pada saat pensiun yang dihitung menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti langsung diakui dalam laporan posisi keuangan dan penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi, namun menjadi bagian dari saldo laba. Biaya lainnya terkait dengan program imbalan pasti diakui dalam laba rugi.

Margin income and profit sharing on financing facilities and other earning assets are distributed to fund owners and the Bank based on proportion of fund used in financing and other earning assets. Margin income and profit sharing income allocated to the fund owners are then distributed to fund owners as shahibul maal and the Bank as mudharib based on a predetermined ratio (nisbah). Margin income and profit sharing from financing facilities and other earning assets using the Bank's funds, are entirely earned by the Bank, including income from the Bank's fee-based transactions.

v. Income and Expense Recognition

Administration income is income from financing administration services and other banking services. Administration income is directly recognised into profit or loss at the transaction date, except for administration income that is an integral part of effective return of murabahah receivables.

Revenues and expenses are recognized when incurred using accrual basis. Revenues and expenses are recorded among others according with PSAK 23 - Revenue.

w. Employee Benefits

Short-term Employee Benefits Liability

Short-term employee benefits are recognized at its undiscounted amount as a liability after deducting any amount already paid in the statement of financial position and as an expense in profit or loss.

Long-term Employee Benefits Liability

Long-term employee benefits liability represents post-employment benefits, unfunded defined-benefit plans which amounts are determined based on years of service and salaries of the employees at the time of pension and calculated using the Projected Unit Credit. Remeasurement is reflected immediately in the statement of financial position with a charge or credit recognized in other comprehensive income in the period in which they occur and not to be reclassified to profit or loss but reflected immediately in retained earnings. All other costs related to the defined-benefit plan are recognized in profit or loss.

Pesangon Pemutusan Kontrak Kerja (PKK)

Pesangon Pemutusan Kontrak Kerja diakui sebagai liabilitas dan beban dalam laporan keuangan. Jika pesangon ini jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan, maka besarnya liabilitas pesangon disajikan sebesar nilai kini yang didiskontokan.

x. Pajak Penghasilan

Pajak Kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui sebagai liabilitas jika terdapat perbedaan temporer kena pajak yang timbul dari perbedaan antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan jumlah tercatatnya pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan. Aset pajak tangguhan diakui dan direviu pada setiap tanggal pelaporan atau diturunkan jumlah tercatatnya, sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak tersedia untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus jika dan hanya jika, terdapat hak yang dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini.

y. Dana Zakat Dan Kebajikan

Dana zakat dan dana kebajikan pengelolaannya diserahkan kepada Unit Pengelola Zakat Bank Victoria Syariah lalu kepada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) pada tahun 2018 dan 2017.

Termination Benefits

Termination benefits are recognized as a liability and an expense in the financial statements. If the termination benefit falls due in a period in excess of twelve (12) months from the statement of financial position date, the termination benefit liability are presented at its discounted amount.

x. Income Tax

Current Tax

Current tax expense is determined based on the taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

Deferred Tax

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date.

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and the carry forward benefit of any unused tax losses. Deferred tax assets are recognized and reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences and the carry forward benefit of unused tax losses can be utilized.

Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset if and only if, a legally enforceable right exists to set off current tax assets against current tax liabilities.

y. Zakah Funds and Benevolence Funds

The management of zakah and benevolence funds is delegated to Unit Pengelola Zakat Bank Victoria Syariah then to BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) at 2018 and 2017.

Denda/sanksi diberikan kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja, sejumlah uang yang besarnya tidak ditentukan atas dasar kesepakatan dan tidak dibuat saat akad ditandatangani. Dana yang berasal dari denda/sanksi diperuntukkan untuk dana sosial/kebajikan.

Penalties/sanctions were charged to customers who are able to pay, but deliberately delay payments, in the amount that are not agreed and not determined in the contract. The funds from penalties/sanctions will be used for charity funds/benevolence funds.

z. Provisi

Provisi diakui jika Bank mempunyai kewajiban kini (hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, yang memungkinkan Bank harus menyelesaikan kewajiban tersebut dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada tanggal pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian terkait kewajiban tersebut.

z. Provisions

Provisions are recognized when the Bank has present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the Bank will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made the amount of the obligation.

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the obligation at the reporting date, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation.

aa. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Bank pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

aa. Events after the Reporting Period

Post year-end events that provide additional information about the Bank's statement of financial position at the reporting date (adjusting events), if any, are reflected in the financial statements. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to financial statements when material.

3. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi Manajemen

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Bank, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 pada laporan keuangan, manajemen harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut, berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

3. Management Use of Estimates, Judgments, and Assumptions

In the application of the Bank's accounting policies, which are described in Note 2 to the financial statements, management is required to make estimates, judgments, and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant.

Manajemen berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan dan asumsi signifikan yang dibuat oleh manajemen, yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Bank yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

- a. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dari Piutang Murabahah

Kondisi spesifik nasabah yang mengalami penurunan nilai dalam pembentukan cadangan kerugian atas piutang murabahah dievaluasi secara individu berdasarkan estimasi terbaik manajemen atas nilai kini arus kas yang diharapkan akan diterima. Dalam mengestimasi arus kas tersebut, manajemen membuat pertimbangan tentang situasi keuangan nasabah dan nilai realisasi bersih dari setiap agunan. Setiap aset yang mengalami penurunan nilai dinilai sesuai dengan manfaat yang ada, dan strategi penyelesaian serta estimasi arus kas yang diperkirakan dapat diterima.

Perhitungan cadangan penurunan nilai kolektif meliputi kerugian kredit yang melekat dalam portofolio piutang murabahah dengan karakteristik ekonomi yang sama ketika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, tetapi penurunan nilai secara individu belum dapat diidentifikasi. Dalam menilai kebutuhan untuk cadangan kolektif, manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas piutang dan jenis produk. Guna membuat estimasi cadangan yang diperlukan, manajemen membuat asumsi untuk menentukan kerugian yang melekat, dan untuk menentukan parameter input yang diperlukan, berdasarkan pengalaman masa lalu dan kondisi ekonomi saat ini. Keakuratan pencadangan tergantung pada seberapa baik estimasi arus kas masa depan untuk cadangan nasabah tertentu dan asumsi model dan parameter yang digunakan dalam menentukan cadangan kolektif.

Management believes that the following represent a summary of the significant estimates, judgments, and assumptions made that affected certain reported amounts and disclosures in the financial statements:

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Bank's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

- a. Allowance for Impairment losses on Murabahah Receivables

In the calculation of allowance for impairment losses of murabahah receivables, the specific condition of impaired customer is individually evaluated based on management's best estimate of the present value of the expected cash flows to be received. In estimating these cash flows, management makes judgements about the customer's financial situation and the net realizable value of any underlying collateral. Each impaired asset is assessed on its merits, and the workout strategy and estimated cash flows considered recoverable.

Collectively assessed impairment allowances cover credit losses inherent in portfolios of murabahah receivables with similar economic characteristics when there is objective evidence to suggest that they contain impaired financial assets, but the individual impaired items cannot yet be identified. In assessing the need for collective allowances, management considers factors such as credit quality and type of product. In order to estimate the required allowance, assumptions are made to define the way inherent losses are modelled and to determine the required input parameters, based on historical experiences and current economic conditions. The accuracy of the allowances depends on how well these estimate future cash flows for specific customer allowances and the model assumptions and parameters used in determining collective allowances.

b. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Bank mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Bank. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

a. Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap

Masa manfaat dari masing-masing aset tetap Bank diestimasi berdasarkan jangka waktu aset tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan. Estimasi tersebut didasarkan pada penilaian kolektif berdasarkan bidang usaha yang sama, evaluasi teknis internal dan pengalaman dengan aset sejenis. Estimasi masa manfaat setiap aset ditelaah secara berkala dan diperbarui jika estimasi berbeda dari perkiraan sebelumnya yang disebabkan karena pemakaian, usang secara teknis atau komersial serta keterbatasan hak atau pembatasan lainnya terhadap penggunaan aset. Dengan demikian, hasil operasi di masa mendatang mungkin dapat terpengaruh secara signifikan oleh perubahan dalam jumlah dan waktu terjadinya biaya karena perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang disebutkan di atas. Penurunan estimasi masa manfaat ekonomis setiap aset tetap akan menyebabkan kenaikan beban penyusutan dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

Nilai tercatat aset tetap pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 diungkapkan pada Catatan 12.

b. Income Taxes

Significant judgment is required in determining the provision for income taxes. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain due to different interpretation of tax regulations.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below. The Bank based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes on circumstances arising beyond the control of the Bank. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

a. Estimated Useful Lives of Property and Equipment

The useful life of each of the item of the Bank's property and equipment are estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on a collective assessment of similar business, internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence, and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above. A reduction in the estimated useful life of any item of property and equipment would increase the recorded depreciation and decrease the carrying values of these assets.

The carrying values of these assets as of December 31, 2018 and 2017 is disclosed in Note 12.

b. Penurunan Nilai Aset Non-Produktif

Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Bank.

Nilai tercatat aset non-produktif berupa agunan yang diambil alih dan properti terbengkalai pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 diungkapkan pada Catatan 15.

c. Imbalan Kerja Jangka Panjang

Penentuan liabilitas imbalan kerja jangka panjang dipengaruhi oleh asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah tersebut. Asumsi-asumsi tersebut dijelaskan dalam Catatan 33 dan mencakup, antara lain, tingkat kenaikan gaji, dan tingkat diskonto yang ditentukan dengan mengacu pada imbal hasil pasar atas bunga obligasi korporasi berkualitas tinggi dalam mata uang yang sama dengan mata uang pembayaran imbalan dan memiliki jangka waktu yang mendekati estimasi jangka waktu liabilitas imbalan kerja jangka panjang tersebut. Hasil aktual yang berbeda dengan asumsi Bank dibukukan pada penghasilan komprehensif lain dan dengan demikian, berdampak pada jumlah penghasilan komprehensif lain yang diakui dan liabilitas yang tercatat pada periode-periode mendatang. Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan adalah tepat dan wajar, namun demikian, perbedaan signifikan pada hasil aktual, atau perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah liabilitas imbalan kerja jangka panjang.

Nilai tercatat liabilitas imbalan kerja jangka panjang masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, diungkapkan pada Catatan 33.

b. Impairment of Non-Productive Assets

Impairment review is performed when certain impairment indicators are present. Determining the fair value of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets. Any significant changes in the assumptions used in determining the fair value may materially affect the assessment of recoverable values and any resulting impairment loss could have a material impact on results of the Bank's operations.

The carrying values of non-productive assets in the form of foreclosed assets and abandoned properties as of December 31, 2018 and 2017 are set out in Note 15.

c. Long-term Employee Benefits

The determination of the long-term employee benefits is dependent on the selection of certain assumptions used by actuary in calculating such amounts. Those assumptions are described in Note 33 and include, among others, rate of salary increase, and discount rate which is determined after giving consideration to interest rates of high-quality corporate bonds that are denominated in the currency in which the benefits are to be paid and have terms of maturity approximating the terms of the related employee benefits liability. Actual results that differ from the Bank's assumptions are charged to comprehensive income and therefore, generally affect the recognized comprehensive income and recorded obligation in such future periods. While it is believed that the management's assumptions are appropriate and reasonable, significant differences in actual experience or significant changes in assumptions may materially affect the amount of long-term employee benefits liability.

The carrying value of long-term employee benefits liability as of December 31, 2018 and 2017 are set out in Note 33.

d. Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas pada laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak jika kemungkinan besar jumlah laba kena pajak akan memadai untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang diakui. Estimasi manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang diakui berdasarkan kemungkinan waktu terealisasinya dan jumlah laba kena pajak pada masa mendatang serta strategi perencanaan pajak masa depan.

Aset pajak tangguhan diungkapkan pada Catatan 34.

d. Deferred Tax Assets

Deferred tax assets are recognized for all temporary differences between the financial statements' carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective taxes bases to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies.

Deferred tax assets are disclosed in Note 34.

4. Giro pada Bank Indonesia

Giro pada Bank Indonesia merupakan saldo giro pada Bank Indonesia dalam mata uang Rupiah. Saldo giro pada Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp 35.378.223.111 dan Rp 85.512.539.440.

Saldo giro pada Bank Indonesia disediakan untuk memenuhi persyaratan Giro Wajib Minimum (GWM) dari Bank Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) mengenai Giro Wajib Minimum (GWM) No. 15/16/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, dengan perubahan terakhir melalui PBI No. 20/3/PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018, dimana Bank sebagai Bank Umum Syariah diwajibkan memelihara GWM dalam Rupiah yang besarnya ditetapkan masing-masing sebesar 5% dan 6% dari dana pihak ketiga Bank dalam Rupiah pada tahun 2018 dan 2017.

Rasio GWM dalam Rupiah Bank sebesar 5,11% dan 6,49% pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Bank telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang GWM per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

4. Current Accounts with Bank Indonesia

Current accounts with Bank Indonesia is a balance of current accounts with Bank Indonesia in Rupiah. Current accounts with Bank Indonesia as of December 31, 2018 and 2017 is Rp 35,378,223,111 and Rp 85,512,539,440, respectively.

Balance of current accounts with Bank Indonesia is provided to fulfill the Statutory Minimum Reserves by Bank Indonesia.

Based on Bank Indonesia Regulation regarding Minimum Statutory Reserve Requirements (GWM) No. 15/16/PBI/2013 dated December 24, 2018 regarding Minimum Statutory Reserves in Rupiah and Foreign Currencies for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units with latest amended was based on Bank Indonesia Regulation No. 20/3/PBI/2018 dated March 29, 2018, where the Bank as a Sharia Commercial Bank is required to maintain GWM in Rupiah which is set at 5% and 6% in 2018 and 2017, respectively of the Bank's third party funds in Rupiah.

The Bank's minimum statutory reserves are 5.11% and 6.49% as of December 31, 2018 and 2017, respectively.

The Bank has complied with the Bank Indonesia regulations regarding the GWM as of December 31, 2018 and 2017.

5. Giro pada Bank Lain

	2018	2017
Pihak berelasi (Catatan 35)		
PT Bank Victoria International Tbk	54.151.409	1.523.684
Pihak ketiga		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3.403.034.358	2.177.086.999
PT Bank Central Asia Tbk	638.674.552	529.805.758
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	141.683.972	-
PT Bank Pan Indonesia Tbk	1.280.877	1.634.819
Jumlah pihak ketiga	4.184.673.759	2.708.527.576
Jumlah giro pada bank lain	4.238.825.168	2.710.051.260

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas penempatan pada bank lain sehingga tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai.

Berdasarkan hasil penelaahan dan evaluasi manajemen, kolektibilitas seluruh giro pada bank lain pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah lancar.

Tingkat pengembalian (bonus dan bunga) rata-rata per tahun adalah sebesar 0,00%-2,00% pada tahun 2018 dan 2017.

5. Current Accounts with Other Banks

Related party (Note 35)	
PT Bank Victoria International Tbk	
Third parties	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
PT Bank Central Asia Tbk	
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	
PT Bank Pan Indonesia Tbk	
Total third parties	
Total current accounts with other banks	

Management believes that there is no impaired placement with other banks, therefore, no allowance for impairment losses is provided for.

Based on the management review, all current accounts with other Banks as of December 31, 2018 and 2017 are classified as current.

Annual average rate of return (bonus and interest) are 0.00%-2.00% in 2018 and 2017, respectively.

6. Penempatan pada Bank Lain dan Bank Indonesia

Jenis Penempatan	2018		
	Jangka Waktu/ Term	Tingkat bagi hasil/ Revenue sharing Rate %	Pihak Ketiga/ Third Parties
Penempatan pada Bank Indonesia Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS)	2 hari/days	5,25	30.000.000.000
Penempatan pada bank lain Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA)	4-27 hari/days	5,80 - 7,50	265.000.000.000
Jumlah			295.000.000.000

Jenis Penempatan	2017		
	Jangka Waktu/ Term	Tingkat bagi hasil/ Revenue sharing Rate %	Pihak Ketiga/ Third Parties
Penempatan pada Bank Indonesia Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS)	3 hari/days	3,50	69.000.000.000
Penempatan pada bank lain Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA)	4 - 31 hari/days	4,10 - 5,10	205.000.000.000
Jumlah			274.000.000.000

6. Placement with Other Banks and Bank Indonesia

Type of Placement
Placements with Bank Indonesia Bank Indonesia Sharia Deposit Facility (FASBIS)
Placements with other banks Certificate of Interbanks Mudharabah Investment (SIMA)
Total

Type of Placement
Placements with Bank Indonesia Bank Indonesia Sharia Deposit Facility (FASBIS)
Placements with other banks Certificate of Interbanks Mudharabah Investment (SIMA)
Total

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2018 dan 2017
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Penempatan pada bank lain berupa Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank merupakan penempatan pada:

Details of placements with other banks in form Certificate of Interbanks Mudharabah Investment are as follows:

	2018	2017	
PT BPD Jateng	110.000.000.000	-	PT BPD Jateng
PT BPD Kaltimara	85.000.000.000	50.000.000.000	PT BPD Kaltimara
PT Bank Syariah Bukopin	50.000.000.000	-	PT Bank Syariah Bukopin
PT Bank Mega Syariah	20.000.000.000	-	PT Bank Mega Syariah
PT Bank Sinarmas Tbk	-	90.000.000.000	PT Bank Sinarmas Tbk
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	-	40.000.000.000	PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	-	25.000.000.000	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
Jumlah	<u>265.000.000.000</u>	<u>205.000.000.000</u>	Total

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas penempatan pada bank lain sehingga tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai.

Management believes that there is no impaired placement with other banks, therefore, no allowance for impairment losses is provided for.

Berdasarkan hasil penelaahan manajemen, kolektibilitas seluruh penempatan pada bank lain pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah lancar.

Based on management review, all placement with other banks as of December 31, 2018 and 2017 are classified as current.

7. Efek-efek

7. Marketable Securities

a. Berdasarkan jenis

a. By type

	2018	2017	
Diukur pada biaya perolehan			At cost
Surat Berharga Syariah Negara	210.917.197.528	181.330.129.502	Sharia Government Bonds
Sukuk Korporasi	12.062.434.983	40.158.019.183	Corporate sukuk
Jumlah diukur pada biaya perolehan	<u>222.979.632.511</u>	<u>221.488.148.685</u>	Total At cost
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain			Fair value through other comprehensive income
Surat Berharga Syariah Negara	162.789.153.580	48.615.644.400	Sharia Government Bonds
Sukuk Korporasi	19.245.417.321	10.000.000.000	Corporate sukuk
Jumlah diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	<u>182.034.570.901</u>	<u>58.615.644.400</u>	Total fair value through other comprehensive income
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi			At fair value through profit loss - trading
Reksadana Syariah	4.665.199.714	40.178.152.309	Sharia Mutual Funds
Jumlah	<u>409.679.403.126</u>	<u>320.281.945.394</u>	Total
Dikurangi:			Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(1.300.000.000)</u>	-	Allowance for impairment losses
Jumlah - bersih	<u>408.379.403.126</u>	<u>320.281.945.394</u>	Total - net

b. Berdasarkan jatuh tempo

b. By maturity

	2018	2017	
Lebih dari 3 sampai dengan 12 bulan	60.056.423.983	31.465.274.378	More than 3 to 12 months
Lebih dari 12 sampai dengan 60 bulan	114.897.992.358	122.968.941.100	More than 12 to 60 months
Lebih dari 5 tahun	233.424.986.785	165.847.729.916	More than 5 years
Surat-surat berharga - bersih	<u>408.379.403.126</u>	<u>320.281.945.394</u>	Marketable securities - net

c. Berdasarkan kolektibilitas

	2018	2017	
Lancar	407.680.877.916	320.281.945.394	Current
Macet	1.998.525.210	-	Loss
Jumlah	409.679.403.126	320.281.945.394	Total
Dikurangi:			Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.300.000.000)	-	Allowance for impairment losses
Jumlah - bersih	408.379.403.126	320.281.945.394	Net

c. By collectability

d. Tingkat pengembalian rata-rata per tahun

	2018	2017	
Sukuk Korporasi	7,50% - 11,50%	6,50% - 11,50%	Corporate Sukuk
Surat Berharga Syariah Negara	5,45% - 8,88%	6,00% - 11,90%	Sharia Government Securities Bonds

d. Rate of annual average return

e. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai efek-efek adalah sebagai berikut:

	2018	
Saldo awal tahun	-	Beginning balance
Pencadangan		Allowance for impairment
selama tahun berjalan (Catatan 30)	1.300.000.000	losses in current year (Note 30)
Saldo akhir tahun	1.300.000.000	Ending balance

e. Movement of allowance for impairment losses on securities are as follows:

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai efek-efek pada tanggal 31 Desember 2018 adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang akan timbul akibat tidak tertagihnya efek-efek sedangkan pada tanggal 31 Desember 2017 tidak terdapat penurunan nilai atas efek-efek sehingga tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai.

Management believes that the allowance for impairment losses on securities as of December 31, 2018 are adequate to cover the losses which might arise from uncollectible securities, while as of December 31, 2017 no impaired marketable securities, therefore, no allowance for impairment losses is provided for.

Nilai wajar dari surat berharga (termasuk obligasi Pemerintah) yang diukur pada biaya perolehan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 376.899.043.058 dan Rp 267.662.195.018.

The fair values of marketable securities carried at cost (including government bonds) as of December 31, 2018 and 2017 amounted to Rp 376,899,043,058 and Rp 267,662,195,018, respectively.

8. Piutang Murabahah

a. Berdasarkan jenis

	2018	2017	
Pihak berelasi (Catatan 35)			Related parties (Note 35)
Konsumsi	1.031.081.589	1.159.084.646	Consumer
Pihak ketiga			Third parties
Modal kerja	122.659.033.576	212.381.833.280	Working capital
Investasi	55.284.916.987	60.616.702.871	Investment
Konsumsi	64.585.409.363	51.474.367.479	Consumer
Jumlah	242.529.359.926	324.472.903.630	Subtotal
Jumlah	243.560.441.515	325.631.988.276	Total
Dikurangi:			Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.072.981.878)	(3.264.568.617)	Allowance for impairment losses
Jumlah - bersih	241.487.459.637	322.367.419.659	Net

b. Berdasarkan sektor ekonomi

	2018	2017	
Pihak berelasi (Catatan 35)			Related parties (Note 35)
Lain-lain	1.031.081.589	1.159.084.646	Others
Pihak ketiga			Third parties
Perdagangan besar dan eceran	43.625.912.319	84.636.014.928	Large trading and retail
Jasa-jasa dunia usaha	37.130.337.549	88.662.136.431	Business services
Konstruksi	34.482.314.513	40.085.586.206	Construction
Industri pengolahan lainnya	31.005.853.926	46.151.814.098	Other processing industry
Perdagangan lain	27.835.332.748	13.462.984.488	Other trading
Lain-lain	68.449.608.871	51.474.367.479	Others
Jumlah	242.529.359.926	324.472.903.630	Subtotal
Jumlah	243.560.441.515	325.631.988.276	Total
Dikurangi:			Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.072.981.878)	(3.264.568.617)	Allowance for impairment losses
Jumlah - bersih	241.487.459.637	322.367.419.659	Net

c. Berdasarkan jangka waktu pembiayaan

	2018	2017	
Kurang dari 1 tahun	7.695.806.324	116.769.766	Less than 1 year
1 sampai dengan 2 tahun	55.416.559.841	45.833.041.970	1 year to 2 years
2 sampai dengan 5 tahun	114.322.152.392	176.648.908.623	2 years to 5 years
Lebih dari 5 tahun	66.125.922.958	103.033.267.917	More than 5 years
Jumlah	243.560.441.515	325.631.988.276	Total
Dikurangi:			Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.072.981.878)	(3.264.568.617)	Allowance for impairment losses
Jumlah - bersih	241.487.459.637	322.367.419.659	Net

8. Murabahah Receivables

a. By type

Related parties (Note 35)
Consumer
Third parties
Working capital
Investment
Consumer
Subtotal
Total
Less:
Allowance for impairment losses
Net

b. By economic sector

Related parties (Note 35)
Others
Third parties
Large trading and retail
Business services
Construction
Other processing industry
Other trading
Others
Subtotal
Total
Less:
Allowance for impairment losses
Net

c. By period of financing

Less than 1 year
1 year to 2 years
2 years to 5 years
More than 5 years
Total
Less:
Allowance for impairment losses
Net

d. Berdasarkan kolektibilitas

	2018	2017
Lancar	205.112.897.178	258.943.782.330
Dalam perhatian khusus	13.630.161.714	29.371.513.624
Kurang lancar	343.594.133	3.759.220.923
Diragukan	13.468.126.106	16.721.458
Macet	11.005.662.384	33.540.749.941
Jumlah	243.560.441.515	325.631.988.276
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.072.981.878)	(3.264.568.617)
Jumlah - bersih	241.487.459.637	322.367.419.659

d. By collectability

Current
Special mention
Substandard
Doubtful
Loss
Total
Less:
Allowance for impairment losses
Net

e. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai

	2018	2017
Saldo awal tahun	3.264.568.617	21.769.356.487
Pemulihan selama tahun berjalan (Catatan 30)	(2.903.186.359)	(7.235.328.944)
Penerimaan kembali pembiayaan yang dihapus bukukan	1.711.599.620	8.068.168.480
Penghapusan	-	(19.337.627.406)
Saldo akhir tahun	2.072.981.878	3.264.568.617

e. Movement of allowance for impairment losses

Beginning balance
Recovery for impairment losses in current year (Note 30)
Recoveries from write off financing
Write Off
Ending balance

Manajemen Bank berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang murabahah yang telah dibentuk pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah memadai untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya piutang murabahah.

Management believes that the allowance for impairment losses as of December 31, 2018 and 2017 is sufficient to cover all possible losses arising from uncollected murabahah receivables.

f. Mutasi pembiayaan murabahah yang dihapus buku

	2018	2017
Saldo awal tahun	58.569.918.907	47.300.459.981
Mutasi selama tahun berjalan		
Hapus buku	-	19.337.627.406
Hapus tagih	(131.529.328)	-
Penerimaan kembali	(1.711.599.620)	(8.068.168.480)
Saldo akhir tahun	56.726.789.959	58.569.918.907

f. The movement of murabahah financing written-off

Beginning balance
Movement during the year
Write off
Deleted notes
Recovery
Ending balance

g. Tingkat margin rata-rata per tahun

Tingkat margin rata-rata per tahun adalah sebesar 12,00% dan 13,00% pada tahun 2018 dan 2017.

h. Pembiayaan bersama

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, piutang murabahah termasuk fasilitas pembiayaan bersama *without recourse* dengan perusahaan pembiayaan sebesar Rp 68.411.459.418 dan Rp 58.633.347.557.

i. Piutang murabahah direstrukturisasi

Piutang murabahah yang direstrukturisasi masing-masing sebesar Rp 32.059.783.415 dan Rp 57.079.016.370 pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

g. Average annual margin rate

Average annual margin rate is 12.00% and 13.00% in 2018 and 2017, respectively.

h. Joint financing

As of December 31, 2018 and 2017, murabahah receivables include joint financing without recourse with multifinance companies amounted to Rp 68,411,459,418 and Rp 58,633,347,557, respectively.

i. Restructured murabahah receivables

Restructured murabahah receivables amounted to Rp 32,059,783,415 and Rp 57,079,016,370 as of December 31, 2018 and 2017, respectively.

9. Pembiayaan Musyarakah

a. Berdasarkan jenis

	2018	2017	
Pihak berelasi (Catatan 35)			Related parties (Note 35)
Investasi	20.131.128.262	-	Investment
Pihak ketiga			Third parties
Modal kerja	875.006.549.651	798.730.023.769	Working capital
Investasi	34.662.981.512	68.834.086.278	Investment
Konsumsi	618.696.644	450.000.000	Consumer
Jumlah pihak ketiga	910.288.227.807	868.014.110.047	Total related parties
Dikurangi:			Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(12.423.139.991)	(12.208.263.314)	Allowance for impairment losses
Jumlah - bersih	917.996.216.078	855.805.846.733	Net

b. Berdasarkan sektor ekonomi

	2018	2017	
Pihak berelasi (Catatan 35)			Related parties (Note 35)
Perdagangan lain	20.131.128.262	-	Other trading
Pihak ketiga			Third parties
Perdagangan lain	398.721.420.136	95.346.720.190	Other trading
Jasa-jasa dunia usaha	301.954.957.117	540.466.736.934	Business services
Perdagangan eceran	110.611.169.486	84.944.834.984	Retail
Industri pengolahan lainnya	81.751.439.384	129.922.857.513	Other processing industry
Konstruksi	17.249.241.684	17.332.960.426	Construction
Jumlah pihak ketiga	910.288.227.807	868.014.110.047	Total third parties
Dikurangi:			Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(12.423.139.991)	(12.208.263.314)	Allowance for impairment losses
Jumlah - bersih	917.996.216.078	855.805.846.733	Net

9. Musyarakah Financing

a. By type

b. By economic sector

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2018 dan 2017
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

c. Berdasarkan jangka waktu pembiayaan

	2018	2017
Kurang dari 1 tahun	531.627.541.616	17.818.000.000
1 sampai dengan 2 tahun	129.891.045.755	410.104.474.427
2 sampai dengan 5 tahun	177.382.152.135	430.255.753.245
Lebih dari 5 tahun	91.518.616.563	9.835.882.375
Jumlah	930.419.356.069	868.014.110.047
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(12.423.139.991)	(12.208.263.314)
Jumlah - bersih	917.996.216.078	855.805.846.733

c. By period of financing

Less than 1 year	
1 year to 2 years	
2 years to 5 years	
More than 5 years	
Total	
Less:	
Allowance for impairment losses	
Net	

d. Berdasarkan kolektibilitas

	2018	2017
Lancar	768.494.616.426	756.042.326.004
Dalam perhatian khusus	137.464.427.615	91.593.675.422
Kurang lancar	2.851.000.000	4.999.168.217
Diragukan	9.472.276.418	-
Macet	12.137.035.610	15.378.940.404
Jumlah	930.419.356.069	868.014.110.047
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(12.423.139.991)	(12.208.263.314)
Jumlah - bersih	917.996.216.078	855.805.846.733

d. By collectability

Current	
Special mention	
Substandard	
Doubtful	
Loss	
Total	
Less:	
Allowance for impairment losses	
Net	

e. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai

	2018	2017
Saldo awal tahun	12.208.263.314	20.598.190.723
Pencadangan selama tahun berjalan (Catatan 30)	214.776.677	5.580.180.083
Penerimaan kembali pembiayaan yang dihapusbukukan	100.000	4.000.000
Penghapusan	-	(13.974.107.492)
Saldo akhir tahun	12.423.139.991	12.208.263.314

e. Movement in allowance for impairment losses

Beginning balance	
Allowance for impairment losses in current year (Note 30)	
Recoveries from write off financing	
Write Off	
Ending balance	

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan musyarakah yang telah dibentuk adalah memadai untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya pembiayaan musyarakah.

Management believes that the allowance for impairment losses of musyarakah financing is sufficient to cover all possible losses arising from uncollected musyarakah financing.

f. Mutasi pembiayaan musyarakah yang dihapus buku

	2018
Saldo awal tahun	15.487.741.079
Mutasi selama tahun berjalan	
Hapus buku	-
Hapus tagih	(54.516.000)
Penerimaan kembali	(100.000)
Saldo akhir tahun	15.433.125.079

f. The movement of musyarakah financing written-off

	2017
Beginning balance	1.517.633.587
Movement during the year	
Write off	13.974.107.492
Deleted notes	-
Recovery	(4.000.000)
Ending balance	15.487.741.079

g. Tingkat bagi hasil rata-rata per tahun

Tingkat bagi hasil rata-rata per tahun adalah sebesar 13,00% pada tahun 2018 dan 2017.

g. Average annual profit sharing rate

Average annual profit sharing rate per annum in 2018 and 2017 is 13.00%.

h. Pembiayaan musyarakah direstrukturisasi

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, terdapat pembiayaan musyarakah yang direstrukturisasi masing-masing sebesar Rp 52.659.600.356 dan Rp 67.210.854.564.

h. Restructured musyarakah financing

As of December 31, 2018 and 2017, there are restructured musyarakah financing amounted Rp 52,659,600,356 and Rp 67,210,854,564, respectively.

10. Pembiayaan Mudharabah

Seluruh pembiayaan mudharabah diberikan kepada pihak ketiga.

a. Berdasarkan jenis

	2018
Modal kerja	56.739.552.733
Dikurangi:	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(659.091.793)
Jumlah - bersih	56.080.460.940

10. Mudharabah Financing

All mudharabah financing were given to third parties.

a. By type

	2017
Working capital	64.197.635.203
Less:	
Allowance for impairment losses	(711.865.985)
Net	63.485.769.218

b. Berdasarkan sektor ekonomi

	2018
Jenis-jenis dunia usaha	56.739.552.733
Dikurangi:	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(659.091.793)
Jumlah - bersih	56.080.460.940

b. By economic sector

	2017
Business services	64.197.635.203
Less:	
Allowance for impairment losses	(711.865.985)
Net	63.485.769.218

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2018 dan 2017
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

c. Berdasarkan jangka waktu pembiayaan

	2018	2017
1 sampai dengan 2 tahun	37.229.850.452	16.523.737.961
2 sampai dengan 5 tahun	19.509.702.281	42.951.467.450
Lebih dari 5 tahun	-	4.722.429.792
Jumlah	56.739.552.733	64.197.635.203
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(659.091.793)	(711.865.985)
Jumlah - bersih	56.080.460.940	63.485.769.218

c. By period of financing

1 year to 2 years
2 years to 5 years
More than 5 years
Total
Less: Allowance for impairment losses
Net

d. Berdasarkan kolektibilitas

	2018	2017
Lancar	56.739.552.733	62.413.971.085
Dalam perhatian khusus	-	1.783.664.118
Kurang lancar	-	-
Diragukan	-	-
Macet	-	-
Jumlah	56.739.552.733	64.197.635.203
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(659.091.793)	(711.865.985)
Jumlah - bersih	56.080.460.940	63.485.769.218

d. By collectability

Current
Special mention
Substandard
Doubtful
Loss
Total
Less: Allowance for impairment losses
Net

e. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai

	2018	2017
Saldo awal tahun	711.865.985	63.759.618
Pencadangan (pemulihan) selama tahun berjalan (Catatan 30)	(52.774.192)	648.106.367
Saldo akhir tahun	659.091.793	711.865.985

e. Movement in allowance for impairment losses

Beginning balance
Allowance (recovery) for impairment losses in current year (Note 30)
Ending balance

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan mudharabah yang telah dibentuk adalah memadai untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya pembiayaan mudharabah.

Management believes that allowance for impairment losses of mudharabah financing is sufficient to cover all possible losses arising from uncollected mudharabah financing.

f. Tingkat bagi hasil rata-rata per tahun

Tingkat bagi hasil rata-rata per tahun adalah sebesar 12,60% dan 13,00% pada tahun 2018 dan 2017.

f. Average annual profit sharing rate

Annual average profit sharing rate is 12.60% and 13.00% in 2018 and 2017, respectively.

g. Pembiayaan mudharabah direstrukturasikan

Pembiayaan mudharabah yang direstrukturasikan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 1.590.362.878, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2017 tidak terdapat pembiayaan mudharabah yang direstrukturasikan.

g. Restructured mudharabah financing

Restructured mudharabah financing amounted to Rp 1,590,362,878 as of December 31, 2018, while there is no restructured mudharabah financing as of December 31, 2017.

11. Pendapatan Bagi Hasil Yang Akan Diterima

	2018	2017
Bagi hasil efek-efek	8.104.160.493	5.270.002.774
Bagi hasil piutang murabahah	1.169.699.764	2.495.257.247
Bagi hasil penempatan pada bank lain	481.258.333	534.177.777
Pendapatan ijarah	11.671.501	11.704.614
Jumlah	9.766.790.091	8.311.142.412

11. Revenue Sharing Receivables

Revenue sharing marketable securities
Revenue sharing murabahah receivables
Revenue sharing placement
with other banks
Ijarah income

Total

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017, pendapatan bagi hasil yang akan diterima dari pihak berelasi masing-masing sebesar Rp 5.723.920 dan Rp 12.696.349 (Catatan 35) atau masing-masing 0,06% dan 0,17% dari jumlah pendapatan bagi hasil yang akan diterima.

For the years ended December 31, 2018 and 2017, revenue sharing receivables received from related parties amounted to Rp 5,723,920 and Rp 12,696,349 (Note 35) respectively, or 0.06% and 0.17% of total revenue sharing receivables.

12. Aset Tetap

12. Property and Equipment

	1 Januari 2018/ January 1, 2018	Perubahan Selama Tahun 2018/ Changes during 2018		31 Desember 2018/ December 31, 2018	
		Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions		
Biaya perolehan:					At cost:
Tanah	81.556.965	-	-	81.556.965	Land
Bangunan	245.619.585	-	-	245.619.585	Building
Mesin dan peralatan	6.811.786.289	613.585.700	(16.522.000)	7.408.849.989	Machine and equipment
Kendaraan bermotor	3.453.777.341	-	-	3.453.777.341	Motor vehicle
Jumlah	10.592.740.180	613.585.700	(16.522.000)	11.189.803.880	Total
Akumulasi penyusutan:					Accumulated depreciation:
Bangunan	94.348.251	12.280.980	-	106.629.231	Building
Mesin dan peralatan	6.245.422.955	513.993.196	(16.522.000)	6.742.894.151	Machine and equipment
Kendaraan bermotor	2.825.664.527	157.812.575	-	2.983.477.102	Motor vehicle
Jumlah	9.165.435.733	684.086.751	(16.522.000)	9.833.000.484	Total
Nilai Tercatat	1.427.304.447			1.356.803.396	Net Book Value

	1 Januari 2017/ January 1, 2017	Perubahan Selama Tahun 2017/ Changes during 2017		31 Desember 2017/ December 31, 2017	
		Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions		
Biaya perolehan:					At cost:
Tanah	81.556.965	-	-	81.556.965	Land
Bangunan	245.619.585	-	-	245.619.585	Building
Mesin dan peralatan	6.564.746.090	330.757.317	(83.717.118)	6.811.786.289	Machine and equipment
Kendaraan bermotor	3.571.227.341	-	(117.450.000)	3.453.777.341	Motor vehicle
Jumlah	10.463.149.981	330.757.317	(201.167.118)	10.592.740.180	Total
Akumulasi penyusutan:					Accumulated depreciation:
Bangunan	82.067.272	12.280.979	-	94.348.251	Building
Mesin dan peralatan	5.983.331.951	333.780.968	(71.689.964)	6.245.422.955	Machine and equipment
Kendaraan bermotor	2.731.683.713	211.430.813	(117.449.999)	2.825.664.527	Motor vehicle
Jumlah	8.797.082.936	557.492.760	(189.139.963)	9.165.435.733	Total
Nilai Tercatat	1.666.067.045			1.427.304.447	Net Book Value

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2018 dan 2017
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Pada tahun 2018 dan 2017, Bank menjual aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

In 2018 and 2017, the Bank sell its property and equipment as follows:

	2018	2017	
Harga jual	1.800.000	88.183.119	Selling value
Nilai tercatat	-	(12.027.155)	Net book value
Keuntungan penjualan aset tetap (Catatan 31)	1.800.000	76.155.964	Gain on sales of property and equipment (Note 31)

Aset tetap, kecuali tanah, diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan pencurian kepada pihak ketiga dengan jumlah pertanggungan sebagai berikut:

Property and equipment are insured against fire and theft to a third party with insurance coverage as follows:

	2018	2017	
PT Asuransi Adira Dinamika	6.588.927.187	9.397.647.187	PT Asuransi Adira Dinamika
PT Asuransi Adira Indonesia	2.505.650.000	-	PT Asuransi Adira Indonesia
PT Asuransi Asei Indonesia	-	31.000.000	PT Asuransi Asei Indonesia
Jumlah	9.094.577.187	9.428.647.187	Total

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset tetap yang dipertanggungkan.

Management believes that the sum insured is sufficient to cover all possible losses of the insured assets.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, jumlah nilai perolehan aset tetap yang telah disusutkan penuh namun masih digunakan adalah sebesar Rp 3.181.196.717 dan Rp 3.184.528.220.

As of December 31, 2018 and 2017, total property and equipment that have been fully depreciated, but still used for operation amounted Rp 3,181,196,717 and Rp 3,184,528,220, respectively.

Berdasarkan penelaahan manajemen, tidak terdapat penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Based on management review, there is no impairment in the property and equipment as of December 31, 2018 and 2017.

13. Aset Tak Berwujud

13. Intangible Assets

	2018	2017	
Biaya perolehan			Acquisition costs
Lisensi ATM	2.949.598.875	2.784.598.875	ATM license
Aplikasi dan perangkat lunak	3.914.955.055	2.534.783.802	Application and software
Jumlah	6.864.553.930	5.319.382.677	Subtotal
Akumulasi amortiasi			Accumulated amortisation
Lisensi ATM	(2.941.348.875)	(2.227.679.100)	ATM license
Aplikasi dan perangkat lunak	(1.477.384.741)	(1.020.296.823)	Application and software
Jumlah	(4.418.733.616)	(3.247.975.923)	Subtotal
Jumlah	2.445.820.314	2.071.406.754	Total

Berdasarkan penelaahan manajemen, tidak terdapat penurunan nilai atas aset tak berwujud pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Based on management review, there is no impairment on intangible assets as of December 31, 2018 and 2017.

14. Biaya Dibayar Dimuka

	2018	2017
Uang muka pembiayaan	5.312.668.445	2.494.587.987
Sewa rumah/gedung	1.326.723.666	1.003.343.191
Iuran keanggotaan	637.850.298	611.518.373
Perbaikan gedung	496.724.060	1.282.838.520
Pengembangan sistem	281.536.688	1.172.192.390
Asuransi	17.605.501	13.894.008
Promosi	7.182.725	7.155.619
Lain-lain	994.791.891	745.827.139
Jumlah	9.075.083.274	7.331.357.227

14. Prepaid Expenses

Financing advance
Building/house rent
Membership fee
Building renovation
System development
Insurance
Promotion
Others

15. Aset Lain-lain

	2018	2017
Agunan yang diambil alih	120.791.951.254	26.126.472.819
Setoran jaminan	2.807.702.450	2.757.702.450
Biaya yang ditangguhkan dan tagihan lain	1.066.684.296	836.855.271
Properti terbengkalai	128.252.200	128.252.200
Tagihan pajak tahun 2014	2.962.500	2.962.500
Lain-lain	5.015.103	5.014.014
Jumlah	124.802.567.803	29.857.259.254
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(7.573.948.142)	(3.906.782.129)
Jumlah	117.228.619.661	25.950.477.125

15. Other Assets

Foreclosed assets
Deposit guarantee
Deferred expenses and other receivables
Abandoned properties
Claim for tax refund for year 2014
Others

Berikut adalah rincian agunan yang diambil alih berdasarkan kolektibilitasnya :

The classification of foreclosed assets is as follows:

	2018	2017	
Lancar	95.340.320.327	-	Current
Macet	25.451.630.927	26.126.472.819	Loss
Jumlah	120.791.951.254	26.126.472.819	Total

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai aset lain-lain pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Movement in allowance for impairment losses of other assets as of December 31, 2018 and 2017, as follows:

	2018	2017	
Saldo awal tahun	3.906.782.129	3.498.651.564	Beginning balance
Pencadangan selama tahun berjalan (Catatan 30)	3.667.166.013	408.130.565	Allowance for impairment losses in current year (Note 30)
Saldo akhir tahun	7.573.948.142	3.906.782.129	Ending balance

Termasuk di dalam cadangan kerugian penurunan nilai adalah cadangan kerugian penurunan nilai atas agunan yang diambil alih masing-masing sebesar Rp 7.445.695.942 dan Rp 3.778.529.929 pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Included in allowance for impairment losses is allowance for impairment losses of foreclosed assets amounted to Rp 7,445,695,942 and Rp 3,778,529,929 as of December 31, 2018 and 2017, respectively.

16. Liabilitas Segera

	2018	2017
Titipan pembiayaan	3.807.739.480	3.112.502.283
Titipan dana sosial	131.033.682	91.951.994
Asuransi karyawan	27.323.200	31.832.346
Administrasi pembiayaan	16.274.940	22.224.940
Lain-lain	392.679.758	1.236.261.463
Jumlah	4.375.051.060	4.494.773.026

Seluruh liabilitas segera merupakan liabilitas kepada pihak ketiga.

16. Liabilities Immediately Payable

Financing
Social fund
Insurance
Financing administration
Others

Total

All liabilities immediately payable were from third parties.

17. Simpanan Giro Wadiah

Simpanan giro wadiah pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 41.421.592.792 dan Rp 37.470.907.665 merupakan simpanan dari pihak ketiga.

Tingkat bonus rata-rata per tahun untuk giro wadiah selama tahun 2018 dan 2017 adalah sebesar 1,50%.

17. Wadiah Demand Deposits

As of December 31, 2018 and 2017, wadiah demand deposits amounting to Rp 41,421,592,792 and Rp 37,470,907,665, respectively are from third parties.

Average annual bonus rate for wadiah demand deposits during 2018 and 2017 are 1.50%.

18. Simpanan dari Bank Lain

	2018	2017
Deposito Sertifikat Mudharabah (SIMA)	-	30.000.000.000
Pihak berelasi (Catatan 35)	-	120.000.000.000
Pihak ketiga	217.000.000.000	120.000.000.000
Jumlah	217.000.000.000	150.000.000.000

Tingkat bonus rata-rata per tahun untuk simpanan dari bank lain selama tahun 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar 5,00% dan 4,00%.

18. Deposit from Other Banks

Mudharabah Certificate Deposits
Related parties (Note 35)
Third parties

Total

Average annual bonus rate for deposit from other banks during 2018 and 2017 are 5.00% and 4.00%, respectively.

19. Bagi Hasil yang Belum Dibagikan

	2018	2017
Pihak berelasi (Catatan 35)		
Deposito mudharabah	199.938.322	12.166.441
SIMA	-	3.291.667
Tabungan mudharabah	-	1.014.822
Jumlah	199.938.322	16.472.930
Pihak ketiga		
Deposito mudharabah	4.160.683.939	4.539.380.170
Tabungan mudharabah	114.642.349	70.360.257
SIMA	113.925.000	118.738.889
Giro mudharabah	19.266.914	-
Giro wadiah	7.890.411	7.890.411
Jumlah	4.416.408.613	4.736.369.727
Jumlah	4.616.346.935	4.752.842.657

19. Undistributed Revenue Sharing

Related parties (Note 35)
Current taxes payable
SIMA
Mudharabah savings
Subtotal
Third parties
Current taxes payable
Mudharabah savings
SIMA
Mudharabah demand deposits
Wadiah demand deposits
Subtotal

Total

20. Utang Pajak

	2018	2017	
Pasal 4 ayat 2	1.794.610.512	1.721.427.993	Article 4 paragraph 2
Pasal 21	444.198.768	429.536.077	Article 21
Pasal 23	6.095.133	10.593.300	Article 23
Jumlah	<u>2.244.904.413</u>	<u>2.161.557.370</u>	Total

20. Taxes Payable

21. Dana Syirkah Temporer

a. Tabungan mudharabah

	2018	2017	
Bukan bank			Non - bank
Pihak berelasi (Catatan 35)	611.661.800	692.931.765	Related parties (Note 35)
Pihak ketiga	<u>53.454.257.443</u>	<u>43.072.752.644</u>	Third parties
Jumlah	<u>54.065.919.243</u>	<u>43.765.684.409</u>	Total

21. Temporary Syirkah Funds

a. Mudharabah saving deposits

Tingkat bagi hasil rata-rata per tahun untuk tabungan mudharabah selama tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar 0,50% - 5,00% dan 0,50% -4,00%.

Average annual profit sharing for mudharabah saving during 2018 and 2017 are 0.50% - 5.00% and 0.50% - 4.00%, respectively.

b. Deposito mudharabah

i) Berdasarkan pemilik dana

	2018	2017	
Bukan bank			Non - bank
Pihak berelasi (Catatan 35)	26.965.000.000	2.015.000.000	Related parties (Note 35)
Pihak ketiga	<u>1.364.122.597.023</u>	<u>1.428.756.737.764</u>	Third parties
Jumlah	<u>1.391.087.597.023</u>	<u>1.430.771.737.764</u>	Subtotal
Bank			Bank
Pihak ketiga	<u>107.700.000.000</u>	<u>20.750.000.000</u>	Third parties
Jumlah	<u>1.498.787.597.023</u>	<u>1.451.521.737.764</u>	Total

b. Mudharabah deposits

i) By type of customer

ii) Berdasarkan periode deposito

	2018	2017	
Kurang dari 1 bulan	42.000.000.000	109.750.000.000	Less than 1 month
1 bulan	661.044.984.017	517.717.320.746	1 month
3 bulan	419.481.335.879	361.346.696.080	3 months
6 bulan	264.371.277.127	399.982.720.938	6 months
12 bulan	<u>111.890.000.000</u>	<u>62.725.000.000</u>	12 months
Jumlah	<u>1.498.787.597.023</u>	<u>1.451.521.737.764</u>	Total

ii) By the contractual maturity

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2018 dan 2017
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

iii) Berdasarkan sisa umur sampai dengan jatuh tempo

iii) By remaining period until maturity

	2018	2017	
Deposito mudharabah			Mudharabah deposit
Kurang dari 1 bulan	662.046.922.876	582.018.679.872	Less than 1 month
1 sampai dengan 3 bulan	658.059.397.020	553.409.691.429	1 month to 3 months
3 sampai dengan 6 bulan	68.941.277.127	257.218.366.463	3 months to 6 months
6 sampai dengan 12 bulan	109.740.000.000	58.875.000.000	6 months to 12 months
Jumlah	1.498.787.597.023	1.451.521.737.764	Total

iv) Tingkat bagi hasil rata-rata

iv) Average profit sharing rate

Tingkat bagi hasil rata-rata per tahun untuk deposito mudharabah selama tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar 4,00% - 6,00% dan 7,00% - 8,00%.

Average annual profit sharing for mudharabah deposits during 2018 and 2017 are 4.00% - 6.00% and 7.00% - 8.00% respectively.

Deposito mudharabah yang dijadikan sebagai jaminan atas piutang dan pembiayaan adalah masing-masing sebesar Rp 334.939.608.566 dan Rp 221.150.000.000 pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Mudharabah deposits pledged as collateral for receivables and financing amounted to Rp 334.939.608.566 and Rp 221,150,000,000 as of December 31, 2018 and 2017, respectively.

c. Giro mudharabah

c. Mudharabah demand deposits

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 giro mudharabah masing-masing sebesar Rp 4.866.175.990 dan Rp 150.000 adalah dari pihak ketiga.

As of December 31, 2018 and 2017, mudharabah demand deposits amounted to Rp 4,866,175,990 and Rp 150,000, respectively are from third parties.

Tingkat bagi hasil rata-rata per tahun untuk giro mudharabah selama tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar 5,00% dan 0,00%.

Average annual profit sharing for mudharabah demand deposits during 2018 and 2017 are 5.00% and 0.00%, respectively.

22. Modal Saham

22. Capital Stock

Susunan kepemilikan saham bank pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

The composition of the Bank's stockholder as of December 31, 2018 and 2017 are as follows:

Nama Pemegang Saham	2018		Jumlah/ Total	Name of Stockholder
	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued and Fully Paid Stock	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership %		
PT Bank Victoria International Tbk	309.982.683	99,99	309.982.683.000	PT Bank Victoria International Tbk
Lain-lain	17.317	0,01	17.317.000	Others
Jumlah	310.000.000	100,00	310.000.000.000	Total

2017				
Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ <i>Issued and Fully Paid Stock</i>	Persentase Kepemilikan/ <i>Percentage of Ownership</i> %	Jumlah/ <i>Total</i>	Name of Stockholder
PT Bank Victoria International Tbk	269.982.683	99,99	269.982.683.000	PT Bank Victoria International Tbk
Lain-lain	17.317	0,01	17.317.000	Others
Jumlah	<u>270.000.000</u>	<u>100,00</u>	<u>270.000.000.000</u>	Total

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Bank yang didokumentasikan dalam Akta Pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham – Luar Biasa (RUPS-LB) No. 46 tanggal 14 November 2017 dari Surjadi, S.H.,M.Kn.,M.M., notaris di Jakarta, telah disetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Bank dari Rp 270.000.000.000 menjadi Rp 310.000.000.000 yang diambil dan disetor seluruhnya sebesar Rp 40.000.000.000 atau sebanyak 40.000.000 (empat puluh juta) saham oleh PT Bank Victoria International Tbk. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0191022 tanggal 15 November 2017.

Based on the Shareholders' Resolution of the Bank which is documented in the Deed Statement General Meeting of Shareholders – Extraordinary (EGM) No.46 dated November 14, 2017 from Surjadi, S.H.,M.Kn.,M.M., a public notary in Jakarta, has approved an increase in the Bank's issued and paid up capital from Rp 270,000,000,000 to Rp 310,000,000,000 which is entirely taken and paid amounted to Rp 40,000,000,000 or 40,000,000 (fourty million) shares by PT Bank Victoria International Tbk. The Amendment of the Article of Association has been received and recorded by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in his Letter No. AHU-AH.01.03-0191022 dated November 15, 2017.

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Bank yang didokumentasikan dalam Akta Pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham – Luar Biasa (RUPS-LB) No. 27 tanggal 27 Maret 2017 dari Hartanti Kuntoro, S.H., notaris di Jakarta, telah disetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Bank dari Rp 210.000.000.000 menjadi Rp 270.000.000.000 yang diambil dan disetor seluruhnya sebesar Rp 60.000.000.000 atau sebanyak 60.000.000 (enam puluh juta) saham oleh PT Bank Victoria International Tbk. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0126193 tanggal 11 April 2017.

Based on the Shareholders' Resolution of the Bank which is documented in the Deed Statement General Meeting of Shareholders – Extraordinary (EGM) No.27 dated March 27, 2017 from Hartanti Kuntoro, SH, a public notary in Jakarta, has approved an increase in the Bank's issued and paid up capital from Rp 210,000,000,000 to Rp 270,000,000,000 which is entirely taken and paid amounted to Rp 60,000,000,000 or 60,000,000 (sixty million) shares by PT Bank Victoria International Tbk. The Amendment of the Article of Association has been received and recorded by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in his Letter No. AHU-AH.01.03-0126193 dated April 11, 2017.

Manajemen Permodalan

Tujuan utama dari pengelolaan modal Bank adalah untuk memastikan bahwa Bank mempertahankan rasio modal yang sehat dalam rangka mendukung bisnis dan memaksimalkan nilai pemegang saham. Bank wajib untuk memenuhi rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Capital Management

The primary objective of the Bank's capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value. The Bank is required by Bank Indonesia to meet Capital Adequacy Ratio (CAR).

Manajemen menggunakan peraturan rasio permodalan untuk memantau kecukupan modal, sesuai dengan standar industri. Pendekatan Bank Indonesia untuk pengukuran modal tersebut terutama didasarkan kepada pemantauan kebutuhan modal yang diwajibkan dari aset tertimbang menurut risiko terhadap modal yang tersedia.

Bank telah memenuhi semua persyaratan modal yang diwajibkan sepanjang tahun.

Perhitungan rasio KPMM pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	2018	2017
I. Komponen Modal		
A. Modal Inti	262.389.647.413	227.348.936.652
B. Modal Pelengkap	10.371.243.610	10.546.846.926
C. Penyertaan	(60.468.550)	(60.468.550)
II. Jumlah modal	272.700.422.473	237.835.315.028
III. Aset tertimbang menurut risiko kredit, pasar dan operasional	1.140.216.950.104	1.232.796.929.631
IV. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	22,07%	19,29%
V. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang diwajibkan	9% - 10%	9% - 10%

Management uses regulatory capital ratios in order to monitor its capital base, and these capital ratios remain the industry standards for measuring capital adequacy. Bank Indonesia's approach to such measurement is primarily based on monitoring the relationship of the capital resources requirement measured of risk-weighted assets to available capital resources.

The Bank has complied with all externally imposed capital requirements throughout the year.

The calculation of CAR as of December 31, 2018 and 2017, is as follows:

I. Capital Stock Component	
A. Core Capital	
B. Supplementary Capital	
C. Placement	
II. Total	
III. Risk weighted assets for credit, market and operational risk	
IV. Capital Adequacy Ratio (CAR)	
V. Minimum Capital Adequacy Ratio	

23. Uang Muka Setoran Modal

Berdasarkan Akta No. 46 tanggal 14 November 2017 dari Surjadi, S.H., M.Kn., M.M., notaris di Jakarta, Bank menerima dana setoran modal dari PT Bank Victoria International Tbk, pemegang saham, sebesar Rp 40.000.000.000 (Catatan 22). Berdasarkan surat dari OJK No. S-23/PB.132/2018 tertanggal 23 Januari 2018, uang muka setoran modal tersebut telah disetujui OJK untuk diakui sebagai modal disetor.

23. Capital Paid-up In Advance

Based on Deed No. 46 dated November 14, 2017 of Surjadi, S.H., M.Kn., M.M., a public notary in Jakarta, the Bank received advance for paid-up capital from PT Bank Victoria International Tbk, a stockholder amounted to Rp 40,000,000,000 (Note 22). Based on a letter from OJK No. S-23/PB.132/2018 dated January 23, 2018, the said capital paid-up in advance has been approved by OJK to be recognized as issuance of additional share capital.

24. Saldo Laba yang Sudah Ditentukan Penggunaannya

Berdasarkan Akta No. 23 tertanggal 26 Maret 2010 dan Akta No. 24 tertanggal 26 Maret 2010 keduanya dari Erni Rohaini, SH, MBA, notaris di Jakarta, saldo laba sebelum proses konversi menjadi bank umum syariah dikapitalisasi menjadi cadangan umum sebesar Rp 10.014.130.827. Setelah ada perubahan pencadangan imbalan pasti karyawan dan pajak penghasilan badan maka saldo cadangan umum menjadi Rp 9.156.165.256. Perubahan ini telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Akta No. 12 tertanggal 30 Juni 2014 dari Setiawan, S.H., notaris di Jakarta.

24. Appropriated Retained Earnings

Based on Notarial Deed No. 23 dated March 26, 2010 and Deed No. 24 dated March 26, 2010, both from Erni Rohaini, SH, MBA, a public notary in Jakarta, retained earnings before conversion into sharia bank is capitalised into general reserves amounted to Rp 10,014,130,827. After changes in allowances for post-employment benefit and current income tax, the balance of general reserves becomes Rp 9,156,165,256. These changes have been rectified by General Shareholders Meeting based on Notarial Deed No. 12 dated June 30, 2014 from of Setiawan, S.H., a public notary in Jakarta.

25. Pendapatan Pengelolaan Dana Oleh Bank Sebagai Mudharib

	2018	2017
Pihak berelasi (Catatan 35)		
Pendapatan bagi hasil musyarakah	4.389.893.966	-
Pendapatan dari penjualan murabahah	359.394.707	164.001.466
Jumlah - pihak berelasi	4.749.288.673	164.001.466
Pihak ketiga		
Pendapatan dari penjualan murabahah	30.894.625.917	25.168.377.529
Pendapatan bagi hasil:		
Musyarakah	89.944.122.589	91.073.496.425
Mudharabah	3.446.723.052	4.954.283.252
Pendapatan ijarah - bersih	576.677.451	655.391.320
Pendapatan usaha utama lainnya :		
Pendapatan efek-efek Syariah	31.453.704.841	20.554.589.518
Pendapatan administrasi	4.977.767.225	5.749.490.704
Pendapatan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBIS)	1.250.802.778	1.593.579.860
Pendapatan deposito pada bank lain	2.693.099.211	3.782.212.648
Jumlah	40.375.374.055	31.679.872.730
Jumlah - pihak ketiga	165.237.523.064	153.531.421.256
Jumlah	169.986.811.737	153.695.422.722

25. Income From Fund Management by Bank as Mudharib

Related parties (Note 35)	
Income from profit sharing musyarakah	
Income from sales of murabahah	
Subtotal - related parties	
Third parties	
Income from sales of murabahah	
Income from profit sharing:	
Musyarakah	
Mudharabah	
Income from ijarah - net	
Other main operating income :	
Income from sharia marketable securities	
Administration income	
Bank Indonesia Sharia	
Deposit Facility income (FASBIS)	
Current deposit with other banks income	
Subtotal	
Subtotal - third parties	
Total	

26. Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer

	2018	2017
Pihak berelasi (Catatan 35)		
SIMA	687.456.944	-
Deposito mudharabah	185.524.008	11.346.204
Tabungan mudharabah	719.017	807.876
Giro	56.210	-
Jumlah	873.756.179	12.154.080
Pihak ketiga		
Deposito Mudharabah	102.660.228.442	98.517.036.646
SIMA	4.373.896.132	1.266.633.078
Tabungan Mudharabah	783.849.206	790.778.535
Giro	570.687.111	473.487.775
Jumlah	108.388.660.891	101.047.936.034
Jumlah	109.262.417.070	101.060.090.114

26. Third Parties' Share on Returns of Temporary Syirkah Funds

Related parties (Note 35)	
SIMA	
Mudharabah deposit	
Mudharabah saving deposits	
Current accounts	
Subtotal	
Third parties	
Mudharabah Deposit	
SIMA	
Mudharabah Saving Deposits	
Current accounts	
Subtotal	
Total	

27. Pendapatan Operasional Lainnya

	2018	2017
Keuntungan penjualan efek-efek	1.061.946.788	2.506.864.658
Pendapatan pelunasan dipercepat	431.811.550	306.924.210
Keuntungan penjualan AYDA - bersih	-	234.278.050
Keuntungan dari peningkatan nilai wajar efek yang diperdagangkan - bersih	-	178.152.308
Administrasi dan lainnya	194.677.491	106.007.793
Jumlah	1.688.435.829	3.332.227.019

27. Other Operating Income

Gain on sale of marketable securities	
Income from early repayment	
Gain on sale of foreclosed assets - net	
Gain on increase in fair value of trading securities - net	
Administrative and others	
Total	

28. Beban Umum dan Administrasi

	2018	2017
Sewa	4.471.720.053	4.211.264.123
Asuransi	4.562.926.396	4.055.257.974
Pemeliharaan dan perbaikan	2.209.708.506	1.844.215.995
Pengembangan sistem	1.944.485.263	1.835.908.070
Keanggotaan	1.670.463.739	1.224.481.160
Amortisasi aset tidak berwujud (Catatan 13)	1.170.757.693	986.195.535
Penyusutan aset tetap (Catatan 12)	684.086.751	557.492.760
Transportasi	623.600.527	634.196.211
Promosi	622.067.869	444.958.154
Listrik dan air	547.529.403	571.423.404
Biaya fee ATM tahunan	546.474.355	686.449.854
Konsultan	442.000.001	472.723.074
Peralatan kantor	426.857.520	443.745.478
Telekomunikasi	397.735.745	391.446.193
Keamanan dan kebersihan	129.843.174	124.963.100
Pajak dan perijinan	111.739.005	120.554.914
Lain-lain	143.111.071	281.167.555
Jumlah	20.705.107.071	18.886.443.554

28. General and Administrative Expenses

Rent
Insurance
Repair and maintenance
System development
Membership
Amortisation of intangible assets (Note 13)
Depreciation of property and equipment (Note 12)
Transportation
Promotional
Electricity and water
Annual fee ATM expense
Consultants
Office supplies
Telecommunication
Securities and cleanliness
Tax and permission
Others

29. Beban Personalia

	2018	2017
Gaji	23.659.055.082	22.413.929.024
Tunjangan hari raya	1.801.267.531	1.869.466.524
Honor Dewan Komisaris	1.395.065.718	1.384.457.585
Beban imbalan pasti (Catatan 33)	1.345.109.625	2.069.004.219
Premi asuransi jiwa	1.151.472.225	1.088.211.369
Lembur	661.730.703	562.636.592
Pendidikan	596.298.673	442.713.589
Kesehatan	85.088.976	72.695.126
Jumlah	30.695.088.533	29.903.114.028

29. Personnel Expenses

Salaries
Holiday allowance
Remuneration of Board of Commissioners
Post-employment benefit (Note 33)
Life insurance premium
Overtime
Educational expenses
Health

30. Pembentukan (Pemulihan) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Rincian beban pencadangan (pemulihan) kerugian penurunan nilai aset produktif dan non produktif adalah sebagai berikut:

	2018	2017
Efek-efek (Catatan 7)	1.300.000.000	-
Piutang murabahah (Catatan 8)	(2.903.186.359)	(7.235.328.944)
Pembiayaan musyarakah (Catatan 9)	214.776.677	5.580.180.083
Pembiayaan mudharabah (Catatan 10)	(52.774.192)	648.106.367
Aset lain-lain (Catatan 15)	3.667.166.013	408.130.565
Jumlah	2.225.982.139	(598.911.929)

30. Allowances (Recovery) For Impairment Losses Expenses

Details of allowance (recovery) for impairment losses in earning and non-earning assets are as follows:

Marketable securities (Note 7)
Murabahah receivables (Note 8)
Musyarakah financing (Note 9)
Mudharabah financing (Note 10)
Other assets (Note 15)

31. Pendapatan (Beban) Non Operasional

	2018	2017
Pendapatan non operasional		
Pendapatan imbalan dari pihak ketiga	147.809.468	116.063.158
Pendapatan non operasional lainnya	17.906.731	4.827.336
Keuntungan penjualan aset tetap (Catatan 12)	1.800.000	76.155.964
Jumlah	167.516.199	197.046.458
Beban non operasional		
Denda dan sanksi	(14.784.738)	(161.332.569)
Lain-lain	(34.730.000)	(192.029.534)
Jumlah	(49.514.738)	(353.362.103)
Jumlah	118.001.461	(156.315.645)

31. Non Operating Income (Expense)

Non operating income
Income fee from third parties
Other non-operating income
Gain on sale of property and equipment (Note 12)
Total
Non-operating expenses
Penalties
Others
Total
Net

32. Komitmen dan Kontinjensi

	2018	2017
Liabilitas komitmen:		
Fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum digunakan	(10.053.691.378)	(2.040.291.378)
Tagihan kontinjensi:		
Margin dalam penyelesaian	3.641.272.030	8.462.700.542
Liabilitas kontinjensi:		
Bank Garansi	(2.532.000.000)	(2.532.000.000)
Tagihan kontinjensi – bersih	1.109.272.030	5.930.700.542

32. Commitment and Contingencies

Commitment payables:
Unused financing facilities
Contingencies receivables:
Margin from non-performing receivables
Contingencies payables:
Bank guarantees issued
Contingencies receivables - net

33. Imbalan Kerja Jangka Panjang

Besarnya imbalan pasca-kerja dihitung berdasarkan peraturan yang berlaku, yakni Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003. Tidak terdapat pendanaan khusus yang disisihkan sehubungan dengan imbalan kerja jangka panjang tersebut.

Perhitungan aktuaria terakhir atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang dilakukan oleh PT Ricky Leonard Jasatama, aktuaris independen, tertanggal 22 Januari 2019.

Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan kerja jangka panjang tersebut masing-masing sebanyak 150 dan 210 pada tahun 2018 dan 2017.

33. Long-term Employee Benefits

The amount of post-employment benefits is determined based on the outstanding regulation Law No. 13 Year 2003, dated March 25, 2003. No funding of the benefits has been made to date.

The latest actuarial valuation report, dated January 22, 2019, on the long-term employee benefits liability was from PT Ricky Leonard Jasatama, an independent actuary.

Number of eligible employees is 150 and 210 in 2018 and 2017, respectively.

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2018 dan 2017
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sehubungan dengan imbalan pasti adalah sebagai berikut:

The amount of employee benefits recognized in statements of profit or loss and other comprehensive income as follows:

	2018	2017	
Beban jasa kini	1.005.843.010	1.542.214.451	Current service costs
Beban bunga neto	339.266.615	396.946.126	Interest costs
Biaya pesangon pemutusan hubungan kerja	-	129.843.642	Severance cost
Komponen biaya imbalan pasti yang diakui di laba rugi	1.345.109.625	2.069.004.219	Component of employee benefits cost recognized in statements of profit or loss
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	3.196.422.556	350.025.908	Remeasurement of defined benefit liability
Jumlah	4.541.532.181	2.419.030.127	Total

Beban imbalan kerja jangka panjang sebesar Rp 1.345.109.625 dan Rp 2.069.004.219 untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 disajikan sebagai bagian dari "Beban personalia" (Catatan 29).

Long-term employee benefits expense amounted to Rp 1,345,109,625 and Rp 2,069,004,219 as of December 31, 2018 and 2017, respectively is presented as part of "Personnel expense (Note 29).

Mutasi liabilitas imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut:

Movements of long-term employee benefits liability follows:

	2018	2017	
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang awal tahun	7.452.301.217	6.437.357.670	Long-term employee benefits liability at the beginning of the year
Beban imbalan kerja jangka panjang tahun berjalan	1.345.109.625	2.069.004.219	Long-term employee benefits expense during the year
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	(3.196.422.556)	(350.025.908)	Remeasurement of defined benefit liability
Dampak mutasi karyawan - bersih	-	(129.843.641)	Effect of employees transferred - net
Pembayaran imbalan kerja jangka panjang	(240.889.139)	(574.191.123)	Benefit payments during the year
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang akhir tahun	5.360.099.147	7.452.301.217	Long-term employee benefits liability at the end of the year

Asumsi-asumsi aktuarial utama yang digunakan dalam perhitungan imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut:

Principal assumptions used in the valuation of the long-term employee benefits follows:

	2018	2017	
Tingkat diskonto	8,45%	7,20%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	6,00%	9,00%	Increase of salary rate
Tingkat perputaran karyawan	5% sampai dengan usia 40 tahun kemudian menurun secara linear sampai dengan 0% pada saat usia 55 tahun/ 5% per annum at age up 40 years old, then decrease in linear to 0% per annum at age 55 years old		Level of employee turnover

Analisa sensitivitas dari perubahan asumsi-asumsi utama terhadap liabilitas imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut:

Analysis of sensitivity from changes of main assumptions to long-term employee benefits liability as follows:

2018			
Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti/ Effect on employee benefits liability			
Perubahan Asumsi/ Changes of assumption	Kenaikan Asumsi/ Increases of assumption	Penurunan Asumsi/ Decreases of assumption	
Tingkat diskonto/Discount rate	1%	(431.086.878)	495.281.769
Tingkat kenaikan gaji/Future salary increases	1%	502.382.890	(444.342.040)

2017			
Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti/ Effect on employee benefits liability			
Perubahan Asumsi/ Changes of assumption	Kenaikan Asumsi/ Increases of assumption	Penurunan Asumsi/ Decreases of assumption	
Tingkat diskonto/Discount rate	1%	(770.126.045)	906.463.389
Tingkat kenaikan gaji/Future salary increases	1%	881.312.068	(765.120.906)

34. Pajak Penghasilan

34. Income Tax

a. Beban pajak terdiri dari:

a. The tax expense consists of the following:

	2018	2017	
Pajak kini	-	-	Current tax
Pajak tangguhan	1.361.709.301	1.505.463.924	Deferred tax
Jumlah	1.361.709.301	1.505.463.924	Total

b. Pajak Kini

b. Current Tax

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan akumulasi rugi fiskal adalah sebagai berikut:

A reconciliation between profit before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income with accumulated fiscal losses follows:

	2018	2017	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	6.335.852.696	6.098.951.987	Profit before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income
Perbedaan temporer:			Temporary differences:
Pencadangan (pemulihan) kerugian penurunan nilai atas pembiayaan	21.687.730.161	(10.149.691.171)	Allowances (reversal) for impairment losses on financing
Pencadangan kerugian penurunan nilai atas efek-efek	1.300.000.000	-	Allowances for impairment losses on securities
Pencadangan penurunan nilai atas aset non-produktif dan lain-lain	3.667.166.013	408.130.565	Allowances for impairment losses on non-earning assets and others
Imbalan kerja jangka panjang - bersih	1.104.220.486	1.364.969.455	Long-term employee benefits
Amortisasi aset tak berwujud	460.336.255	918.322.623	Amortization of intangible assets
Jumlah	28.219.452.915	(7.458.268.528)	Net

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2018 dan 2017
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	2018	2017	
Perbedaan tetap:			Permanent differences:
Keuntungan penjualan reksadana syariah	(1.139.374.693)	-	Gain on sales of Sharia Mutual Fund
Keuntungan penjualan aset tetap	(1.800.000)	(76.155.964)	Gain on sale of property and equipment
Lain-lain	252.159.203	(940.326)	Others
Laba (rugi) kena pajak sebelum kompensasi rugi fiskal tahun-tahun lalu	33.666.290.121	(1.436.412.831)	Taxable income (loss) before application of prior year's fiscal loss
Kompensasi rugi fiskal tahun lalu 2017	(1.436.412.831)	-	Application of prior years fiscal losses 2017
2016	(59.193.921.220)	(59.193.921.220)	2016
2015	(32.966.780.279)	(32.966.780.279)	2015
2014	(11.272.497.319)	(11.272.497.319)	2014
Akumulasi rugi fiskal	(71.203.321.528)	(104.869.611.649)	Accumulated fiscal losses
Rugi fiskal dan pajak dibayar dimuka untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak.			Fiscal loss and prepaid tax for the year ended December 31, 2017 conforms with its Annual Corporate Income Tax Return filed loss and prepaid tax.

c. Pajak Tangguhan

c. Deferred Tax

	Dikreditkan (dibebankan)/ Credited in (charged to)			31 Desember 2018/ December 31, 2018	
	1 Januari 2018/ January 1, 2018	Laba Rugi/ Profit or Loss	Penghasilan Komprehensif Lain/ Other comprehensive income		
Aset (kewajiban) pajak tangguhan:					Deferred tax assets (liabilities):
Imbalan kerja jangka panjang	1.863.075.305	276.055.120	(799.105.639)	1.340.024.786	Employment benefit liabilities
Keuntungan belum direalisasi atas penurunan nilai investasi	(52.737.294)	-	22.517.731	(30.219.563)	Unrealized gain on impairment of investment value
Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif pembiayaan	(6.250.380.134)	5.421.932.540	-	(828.447.594)	Allowances for impairment losses on financing earning assets
Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif selain pembiayaan	151.172	325.000.000	-	325.151.172	Allowances for impairment losses on non-financing earning assets
Cadangan kerugian penurunan nilai aset non produktif	976.695.532	916.791.503	-	1.893.487.035	Allowances for impairment losses non-earning assets
Biaya amortisasi aset tak berwujud	375.079.589	115.084.064	-	490.163.653	Amortization of intangible assets
Rugi fiskal yang dapat dikompensasikan	26.217.402.909	(8.416.572.528)	-	17.800.830.381	Fiscal loss carry forward
Jumlah aset pajak tangguhan - Bersih	23.129.287.079	(1.361.709.301)	(776.587.908)	20.990.989.870	Deferred tax assets - net
	Dikreditkan (dibebankan)/ Credited in (charged to)			31 Desember 2017/ December 31, 2017	
	1 Januari 2017/ January 1, 2017	Laba Rugi/ Profit or Loss	Penghasilan Komprehensif Lain/ Other comprehensive income		
Aset (kewajiban) pajak tangguhan:					Deferred tax assets (liabilities):
Imbalan kerja jangka panjang	1.609.339.418	341.242.364	(87.506.477)	1.863.075.305	Employment benefit liabilities
Keuntungan belum direalisasi atas penurunan nilai investasi	-	-	(52.737.294)	(52.737.294)	Unrealized gain on impairment of investment value
Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif pembiayaan	(3.712.957.341)	(2.537.422.793)	-	(6.250.380.134)	Allowances for impairment losses on financing earning assets
Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif selain pembiayaan	151.172	-	-	151.172	Allowances for impairment losses on non-financing earning assets
Cadangan kerugian penurunan nilai aset non produktif	874.662.891	102.032.641	-	976.695.532	Allowances for impairment losses non-earning assets
Biaya amortisasi aset tak berwujud	145.498.933	229.580.656	-	375.079.589	Amortization of intangible assets
Rugi fiskal yang dapat dikompensasikan	25.858.299.701	359.103.208	-	26.217.402.909	Fiscal loss carry forward
Jumlah aset pajak tangguhan - Bersih	24.774.994.774	(1.505.463.924)	(140.243.771)	23.129.287.079	Deferred tax assets - net

Manajemen berpendapat bahwa terdapat kemungkinan besar jumlah laba fiskal pada masa mendatang akan memadai untuk mengkompensasi perbedaan yang menimbulkan aset pajak tangguhan tersebut.

Management believes that the future taxable income will likely be sufficient to compensate temporary differences giving rise to the deferred tax assets.

Rekonsiliasi antara manfaat pajak yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atas laba (rugi) akuntansi sebelum pajak penghasilan tidak final dengan manfaat pajak penghasilan seperti yang tercantum dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the total tax benefit and the amounts computed by applying the effective tax rate to profit (loss) before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income follows:

	2018	2017	
Laba sebelum beban pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	6.335.852.696	6.098.951.987	Profit before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income
Beban pajak penghasilan dengan tarif pajak yang berlaku	1.583.963.174	1.524.737.997	Tax expense at prevailing tax rate
Pengaruh pajak atas perbedaan tetap: Keuntungan penjualan Reksadana Syariah	(284.843.673)	-	Tax effects of permanent differences: Gain on sale of Sharia Mutual Funds
Keuntungan penjualan aset tetap	(450.000)	(19.038.991)	Gain on sale of property and equipment
Lain-lain	63.039.800	(235.082)	Others
Jumlah - bersih	(222.253.873)	(19.274.073)	Net
Jumlah Beban pajak penghasilan	1.361.709.301	1.505.463.924	Total tax expense

35. Sifat dan Transaksi Hubungan Berelasi

Sifat Pihak Berelasi

- PT Bank Victoria International Tbk merupakan pemegang saham utama Bank.
- Perusahaan-perusahaan yang dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh pemegang saham Bank.
- Perusahaan-perusahaan yang dikendalikan oleh anggota keluarga dekat pemegang saham dan manajemen kunci Bank.

35. Nature of Relationship and Transactions with Related Parties

Nature of Relationship

- PT Bank Victoria International Tbk is majority stockholder of the Bank.
- Companies owned by stockholders of the Bank, either directly or indirectly.
- Companies controlled by close family members of stockholders and key management personnel.

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2018 dan 2017
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Transaksi Hubungan Berelasi

Saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Transactions with Related Parties

Balances and transactions with related parties are as follows:

	2018	2017	
Aset			Assets
Giro pada bank lain (Catatan 5)			Current accounts with other Banks (Note 5)
PT Bank Victoria International Tbk	54.151.409	1.523.684	PT Bank Victoria International Tbk
Piutang murabahah (Catatan 8) - Komisaris, Direktur dan pejabat eksekutif	1.031.081.589	1.159.084.646	Murabahah receivables (Note 8) - Commissioners, Directors and executive officers
Pembiayaan musyarakah (Catatan 9)	20.131.128.262	-	Musyarakah financing (Note 9)
Pendapatan bagi hasil yang akan diterima (Catatan 11)	5.723.920	12.696.349	Revenue sharing receivables (Note 11)
Jumlah	21.222.085.180	1.173.304.679	Total
Persentase terhadap jumlah aset	1,00%	0,06%	Percentage to total assets
Liabilitas			Liabilities
Simpanan dari bank lain (Catatan 18)	-	30.000.000.000	Deposit from other banks (Note 18)
Bagi hasil yang belum dibagikan (Catatan 19)	199.938.322	16.472.930	Undistributed revenue sharing (Note 19)
Jumlah	199.938.322	30.016.472.930	Total
Persentase terhadap jumlah liabilitas	0,07%	14,40%	Percentage to total liabilities
Dana Syirkah Temporer (Catatan 21)			Temporary Syirkah Funds (Note 21)
Tabungan mudharabah	611.661.800	692.931.765	Mudharabah saving deposits
Deposito mudharabah	26.965.000.000	2.015.000.000	Mudharabah deposit
Jumlah	27.576.661.800	2.707.931.765	Total
Persentase terhadap jumlah dana syirkah temporer	1,77%	0,18%	Percentage to temporary syirkah funds
Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib (Catatan 25)			Income from funds management by Bank as mudharib (Note 25)
Pendapatan bagi hasil musyarakah	4.389.893.966	-	Income profit sharing musyarakah
Pendapatan dari penjualan murabahah	359.394.707	164.001.466	Income from sales of murabahah
Persentase terhadap jumlah pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib	2,79%	0,11%	Percentage to total income from funds management by Bank as mudharib
Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer (Catatan 26)			Third parties' shares on returns of temporary syirkah funds (Note 26)
SIMA	687.456.944	-	
Deposito mudharabah	185.524.008	11.346.204	Mudharabah deposit
Tabungan mudharabah	719.017	807.876	Mudharabah saving deposits
Giro mudharabah	56.210	-	Mudharabah current account
Jumlah	873.756.179	12.154.080	Total
Persentase terhadap hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer	0,80%	0,01%	Percentage to third parties' shares on returns of the temporary syirkah funds

	2018	2017	
Beban Operasional lainnya			Other Operating expense
Beban personalia			Personnel expenses
Gaji, tunjangan, dan THR – Direktur dan pejabat eksekutif	9.517.564.100	8.527.907.072	Salary, allowances, and THR - Directors and executive personnel
Honor Dewan Komisaris	1.095.445.000	1.095.445.000	Remuneration of Board of Commissioners
Gaji, tunjangan, dan THR – Komite, dan Dewan Pengawas Syariah	475.817.000	520.013.000	Salary, allowances, and THR Committee, and Sharia Supervisory Board
Jumlah	11.088.826.100	10.143.365.072	Total
Persentase terhadap jumlah beban personalia	36,13%	37,17%	Percentage of total personnel expenses

36. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan, Bank senantiasa dihadapkan pada berbagai risiko finansial maupun risiko non-finansial. Perkembangan bisnis yang pesat pada lingkungan eksternal dan internal perbankan juga menyebabkan risiko kegiatan usaha Bank semakin kompleks sehingga Bank harus mampu menerapkan manajemen risiko yang baik agar mampu beradaptasi dalam lingkungan bisnis perbankan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip manajemen risiko yang diterapkan akan sangat mendukung Bank untuk dapat beroperasi secara lebih berhati-hati. Prinsip-prinsip manajemen risiko tersebut pada dasarnya telah menjadi standar bagi dunia perbankan yang penerapannya diarahkan oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Sebagaimana diamanatkan ketentuan Bank Indonesia terkait penerapan manajemen risiko, Bank menyusun laporan profil risiko triwulanan secara *self assessment*.

a. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan dapat terjadi pada berbagai kegiatan operasional perbankan seperti pemberian fasilitas pembiayaan, pembelian efek-efek, transaksi antar bank, dan fasilitas lainnya.

Bank harus mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang terkandung dalam setiap produk dan kegiatan perbankannya. Identifikasi ini dihasilkan dari penilaian yang menggunakan prinsip kehati-hatian dari karakteristik risiko pembiayaan dan risiko potensial yang timbul dari produk/kegiatan tertentu.

36. Financial Risk Management Objectives and Policies

In conducting its function as financial institution intermediaries, the Bank faces various financial and non-financial risk. Rapid business development in banking external and internal environment also causes the Bank business risk getting more complex, so the Bank must implement good risk management to adapt in banking business environment. Hence, risk management principles implemented will support the Bank to be more prudent in its operation. Basically, risk management principles are standard in banking industry which implementation is regulated by Bank Indonesia in Otoritas Jasa Keuangan Regulation No. 65/POJK.03/2016 dated December 28, 2016 regarding Implementation of Risk Management for Sharia Bank and Sharia Unit Business.

As regulated by Bank Indonesia related to the implementation of risk management, Bank prepares quarterly risk profile report based on self assessment.

a. Financing Risk

Financing risk can be occurred in various banking operational activities such as providing financing facilities, purchasing marketable securities, interbank transactions, and other liabilities.

The Bank must identify and analyse risk embedded in each product and banking activity. This identification is derived from an assessment that uses the precautionary principle of characterizing financing risks and potential risks arising from certain product/activity.

Dalam penerapan manajemen risiko melalui pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah untuk risiko pembiayaan, Bank juga menerapkan beberapa hal dalam tiap aspek pengawasan tersebut, sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris memantau penyediaan dana termasuk meninjau penyediaan dana dengan jumlah besar atau yang diberikan kepada pihak berelasi.
2. Direksi bertanggung jawab agar seluruh aktivitas penyediaan dana dilakukan sesuai dengan strategi dan kebijakan risiko pembiayaan yang disetujui oleh Dewan Komisaris.
3. Dewan Pengawas Syariah melakukan evaluasi atas kebijakan manajemen risiko pembiayaan yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.
4. Komite Pembiayaan Pusat bertanggung jawab untuk memutuskan pemberian pembiayaan dalam jumlah tertentu sesuai kebijakan Bank.

Berikut adalah eksposur maksimum instrumen keuangan dalam laporan posisi keuangan dan rekening administratif yang terkait risiko pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017:

In implementing risk management through active supervision of Board of Commissioner, Board of Directors, and Sharia Supervisory Board for financing risk, the Bank also implements several points in each of the supervising aspect as follows:

1. The Board of Commissioner monitors fund provided, including a review of fund provided in large amount or those given to related parties.
2. The Board of Directors is responsible in ensuring all fund providing activities are conducted according to the financing risk strategy and policies approved by the Board of Commissioner.
3. The Sharia Supervisory Board evaluates financing risk management policies related to compliance with sharia principles.
4. The Head Office Financing Committee is responsible for deciding the approval of financing in certain amount according to the Bank's policy.

The maximum exposure of financial instruments related to credit risk as shown in the statements of financial position as of December 31, 2018 and 2017 are as follows:

	2018		2017		
	Jumlah Bruto/ Gross amounts	Jumlah Neto/ Net amounts	Jumlah Bruto/ Gross amounts	Jumlah Neto/ Net amounts	
Laporan Posisi Keuangan					Statements of Financial Position
Giro pada bank lain	4.238.825.168	4.238.825.168	2.710.051.260	2.710.051.260	Current accounts with other banks
Penempatan pada bank lain	265.000.000.000	265.000.000.000	205.000.000.000	205.000.000.000	Placements with other banks
Efek-efek	35.973.052.018	34.673.052.018	90.336.171.492	90.336.171.492	Marketable Securities
Piutang murabahah	243.560.441.515	241.487.459.637	325.631.988.276	322.367.419.659	Murabahah receivables
Pembiayaan musyarakah	930.419.356.069	917.996.216.078	868.014.110.047	855.805.846.733	Musyarakah financing
Pembiayaan mudharabah	56.739.552.733	56.080.460.940	64.197.635.203	63.485.769.218	Mudharabah financing
Pendapatan bagi hasil yang akan diterima	9.766.790.091	9.766.790.091	8.311.142.412	8.311.142.412	Revenue sharing receivable
Piutang ljarah	171.179.684	171.179.684	181.738.611	175.801.111	Ijarah receivables
Penyertaan saham	60.468.550	59.863.864	60.468.550	59.863.864	Investments in shares
Aset lain-lain	2.807.702.450	2.807.702.450	2.757.702.450	2.757.702.450	Other assets
Jumlah	1.548.737.368.278	1.532.281.549.930	1.567.201.008.301	1.551.009.768.199	Total
Komitmen dan kontinjensi					Commitment and Contingencies
Fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum digunakan	10.053.691.378	10.053.691.378	2.040.291.378	2.040.291.378	Unused financing facilities issued
Bank garansi	2.532.000.000	2.532.000.000	2.532.000.000	2.532.000.000	Bank guarantee
Jumlah	12.585.691.378	12.585.691.378	4.572.291.378	4.572.291.378	Total

Eksposur maksimum risiko pembiayaan tercermin dari persentase setiap kategori pembiayaan yang diberikan terhadap jumlah pembiayaan. Portofolio pembiayaan yang diberikan terdiversifikasi ke dalam 20 jenis sektor ekonomi, dimana untuk posisi 31 Desember 2018 dan 2017, kelompok sektor ekonomi yang memperoleh penyaluran pembiayaan terbesar dari Bank adalah sektor ekonomi perdagangan.

The maximum exposure to financing risk is reflected in the percentage of each category of loan to total loan exposure. Loans portfolio diversified into 20 types of economic sectors, as of December 31, 2018 and 2017, wherein trading economic sector obtained the largest financing from the Bank.

Bank mengkategorikan nasabah yang menerima pembiayaan berdasarkan segmen pasar, yaitu komersial, konsumsi dan mikro, perusahaan pembiayaan dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Tabel dibawah ini menunjukkan komposisi pembiayaan yang diberikan Bank berdasarkan segmen pasar beserta tingkat *Non-Performing Financing* (NPF) pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017:

The Bank categorizes customers based on market segments, namely; commercial, consumer and micro, multifinance and Small and Medium Enterprises (SME). The table below shows the composition of financing provided by the Bank based on market segment and its level of Non-Performing Financing (NPF) as of December 31, 2018 and 2017:

	2018		2017		
	Baki Debet/ Outstanding financing %	Pembiayaan bermasalah/ Non-performing financing %	Baki Debet/ Outstanding financing %	Pembiayaan bermasalah/ Non-performing financing %	
Komersial	57,82	4,66	62,23	5,62	Commercial
Perusahaan pembiayaan	2,04	0,08	32,42	0,25	Multifinance
Konsumsi & Mikro	26,71	15,51	4,02	19,42	Consumer & Micro
UKM	13,43	7,48	1,33	16,99	SME
Jumlah	100,00	27,73	100,00	42,28	Total

Kualitas aset keuangan

Tabel dibawah ini menunjukkan kualitas aset keuangan berdasarkan golongan aset untuk semua aset keuangan yang mempunyai risiko pembiayaan (diluar cadangan kerugian penurunan nilai):

Financial assets quality

The tables below shows financial assets quality per class of assets for all financial assets exposed by financing risk (gross of allowances for impairment losses):

	2018				
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ Neither past due nor impaired	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ past due but not impaired	Mengalami penurunan nilai/ Impaired	Jumlah/ Total	
Giro pada bank lain	4.238.825.168	-	-	4.238.825.168	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank lain	265.000.000.000	-	-	265.000.000.000	Placement with other bank
Efek-efek	33.974.526.808	-	1.998.525.210	35.973.052.018	Marketable Securities
Piutang murabahah	218.743.058.892	-	24.817.382.623	243.560.441.515	Murabahah receivables
Pembiayaan musyarakah	905.959.044.041	-	24.460.312.028	930.419.356.069	Musyarakah financing
Pembiayaan mudharabah	56.739.552.733	-	-	56.739.552.733	Mudharabah financing
Pendapatan bagi hasil yang akan diterima	9.766.790.091	-	-	9.766.790.091	Revenue sharing receivable
Piutang Ijarah	171.179.684	-	-	171.179.684	Ijarah receivables
Penyertaan saham	60.468.550	-	-	60.468.550	Investment in shares
Aset lain-lain	2.807.702.450	-	-	2.807.702.450	Other assets
Jumlah	1.497.461.148.417	-	51.276.219.861	1.548.737.368.278	Total

	2017				
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ Neither past due nor impaired	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ past due but not impaired	Mengalami penurunan nilai/ Impaired	Jumlah/ Total	
Giro pada bank lain	2.710.051.260	-	-	2.710.051.260	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank lain	205.000.000.000	-	-	205.000.000.000	Placement with other bank
Efek-efek	90.336.171.492	-	-	90.336.171.492	Marketable Securities
Piutang murabahah	288.315.295.954	-	37.316.692.322	325.631.988.276	Murabahah receivables
Pembiayaan musyarakah	847.636.001.426	-	20.378.108.621	868.014.110.047	Musyarakah financing
Pembiayaan mudharabah	64.197.635.203	-	-	64.197.635.203	Mudharabah financing
Pendapatan bagi hasil yang akan diterima	8.311.142.412	-	-	8.311.142.412	Revenue sharing receivable
Piutang Ijarah	175.801.111	-	5.937.500	181.738.611	Ijarah receivables
Penyertaan saham	60.468.550	-	-	60.468.550	Investment in shares
Aset lain-lain	2.757.702.450	-	-	2.757.702.450	Other assets
Jumlah	1.509.500.269.858	-	57.700.738.443	1.567.201.008.301	Total

b. Risiko Pasar

Dalam melaksanakan aktivitasnya, Bank terekspos pada risiko pasar yang terdiri atas risiko imbal hasil. Risiko pasar antara lain terdapat pada aktivitas fungsional Bank seperti kegiatan treasuri dan investasi dalam surat berharga dan pasar uang serta kegiatan pendanaan. Bank senantiasa melakukan pengelolaan terhadap risiko pasar tersebut secara rutin dan/atau berkala.

Aktivitas manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank untuk mengelola risiko pasar adalah:

1. Melaksanakan fungsi *Assets & Liabilities Committee* (ALCO) untuk membahas kondisi pasar dan menetapkan strategi pengelolaan risikonya.
2. Melakukan pemantauan tingkat imbal hasil yang berlaku di pasar.
3. Melakukan penyesuaian *pricing* pembiayaan agar senantiasa dapat kompetitif dengan *pricing* pasar dan dapat memberikan hasil yang optimal bagi shaibul maal (deposan).

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

Dalam mengantisipasi terjadinya risiko likuiditas, aktivitas manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank adalah:

1. Melaksanakan fungsi ALCO untuk membahas manajemen likuiditas dan menetapkan strategi pengelolaan risikonya.
2. Memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang berkaitan dengan likuiditas, seperti Giro Wajib Minimum (GWM) dan lain-lain.
3. Menjaga posisi likuiditas Bank sesuai ketentuan Bank Indonesia.
4. Memiliki cadangan sekunder dan cadangan tersier untuk kebutuhan likuiditas.

b. Market Risk

In conducting its activities, the Bank is exposed to market risk consisting of yield risk and foreign exchange risk. Market risk, among others is present in the functional activities of the Bank, such as treasury activities and investments in securities and financial markets and financing activities. The Bank always manages market risk on a regular basis and/or periodically.

In anticipating the liquidity risk, risk management performed by the Bank are as follows:

1. Performing *Assets & Liabilities Committee* (ALCO) function to discuss market condition and implement risk management strategy.
2. Monitoring yield rate in market.
3. Performing price adjustment for financing to compete with the market price and give optimum result to the customer.

c. Liquidity Risk

Liquidity risk is a risk occurred when the the Bank is not able to settle obligations due from funding cash flows and/or used high quality liquid asset without disrupting the Bank's activity and financial condition.

In anticipating the liquidity risk, risk management performed by the Bank are as follows:

1. Perform ALCO function to discuss liquidity management and implement its risk management strategy.
2. Complying Bank Indonesia related requirement regarding liquidity such as Minimum Statutory Requirement and others.
3. Maintaining the Bank's liquidity according to Bank Indonesia regulation.
4. Having secondary and tertiary reserve for liquidity needs.

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2018 dan 2017
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

5. Meningkatkan efisiensi penggunaan dana dalam pengelolaan portofolio secara menyeluruh baik secara sisi aset dan liabilitas.
6. Memenuhi seluruh kewajiban kepada nasabah secara tepat waktu untuk menjaga kepercayaan nasabah sementara tetap menjaga profitabilitas Bank.

5. Increasing efficiency in using fund in portfolio management, both from assets and liabilities.
6. Meet all obligations to customer's in a timely manner to maintain customer's trust while maintaining the Bank's profitability.

Berikut adalah jadwal jatuh tempo liabilitas keuangan berdasarkan pembayaran kontraktual pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017:

Below table shows the maturities of financial liabilities based on contractual payments as of December 31, 2018 and 2017:

2018											
	Sampai dengan 1 bulan/ 1 month or less	> 1 bulan s.d. 3 bulan/ More than 1 month until 3 months	> 3 bulan s.d. 6 bulan/ More than 3 months until 6 months	> 6 bulan s.d. 12 bulan/ More than 6 months until 12 months	Jumlah/ Total						
Liabilitas						Liabilities					
Liabilitas segera	4.375.051.060	-	-	-	4.375.051.060	Liabilities immediately payable					
Simpanan giro wadiah	41.421.592.792	-	-	-	41.421.592.792	Wadiah demand deposits					
Simpanan dari bank lain	217.000.000.000	-	-	-	217.000.000.000	Deposits from other banks					
Bagi hasil yang belum dibagikan	4.616.346.935	-	-	-	4.616.346.935	Undistributed revenue sharing					
Liabilitas lain-lain	852.725.450	-	-	-	852.725.450	Other liabilities					
Jumlah Liabilitas	268.265.716.237	-	-	-	268.265.716.237	Total Liabilities					
Dana Syirkah Temporer						Temporary Syirkah Funds					
Tabungan mudharabah	54.065.919.243	-	-	-	54.065.919.243	Mudharabah saving deposits					
Deposito mudharabah	662.046.922.876	658.059.397.020	68.941.277.127	109.740.000.000	1.498.787.597.023	Mudharabah deposits					
Giro mudharabah	4.866.175.990	-	-	-	4.866.175.990	Mudharabah demand deposits					
Jumlah Dana Syirkah Temporer	720.979.018.109	658.059.397.020	68.941.277.127	109.740.000.000	1.557.719.692.256	Total Temporary syirkah funds					
2017											
	Sampai dengan 1 bulan/ 1 month or less	> 1 bulan s.d. 3 bulan/ More than 1 month until 3 months	> 3 bulan s.d. 6 bulan/ More than 3 months until 6 months	> 6 bulan s.d. 12 bulan/ More than 6 months until 12 months	Jumlah/ Total						
Liabilitas						Liabilities					
Liabilitas segera	4.494.773.026	-	-	-	4.494.773.026	Liabilities immediately payable					
Simpanan giro wadiah	37.470.907.665	-	-	-	37.470.907.665	Wadiah demand deposits					
Simpanan dari bank lain	150.000.000.000	-	-	-	150.000.000.000	Deposits from other banks					
Bagi hasil yang belum dibagikan	4.752.842.657	-	-	-	4.752.842.657	Undistributed revenue sharing					
Liabilitas lain-lain	633.380.929	-	-	-	633.380.929	Other liabilities					
Jumlah Liabilitas	197.351.904.277	-	-	-	197.351.904.277	Total Liabilities					
Dana Syirkah Temporer						Temporary Syirkah Funds					
Tabungan mudharabah	43.765.684.409	-	-	-	43.765.684.409	Mudharabah saving deposits					
Deposito mudharabah	582.018.679.872	553.409.691.429	257.218.366.463	58.725.000.000	1.451.371.737.764	Mudharabah deposits					
Giro mudharabah	150.000	-	-	-	150.000	Mudharabah demand deposits					
Jumlah Dana Syirkah Temporer	625.784.514.281	553.409.691.429	257.218.366.463	58.725.000.000	1.495.137.572.173	Total Temporary syirkah funds					

d. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang langsung ataupun tidak langsung yang terjadi karena tidak memadainya atau karena adanya kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Dalam penerapan manajemen risiko melalui pengawasan aktif Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah untuk risiko operasional, Bank juga menerapkan beberapa hal dalam tiap aspek pengawasan aktif tersebut, sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab mengembangkan budaya organisasi yang sadar terhadap risiko operasional dan menumbuhkan komitmen dalam mengelola risiko operasional sesuai dengan strategi bisnis Bank.
2. Direksi menciptakan kultur pengungkapan secara objektif atas risiko operasional pada seluruh elemen organisasi sehingga risiko operasional dapat diidentifikasi dengan cepat dan dimitigasi dengan tepat.
3. Dewan Pengawas Syariah melakukan evaluasi atas kebijakan manajemen risiko operasional yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.
4. Bank menerapkan sanksi secara konsisten kepada pejabat dan Sumber Daya Insani (SDI) yang terbukti melakukan penyimpangan dan pelanggaran.

e. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini juga dapat timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendasari atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian atau agunan yang tidak memadai.

d. Operational Risk

Operational risk is a risk on loss, directly or indirectly, due to insufficient or failure in internal process, human errors, system failures, and/or external events which affected the Bank's operations.

In implementing risk management through active supervision from Board of Commissioners, Board of Directors, and Sharia Supervisory Board, the Bank also implements several points in each of the supervising aspects as follows:

1. The Board of Commissioners and Board of Directors are responsible to develop an organizational culture that provides awareness on operational risk and can contribute in managing operational risk according to the Bank's business strategy.
2. The Board of Directors creates culture which objectively discloses the operational risk to the whole organizational elements, so the operational risk can be promptly identified and mitigated.
3. The Sharia Supervisory Board evaluates operational risk management policies related to compliance with Sharia Principles.
4. The Bank consistently gives punishment to the officers and employees who are proven conducting irregularities and violation.

e. Legal Risk

Legal risk is a risk when there is a lawsuit and/or weakness in juridical aspect. This risk is also due to absence of supportive laws and regulations or weakness in agreements such as non-compliance of the validity contract terms or insufficient collateral.

f. Risiko Strategis

Risiko strategis adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Bank terhadap perubahan eksternal.

Bank telah menyusun strategi dan rencana bisnis yang sebelumnya telah didiskusikan dengan Dewan Komisaris, Direksi serta seluruh manajemen Bank. Bank juga melakukan kajian dan evaluasi stratejik bisnis serta realisasi yang telah dicapai oleh Bank sesuai dengan yang terangkum dalam Rencana Bisnis Bank.

g. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan risiko akibat Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pada praktiknya risiko kepatuhan melekat pada risiko Bank yang terkait pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku, serta prinsip Syariah.

Bank senantiasa berupaya maksimal agar segala ketentuan dan peraturan yang berlaku dapat dilaksanakan dengan baik. Secara periodik, audit internal dan staf *compliance* senantiasa bekerja secara terpadu agar aktivitas operasional Bank berjalan sesuai dengan peraturan dan senantiasa menerapkan *check and balance* sehingga fungsi pengendalian dapat berjalan dengan baik.

Bank telah menyampaikan Laporan Profil Manajemen Risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk posisi 31 Desember 2018, dengan Surat No. 044/DIR-BVIS/I/2019 tanggal 24 Januari 2019 dengan predikat risiko komposit yaitu 2 (*Low to moderate*).

Tingkat kesehatan bank sesuai Ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE OJK) No.10/SEOJK.03.2014 adalah hasil penilaian atas berbagai aspek yang mempengaruhi kondisi atau kinerja suatu Bank melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif terhadap faktor-faktor profil risiko, *Good Corporate Governance* (GCG), permodalan dan rentabilitas. Nilai akhir dari penilaian tingkat kesehatan Bank dinyatakan dalam peringkat komposit.

f. Strategic Risk

Strategic risk arises from insufficient determination and implementation of the Bank's strategies, incorrect business decision, or irresponsiveness to external changes.

The Bank has formulated the business strategies and plans based on discussions from the Board of Commissioners, Directors and all of the Bank's management. The Bank also reviews, evaluates, business strategy and its realisation achieved by the Bank based on Bank's Business Plan.

g. Compliance Risk

Compliance risk is a risk when the Bank does not comply or implement current laws and regulations and other policies. In practice, compliance risk is attached to Bank's risk related to laws and other regulations and policies, and sharia principles.

The Bank always try to comply with the applicable laws and regulations. Periodically, internal audit and compliance staff works integratedly so the Bank's operational activity is conducted based on applicable laws and regulations, and implement check and balance procedures, so the controlling function is properly performed.

The Bank has submitted its risk profile report to the Financial Service Authority as of December 31, 2018 as set forth in its letter No. 044/DIR-BVIS/I/2019, dated January 24, 2019 with Moderate composite risk.

The soundness level of the Bank, in accordance with Financial Service Authority Circular Letter No.10/SEOJK.03.2014 represents the result of evaluation of various aspects that affect the condition and performance of the Bank through quantitative and qualitative evaluation of the factors of risk profile, Good Corporate Governance (GCG), capital and profitability. The final result of the evaluation of the Bank's soundness level is stated as a composite rating.

Berdasarkan penilaian manajemen terkait tingkat kesehatan Bank posisi 31 Desember 2018, Bank memiliki peringkat komposit 2, dengan demikian Bank secara umum sehat sehingga mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), rentabilitas dan permodalan yang secara umum sangat baik.

h. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.

Langkah-langkah pengendalian risiko reputasi yaitu antara lain:

1. Segera menindaklanjuti dan mengatasi adanya keluhan nasabah dan gugatan hukum yang dapat meningkatkan eksposur risiko reputasi.
2. Pencegahan terjadinya kejadian yang menimbulkan risiko reputasi yang secara umum dilakukan melalui serangkaian aktivitas yaitu:
 - Melakukan tanggung jawab sosial Bank (*Corporate Social Responsibility*), merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan Bank untuk pemberdayaan masyarakat dalam bentuk kegiatan ekonomi/sosial yang diharapkan dapat membangun reputasi positif dari pemangku kepentingan Bank.
 - Komunikasi/edukasi secara rutin kepada pemangku kepentingan dalam rangka membentuk reputasi positif dari pemangku kepentingan Bank.
3. Pemulihan reputasi Bank setelah terjadi kejadian yang menimbulkan risiko reputasi, yaitu segala respon Bank untuk memulihkan reputasi dan mencegah terjadinya pemburuan reputasi Bank.

Based on the management's assessment of soundness of the Bank as of December 31, 2018, the composite rate of the Bank is 2 which shows that the Bank is sound and able to overcome significant negative effects of changes in business condition and other external factor, such as risk profile, the implementation of Good Corporate Governance (GCG), profitability and good capital.

h. Reputation Risk

Reputational risk is a risk when there is decrease in stakeholder trust due to negative perspective to the Bank.

Steps in managing reputational risk are as follows:

1. Immediately following up and handling customer complaints and lawsuit which can increase exposure in reputational risk.
2. Taking preventive action to prevent event which may arise general reputational risk through series of action:
 - Corporate social responsibilities, a series of activities done by the Bank for people empowerment in the form of economic/social activities which expected to build positive reputation from the Bank's stakeholders.
 - Routine communication/education to stakeholders in order to build positive reputation from the Bank's stakeholder.
3. Restoring the Bank's reputation after an event has occurred which gives rise to reputational risk, which is any response of the Bank to restore and prevent worsening in the Bank's reputation.

i. Risiko Investasi

Risiko investasi adalah risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil, baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing*.

Aktivitas manajemen risiko yang dilakukan Bank antara lain:

1. Melakukan identifikasi terhadap risiko investasi secara berkala. Proses identifikasi mencakup sumber risiko yang dapat mempengaruhi pendapatan, nilai ekonomis dari posisi keuangan, dan modal Bank.
2. Melakukan pemantauan terhadap kepatuhan limit secara berkala, dan tindak lanjut untuk mengatasi apabila terjadi pelampauan.

j. Risiko Imbal Hasil

Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*) adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank.

i. Investment Risk

Investment risk is a risk arising due to the Bank's share in the risk on customer's business which is financed by profit sharing financing, whether using net revenue sharing method or profit and loss method.

Risk management implementation performed by the Bank includes:

1. Performing regular investment risk identification. Identification process includes source of risk affected revenue, economic value of financial position, and the Bank's capital.
2. Performing regular monitoring towards compliance on approval limit and follow up action when it is breached.

j. Rate of Return Risk

Rate of return risk is a risk arising from changes in rate of return obtained by the Bank from financing activity that can influence the behavior of the customer.

37. Opini Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan Surat Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank No. 002/BVIS/DPS/II/2019 tanggal 7 Februari 2019, untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 menyatakan bahwa berdasarkan pengawasannya secara umum, aspek operasional dan produk, Bank telah mengikuti fatwa-fatwa dan ketentuan syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta opini-opini Syariah dari DPS.

38. Kontinjensi dan Perkara Hukum

Bank mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan Negeri Bandung yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bandung, Pemerintah Tingkat I Provinsi Bandung, Ny. Elly Rosanti (Pemilik Lama) dan Weike Loppies S.H. (Notaris) atas tidak dikabulkannya permohonan perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 470/Braga, milik Bank yang berlokasi di Bandung yang telah jatuh tempo pada tahun 2008. Pada saat ini, perkara hukum tersebut telah sampai ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sampai dengan tanggal laporan keuangan, belum ada putusan dari Mahkamah Agung RI atas perkara hukum tersebut.

37. Sharia Supervisory Board Opinion

Based on Sharia Supervisory Board (SSB) Letter No. 002/BVIS/DPS/II/2019 dated February 7, 2019, for period January 1, 2018 to December 31, 2018, states that based on its general supervision, in operational and product aspect, the Bank has complied with fatwa and sharia regulation issued by National Sharia Board of Indonesian Ulama Council and Sharia opinion from SSB.

38. Contingencies and Lawsuit

The Bank filed a lawsuit to the Bandung District Court, addressed to the National Land Agency (BPN) Bandung, Bandung Provincial Government Level I, Mrs. Elly Rosanti (Previous Land's Owner) and Weike Loppies S.H. (Notary) related to objection on the application for the extension of Certificate of Building Rights (HGB) No. 470/Braga, owned by the Bank which is located in Bandung that have matured in 2008. At this time, the legal case has reached the Supreme Court of the Republic of Indonesia. As of the date of the issuance of the financial statements, there has been no decision from the Supreme Court on the legal proceedings.

Selain perkara hukum yang disebutkan diatas, Bank menghadapi perkara hukum atau gugatan yang timbul dari kegiatan normal usahanya. Manajemen Bank bersama dengan penasehat hukum berpendapat bahwa liabilitas akhir atas perkara hukum atau gugatan tersebut, jika ada, tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan. Oleh karena itu, tidak ada provisi yang dibentuk atas liabilitas kontinjensi tersebut.

In addition to the above lawsuit mentioned, Bank is a party to certain lawsuits or claims arising from their ordinary course of business. The Banks management and legal counsels believe that the resulting liabilities under these lawsuits or claims, if any, will not have a material effect on the financial statements, thus, no provision has been made for these contingent liabilities.

39. Kejadian Setelah Tanggal Laporan Posisi Keuangan

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Bank yang didokumentasikan dalam Akta Pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham – Luar Biasa (RUPS-LB) No. 09 tanggal 9 Januari 2019 dari Ririn, S.H., notaris di Jakarta, telah disetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor Bank dari PT Bank Victoria International Tbk, pemegang saham, sebesar Rp 50.000.000.000. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat No.AHU-AH.01.03-0024305 tanggal 15 Januari 2019. Sampai dengan tanggal laporan keuangan, Bank belum menerima dana atas peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut.

39. Subsequent Event After Reporting Date.

Based on the Shareholders Resolution of the Bank which is documented in the Deed Statement General Meeting of Shareholders – Extraordinary (EGM) No. 09 dated January 9, 2019 of Ririn, S.H., a public notary in Jakarta, has approved increase in the Bank's issued and capital from PT Bank Victoria International Tbk, a stockholder amounted to Rp 50,000,000,000. The Amendment of the Article of Association has been received and recorded by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in his Letter No.AHU-AH.01.03-0024305 dated January 15, 2019. As of date of completion of these financial statements, the Bank has not received the increase in issued and paid up capital.

40. Informasi Lainnya

- a. Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 Bank memiliki rasio *non-performing finance* (NPF) bruto untuk piutang dan pembiayaan masing-masing sebesar 4,00% dan 4,59% serta rasio NPF neto masing-masing sebesar 3,46% dan 4,08%.
- b. Rasio piutang dan pembiayaan terhadap total dana pihak ketiga masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar 82,78% dan 83,57%.
- c. Imbal hasil aset atau *Return on Assets* (ROA) untuk tahun 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar 0,32% dan 0,36%.
- d. Imbal Hasil Ekuitas atau *Return on Equity* untuk tahun 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar 2,02% dan 2,01%.
- e. Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, tidak terdapat pembiayaan kepada pihak berelasi dan pihak ketiga yang melampaui Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP).

40. Other Information

- a. As of December 31, 2018 and 2017 the Bank has gross non-performing financing (NPF) ratio for receivables and financing of 4.00% and 4.59% respectively, and net NPF ratio of 3.46% and 4,08% respectively.
- b. The ratios of receivables and financing to total deposits as of December 31, 2018 and 2017 were 82.78% and 83.57%, respectively.
- c. Return on Assets as of December 31, 2018 and 2017 were 0.32% and 0.36%, respectively.
- d. Return on Equity as of December 31, 2018 and 2017 were 2.02% and 2.01%, respectively.
- e. As of December 31, 2018 and 2017, there is no financing granted and related to third parties which has exceeded the Bank's Maximum Financing Limit (MFL).

41. Standar Akuntansi Keuangan Baru

a. Diterapkan pada Tahun 2018

Bank telah menerapkan amandemen Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) berikut, namun tidak mengakibatkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Bank dan tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan:

1. PSAK No. 2, Laporan Arus Kas: Prakarsa Pengungkapan
2. PSAK No. 46, Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi

b. Telah Diterbitkan namun Belum Berlaku Efektif

Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) baru, amandemen PSAK dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) baru yang berlaku efektif pada periode yang dimulai:

1 Januari 2019

ISAK

1. ISAK No. 33, Transaksi Valuta Asing dan Imbalan Di Muka
2. ISAK No. 34, Ketidakpastian Perlakuan Pajak Penghasilan

1 Januari 2020

PSAK

1. PSAK No. 71, Instrumen Keuangan
2. PSAK No. 72, Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
3. PSAK No. 73, Sewa

Bank masih mengevaluasi dampak penerapan PSAK dan ISAK di atas dan dampak terhadap laporan keuangan dari penerapan PSAK dan ISAK tersebut belum dapat ditentukan.

41. New Financial Accounting Standards

a. Adopted During 2018

The Bank has adopted the following amended Statements of Financial Accounting Standards (PSAKs), which did not result in substantial changes to the Bank's accounting policies and had no material effect on the financial statements:

1. PSAK No. 2, Statements of Cash Flows: Disclosure Initiative
2. PSAK No. 46, Incomes Taxes: Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealized Losses

b. Issued but Not Yet Effective

The Institute of Indonesia Chartered Accountants has issued the following new Statement of Financial Accounting Standards (PSAK), amendments of PSAKs and new Interpretations Accounting Standard (ISAKs) which will be effective for annual period beginning:

January 1, 2019

ISAK

1. ISAK No. 33, Foreign Currency Transaction and Advance Consideration
2. ISAK No. 34, Uncertainty Over Income Tax Treatments

January 1, 2020

PSAK

1. PSAK No. 71, Financial Instruments
2. PSAK No. 72, Revenues from Contracts with Customers
3. PSAK No. 73, Leases

The Bank is still evaluating the effects of these PSAKs and ISAK and has not yet determined the related effects on the financial statements.



bank  victoria
Syariah

Gedung The Victoria

Jalan Tomang Raya Kav. 35-37 Lantai 1-3,
Jakarta Barat

Phone : (021) 5600467 (hunting)

Fax : (021) 5664247

Website : www.bankvictoriasyariah.co.id